

BAB- II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pihak yang berkepentingan, membangun Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dewasa ini dan ke depan nantinya akan semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Utara.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi 0° - 4° Lintang Utara dan 96°-100° Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, memiliki total wilayah seluas 181.860,65 km², terdiri dari daratan seluas 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan perairan seluas 110.000,65 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka.

Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas : 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya. Untuk kelestarian hutan mangrove dan terumbu karang perlu dilakukan upaya konservasi sehingga keanekaragaman hayati kawasan pesisir bisa dipertahankan.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter.

Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

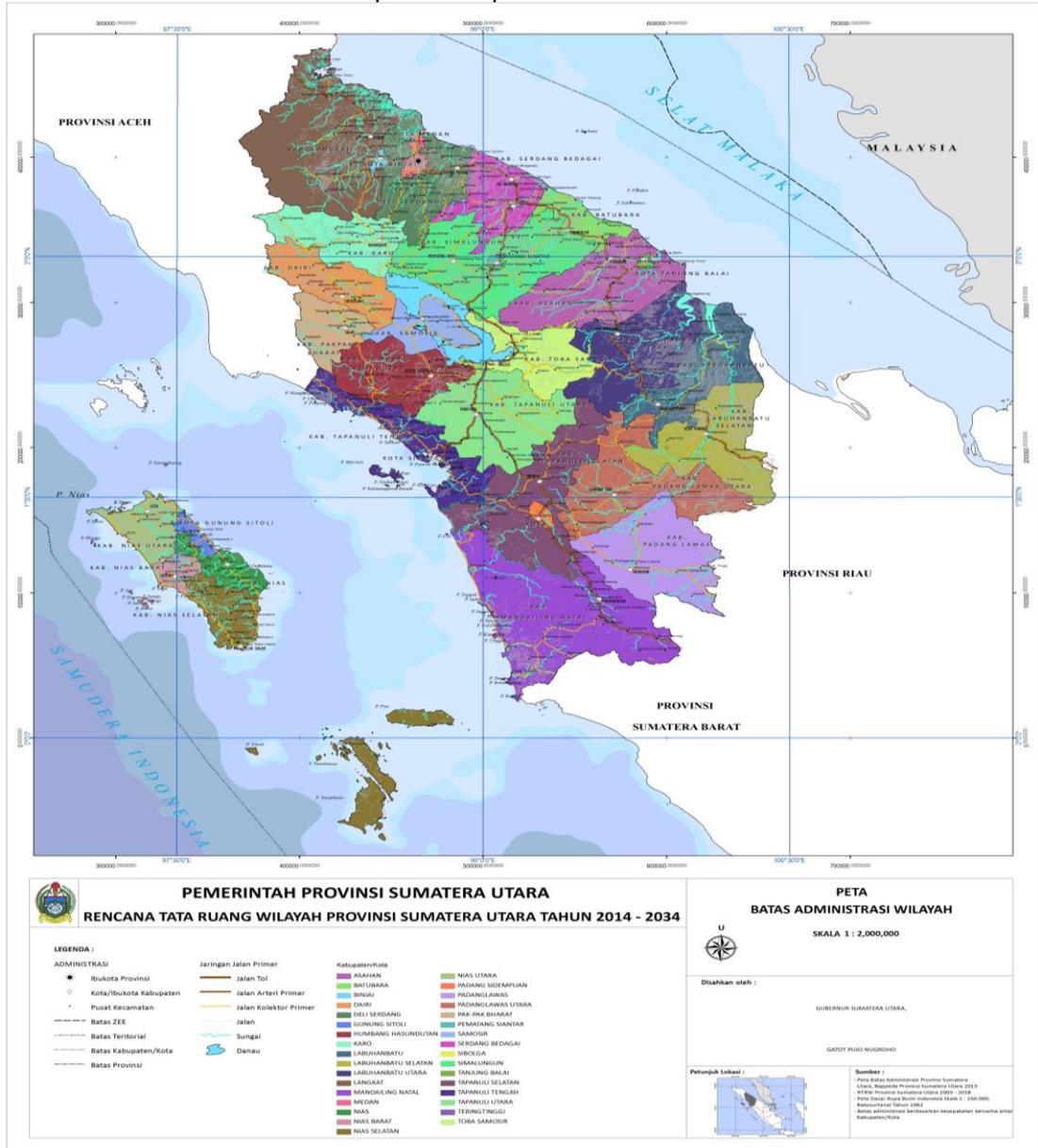
Perkembangan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2012, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 436 Kecamatan dan 5.324 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.620,70 (9,24%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Sibolga yaitu 10,77km² (0,02%).

Tabel. 2.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	165	0	980,32
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6 620,70
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	212	36	4 352,86
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	147	30	2 158,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	232	11	3 764,65
06. Toba Samosir	Balige	16	231	13	2 352,35
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2 561,38
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3 675,79
09. Simalungun	Pematang Raya	31	345	22	4 368,60
10. Dairi	Sidikalang	15	161	8	1 927,80
11. Karo	Kabanjahe	17	259	10	2 127,25
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	382	14	2 486,14
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6 263,29
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	31	467	2	1 625,91
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2 297,20
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1 218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2 433,50
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1 913,33
19. Batu Bara	Limapuluh	7	93	7	904,96
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	388	3	3 918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	304	1	3 892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3 116,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	83	8	3 545,80
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1 501,63
25. Nias Barat	Lahomi	8	112	0	544,09
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	10,77
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	61,52
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	79,97
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	0	35	38,44
30. Medan	Medan	21	0	151	265,10
31. Binjai	Binjai	5	0	37	90,24
32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	42	37	114,65
33. Gunungsitoli	Gunung Sitoli	6	98	3	469,36
SUMATERA UTARA	Medan	436	5324	659	71 680,68

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peta Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini.

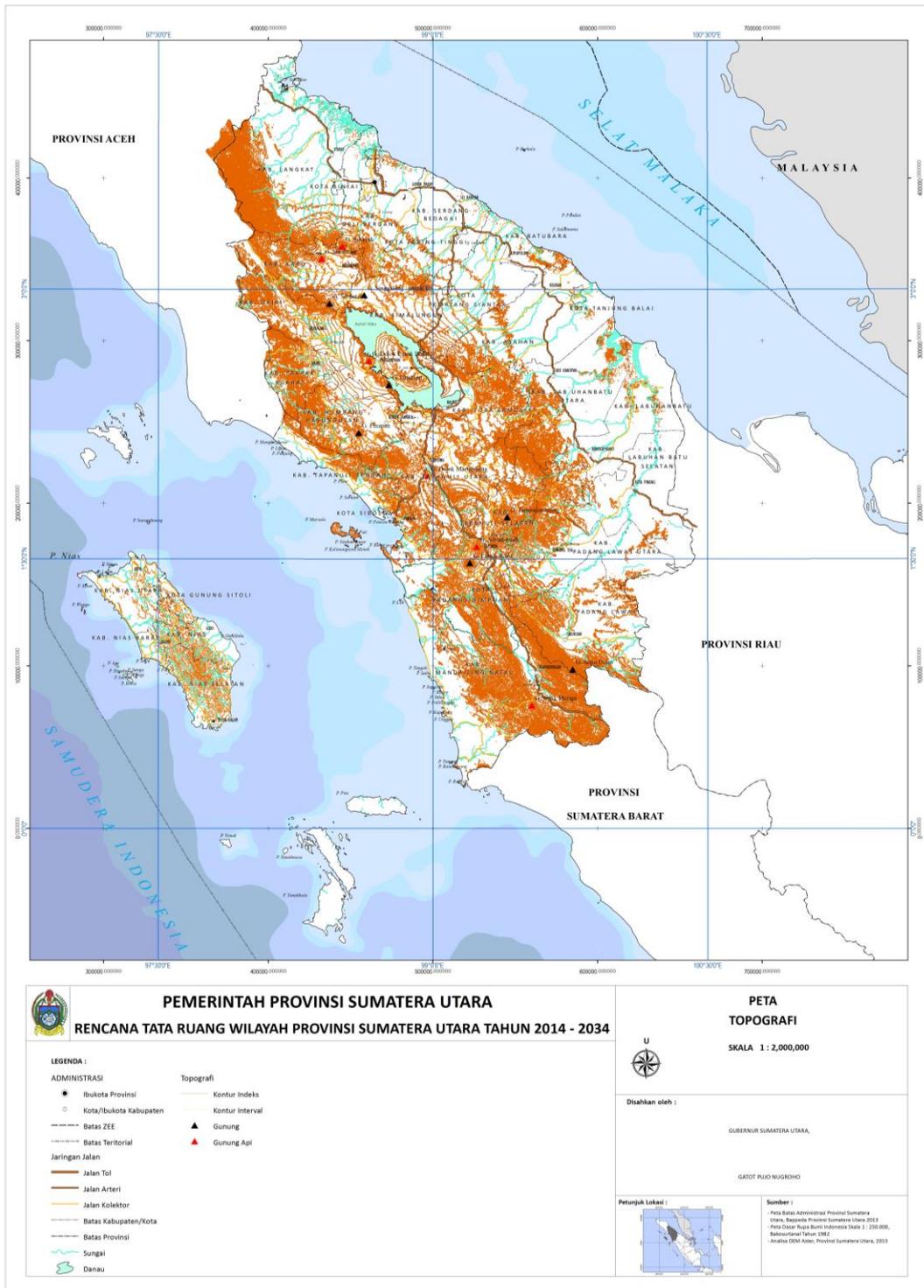


Gambar 2.1.
 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Rencana Tata Ruang Provsu Tahun 2014-2034

a. Topografi

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 % seluas 65,51 %, antara 12 – 40 % seluas 8,64 % dan diatas 40 % seluas 24,28 %, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 Ha atau 1,57 %.

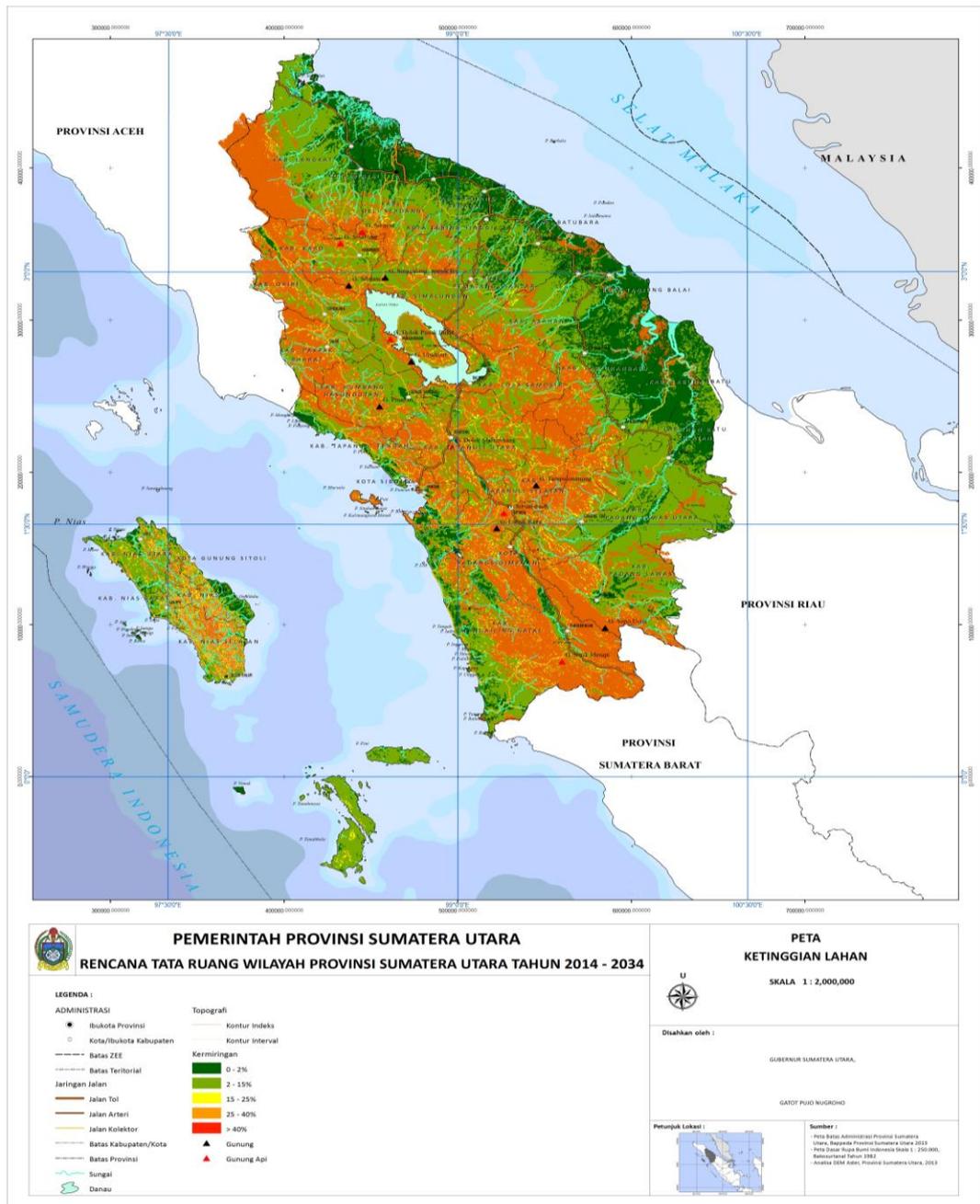
Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.



Gambar 2.2.
 Peta Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Topografi
 Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km² atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23 % dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.



Gambar 2.3.
 Peta Wilayah Sumatera Utara berdasarkan ketinggian lahan
 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provsu Tahun 2014-2034

b. Geologi :

1) Struktur dan Karakteristik

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (subduction) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

2) Potensi.

a) Sumber energi

Berbagai kebijakan energi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, rasional, optimal dan terpadu adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi saat ini energy telah berubah menjadi suatu hal yang sangat urgen dan mendesak dan kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah
2. Tidak mencukupinya pasokan energi untuk kebutuhan energi domestik, namun produksi energi diekspor dalam jumlah yang besar
3. Pemanfaatan energi tidak efisien
4. Harga energi belum memenuhi harga keekonomian
5. Iklim investasi energi masih rendah
6. Kapasitas industri energi nasional masih rendah
7. Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas dan Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Tabel. 2.2
Potensi Hydro Power

No.	Kabupaten	Skala Besar		Skala Mini		Skala Mikro		T o t a l	
		JML. Lok	Daya (KW)	JML. Lok.	Daya (KW)	JML. Lok.	Daya (KW)	Lok	Daya (KW)
1	Langkat	16	449.000	-	-	4	122,4	20	449.122,4
2	Deli Serdang	-	-	8	4.276,7	7	301,4	15	4.578,1
3	Simalungun	-	-	13	21.275,8	3	148	16	21.423,8
4	Karo	1	85.000	4	3.234	4	81,2	9	88.315,2
5	Dairi	-	-	5	3.841,6	4	174,2	9	4.015,8
6	Asahan	2	98.000	1	196	3	162	6	98.358,0
7	Lab. Batu	-	-	3	4.900	7	358,3	10	5.258,3
8	Taput	31	1.028.000	26	30.090	11	610,6	68	1.058.700,6
9	Toba Samosir	2	580.000	-	-	-	-	2	580.000,0
10	Hb.Hasudutan	1	7.500	18	14.714,7	4	277	23	22.491,7
11	Tapsel	3	194.200	16	6.452	15	729,2	34	663.081,2
12	Madina	10	563.600	-	-	-	-	10	563.600,0
13	Tapteng	-	-	-	-	6	189,3	6	189,3
14	Nias	-	-	1	441	4	190	5	631,0
	TOTAL	66	3.005.300	95	89.698,9	72	3.343,6	233	3.098.075,4

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2013

Tabel. 2.3
Potensi Panas Bumi

No	Lapangan	Kabupaten	RES (Mwe)		RE (Mwe)			Ins (MW)
			Sp	Hp	Ps	Pb	Pv	
1	Beras Tepu	Karo	-	-	-	-	-	-
2	Lau Debuk-Debuk	Karo	-	70	131	-	30	2
3	Sibayak	Karo	25	-	-	-	-	-
4	Marike	Simalungun	225	-	-	-	-	-
5	Dolok Merawan	Taput	225	-	-	-	-	-
6	Pusuk Buhit D. Toba	Taput	225	-	-	-	-	-
7	Simbolon Samosir	Taput	225	-	-	-	-	-
8	Pagaran	Taput	25	-	-	-	-	-
9	Heta Toba	Taput	-	100	200	-	135	-
10	Sarulla	Taput	800	-	-	-	210	-
11	Namorailangit	Tapsel	225	-	-	-	-	-
12	Sipoholon Ria-Ria	Tapsel	-	-	556	-	-	-
13	Sibual-Buali	Tapsel	100	-	-	-	-	-
14	Sibuhuan	Padang	-	-	420	-	-	-
15	S. Merapi -	Lawas	225	-	-	-	-	-
16	Sampuraga	Madina	-	-	320	-	-	-
	Roburan	Madina	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		2300	170	1627		375	2

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2013

Cadangan energi yang berasal dari minyak bumi terdapat pada beberapa kabupaten/kota yakni Langkat, Deli Serdang, Binjai, Medan dan Padang Lawas. Sumatera Utara juga memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

Tabel. 2.4
Potensi Minyak Bumi

KABUPATEN	CADANGAN (MSTB) MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
1.LANGKAT	19,466	6,884	3,310
2.D.SERDANG	7,551	31,6	27,08
3.BINJAI	5,207	-	-
4.MEDAN	674,10	686,80	594,30
5.P.LAWAS	2,000	-	-
TOTAL	34,898.10	7,602.40	3,931.38

KABUPATEN	CADANGAN (MSTB) MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
1.LANGKAT	19,466	6,884	3,310
2.D.SERDANG	7,551	31,6	27,08
3.BINJAI	5,207	-	-
4.MEDAN	674,10	686,80	594,30
5.P.LAWAS	2,000	-	-
TOTAL	34,898.10	7,602.40	3,931.38

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2013

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi.

Terdapat juga potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Utara, yakni berupa Radium (Ra).

Tabel. 2.5
Potensi Gas Bumi

KABUPATEN	CADANGAN (MMSCF) GAS BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
1.LANGKAT	233,591	54,797	25,893
2.D.SERDANG	143,065	-	-
3.BINJAI	37,81	-	-
4.MEDAN	3,933	1,681	1,449
5. OFF SHORE LANGKAT	54,000	-	-
TOTAL	434,626.81	56,478	27,342

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2013

b) Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Bahan tambang mineral di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) jenis berupa Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismut, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal dan Wolfram. Selain itu terdapat juga bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Bentonit, Zeolit, Dolomit, Travertin, Diatomea, Trass, Andesit, Granit, Feldspar, Marmer, Kaolin, Batumulia, Batu Gamping, Batu Apung, Perlit,

Kalsit, Kukarsit, Phospat, Lempung, Pasir Kuarsa, Mika, Grafit, Oker, Talk, Sirtu, dan Serpentinit.

Tabel. 2.6
Potensi Pertambangan

NO	SUMBER DAYA	DEPOSIT	LOKASI
V	PERTAMBANGAN		
1	Batubara	23,45 juta ton	Langkat, Lab.Batu, Nias
2	Geothermal	1.380 MW	Tapael, Madina, Tapteng, Karo, Taput
3	Bauksit	27,6 juta ton	Lab.Batu
4	Andesit	58,2 juta ton	Deli serdang
5	Batu Gamping	1.678 juta ton	Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Taput, Nias, Humbahas
6	Bentonit	80,8 juta ton	Langkat, Tapael
7	Dolomite	11,5 juta ton	Karo
8	Feldspar	117 juta ton	Taput, Simalungun, Langkat
9	Granit	951,3 juta ton	Taput, Tapteng, Lab.Batu
10	Marmer	32,5 juta ton	Madina, Karo, Dairi
11	Trust	32,9 juta ton	Simalungun, Karo, Langkat
12	Emas	Eksplorasi pendahuluan	Tapael, Madina, Deli Serdang, Dairi, Humbahas
13	Seng	Eksplorasi Umum	Madina, Tapteng, Tapael, Dairi

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2013

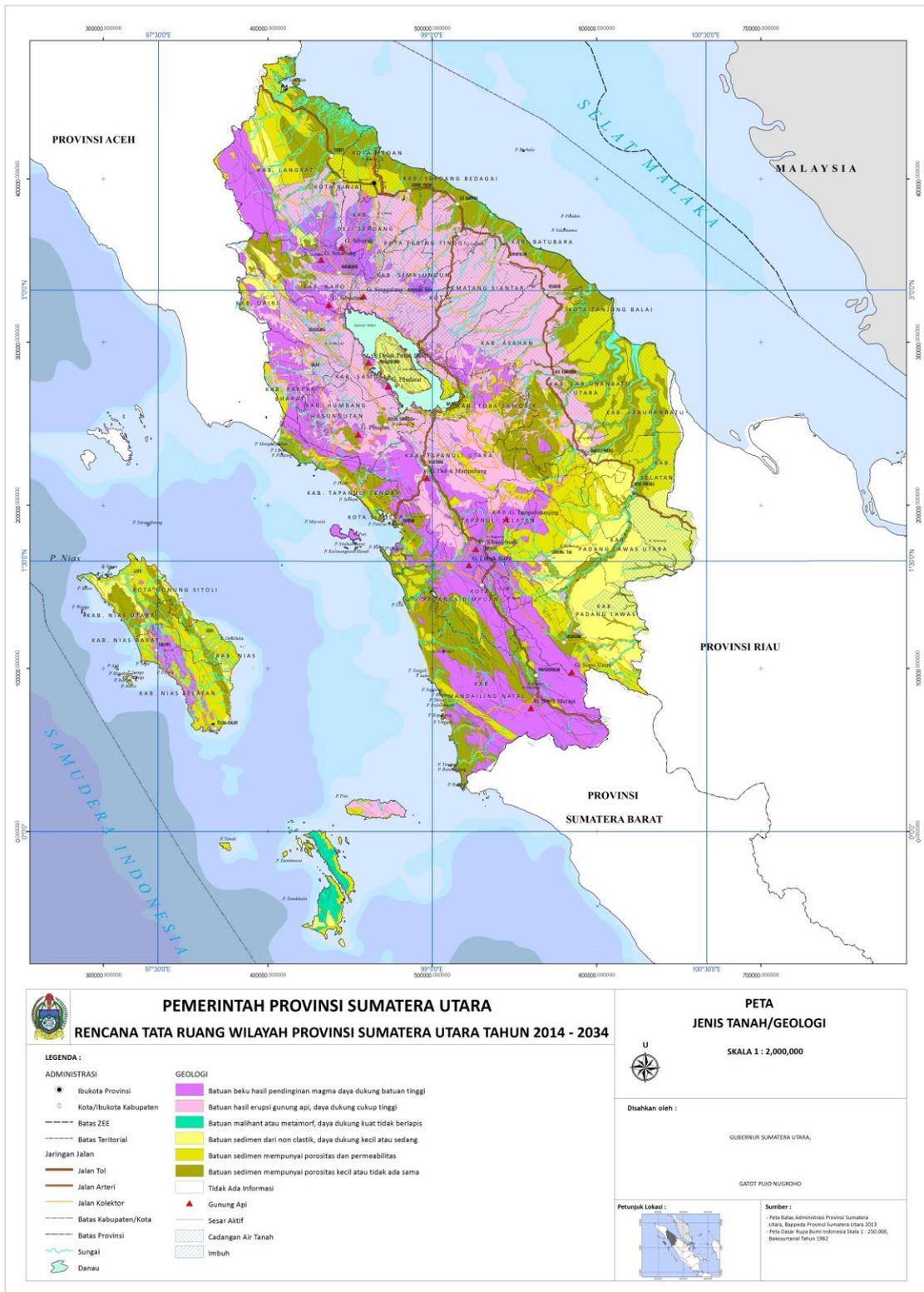
Tabel. 2.7
Potensi Pertambangan Logam dan Non Logam

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Batangnatal, • Kabupaten Mandailing Natal
2	Arsen	<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kab. Mandailing Natal • Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
4	Bauksit	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhan Batu Selatan • Kabupaten Mandailing Natal
5	Belerang	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal • Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailingnatal • Desa Namorailangit, Kecamatan Pahaejulu, Kabupaten Tapanuli Utara • Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Pusukbuhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara • Gunung Sibayak, Kecamatan Simpangempat Kabupaten Karo • Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo • Kabupaten Tapanuli Selatan
6	Besi	<ul style="list-style-type: none"> • Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kotanopan Kab Mandailing Natal • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Tapanuli Tengah
7	Bismuth	<ul style="list-style-type: none"> • Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
8	Emas	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec Batangnatal Kab. Mandailing Natal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal • Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal • Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan • Desa Sikuikkuik, Kec Padangsidempuan Barat, Kab Tapanuli Selatan • Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kabupaten Deliserdang • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Toralaulu • Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan • Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan • Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat • Kabupaten Padang Lawas
9	Tembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Batanggadis, Aekkorsik, Aeksorik, Aekkulbungnagodang, Batanglobung Kecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal • Pagargunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal • Desa Aekhabil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah • Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbanghasundutan • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Padang Lawas Utara
10	Fluorit dan Tungsten	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhanbatu Utara
11	Mangan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal • Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
12	Molibdenum	<ul style="list-style-type: none"> • Aekkolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
13	Niobium	<ul style="list-style-type: none"> • Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
14	Platina	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
15	Tellurium	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		Natal
16	Seng	<ul style="list-style-type: none"> • Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal • Hutabargotjulu, Aeksorik, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Pionngu, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal • Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan • Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi • Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat • Kabupaten Tapanuli Utara
17	Wolfromit	<ul style="list-style-type: none"> • Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah • Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara
18	Timah	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Selatan
19	Timah Hitam	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Mandailing Natal • Kabupaten Tapanuli Selatan • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat • Kabupaten Tapanuli Tengah • Kabupaten Humbang Hasundutan

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2013

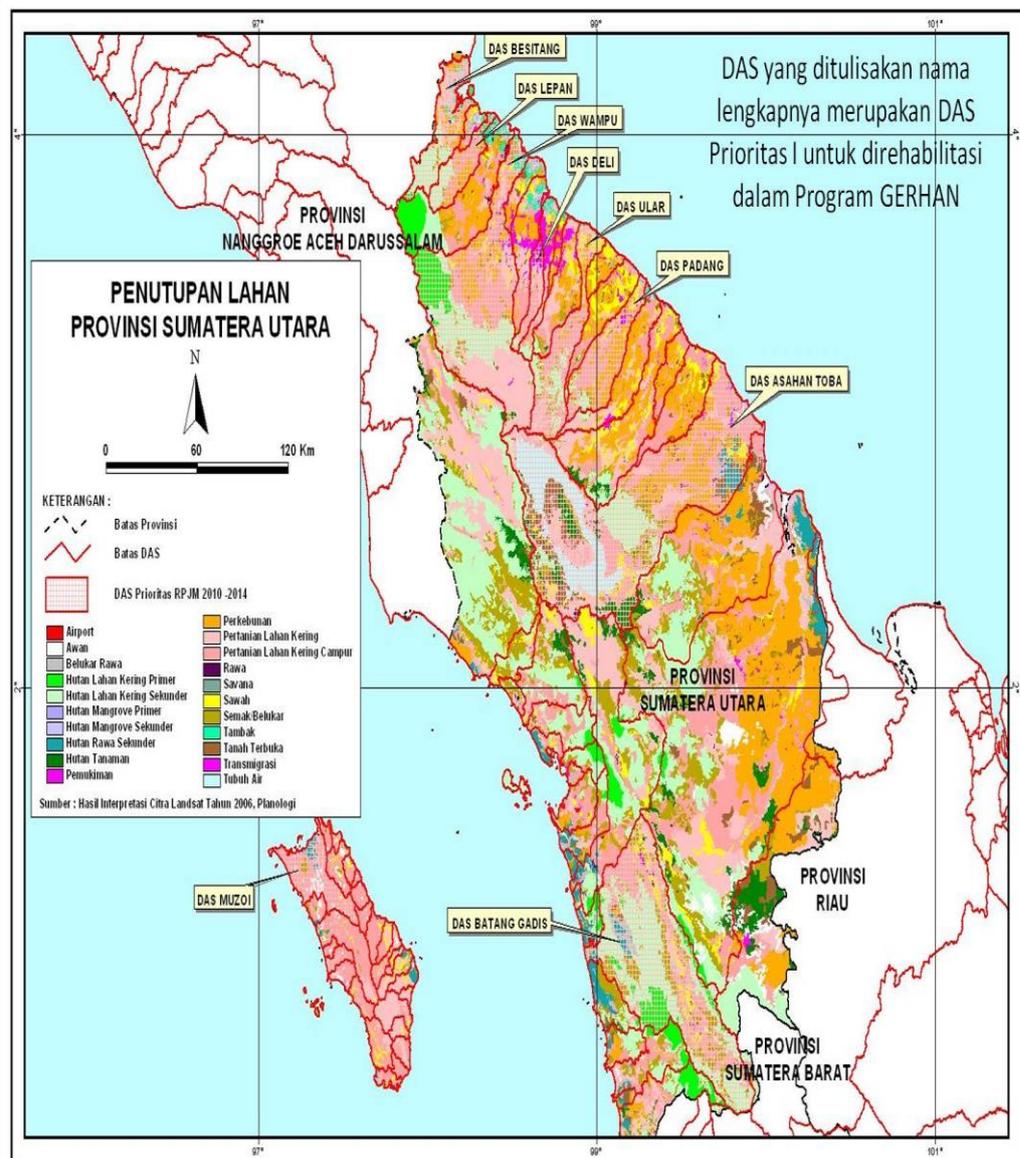


Gambar 2.4.
 Peta Jenis Tanah/Geologi Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provsu Tahun 2014-2034

c. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan terbagi atas 71 DAS yang terdiri dari 20 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 51 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumon dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai sebanyak 99 buah, anak-anak sungai sebanyak 783 buah, ranting sungai 659 buah, anak ranting sungai sebanyak 342 buah.



Gambar 2.5.
DAS Prioritas di Sumatera Utara
Sumber : Balai Pengelolaan DAS Wampu Sei Ular Tahun 2009

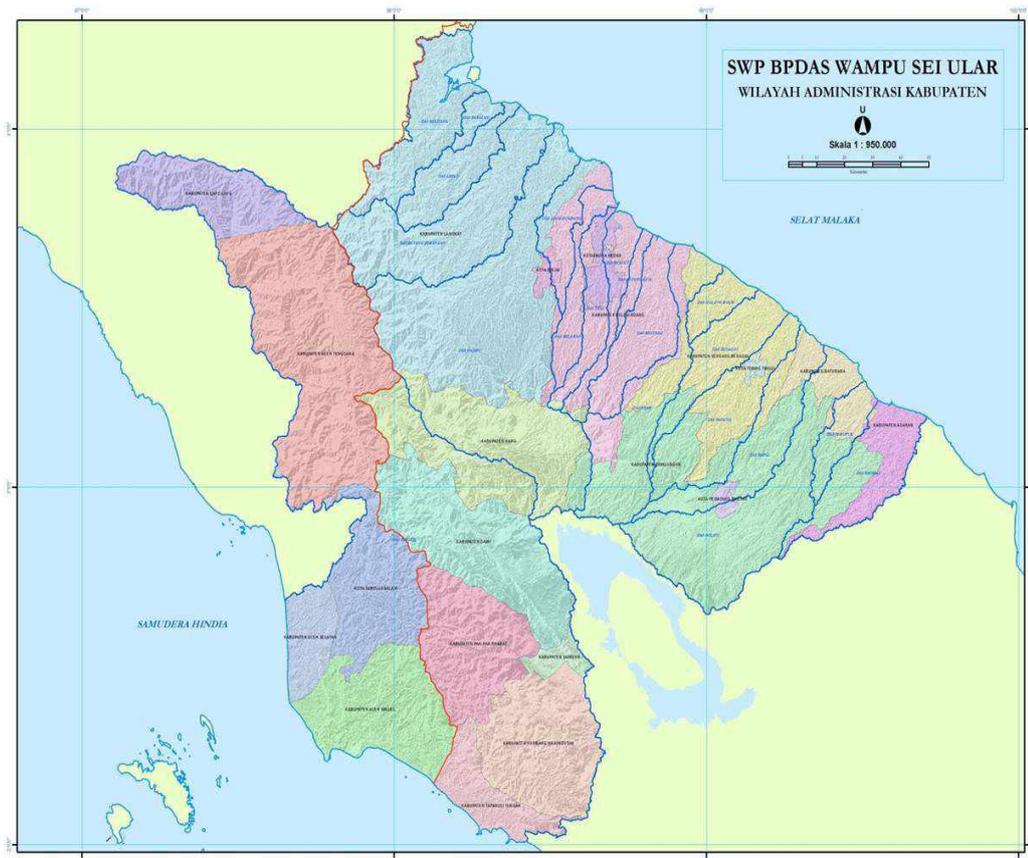
Berdasarkan hasil Review Batas DAS yang dikeluarkan Balai Pengelolaan DAS Wampu Sei Ular Tahun 2009, luas SWP DAS Wampu Sei Ular ± 3.164.256,95 Ha dengan DAS Prioritas di SWP DAS Wampu Sei Ular adalah sebagai berikut :

DAS PRIORITAS I :

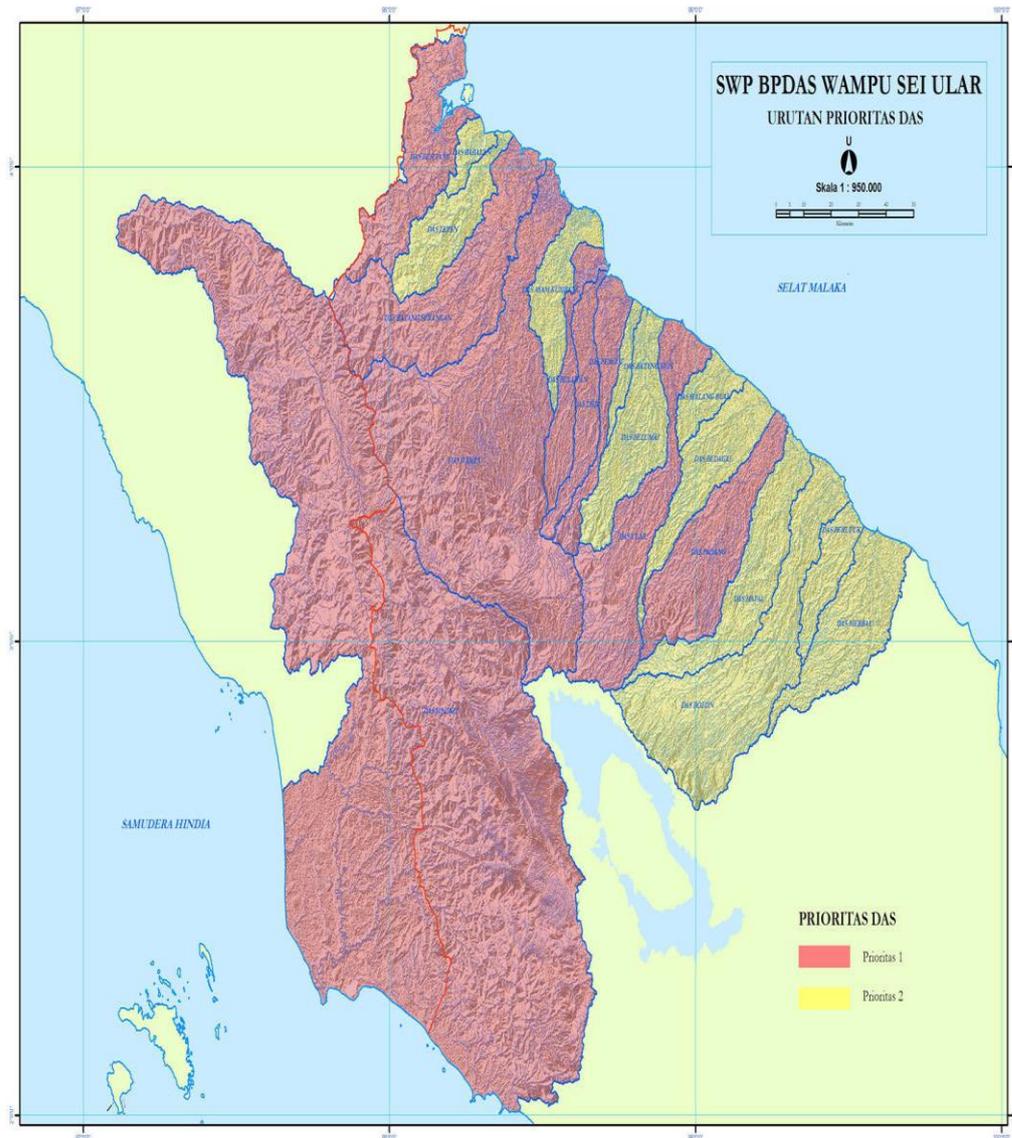
1. DAS Deli seluas 45.685,02 Ha
2. DAS Wampu seluas 415.617,46 Ha
3. DAS Batang Serangan seluas 164.909,66 Ha
4. DAS Padang seluas 110.801,58 Ha
5. DAS Ular seluas 130.929,01 Ha
6. DAS Besitang seluas 96.494,12 Ha
7. DAS Belawan seluas 41.099,95 Ha
8. DAS Singkil seluas 1.388.544,09 Ha
9. DAS Percut seluas 42.758,20 Ha

DAS PRIORITAS II :

1. DAS Lengan seluas 57.407,75 Ha
2. DAS Asam Kumbang seluas 48.960,05 Ha
3. DAS Bolon seluas 195.695,31 Ha
4. DAS Babalan seluas 15.292,22 Ha
5. DAS Bedagai seluas 69.696,93 Ha
6. DAS Belumai seluas 78.624,55 Ha
7. DAS Hapal seluas 93.813,43 Ha
8. DAS Merbau seluas 92.017,41 Ha
9. DAS Batang Kuis seluas 13.302,53 Ha
10. DAS Perupuk seluas 35.675,49 Ha
11. DAS Sialang Buah seluas 26.932,20 H



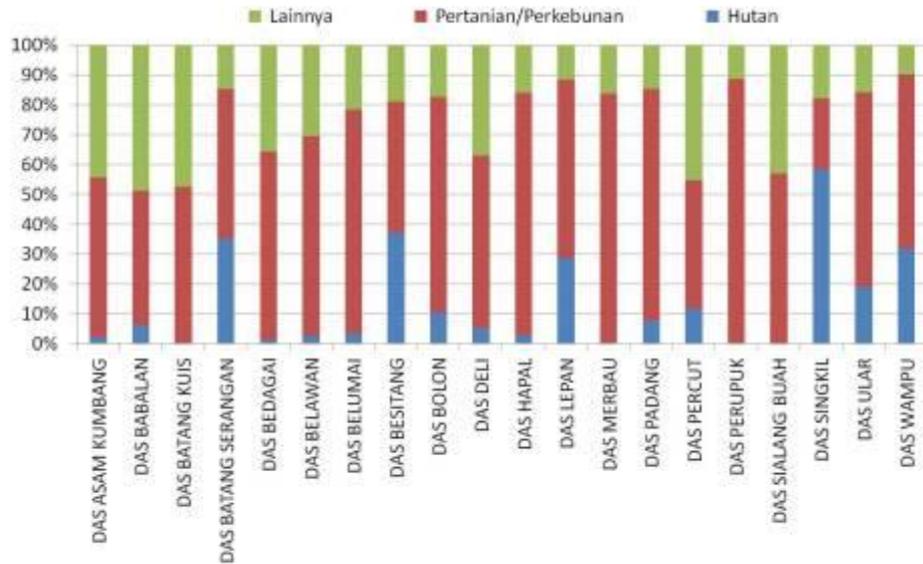
Gambar 2. 6.
Peta SWP DAS Wampu Sei Ular
Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular



Gambar 2.7.
 DAS Prioritas SWP Wampu Sei Ular
 Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular

Bila berkaca pada UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka sangat sedikit DAS di Sumatera Utara yang memenuhi syarat minimal yang dinyatakan UU tersebut (lihat Peta).

Kondisi hutan riil di pada SWP DAS Wampu Sei Ular, hanya 20% (4 dari 20 unit DAS) saja yang tutupan hutannya yang memenuhi persyaratan minimal UU No. 26 tahun 2007 tersebut, yakni DAS Batang Serangan, DAS Besitang, DAS Singkil dan DAS Wampu. Keempat unit DAS yang luas hutan memenuhi syarat minimal UU tersebut adalah DAS yang bagian hulunya termasuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). DAS Deli yang melewati Kota Medan, tutupan hutannya hanya 5,21% jauh dari syarat minimal 30% (lihat Grafik).



Proporsi luas lahan berdasarkan penutupan lahan di SWP DAS Wampu Sei Ular, Sumatera Utara pada tahun 2010. Sebagian besar (80% dari unit DAS) tidak memenuhi syarat minimal tutupan hutan sebesar 30%, seperti diatur UU No. 26 tahun 2007

Gambar 2. 8.

Proporsi luas lahan berdasarkan penutupan lahan di SWP Wampu Sei Ular
 Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular

Meskipun Program GERHAN telah dilaksanakan di Sumatera Utara, namun belum mampu menghadang laju kerusakan hutan dan lahan, sehingga jumlah lahan kritis terus bertambah. Luas lahan kritis di Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah 1.665.908,68 ha, dan pada tahun 2010 menjadi 2.471.246,61 ha. Sehingga dalam kurun waktu 2004-2010, terdapat penambahan lahan kritis sebesar 805.337,93 ha atau dengan laju rata-rata penambahan lahan kritis di Sumatera Utara adalah 134.222,99 ha/tahun.

Dari total luas Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Wampu Sei Ular seluas 3,164,256.96 Ha, hampir disemua DAS terdapat lahan sangat kritis.

Banjir dan longsor merupakan permasalahan yang timbul akibat tidak maksimalnya pengelolaan DAS, disamping tingkat kelerengan lahan.

Pada DAS SWP Wampu Sei Ular dengan melihat kondisi DAS nya, kabupaten/Kota yang potensi rawan banjir dan longsor adalah :

Tabel. 2.8

DAS SWP Wampu Sei Ular yang berpotensi rawan banjir dan longsor

No.	Permasalahan	Kabupaten/Kota	Kecamatan
1.	Banjir	Medan	Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Denai, Sunggal, Belawan, Medan Kota, Helvetia, Tembung.
		Deli Serdang	Namo rambe, Lubuk Pakam.
		Langkat	Kuala, Wampu, Stabat, Secanggih, Tj. Pura, Bahorok, Selesai, Batang Serangan , Besitang dan Selapian.
		Karo	---
		Dairi	---

No.	Permasalahan	Kabupaten/Kota	Kecamatan
		Phakpak Bharat	---
		Humbang Hasundutan	---
		Samosir	---
		Tebing Tinggi	Tebing Tinggi.
		Serdang Bedagai	Pantai Cermin, Rambutan, Bajenis, Perbaungan, Pantai Labu
2.	Longsor	Medan	---
		Deli Serdang	Kutalimbaru, Dolok Silau, Raya, Gn. Merish
		Langkat	Sei Bingei, Merdeka, Bahorok, Besitang
		Karo	Berastagi, Tiga nderket, Tiga Binanga, Silimakuta, Payung, Namanteran, Merek, Gn. Meriah
		Dairi	Kuta Buluh, Silalahi.
		Phakpak Bharat	---
		Humbang Hasundutan	---
		Samosir	---
		Tebing Tinggi	---
		Serdang Bedagai	---

Sumber : SWP BPDAS Wampu Sei Ular 2009

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Utara adalah 85.047,77 ha selama 5 tahun atau rata-rata sebesar 17.009.55 ha setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan asumsi super ekstrim bahwa tidak ada penambahan lahan kritis lagi, maka dibutuhkan waktu 145 tahun untuk merehabilitasi lahan kritis di Sumatera Utara.

Salah satu penyebab utama mengapa luasan lahan kritis terus bertambah meskipun Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN atau GNRHL) telah dilaksanakan adalah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang masih bersifat eksploitatif, seperti konversi hutan menjadi peruntukan lainnya. Sangat sering, aspek ekologis dikesampingkan dalam pengelolaan SDA, dikalahkan oleh aspek ekonomis jangka pendek.

Kebijakan lain sebagai penyebab semakin bertambahnya lahan kritis adalah banyaknya perizinan penebangan hutan tanpa pertimbangan dan perlindungan hutan. Sebagian kawasan resapan air, dikonversi menjadi permukiman terutama di perkotaan. Kebijakan eksploitatif yang dikeluarkan sebagian pemerintah kabupaten/kota yang berorientasi keuntungan ekonomi jangka pendek berdampak kerugian secara ekologis. Salah satu contoh kita ambil DAS Deli yang sebagian wilayahnya mencakup Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi hutan sebagai pencegah banjir dengan metode kontingensi (*willingness to pay*) di DAS Deli adalah sekitar Rp. 128 milyar setiap tahunnya, dan nilai ekonomi berupa biaya pengendalian banjir di DAS Deli adalah sekitar Rp. 17 milyar setahun. Itu baru nilai ekonomi hutan dari sebagian kecil aspek ekologis, yakni pencegah banjir. Belum lagi kita menghitung nilai ekonomi hutan dari bagian aspek ekologis lainnya. Sehingga sangat perlu dikaji mana yang lebih untung, keuntungan ekonomi dengan mengkonversi hutan yang ada menjadi penggunaan lain atau mempertahankan hutannya agar banjir dapat dicegah.

Tabel. 2.9

Kondisi DAS terhadap lahan kritis di SWP Wampu Sei Ular berdasarkan daerah Administrasi sebagai berikut :

NO	DAS	KABUPATEN	KELAS KEKRITISAN LAHAN					TOTAL
			Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Asam Kumbang	Deli Serdang, Langkat, Binjai	-	1,145.64	3,081.94	8,839.02	35,676.86	48,743.46
2	Babalan	Langkat	-	3,098.36	5,115.62	3,012.92	3,913.08	15,139.98
3	Batang Kuis	Deli Serdang, Medan	-	554.78	263.08	508.37	11,989.47	13,315.70
4	Batang Serangan	Langkat	-	7,670.31	24,139.83	68,627.27	64,346.97	164,784.38
5	Bedagai	Simalungun, Serdang Bedagai	793.79	1,248.79	13,180.91	8,117.46	46,317.93	69,658.88
6	Belawan	Deli Serdang, Medan	-	3,491.43	7,575.00	9,310.83	20,412.73	40,789.98
7	Belumai	Deli Serdang	307.32	2,748.49	15,520.58	9,064.86	51,019.34	78,660.59
8	Besitang	Langkat	-	5,115.73	29,034.05	27,781.00	34,830.30	96,761.08
9	Bolon	Batubara, Simalungun, P. Siantar	1,043.32	4,467.13	26,749.04	31,742.70	130,343.29	194,345.47
10	Deli	Karo, Medan, Deli Serdang	-	1,395.88	9,048.74	7,514.82	29,338.58	47,298.01
11	Hapal	Batubara, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar	57.42	1,214.54	10,876.24	8,445.91	74,393.94	94,988.04
12	Lepan	Langkat	-	3,448.40	14,026.44	14,478.36	25,410.27	57,363.46
13	Merbau	Asahan, Simalungun, Batubara	-	681.44	4,742.41	14,759.54	71,780.52	91,963.91
14	Padang	Simalungun, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai	1,053.86	5,464.65	17,769.27	18,679.91	67,704.15	110,671.85
15	Percut	Deli Serdang, Karo, Medan	127.09	3,321.73	10,635.76	5,812.66	21,354.97	41,252.20
16	Perupuk	Batubara, Simalungun, Asahan	-	251.84	1,110.24	5,175.84	29,270.52	35,808.44
17	Sialang Buah	Serdang Bedagai	0.85	396.96	2,532.83	2,467.85	21,188.82	26,587.31
18	Singkil	Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Dairi, Gayo Lues, Humbang Hasundutan, Pak-Pak Bharat, Tapanuli Tengah, Subulussalam, Aceh Selatan, Karo, Samosir	37,110.23	223,645.03	215,122.47	659,736.24	252,874.87	1,388,488.84
19	Ular	Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun	1,908.05	12,986.76	44,372.27	33,783.35	38,409.76	131,460.19
20	Wampu	Karo, Langkat, Simalungun, Deli Serdang	8,258.83	20,650.78	58,194.00	171,038.89	158,032.68	416,175.19
	Total Luas SWP		50,660.75	302,998.65	513,090.70	1,108,897.77	1,188,609.07	3,164,256.96
	Persentase		1.60	9.58	16.22	35.04	37.56	100.00

Sumber: BPDAS Wampu Sei Ular, 2010 (Updating/ Rievew Lahan Kritis di SWP DAS Wampu Sei Ular) Dalam Satuan Ha

Sementara pada SWP Asahan Barumun terdapat 51 DAS yang tersebar dalam 16 (enambelas) Kabupaten dan 3 (tiga) Kotamadya. DAS-DAS tersebut dibagi dalam urutan DAS Prioritas berdasarkan penetapan urutan Prioritas DAS tahun 2008 sebagai berikut :

DAS Prioritas I :

1. Asahan Toba (633.725,13 Ha)
2. Susua, Nias Selatan (25.108,26 Ha)
3. Batang Gadis (487.536,63 Ha)
4. Muzoi (77.947,22 Ha)
5. Oyo (55.111,44 Ha)

DAS Prioritas II :

Tumula (11.535,03 Ha), Mola (16.668,70 Ha), Idanoi (8.137,06 Ha), Sowu (20.114,21 Ha), Eho (25.437,35 Ha), Gidosibua (15.950,25 Ha), Mejaya (11.059,06 Ha), Sialikhe (9.568,46 Ha), Nou 8.824,16 Ha), Morro 10.943,40 Ha), Sibin (11.235,43 Ha), Sibundong (116.039,78 Ha), Oou (13.881,64 Ha), Batang Toru (303.439,78 Ha), Lumut (57.808,46 Ha), Hoya (4.254,44 Ha), Tabuyung (50.506,68 Ha), Masio (8.263,50 Ha), Kolang (57.029,32 Ha), Tulumbaho (13.762,04 Ha), Barumun Bilah (1.329.300,29 Ha), Batu Garigis (40.566,74 Ha), Batang Garoga (15.940,76 Ha), Natal, Tolang, Batahan, Za'ua, Sokhili, Bintuas dan Gari.

Dari total luas Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Asahan Barumun seluas 4.560.400,69 Ha, juga terdapat sejumlah lahan sangat kritis pada beberapa Kabupaten/Kota, antara lain :

Tabel. 2.10

Kondisi DAS terhadap lahan kritis di SWP Asahan Barumun berdasarkan daerah Administrasi

NO	NAMA KAB	KELAS KEKRITISAN LAHAN					Tubuh Air	Grand Total
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis		
1	Asahan	214.144,56	84.536,33	29.218,74	11.875,20	9.799,29	2.675,35	352.249,47
2	Dairi	228,60	1.840,69	1.875,93	1.223,97	1.480,23		6.649,42
3	Danau Toba	712,41	0,01	0,01	24,63	-	113.135,33	113.872,39
4	Humbang Hasundutan	27.064,58	50.678,33	22.527,46	11.939,39	7.461,09	0,69	119.671,54
5	Karo	68,98	2.130,06	2.035,47	1.226,07	369,74	127,31	5.957,63
6	Kota Gunung Sitoli	8.486,83	152,06	14.376,87	6.522,27	76,08	24,16	29.638,27
7	Kota Padangsidempuan	6.485,17	4.323,10	1.473,63	1.191,10			13.473,00
8	Kota Sibolga	442,81	207,89	5,36	202,69	93,12		951,87
9	Kota Tanjung Balai	6.348,87					302,06	6.650,93
10	Labuhan Batu	209.381,93	22.244,64	22.902,33	7.930,96	403,19	9.867,92	272.730,97
11	Labuhan Batu Selatan	178.912,85	37.885,33	12.960,90	12.402,99	1.466,79	1.272,67	244.901,53
12	Labuhan Batu Utara	195.260,10	55.290,06	65.366,60	19.757,06	11.212,72	8.636,28	355.522,82
13	Mandailing Natal	198.658,02	152.149,85	179.047,93	59.953,21	26.862,38	1.783,75	618.455,14
14	Nias	25.979,00	6.804,24	20.996,77	31.317,45	4.427,36	22,25	89.547,07
15	Nias Barat	5.392,03	1.457,56	25.215,74	14.832,98	145,55	132,60	47.176,46
16	Nias Selatan	7.351,63	18.473,55	135.365,11	64.836,84	21.025,42	598,44	247.650,99
17	Nias Utara	18.961,15	8.832,89	60.249,99	24.838,27	5.980,82	234,25	119.097,37
18	Padang Lawas	102.521,64	82.679,32	26.026,61	18.755,46	2.515,11	1.016,07	233.514,21
19	Padang Lawas Utara	57.706,86	73.932,84	52.178,83	69.505,88	33.282,03		286.606,44
20	Pasaman Barat	13.546,51	16.672,74	6.205,22	1.941,99	790,48	178,69	39.335,63
21	Rokan Hilir	675,03	14.189,26	14.051,31	628,83			29.544,43
22	Samosir	8.235,12	31.596,37	11.312,49	33.867,81	18.832,19	0,23	103.844,21
23	Simalungun	2.330,21	9.564,24	7.622,47	8.283,38	1.002,87	16,77	28.819,94
24	Tapanuli Selatan	99.344,59	137.596,64	117.009,93	35.500,06	28.177,73	1.150,12	418.779,10
25	Tapanuli Tengah	57.290,84	48.013,66	46.808,87	18.239,55	17.934,03	684,25	188.971,20
26	Tapanuli Utara	128.890,65	130.836,93	73.875,02	28.509,83	14.217,54		376.329,97
27	Toba Samosir	30.697,23	31.180,75	66.834,81	53.622,41	28.072,26	51,23	210.458,69
	Grand Total	1.605.118,20	1.023.269,34	1.015.544,40	538.930,28	235.628,02	141.910,42	4.560.400,69

Sumber: BPDAS Asahan Barumun, 2010 (Riview Lahan Kritis di SWP DAS Asahan Barumun)

Perilaku di atas sebagian banyak yang menyimpang, yang seharusnya dikonservasi agar dapat melindungi tata air dan mencegah erosi, malah banyak dijadikan lahan budidaya. Parahnya lagi, praktek budidaya yang dilakukan justru semakin memicu meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah, sehingga memperbesar potensi banjir dan mempercepat kehilangan kesuburan tanah.

Praktek pembakaran hutan dan lahan masih menjadi kebiasaan. Hal ini mengurangi kapasitas hutan dan lahan dalam menyerap air ke dalam tanah, hilangnya keanekaragaman hayati. Pada akhirnya, praktek ini merugikan secara ekonomi dan ekologi bagi kehidupan kita dan alam sekitar. Sebagian hutan dalam kawasan lindung sekalipun, banyak yang dirambah. Pada hulu DAS yang masih dapat dipertahankan dengan baik, air jernih dan bersih terus mengalir sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah di bawahnya.

Beralih ke bagian tengah suatu DAS yang umum dijadikan areal budidaya, masih sangat banyak kita temukan praktek budidaya yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Salah satunya adalah keberadaan sempadan sungai. Keppres 32 tahun 1990 telah mengamatkan, misalnya pada pasal 16 menyatakan sempadan sungai (a) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman, dan (b) untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Banyak areal budidaya, seperti kebun, persawahan dan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai tidak memiliki jalur hijau sebagai sabuk pengaman. Hal ini memicu erosi tebing sungai dan juga erosi tanah dari kegiatan budidaya langsung masuk ke sungai, sehingga sungai semakin cepat dangkal.

Selain itu, banyak lahan-lahan resapan air yang diberi izin untuk dijadikan kawasan permukiman, sehingga menjadi langganan banjir setiap tahun. Pada bagian hilir DAS, umumnya berupa kawasan permukiman atau perkotaan. Banyak kota yang tidak tertata dengan baik, termasuk tanpa mempertimbangkan resiko banjir. Rasio daerah terbangun dengan daerah terbuka hijau banyak diabaikan. Banyak halaman yang justru malah dibeton! Hal ini sangat mengurangi kapasitas tanah dalam meresapkan air hujan.

2) Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai sebanyak 11 Wilayah Sungai (WS), yakni :

Tabel. 2.11
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Keterangan
1.	Alas – Singkil	Lintas Provinsi
2.	Batang Natal-Batang Batahan	Lintas Provinsi
3.	Rokan	Lintas Provinsi
4.	Belawan – Ular - Padang	Strategis Nasional
5.	Toba - Asahan	Strategis Nasional
6.	Batang Angkola -Batang Gadis	Strategis Nasional
7.	Wampu - Besitang	Lintas Kab/Kota

No	Wilayah Sungai	Keterangan
8.	Bah Bolon	Lintas Kab/Kota
9.	Barumun - Kualuh	Lintas Kab/Kota
10.	Pulau Nias	Lintas Kab/Kota
11.	Sibundong - Batang Toru	Lintas Kab/Kota

Sumber : Badan Wilayah Sungai Sumatera Utara Tahun 2012

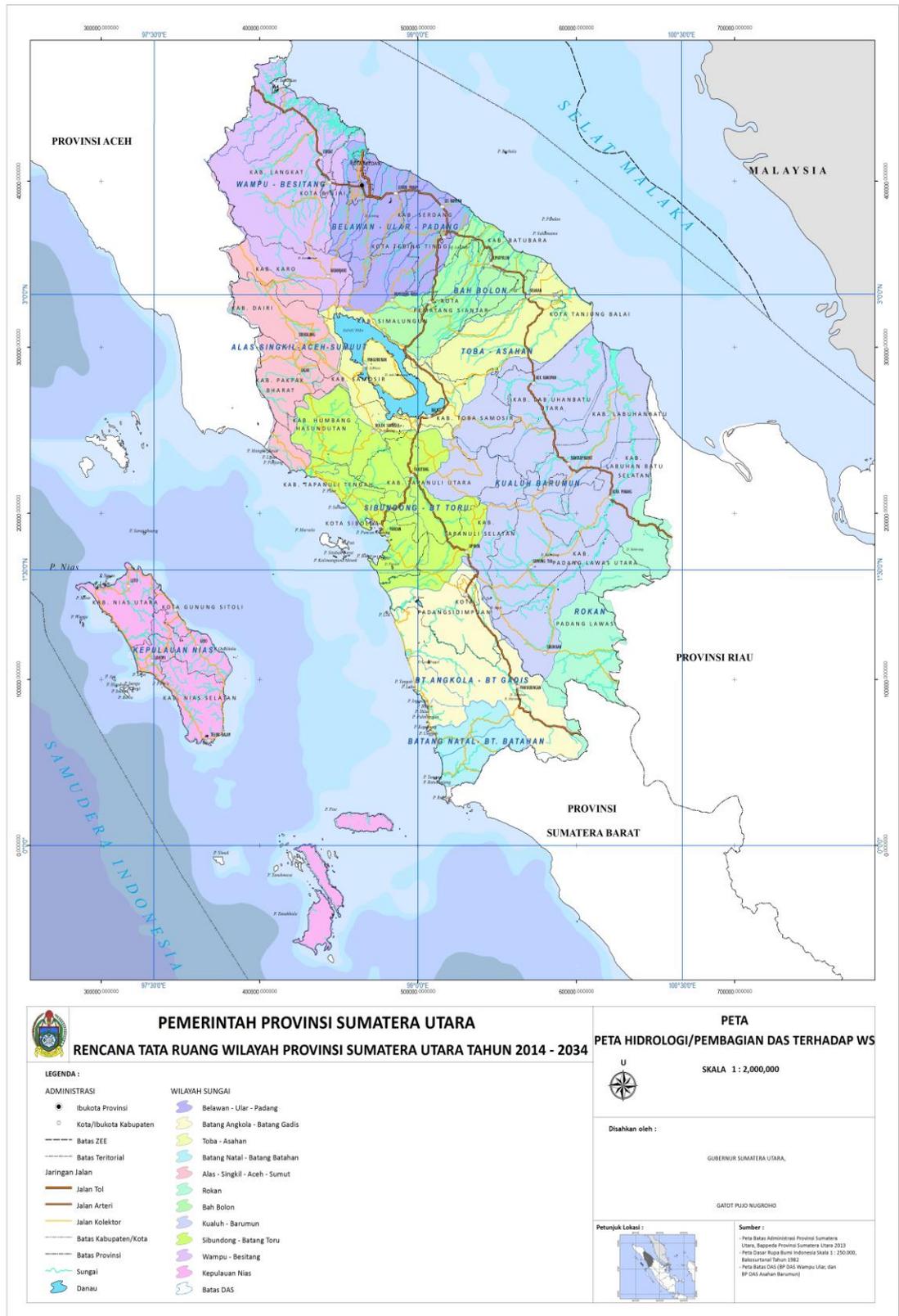
Sedangkan Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

3) Debit

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumun, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri, selain sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Pandan di Tapanuli Tengah, Danau Balimbing di Tapanuli Selatan, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar besar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas 110.260 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Tonang. Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

Oleh karena itu kebutuhan air untuk keperluan domestik, industry dan pertanian perlu dijaga sekaligus mendukung kebutuhan energy masyarakat yang potensial dikembangkan dari melimpahnya air di sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk menjaga investasi di bidang energy perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan yang menjadi daerah tangkapan air DAS yang dimanfaatkan.



Gambar 2. 9.
 Peta Hidrologi dan Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provsu Tahun 2014-2034

d. Klimatologi:

1) Tipe Iklim

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2) Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan.

Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.

3) Suhu dan Kelembaban Udara

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80oC, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40o C. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa geologi, non geologi dan faktor manusia. Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah :

Tabel. 2.12
Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kawasan Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana
1.	Kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.	Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapan Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGG, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat

No.	Kawasan Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana
		Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salapian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.
2.	Kawasan rawan zona patahan aktif	Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara dan wilayah pantai Kepulauan Nias.
3	Kawasan rawan gelombang pasang air laut, abrasi dan tsunami; gelombang pasang; rawan abrasi	Meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias
4	Kawasan rawan banjir/ banjir bandang	<p>Terletak di sepanjang pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera dan wilayah pantai Kepulauan Nias. Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggang, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bamban dan Kecamatan Tebing Tinggi.</p> <p>Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunungsitoli.</p>
5.	Kawasan Rawan Angin Puting Beliung	Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara 2012

Selain itu terdapat Kawasan Rawan Kebakaran hutan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.13
Data Kebakaran Hutan dan Lokasi Hot Spot (Titik Api) di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

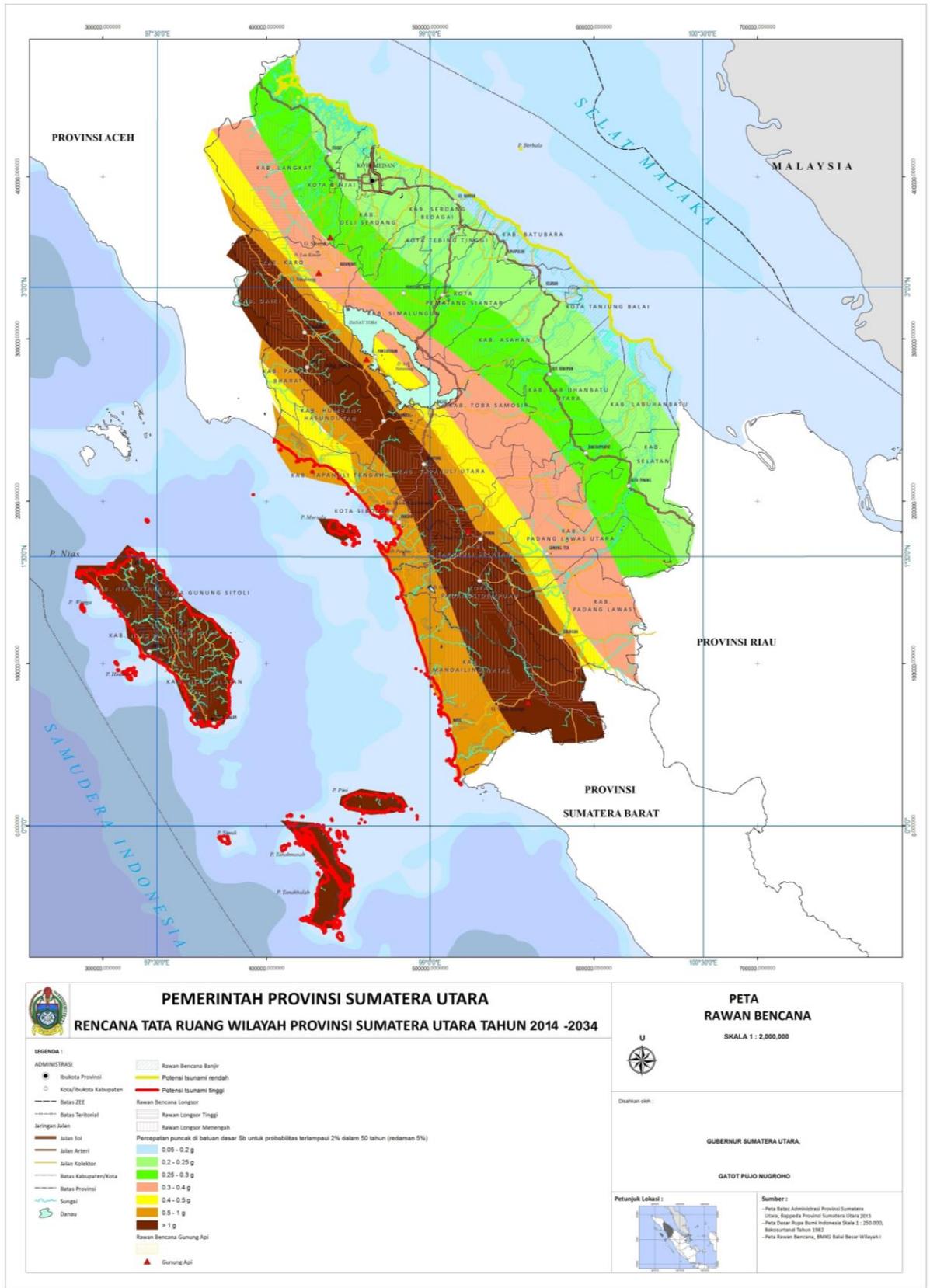
No.	Kabupaten	Tahun					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asahan	45	31	30	54	51	211
2	Batubara	-	2	2	2	2	8
3	Dairi	4	11	1	14	15	45
4	Deli Serdang	14	5	11	30	38	98
5	Humbang Hasundutan	2	21	14	17	19	73
6	Karo	10	8	6	12	11	47
7	Labuhan Batu	239	115	82	77	61	574
8	Labuhan Batu Selatan	-	91	33	58	42	224
9	Labuhan Batu Utara	-	23	27	51	86	187
10	Langkat	6	6	25	30	44	111
11	Mandailing Natal	74	38	19	77	59	267
12	Nias	-	2	6	2	9	19
13	Nias Barat	-	-	-	-	-	-
14	Nias Selatan	4	-	2	2	8	16
15	Nias Utara	-	-	-	-	-	-
16	Padang Lawas	138	268	94	159	121	780
17	Padang Lawas Utara	67	33	60	80	78	318
18	Pakpak Bharat	10	14	3	13	11	51
19	Samosir	3	14	5	12	11	45
20	Serdang Berdagai	2	2	6	7	9	26
21	Simalungun	8	6	7	15	18	54
22	Tapanuli Selatan	44	28	34	75	80	261
23	Tapanuli Tengah	42	32	12	18	17	121
24	Tapanuli Utara	14	20	22	33	49	138
25	Toba Samosir	32	17	10	17	24	100
26	Kota Binjai	1	1	-	1	1	4
27	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-
28	Kota Medan	94	21	3	17	13	148
29	Kota Padang Sidempuan	11	4	1	-	3	19
30	Kota Pematang Siantar	-	3	-	1	-	4
31	Kota Sibolga	-	-	-	1	-	1
32	Kota Tanjung Balai	1	1	4	1	2	9
33	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	865	817	519	876	882	3.959

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2008-2012 total kebakaran hutan dan titik hot spot paling banyak terjadi di kabupaten Padang Lawas, Labuhan Batu dan Padang Lawas Utara.

Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :

- Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600.
- Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunungapi, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.



Gambar 2. 10.
 Peta Rawan Bencana Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provsu - Tahun 2014-2034

2.1.3 Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera memiliki 3 pulau kecil terluar yang terdapat di wilayah pantai timur dan pantai barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Semua Pulau-Pulau Kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak berpenghuni, kecuali Pulau Berhala yang dijaga oleh pasukan Marinir TNI AL. Kondisi 3 pulau tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.14
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Pulau	Fasilitas layanan Umum yang ada	Keterangan Lokasi
1.	Pulau Berhala	Mercusuar, Pangkalan TNI AL (Marinir), ditetapkan sebagai objek wisata bahari oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten Serdang Bedagai (Pantai Timur)
2.	Pulau Simuk	Belum tersedia fasilitas layanan umum	Kabupaten Nias Selatan (Pantai Barat)
3.	Pulau Wunga	Belum tersedia fasilitas layanan umum	Kabupaten Nias Utara (Pantai Barat)

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, 2012

2.1.4. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi ke-4 terpadat penduduk terbanyak di Indonesia dan provinsi berpenduduk terbesar di luar Pulau Jawa. Berdasarkan hasil proyeksi terhadap hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2000-2010 sebesar 1,22%. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 mencapai 13.215.401 orang, yang terdiri atas 6.591.686 laki-laki dan 6.623.715 perempuan.

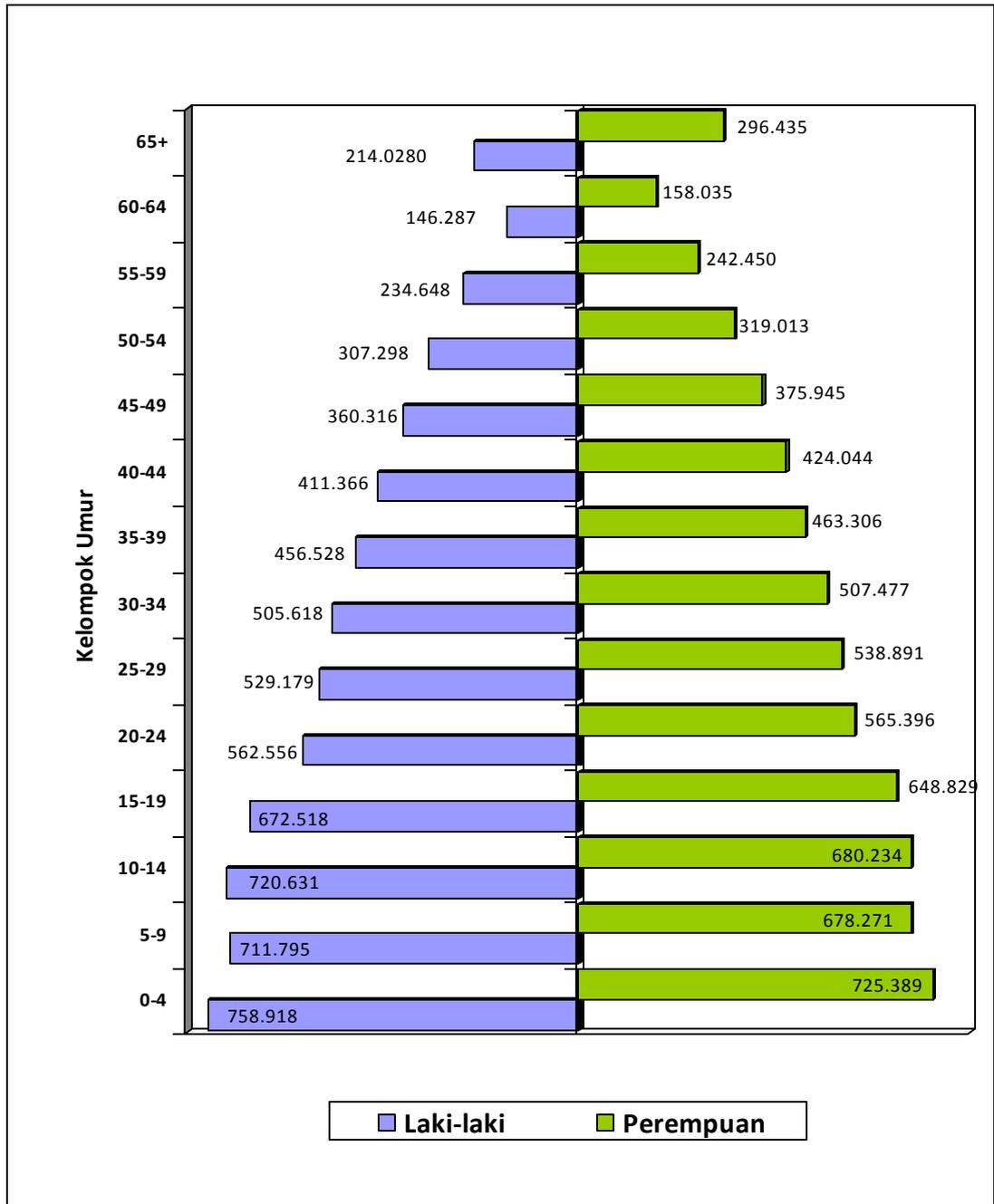
Tabel. 2.15
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2012

KABUPATEN/KOTA	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	64.685	68.175	132.860	94,88
02. Mandailing Natal	201.686	209.245	410.931	96,39
03. Tapanuli Selatan	133.140	134.955	268.095	98,66
04. Tapanuli Tengah	160.012	158.896	318.908	100,70
05. Tapanuli Utara	140.238	143.633	283.871	97,64
06. Toba Samosir	86.932	87.933	174.865	98,86
07. Labuhanbatu	214.452	210.192	424.644	102,03
08. Asahan	340.302	337.574	677.876	100,81
09. Simalungun	413.871	417.115	830.986	99,22
10. Dairi	136.483	136.911	273.394	99,69
11. Karo	178.073	180.750	358.823	98,52
12. Deli Serdang	928.434	917.181	1.845.615	101,23
13. Langkat	492.424	484.461	976.885	101,64
14. Nias Selatan	145.948	148.121	294.069	98,53
15. Humbang Hasundutan	86.769	87.996	174.765	98,61
16. Pakpak Bharat	20.938	20.554	41.492	101,87

KABUPATEN/KOTA	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. Samosir	60.384	61.210	121.594	98,65
18. Serdang Bedagai	303.039	300.987	604.026	100,68
19. Batu Bara	191.652	189.371	381.023	101,20
20. Padang Lawas Utara	114.979	114.085	229.064	100,78
21. Padang Lawas	116.289	115.877	232.166	100,36
22. Labuhanbatu Selatan	145.214	139.595	284.809	104,03
23. Labuhanbatu Utara	169.327	166.132	335.459	101,92
24. Nias Utara	63.678	64.855	128.533	98,19
25. Nias Barat	39.597	43.104	82.701	91,86
26. Sibolga	43.036	42.816	85.852	100,51
27. Tanjungbalai	79.202	77.973	157.175	101,58
28. Pematangsiantar	115.488	121.459	236.947	95,08
29. Tebing Tinggi	73.036	74.735	147.771	97,73
30. Medan	1.047.875	1.074.929	2.122.804	97,48
31. Binjai	124.869	125.383	250.252	99,59
32. Padangsidempuan	96.841	101.968	198.809	94,97
33. Gunungsitoli	62.793	65.544	128.337	95,80
SUMATERA UTARA	6.591.686	6.623.715	13.215.401	99,52

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,52, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni sebesar 104,03 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,86.



Grafik 2. 1.
 Komposisi Demografi berdasarkan usia dan jenis kelamin
 Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2012 (data diolah)

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari data hasil Sensus Penduduk, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 1990-2000 sebesar 1,20 % dan pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,22%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera, atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Yogyakarta (1,02%).

Tabel. 2.16
Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota,
1980, 1990, 2000, dan 2010 (%)

KABUPATEN/KOTA	1980 - 1990	1990 - 2000	2000-2010
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Nias	2,32	1,55	1,03
02. Mandailing Natal	1,94	1,60	1,20
03. Tapanuli Selatan	2,54	1,34	2,12
04. Tapanuli Tengah	2,52	1,37	2,46
05. Tapanuli Utara	0,12	0,04	1,02
06. Toba Samosir	0,29	0,51	-0,38
07. Labuhanbatu	2,97	1,47	1,95
08. Asahan	1,32	0,58	1,11
09. Simalungun	0,59	0,63	-0,46
10. D a i r i	1,37	0,58	0,59
11. K a r o	1,64	0,99	2,17
12. Deli Serdang	2,59	2,10	2,00
13. Langkat	1,47	1,14	0,66
14. Nias Selatan	x	x	x
15. Humbang Hasundutan	x	x	x
16. Pakpak Bharat	x	x	x
17. Samosir	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x
19. Batu Bara	x	x	x
20. Padang Lawas Utara	x	x	x
21. Padang Lawas	x	x	x
22. Labuhanbatu Selatan	x	x	x
23. Labuhanbatu Utara	x	x	x
24. Nias Utara	x	x	x
25. Nias Barat	x	x	x
26. Sibolga	1,84	1,41	0,26
27. Tanjungbalai	9,95	2,11	1,56
28. Pematangsiantar	3,85	1,00	-0,29
29. Tebing Tinggi	2,40	0,71	1,52
30. Medan	2,30	1,00	0,97
31. Binjai	9,05	1,68	1,43
32. Padangsidempuan	x	x	0,26
33. Gunungsitoli	x	x	1,56
SUMATERA UTARA	2,06	1,20	1,22

Sumber : Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000, 2010 BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan: x) Masih tergabung dengan kabupaten induk

Dilihat dari kabupaten/kota, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara periode tahun 2000-2010 sangat bervariasi. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,46 % diikuti oleh Kabupaten Karo sebesar 2,17 % dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 2,12 %, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kabupaten Simalungun, Toba Samosir dan Pematangsiantar masing-masing sebesar minus 0,46 %, minus 0,38 % dan minus 0,29 %.

c. Sebaran Penduduk

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenduduk terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km²), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusi dan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 %, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 %. Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2,122,804 orang (16,06%), 1,845,615 orang (13,97%), dan 976,885 orang (7,39%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 41,492 orang (0,31 %). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680,68 kilometer persegi yang didiami oleh 13,215,401 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 184 orang per kilo meter persegi.

Menurut data penduduk terakhir tahun 2012, Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 8.008 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 34 orang per kilo meter persegi. Kota kedua dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Sibolga sebesar 7971 per kilometer persegi. Dengan kemampuan daya dukung lahan Kota Sibolga yang terbatas sementara penduduk terus bertambah, Kota Sibolga perlu mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

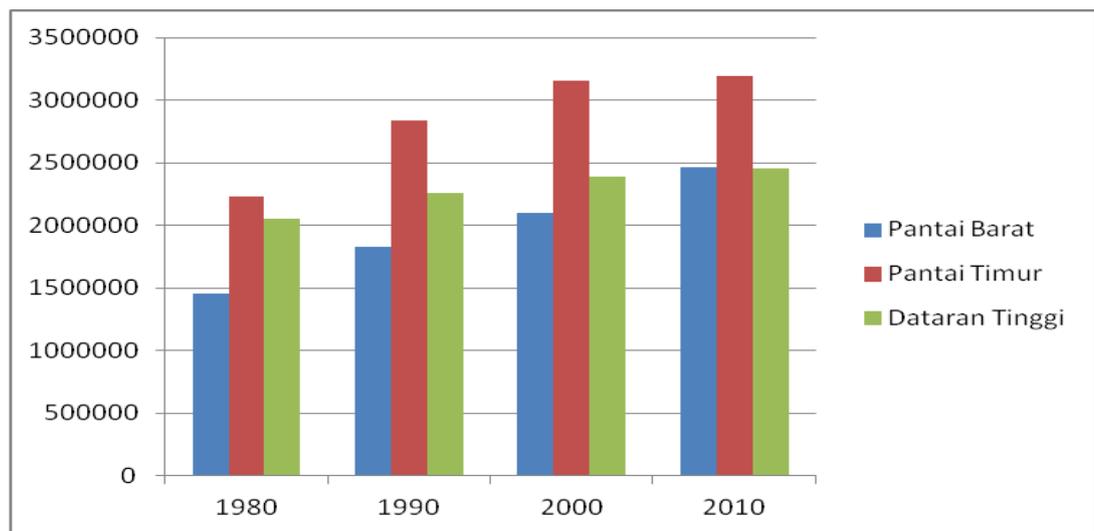
Tabel. 2.17
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

NO	KAB/KOTA	Jumlah	Kepadatan Jiwa per km2	Distribusi Penduduk (%)
1	Nias	132,860	136	1,01
2	Mandailing Natal	410,931	62	3,11
3	Tapanuli Selatan	268,095	62	2,03
4	Tapanuli Tengah	318,908	148	2,41
5	Tapanuli Utara	283,871	75	2,15
6	Toba Samosir	174,865	74	1,32
7	Labuhanbatu	424,644	166	3,21
8	Asahan	677,876	184	5,13
9	Simalungun	830,986	190	6,29
10	D a i r i	273,394	142	2,07
11	K a r o	358,823	169	2,72
12	Deli Serdang	1,845,615	742	13,97
13	Langkat	976,885	156	7,39
14	Nias Selatan	294,069	181	2,23
15	Humbang Hasundutan	174,765	76	1,32
16	Pakpak Bharat	41,492	34	0,31
17	Samosir	121,594	50	0,92
18	Serdang Bedagai	604,026	316	4,57
19	Batu Bara	381,023	421	2,88
20	Padang Lawas Utara	229,064	58	1,73
21	Padang Lawas	232,166	60	1,76
22	Labuhanbatu Selatan	284,809	91	2,16
23	Labuhanbatu Utara	335,459	95	2,54
24	Nias Utara	128,533	86	0,97
25	Nias Barat	82,701	152	0,63
26	Sibolga	85,852	7.971	0,65
27	Tanjungbalai	157,175	2.555	1,19
28	Pematangsiantar	236,947	2.963	1,79
29	Tebing Tinggi	147,771	3.844	1,12
30	Medan	2,122,804	8.008	16,06

31	Binjai	250,252	2.773	1,89
32	Padangsidempuan	198,809	1.734	1,50
33	Gunungsitoli	128,337	273	0,97
SUMATERA UTARA		13,215,401	184	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 Data diolah

Perkembangan Kota Medan yang berada di wilayah timur berpengaruh kepada kabupaten yang berdekatan sehingga menimbulkan pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin dominan, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagei, diikuti Kabupaten Asahan, Batubara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.



Grafik 2. 2.

Distribusi Penduduk Menurut Kawasan

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka tahun 2012 (Data diolah)

Dari penyebaran jumlah penduduk berdasarkan grafik distribusi penduduk di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di kawasan Pantai Timur lebih besar dari penduduk yang tinggal di kawasan Pantai Barat dan Dataran Tinggi, tentu hal ini menimbulkan pengaruh semakin menyempitnya lahan pertanian di kawasan pantai timur yang berakibat kepada krisis ketahanan pangan, permasalahan lingkungan, lapangan kerja dan juga permukiman. Dari grafik tersebut juga terlihat kecenderungan pertumbuhan penduduk di Kawasan Pantai Barat yang sudah mulai mengimbangi pertumbuhan penduduk di Dataran Tinggi. Ketidak seimbangan pertumbuhan penduduk ini juga merupakan dampak dari belum meratanya pembangunan diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu akan menjadi prioritas Provinsi Sumatera Utara untuk mengendalikan penyebaran penduduk agar merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui pembangunan infrastruktur yang merata.

d. Suku dan Agama

Sumatera Utara memiliki keanekaragaman budaya, suku dan agama. Keanekaragaman ini merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi toleransi yang tulus dan terpelihara oleh masyarakat berdampak terhadap pembangunan di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000), etnis terbesar yang ada di Sumatera Utara adalah suku batak (Karo, Pakpak, Tapanuli/Toba, dan Mandailing) sebesar 44,75 %, kemudian suku yang berasal dari Jawa (Betawi, Banten, Sunda, Jawa dan Madura) sebesar 33,40 %, Nias sebesar 6,36 %, Melayu sebesar 5,86 %, Cina sebesar 2,71, Minang sebesar 2,66 %, dan Aceh sebesar 0,97 %.

Tabel. 2.18
 Persentase Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Suku Bangsa, Hasil Sensus Penduduk 2000 (%)

KABUPATEN/ KOTA	Melayu	Karo	Simalungun	Tapanuli/Toba	Mandailing	Pakpak	Nias	Jawa	Minang	Cina	Aceh	Lainnya	Jumlah
01. Nias	0,55	0,01	0,00	0,35	0,06	0,04	95,31	0,08	0,41	0,19	0,09	2,9	100,00
02. Mandailing Natal	6,74	0,03	0,02	3,02	80,20	0,01	0,26	6,30	1,13	0,00	0,07	2,22	100,00
03. Tapanuli Selatan	0,14	0,07	0,01	26,60	63,08	0,02	1,74	5,57	0,95	0,11	0,07	1,65	100,00
04. Tapanuli Tengah	0,65	0,23	0,17	73,09	3,16	2,10	9,91	6,42	1,78	0,07	0,51	1,90	100,00
05. Tapanuli Utara	0,05	0,11	0,06	96,51	0,14	1,53	0,21	0,31	0,14	0,11	0,02	0,81	100,00
06. Toba Samosir	0,05	0,14	0,11	96,72	0,08	0,04	0,35	0,85	0,22	0,04	0,07	1,35	100,00
07. Labuhanbatu	3,97	0,44	0,20	30,21	14,85	0,03	0,75	45,50	0,81	0,93	0,21	2,10	100,00
08. Asahan	16,73	0,38	0,47	22,26	2,68	0,03	0,11	52,25	1,12	0,71	0,45	2,82	100,00
09. Simalungun	0,43	1,32	15,82	31,08	1,77	0,07	0,18	46,53	0,45	0,06	0,14	2,15	100,00
10. Dairi	0,05	8,61	1,52	66,70	0,20	19,79	0,18	1,48	0,27	0,13	0,14	0,92	100,00
11. Karo	0,20	74,87	1,41	11,08	0,42	0,45	0,38	8,32	0,59	0,43	0,55	1,31	100,00
12. Deli Serdang	7,40	6,95	2,23	13,27	5,36	0,15	0,36	54,45	2,17	1,60	0,88	5,18	100,00
13. Langkat	14,93	10,22	0,10	4,50	2,54	0,16	0,12	56,87	1,29	0,88	2,29	6,10	100,00
14. Nias Selatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15. Humbang Hasundut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16. Pakpak Bharat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17. Samosir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19. Batu Bara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20. Padang Lawas Utara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21. Padang Lawas Selatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22. Labuhanbatu Selatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23. Labuhanbatu Utara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24. Nias Utara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25. Nias Barat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26. Sibolga	2,91	0,52	0,36	55,93	5,65	0,20	7,70	6,47	10,76	4,23	3,20	2,07	100,00
27. Tanjungbalai	15,41	0,73	0,09	42,47	8,39	0,01	0,15	17,06	3,58	9,33	1,11	1,68	100,00
28. Pematangsiantar	0,66	1,78	6,69	47,54	5,64	0,10	0,44	25,47	2,40	3,90	0,29	5,09	100,00
29. Tebing Tinggi	4,35	1,34	7,03	14,51	10,47	0,09	0,43	40,16	8,92	9,48	0,62	2,59	100,00
30. Medan	6,59	4,10	0,69	19,21	9,36	0,34	0,69	33,03	8,60	10,65	2,78	3,95	100,00
31. Binjai	6,32	6,03	0,23	7,45	9,31	0,11	0,23	52,43	7,06	6,10	1,50	3,24	100,00
32. Padangsidempuan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33. Gunungsitoli	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SUMATERA UTARA	5,86	5,09	2,04	25,62	11,27	0,73	6,36	33,40	2,66	2,71	0,97	3,29	100,00

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS Provinsi Sumatera Utara

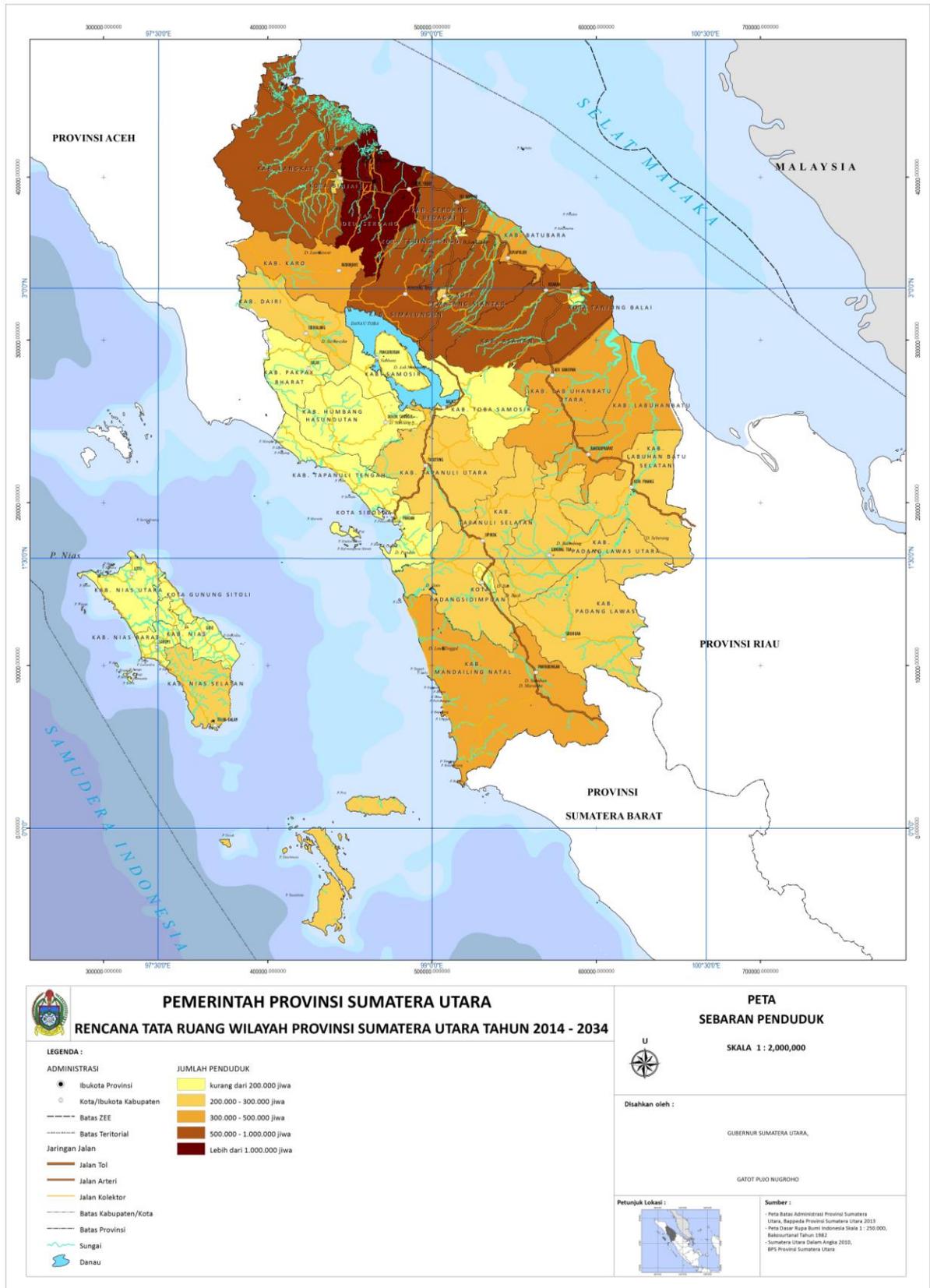
Keterangan : x) Masih bergabung dengan kabupaten induk

Dilihat dari kerukunan umat beragama Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa penduduk Sumatera Utara paling banyak memeluk agama Islam yakni sebesar 66,09 % diikuti oleh agama Kristen (Katolik dan Protestan) sebesar 31,40 %, Budha sebesar 2,31 %, Hindu sebesar 0,11 % dan Konghucu sebesar 0,01 %. Kerukunan umat beragama sudah suatu keharusan dipelihara sehingga berdampak positif terhadap kestabilan dan kemajuan di Sumatera Utara.

Tabel. 2.19
%ase Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Agama,
Hasil Sensus Penduduk 2010 (%)

KABUPATEN/ KOTA	ISLAM	PROTES- TAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONG- HUCU	LAINNYA	TT/TD	JUMLAH
01. Nias	1,17	86,24	12,57	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00
02. Mandailing Natal	95,51	3,07	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	100,00
03. Tapanuli Selatan	78,61	19,61	0,96	0,00	0,01	0,00	0,02	0,80	100,00
04. Tapanuli Tengah	42,71	45,31	11,61	0,01	0,07	0,00	0,11	0,18	100,00
05. Tapanuli Utara	4,76	90,24	4,59	0,00	0,05	0,00	0,01	0,35	100,00
06. Toba Samosir	6,20	85,42	6,60	0,02	0,04	0,00	1,05	0,66	100,00
07. Labuhanbatu	82,92	13,95	1,16	0,01	1,60	0,00	0,01	0,34	100,00
08. Asahan	88,94	9,15	0,68	0,02	1,02	0,00	0,02	0,16	100,00
09. Simalungun	57,27	36,97	5,15	0,02	0,24	0,00	0,06	0,29	100,00
10. Dairi	15,66	72,80	11,29	0,01	0,10	0,00	0,01	0,13	100,00
11. Karo	26,16	58,21	14,72	0,04	0,43	0,00	0,03	0,41	100,00
12. Deli Serdang	78,22	16,82	2,48	0,17	2,03	0,01	0,02	0,26	100,00
13. Langkat	90,58	7,75	0,41	0,04	0,79	0,00	0,03	0,39	100,00
14. Nias Selatan	2,55	77,27	20,06	0,00	0,01	0,00	0,03	0,07	100,00
15. Humbang Hasundutan	3,01	83,11	13,64	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	100,00
16. Pakpak Bharat	39,90	56,94	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
17. Samosir	1,57	58,46	39,76	0,01	0,00	0,00	0,14	0,05	100,00
18. Serdang Bedagai	83,76	13,38	1,40	0,03	1,22	0,01	0,01	0,19	100,00
19. Batu Bara	87,81	10,04	1,52	0,01	0,29	0,01	0,07	0,24	100,00
20. Padang Lawas Utara	89,68	9,32	0,37	0,00	0,01	0,00	0,00	0,62	100,00
21. Padang Lawas	94,98	4,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00
22. Labuhanbatu Selatan	85,96	13,28	0,47	0,01	0,22	0,01	0,00	0,05	100,00
23. Labuhanbatu Utara	82,23	15,87	1,21	0,01	0,54	0,00	0,00	0,13	100,00
24. Nias Utara	5,42	78,22	16,25	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00
25. Nias Barat	1,98	78,74	19,24	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
26. Sibolga	57,24	35,19	4,43	0,00	2,97	0,02	0,01	0,14	100,00
27. Tanjungbalai	85,04	8,00	0,76	0,02	5,69	0,02	0,00	0,49	100,00
28. Pematangsiantar	43,90	46,54	4,71	0,11	4,36	0,01	0,07	0,29	100,00
29. Tebing Tinggi	78,03	12,87	0,91	0,15	7,10	0,05	0,00	0,88	100,00
30. Medan	67,80	20,27	1,79	0,44	8,81	0,02	0,02	0,85	100,00
31. Binjai	85,08	7,88	0,81	0,26	5,44	0,07	0,01	0,45	100,00
32. Padangsidimpuan	89,95	8,94	0,46	0,00	0,35	0,00	0,00	0,29	100,00
33. Gunungsitoli	13,59	78,83	7,22	0,00	0,19	0,00	0,03	0,14	100,00
SUMATERA UTARA	66,09	27,03	3,97	0,11	2,34	0,01	0,04	0,40	100,00

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan: TD = Tidak ditanyakan , TT = Tidak terjawab



Gambar 2. 11.
 Peta Sebaran Penduduk di Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provsu Tahun 2014-2034

2.1.5 Penggunaan Lahan

a. Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas \pm 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km² atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi.

Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Luas areal perkebunan adalah 1.999.403 ha atau 27,89% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan total produksi sebesar \pm 4.411.536,55 ton diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya.

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 239.000,2 ton pertahun sementara pemanfaatannya sudah sekitar 257.364,8 ton atau 107,7%, atau telah terjadi overfishing (padat tangkap), sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 917.000,5 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 100.707.59 atau 10,9%. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), dengan jumlah pulau sebanyak 214 buah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

b. Kawasan lindung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.742.120,00 ha atau 52,21 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha).

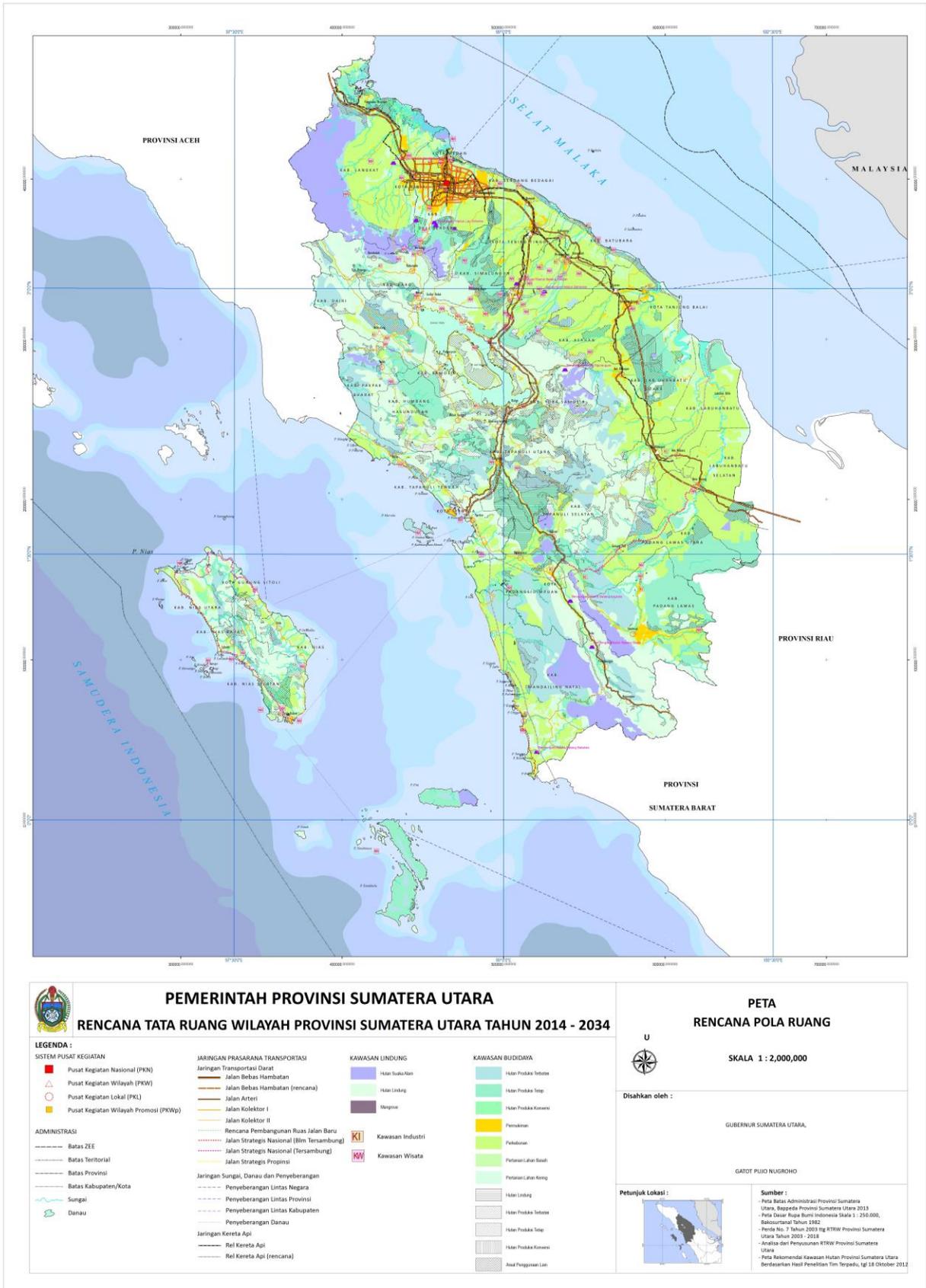
Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.774.400,00 ha)

a.	Cagar Alam (CA)	:	12.287,46	Ha
b.	Suaka Margasatwa (SM)	:	85.552,00	Ha
c.	Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)	:	187.985,00	Ha
d.	Taman Nasional Batang Gadis (TNBG)	:	108.000,00	Ha
e.	Taman Hutan Raya (Tahura)	:	51.600,00	Ha
f.	Taman Wisata Alam (TWA)	:	3.448,90	Ha
g.	Taman Buru (TB)	:	8.350,00	Ha
h.	Hutan Lindung (HL)	:	1.297.330,00	Ha

- Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.967.720,00 ha)

a.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	879.270,00	Ha
b.	Hutan Produksi Tetap (HP)	:	1.035.690,00	Ha
c.	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	:	52.760,00	Ha



Gambar 2. 12.
 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provsu Tahun 2014-2034

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Di Provinsi Sumatera Utara juga telah ditetapkan kawasan andalan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.20
Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara

NO	KAWASAN ANDALAN	DESKRISPI WILAYAH DAN SEKTOR UNGGULAN
1.	Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Kawaan ini meliputi Wilayah Administrasi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kab. Karo. Sektor Unggulan : industri, perkebunan,pariwisata, pertanian, perikanan
2.	Kawasan Pematang Siantar dan sekitarnya	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
3.	Kawasan Rantau Prapat-Kisaran	Perkebunan,kehutanan Pertanian, perikanan industri
4.	Kawasan Tapanuli dan sekitarnya	Perkebunan, pertambangan perikanan laut, pertanian industri, pariwisata
5.	Kawasan Nias dan sekitarnya	pariwisata perkebunan perikanan
6.	Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe - Medan dan sekitarnya	perikanan pertambangan
7.	Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan sekitarnya	perikanan pertambangan
8.	Kawasan Andalan Laut Nias dan sekitarnya	perikanan dan pertambangan

Sumber: PP NO. 26 Tahun 2008 dan Perda RTRWP Tahun 2014-2034

Di samping kawasan andalan ada juga kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk mewedahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan:

- (a) pertumbuhan ekonomi;
- (b) sosial dan budaya; dan

(c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
 1. Merek, Kabupaten Karo;
 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi;
 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan
 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun - Batubara
 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi ;
 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuan Angin – Sibolga
 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mandailing Natal – Tapanuli Selatan
 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, Meliputi:
 1. Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang
 2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
- c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
- d. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
- e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
- b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
- c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Sumatera Utara juga memiliki beberapa kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional. Kawasan strategis nasional tersebut adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- a. Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara) (I/B/1); dan

- b. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara) (I/E/2).

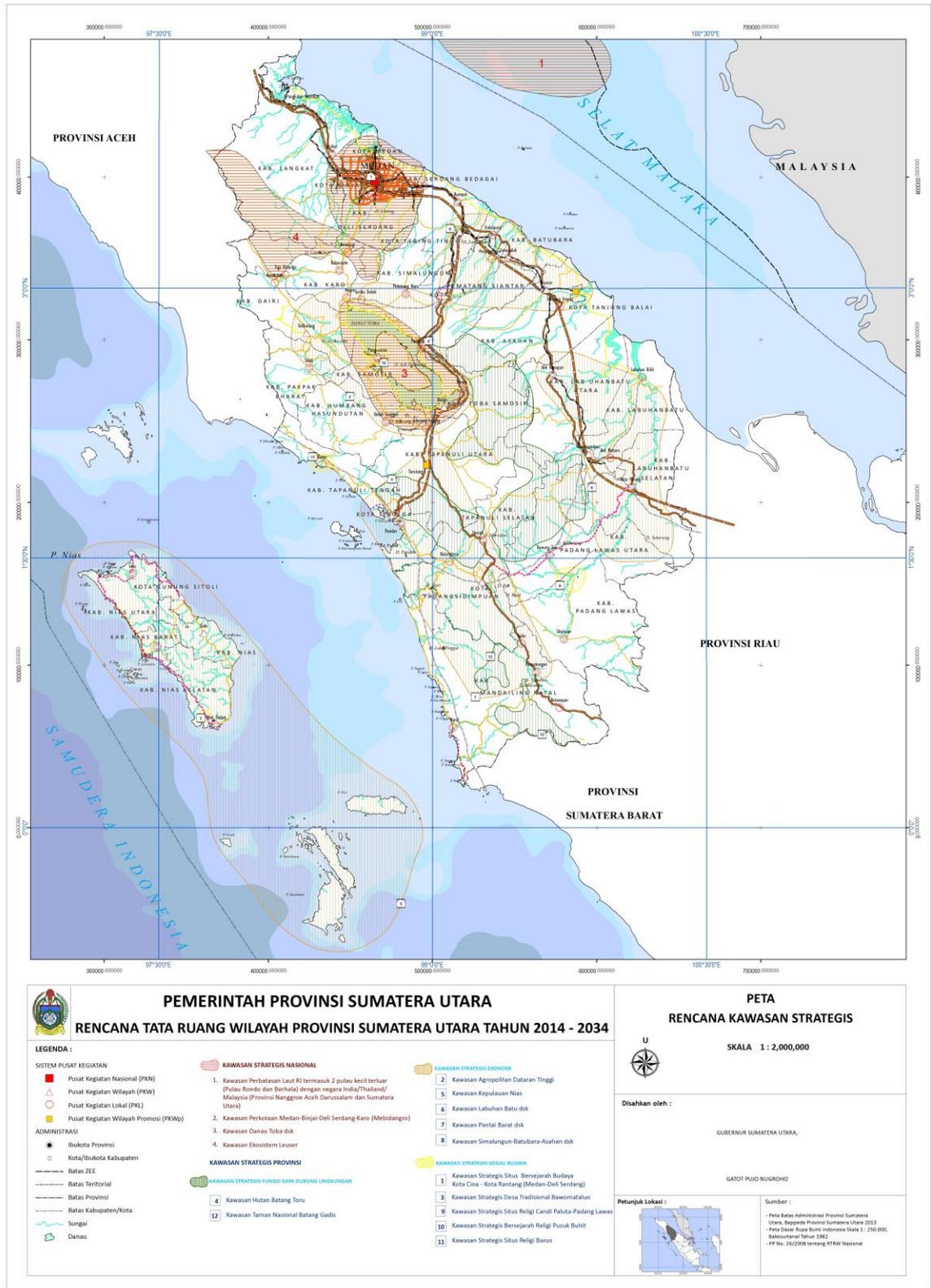
Tabel. 2.21
Kawasan Strategis Nasional

NO	KAWASAN ANDALAN
1.	Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro)
2.	Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara)
3.	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara)
4.	Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008 dan Perda RTRWP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Adapun peta tentang Kawasan Andalan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2. 13.
 Peta Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provsu Tahun 2014-2034

Selain kawasan yang disebutkan diatas, terdapat pula sebuah kawasan yang difungsikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012, dan termasuk dalam KEK Pertama di Indonesia yang berbasis pada pengembangan derivifikasi produk CPO dan Oleochemical. Adapun letak koordinat KEK Sei Mangkei adalah 3⁰ 07' 36.72" N, 99⁰ 20' 35.85" E, dengan letak batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Keramat Kuba, Kecamatan Bandar Perdagangan,
- Sebelah Selatan : PTPN IV Kebun Mayang,
- Sebelah Timur : PTPN IV Kebun Gunung Bayu,
- Sebelah Barat : Sungai Bah Bolon

Progres/perkembangan yang telah dilaksanakan didalam kawasan KEK Sei Mangkei ini antara lain :

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pembangunan Water Intake and Water Treatment Plant
 - Pembangunan beberapa Jalan di dalam kawasan
 - Pembangunan Saluran induk, jaringan listrik, fasilitas Teknologi Informasi, dan perumahan
2. Pembangunan Fasilitas Industri Dasar
 - Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 75 ton TBS/jam
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBS) 2 X 3,5 MW
 - Pembangunan pabrik Palm Kernel oil (PKO) dengan kapasitas 400 Ton/Hari

Selain hal tersebut dalam perkembangan terkahir telah dilakukan penarikan investor di KEK ini dan telah diperoleh beberapa investor berminat untuk berinvestasi, seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.22
Investor Berminat Untuk Berinvestasi Di Sumatera Utara

No.	Investor	Jenis Industri	Luas Areal (ha)	Nomor Kavling
1	PT. Sinergi Oleo Nusantara (PT. SON)	Biodiesel, Fatty Alcohol, Edible Oil, Shortening, SBE	17,39	2-3-4-5
2	PT. Unilever Oleochemical Indonesia	Soap Noodles Plant, Dove Plant, Fatty Acid Plant	27,39	L-M-N-Q-R-S
3	PT. Cipta Buana Utama Mandiri (CBUM)	NPK Fertilizer Plant	20,00	AJ-AI-AS-AT
4	PT. JVL Varanasi Nusantara Pertama	Refinery Plant	20,42	6-7-8-B-C-D
5	PT. Energy Uni Researces PTE, LTD.	RBD-PO Refineries	28,15	9-10-11-12-13-AA-AB-AC-AD-AE
6	Konsorsium PTPN III & PTPN IV	Oleochemical	25,00	X2-Y-Z-A5.2-A6-AJ
7	PT. Aneka Gas Industri (Samator Group)	Air Separation Plant (ASP)	2,00	16
8	Cistercienze holding b.v.	Biomass Pellet Production Plant	2,50	14
TOTAL			142,85	-

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu tahun 2012

Adapun khusus untuk keberadaan PT. Unilever Indonesia, PT. Cipta Buana Utama Mandiri (CBUM) serta Konsorsium PTPN III dan PTPN IV telah dilakukan groundbreaking keberadaannya oleh Bapak Menko Perekonomian RI pada tanggal 3 Juli 2013, sehingga sampai saat ini ketiganya dalam proses on going untuk pekerjaan konstruksi.

Dukungan Pemerintah juga sangat bagus di dalam proses pengembangan KEK Sei Mangkei, seperti di dalam kawasan Pemerintah c/q. Kementerian Perindustrian telah membangun Pusat Inovasi Kelapa Sawit dengan pendanaan dari DIPA Kementerian Perindustrian RI.

Walaupun kondisi KEK Sei Mangkei telah dapat dikatakan berjalan dengan baik, akan tetapi masih pula ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Belum terbitnya Peraturan Bupati Simalungun mengenai Penetapan Administratur KEK Sei Mangkei sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012
2. Belum selesainya pelimpahan kewenangan dan pendelagasian kewenangan untuk hal perizinan
3. Kebutuhan Utilitas Energi Listrik dan Natural Gas yang belum sepenuhnya terjamin dari operator listrik dan gas
4. Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas KEK Sei Mangkei seperti Pembangunan Rel Kereta Api dan Pelabuhan Kuala Tanjung belum sebagaimana yang diagendakan dalam MP3EI.

Selain itu di Sumatera Utara terdapat destinasi pariwisata Nasional yaitu Kawasan Danau Toba, sementara itu masih banyak destinasi wisata daerah yang belum digali secara optimal seperti :

1. Kawasan Wisata Unggulan Kota Medan
2. Kawasan Wisata Unggulan Deli Serdang
3. Kawasan Wisata UnggulanLangkat
4. Kawasan Wisata Unggulan di Kepulauan Nias
5. Kawasan Wisata Pantai Barat

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, konstribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat sangat baik, bahkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu berada diatas capaian nasional, dengan pertumbuhan rata-rata selama 2009-2013 sebesar 6,07%, sementara capaian nasional hanya sebesar 5,87%. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian nasional dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.23

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2009-2013

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi					rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	
Sumatera Utara	5.07	6.42	6.63	6.22	6.01	6.07
Nasional	4.63	6.22	6.49	6.23	5.78	5.87

Sumber : BPS Sumatera Utara tahun 2013 (data diolah)



Grafik 2. 3.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sumber : BPS Sumatera Utara tahun 2013 (data diolah)

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2009-2013 dari sisi produksi, terlihat kondisi sebagai berikut :

Tabel. 2.24

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK dari Sisi produksi Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha/Sektor	2009	2010	2011*	2012	2013
Pertanian	4.85	5.7	4.82	4.72	4.00
Pertambangan dan Penggalian	1.43	5.87	6.73	2.04	5.48
Industri Pengolahan	2.76	4.16	2.05	3.63	4.01
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5.57	6.88	8.21	3.43	3.95
Konstruksi	6.54	6.77	8.54	6.78	7.17
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.43	6.53	8.09	7.23	7.78
Pengangkutan dan Komunikasi	7.56	9.44	10.02	8.26	7.60
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.14	10.78	13.61	11.2	8.31
Jasa-jasa	6.62	6.77	8.3	7.54	7.13
Tota	5.07	6.42	6.63	6.22	6.01

Sumber : BPS Sumatera Utara tahun 2013 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 sebagian besar sektor PDRB mengalami kenaikan, akan tetapi terdapat 4 sektor yang laju pertumbuhannya lebih kecil dari tahun 2012 diantaranya sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa jasa.

b. Struktur PDRB

Secara garis besar sektor-sektor pembentuk PDRB dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni sektor primer (pertanian dan penggalian serta pertambangan); sektor sekunder (industri

pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan/konstruksi); dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta jasa-jasa).

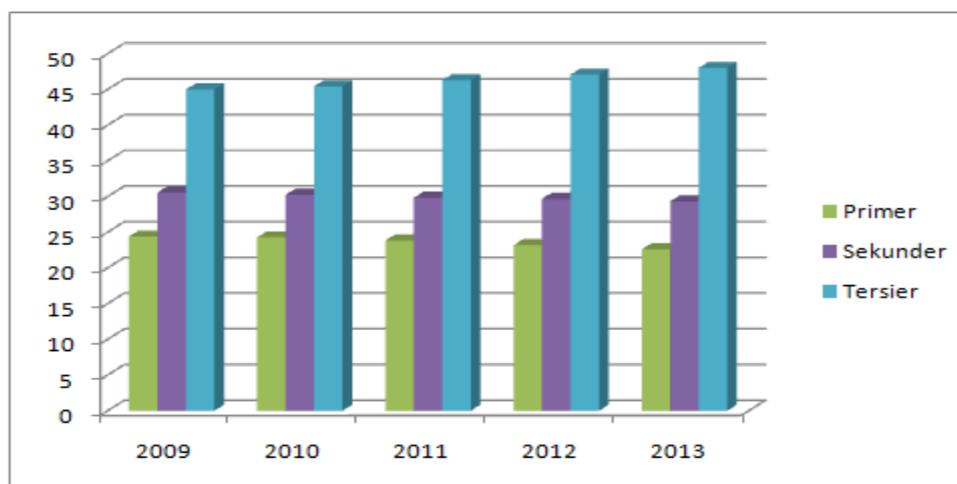
Jika dilihat dari struktur sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2009-2013 terlihat bahwa sektor sekunder telah mulai meninggalkan sektor primer sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB, seperti terlihat dari tabel dibawah ini.

Tabel. 2.25
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013

Sektor	Tahun				
	2009	2010	2011	2012*)	2013
Primer	24,40	24,29	23,86	23,20	22,62
Sekunder	30,57	30,26	29,84	29,70	29,35
Tersier	45,01	45,45	46,30	47,10	48,03

Sumber : BPS Tahun 2012 *). Kondisi Triwulan IV 2012

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Sumatera Utara ternyata lebih didominasi oleh sektor jasa/tersier yang ditunjukkan dari perkembangan kontribusi sektor tersier yakni dari tahun 2009 sebesar 45,01% meningkat terus menjadi 47,10% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 48,03%.



Grafik 2. 4.
Struktur Sektor Pembentuk PDRB Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Sumber : BPS Sumatera Utara 2013 (diolah)

Secara umum kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2013 menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat, terutama pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa, dan sektor lainnya, walaupun hal ini belum optimal pencapaiannya, sebab masih terdapat beberapa kendala peningkatannya seperti kurangnya pasokan listrik, gas dan juga infrastruktur terutama jalan serta fasilitas bongkar muat di pelabuhan laut yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik.

c. Nilai dan Kontribusi PDRB

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2013 secara umum menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel perkembangan nilai dan kontribusi berbagai sektor terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2.26
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
 (Rp. miliar)

NO	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013*)	
		(Rp.)	%								
1	Pertanian	26,526.93	23.78	28,040.20	23.60	29,390.58	23.22	30,778.67	22.89	32,010.15	22.46
2	Pertambangan & Penggalian	1,322.98	1.19	1,400.65	1.18	1,494.85	1.18	1,525.32	1.13	1,608.89	1.13
3	Industri Pengolahan	24,977.11	22.39	26,105.21	21.97	26,548.66	20.97	27,513.10	20.46	28,615.62	20.08
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	816.01	0.73	872.15	0.73	943.75	0.75	976.09	0.73	1,010.40	0.71
5	Bangunan	7,554.37	6.77	8,066.15	6.79	8,754.63	6.92	9,348.16	6.95	10,018.50	7.03
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,575.43	18.44	21,919.34	18.45	23,693.43	18.72	25,406.77	18.89	27,384.48	19.21
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,630.44	9.53	11,633.90	9.79	12,799.43	10.11	13,856.60	10.31	14,911.54	10.46
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	7,939.21	7.12	8,795.15	7.40	9,992.46	7.89	11,111.51	8.26	12,034.81	8.44
9	Jasa-Jasa	11,216.75	10.05	11,976.16	10.08	12,969.81	10.25	13,947.74	10.37	14,942.74	10.48
	PDRB	111,559.22	100.00	118,808.90	100.00	126,587.59	100.00	134,463.95	100.00	142,537.13	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013

Ket : *) Angka Sementara

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan didominasi oleh pertanian disusul oleh sektor Industri Pengolahan dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, Hotel dan Restoran; jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.

Tabel. 2.27
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
 Atas Dasar Harga Berlaku
 (Rp. miliar)

NO	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013*)	
		(Rp.)	%								
1	Pertanian	54,431.19	23.03	62,984.34	22.90	70,655.87	22.48	76,838.11	21.88	86,118.60	21.32
2	Pertambangan & Penggalian	3,229.57	1.37	3,759.75	1.37	4,341.19	1.38	4,653.32	1.33	5,252.87	1.30
3	Industri Pengolahan	55,050.58	23.29	63,013.46	22.91	70,672.28	22.48	77,484.96	22.07	87,170.66	21.58
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,324.65	0.98	2,602.70	0.95	2,966.49	0.94	3,178.78	0.91	3,430.43	0.85
5	Bangunan	14,901.55	6.30	17,519.79	6.37	20,172.80	6.42	23,595.94	6.72	27,934.64	6.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	44,941.66	19.01	52,395.32	19.05	60,387.52	19.21	67,027.28	19.09	77,918.68	19.29
7	Pengangkutan & Komunikasi	21,040.75	8.90	24,907.45	9.06	28,964.29	9.21	32,854.36	9.36	38,574.73	9.55
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	15,728.68	6.65	18,163.64	6.60	21,887.63	6.96	26,442.22	7.53	31,030.23	7.68
9	Jasa-Jasa	24,704.99	10.45	29,709.88	10.80	34,324.37	10.92	39,061.19	11.12	46,502.22	11.51
	PDRB	236,353.62	100.00	275,056.31	100.00	314,372.44	100.00	351,136.16	100.00	403,933.06	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013

Ket : *) Angka Sementara

Sedangkan struktur PDRB atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan kemudian disusul oleh sektor pertanian dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan; pertambangan dan penggalian; dan listrik, gas dan air bersih.

Tabel. 2.28
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Provinsi Sumatera Utara

NO	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013	
		HB	HK								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	23.03	23.78	22.90	23.60	22.48	23.22	21.88	22.89	21.32	22.46
2	Pertambangan & Penggalian	1.37	1.19	1.37	1.18	1.38	1.18	1.33	1.13	1.30	1.13
3	Industri Pengolahan	23.29	22.39	22.91	21.97	22.48	20.97	22.07	20.46	21.58	20.08
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.98	0.73	0.95	0.73	0.94	0.75	0.91	0.73	0.85	0.71
5	Bangunan	6.30	6.77	6.37	6.79	6.42	6.92	6.72	6.95	6.92	7.03
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.01	18.44	19.05	18.45	19.21	18.72	19.09	18.89	19.29	19.21
7	Pengangkutan & Komunikasi	8.90	9.53	9.06	9.79	9.21	10.11	9.36	10.31	9.55	10.46
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	6.65	7.12	6.60	7.40	6.96	7.89	7.53	8.26	7.68	8.44
9	Jasa-Jasa	10.45	10.05	10.80	10.08	10.92	10.25	11.12	10.37	11.51	10.48
	PDRB	100.00									

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013 (Data diolah)
Ket : *) Angka Sementara

Dapat digambarkan bahwa perkembangan perhitungan sektoral khususnya dari sumbangan terhadap PDRB terlihat bahwa Sumatera Utara telah mengarah menjadi Provinsi berbasis Industri dan Jasa, karena peran sektor pertanian (primer) semakin kecil dalam memberikan sumbangan bagi PDRB baik dari harga berlaku maupun konstan.

Tabel. 2.29
Pertumbuhan Rata-rata Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		HB (%)	HK (%)
1	Pertanian	0.13	(0.20)
2	Pertambangan & Penggalian	0.01	(0.01)
3	Industri Pengolahan	(0.79)	(0.45)
4	Listrik, Gas & Air bersih	(0.06)	(0.02)
5	Konstruksi	0.12	0.04
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	0.13	0.03
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.02	0.24
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	0.12	0.21
9	Jasa-jasa	0.33	0.15
	PDRB	0.13	(0.20)

Sumber : BPS Sumatera Utara 2013 (diolah)

d. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2013 kondisi inflasi Sumatera Utara tidak sebaik capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 2 digit pada posisi 10,18%, hal ini disebabkan terjadinya kenaikan pada kelompok bahan makanan (13,18 %); perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (8,27 %); pendidikan, rekreasi dan olahraga (7,93 %); makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (6,24 %); sandang (2,47 %) dan kesehatan (2,11 %).

Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2009-2013 sebesar 5,66% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 5,25% (nasional lebih baik). Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.31
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2009-2013
Provinsi Sumatera Utara

INFLASI	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
INDONESIA	2,78	6,96	3,79	4,36	8,38
SUMATERA UTARA	2,61	8,00	3,67	3,86	10,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013 (data diolah)

e. PDRB per Kapita

Tabel. 2.32
PDRB Perkapita Tahun 2009-2013
Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*)
Nilai PDRB (triliun Rp)	239.03	275.70	314.37	351.12	403.93
Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,248,386.00	12,985,075	13,103,596	13,215,401	13.326.307
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	17.84	21.23	23.99	26.40	30.00
Konversi PDRB/Kapita (US\$)	17,22.67	2,338.62	2,734.53	2,802.85	2,522.07

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013

Adapun kondisi PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan, yang merupakan suatu tanda perbaikan struktur pendapatan global masyarakat Sumatera Utara. Pada tahun 2009 PDRB ADHB mencapai Rp. 239.03 triliun sehingga PDRB/kapita sebesar Rp. 17,84 juta/kapita dan pada tahun 2013 PDRB ADHB telah mencapai Rp. 403.93 triliun sehingga pada tahun 2013 PDRB/kapita masyarakat Sumatera Utara meningkat menjadi Rp. 30,00 juta/kapita atau jika dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat dengan kurs Rp. 11,700/dollar, maka PDRB/kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2013 sebesar USD 2,522.07.

f. Disparitas Pendapatan Masyarakat

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

1) Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen yang mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ke dalam 4 kuadran, diketahui bahwa selama periode tahun 2008-2012 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan adanya perpindahan antar kuadran.

Posisi 33 Kabupaten/Kota selama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.33
 Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
 Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1	Sibolga	4	1	4	4	4
2	Tapanuli Tengah	4	1	4	4	1
3	Tapanuli Utara	4	4	4	4	4
4	Toba Samosir	4	1	4	4	4
5	Samosir	4	4	4	4	4
6	Humbang Hasundutan	4	1	4	4	4
7	Nias	1	1	1	1	1
8	Nias Selatan	4	4	4	4	4
9	Gunung Sitoli			1	4	1
10	Nias Utara			1	1	4
11	Nias Barat			4	1	4
12	Padangsidempuan	4	1	4	4	1
13	Mandaling Natal	1	1	4	4	1
14	Tapanuli Selatan	4	4	4	4	4
15	Padang Lawas	4	1	4	4	1
16	Padang Lawas utara	4	1	1	1	1
17	Labuhan Batu	4	4	4	4	4
18	Asahan	4	4	4	4	4
19	Simalungun	4	4	4	4	4
20	Dairi	4	4	4	4	4
21	Karo	4	1	4	4	1
22	Deli Serdang	3	2	3	3	3
23	Langkat	4	4	4	4	4
24	Pakpak Barat	4	1	1	4	4
25	Serdang Bedagai	4	1	4	4	4
26	Batu Bara	3	3	3	3	3
27	Labuhan Batu Utara			3	3	2
28	Labuhan Batu Selatan			3	3	2
29	Tanjung Balai	4	4	4	4	4
30	Pematang Siantar	4	1	4	4	4
31	Tebing Tinggi	4	1	4	1	1
32	Medan	3	2	2	2	2
33	Binjai	4	1	4	4	1

Sumber : BPS 2013 (data diolah)

Posisi suatu Kabupaten/Kota dalam Tipologi Klassen ini, selain bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota itu sendiri juga bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota lainnya. Suatu kabupaten/kota bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum tentu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah yang menjadi acuan.

2) Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini/Lorenz Curve, rasionya Moderat yakni sebesar 0,354, yang meningkat dari 0,33 di tahun 2012.

3) Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Jumlah desa tertinggal dapat memberikan indikasi mengenai daerah-daerah dimana penduduk miskin banyak ditemui. Kedua indikator tersebut saling melengkapi. Perlu diketahui, bahwa tidak semua penduduk di desa tertinggal adalah miskin, sebaliknya tidak semua penduduk di Kota adalah tidak miskin.

Pembangunan yang telah berjalan di Sumatera Utara berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10,63 % pada tahun 2011 turun menjadi 10,39 % pada tahun 2013.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan sedang dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 % penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 % dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 % sampai dengan 17 % dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 % berketimpangan rendah.

Menurut versi bank Dunia yang menstandarkan pendapatan perkapita yang ideal sekitar 2 US\$/hari/kapita, maka jumlah penduduk yang memenuhi standar tersebut dengan kurs rupiah Rp. 9.500/ 1 US\$ pada tahun 2010 adalah 40 % penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 % penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 % penduduk terendah, yaitu berkisar antara 35,29 % sampai dengan 40,35 % dari total pendapatan, sementara 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya menerima 24,36%, berartisecara umum ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia adalah rendah.

4) Indeks ketimpangan Williamson(Indeks Ketimpangan Regional)

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2009-2012 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2012, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,066 dan jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 0,055. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup stabil mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

Tabel. 2.34
Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara 2009-2012 menurut Indeks Ketimpangan Williamson

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Sibolga	0.004	0.011	0.014	0.007	0.0094
2	Tapanuli Tengah	0.096	0.101	0.102	0.097	0.0992
3	Tapanuli Utara	0.039	0.052	0.056	0.049	0.0484
4	Toba Samosir	0.006	0.008	0.009	0.006	0.007
5	Samosir	0.025	0.033	0.035	0.03	0.031
6	Humbang Hasundutan	0.026	0.037	0.038	0.028	0.0322
7	Nias	0.102	0.059	0.06	0.055	0.0746
8	Nias Selatan	0.084	0.095	0.097	0.093	0.0916
9	Gunung Sitoli	-	0.027	0.023	0.018	0.022667
10	Nias Utara	-	0.057	0.057	0.053	0.055667
11	Nias Barat	-	0.052	0.052	0.05	0.051333
12	Padangsidempuan	0.047	0.059	0.061	0.057	0.0548
13	Mandaling Natal	0.091	0.1	0.102	0.091	0.0966
14	Tapanuli Selatan	0.054	0.062	0.063	0.054	0.0588
15	Padang Lawas	0.076	0.088	0.087	0.084	0.0828
16	Padang Lawas utara	0.075	0.083	0.084	0.08	0.0802
17	Labuhan Batu	0.005	0.024	0.027	0.012	0.0138
18	Asahan	0.015	0.036	0.036	0.012	0.0264
19	Simalungun	0.084	0.101	0.104	0.087	0.0952
20	Dairi	0.037	0.049	0.051	0.04	0.0444
21	Karo	0.005	0.017	0.017	0.002	0.012
22	Deli Serdang	0.061	0.018	0.015	0.054	0.0336
23	Langkat	0.025	0.044	0.043	0.015	0.0356
24	Pakpak Barat	0.032	0.034	0.035	0.032	0.0334
25	Serdang Bedagai	0.034	0.049	0.052	0.032	0.0446
26	Batu Bara	0.227	0.184	0.185	0.221	0.2016
27	Labuhan Batu Utara	0.023	0.004	0.002	0.02	0.01225
28	Labuhan Batu Selatan	0.029	0.01	0.008	0.025	0.018
29	Tanjung Balai	0.009	0.004	0.009	0.002	0.0052
30	Pematang Siantar	0.007	0.022	0.027	0.019	0.0182
31	Tebing Tinggi	0.017	0.027	0.027	0.017	0.0226
32	Medan	0.432	0.352	0.339	0.434	0.3814
33	Binjai	0.007	0.007	0.006	0.014	0.0084
34	Sumatera Utara	0.055	0.051	0.051	0.066	

Sumber : BPS 2013 (data diolah)

Bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode indeks williamson terlihat bahwa Kota Medan merupakan Kab/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,3814 disusul oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 0,2016. Adapun Kab/Kota yang memiliki disparitas pendapatan rendah yakni Kota Tanjungbalai sebesar 0,005 dan disusul oleh Kabupaten Toba Samosir sebesar 0,007.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Sebagai daerah dengan posisi strategis dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk dapat menjawab tantangan perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks. Beberapa indikator kinerja utama dalam bidang pendidikan yang telah dicapai Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah :

a.1. Angka Melek Huruf

Dari total penduduk Sumatera Utara (diperhitungkan dari Sensus Nasional Tahun 2010) dibandingkan jumlah penduduk diperoleh angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2012 mencapai 97,46% dari jumlah penduduk usia tersebut yang berjumlah 8.837.317 jiwa. Hal ini menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga perlu perhatian yang lebih serius dari semua pihak terkait dalam mengurangi angka buta aksara di Provinsi Sumatera Utara

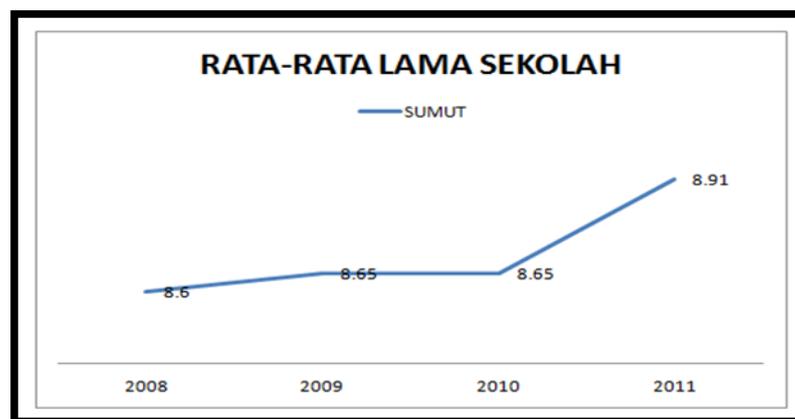
Tabel. 2.35
Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia diatas 15 tahun
dari Tahun 2008 - 2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	8.919.973	9.108.738	9.520.274	8.759.321	8.837.317
2.	Angka melek huruf	97.08%	97.15%	N/A	97,32%	97,46 %

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka

a.2. Angka rata-rata lama sekolah

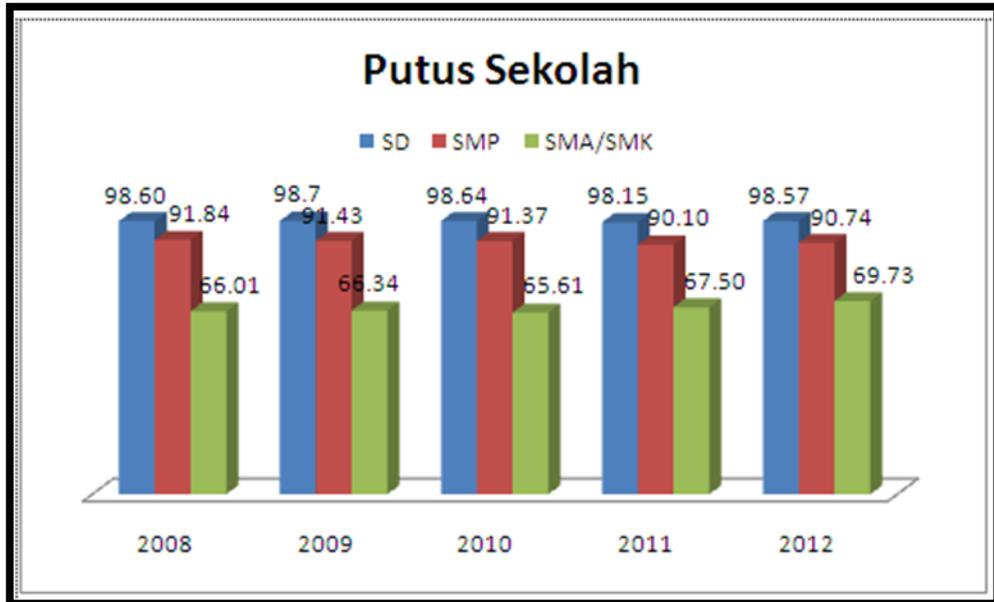
Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2008, sebesar 8,60 tahun meningkat menjadi 8,65 tahun pada tahun 2009, menjadi 8,85 tahun pada tahun 2010 dan menjadi 8,91 tahun pada tahun 2011, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2. 5.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2011
Sumber : Dinas Pendidikan Provsu Tahun 2012 (data diolah)

a.3. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Utara secara umum mengalami penurunan sejak tahun 2008 – 2012. Dimana pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah untuk tingkat SD sebesar 98.60% pada tahun 2012 menjadi 98.57%. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 91.84% pada tahun 2008 menjadi 90.74% pada tahun 2012. Sedangkan untuk tingkat SMA, Angka Putus Sekolah pada tahun 2011 sebesar 67.50% menjadi 69.73% pada tahun 2012, mengalami kenaikan sebesar 2.23%. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



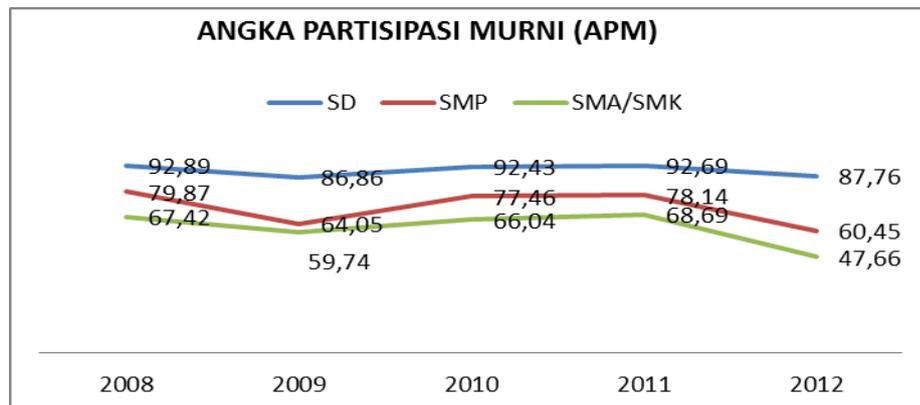
Grafik 2. 6.

Angka Putus Sekolah Tahun 2008-2012

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, BPS Tahun 2009-2013

a.4. Angka Partisipasi Murni

Dari data Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, terlihat bahwa ada kecenderungan terjadinya penurunan jumlah partisipasi murid dari APM murid SD (87.76 %), SLTP (60.45 %) dan SMA/SMK (47.66 %), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2. 7.

Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

Tabel. 2.36
Angka Partisipasi Murni Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Tahun 2008-2012

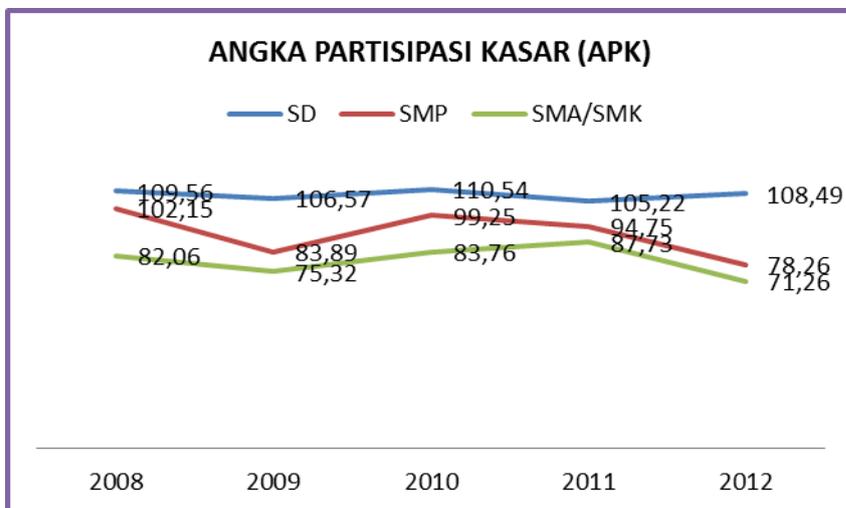
Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM)														
	2008			2009			2010			2011			2012		
	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK
Kab. Deli Serdang	99,57	76,01	67,64	99,69	75,33	68,98	99,78	80,21	88,36	99,12	95,35	81,63	99,38	59,39	53,97
Kab. Langkat	95,86	67,56	58,44	96,10	68,86	58,89	96,62	76,56	67,51	80,19	76,56	16,27	63,80	60,44	22,28
Kab. Karo	99,20	78,38	105,8	99,49	75,14	80,78	99,82	78,46	95,55	90,81	77,86	65,19	91,96	81,62	66,77
Kab. Simalungun	97,52	76,60	50,33	97,74	76,01	54,57	96,62	76,29	51,17	96,09	89,74	64,59	78,87	47,98	34,16
Kab. Dairi	81,88	79,43	89,72	82,19	73,54	92,75	83,51	72,64	92,82	99,43	79,60	68,80	93,40	77,74	74,42
Kab. Asahan	88,31	70,70	52,65	88,42	70,92	53,56	97,21	75,49	59,27	98,44	30,55	46,13	98,49	69,95	54,15
Kab. Batubara	90,86	67,17	40,14	91,03	65,55	43,10	93,23	75,08	48,01	90,68	67,23	41,08	8,73	25,32	27,25
Kab. Labuhan Batu	88,50	67,60	51,42	88,64	70,94	56,18	88,06	78,14	58,54	89,95	77,60	77,82	71,97	35,73	40,62
Kab. Labuhan Batu Selatan				0,00	0,00	0,00	83,07	76,04	15,08	94,26	97,20	72,33	86,13	100,29	56,51
Kab. Labuhan Batu Utara				0,00	0,00	0,00	82,29	79,07	22,34	97,28	88,28	66,13	0,00	0,00	0,00
Kab. Tapanuli Utara	100,49	74,96	100,01	98,62	72,23	86,20	99,24	76,07	94,85	93,41	76,48	81,20	91,20	51,57	15,83
Kab. Tapanuli Tengah	93,85	63,50	80,96	94,03	62,59	85,77	97,75	73,53	90,10	97,75	73,53	90,10	91,85	60,84	21,20
Kab. Tapanuli Selatan	96,89	75,81	57,31	96,95	77,11	66,56	98,95	81,15	70,71	98,97	77,28	46,12	99,10	62,14	39,35
Kab. Padang Lawas				97,63	0,00	0,00	98,99	71,63	51,01	103,83	41,38	96,22	0,00	0,00	0,00
Kab. Padang Lawas Utara				84,88	0,00	0,00	91,91	72,79	49,92	98,08	69,88	53,49	82,68	30,53	8,50
Kab. Nias	93,57	53,78	36,39	93,67	51,70	40,22	94,49	72,08	49,47	95,17	44,77	22,43	87,49	62,77	20,12
Kab. Nias Utara							75,29	78,19	13,54	80,52	56,14	48,85	0,00	0,00	0,00
Kab. Nias Barat							74,02	75,82	17,62	74,02	75,82	17,62	84,01	61,99	53,26
Kab. Mandailing Natal	92,41	71,56	60,57	92,85	75,43	69,35	96,71	79,62	69,51	96,71	97,75	95,02	98,11	28,80	29,52
Kab. Toba Samosir	92,68	83,75	63,92	92,99	74,22	65,68	95,11	76,01	87,67	99,62	85,64	84,24	69,62	29,14	37,06
Kab. Nias Selatan	91,39	75,75	78,31	91,68	72,32	90,90	92,47	74,88	94,02	101,23	91,14	101,55	103,51	101,33	75,96
Kab. Pakpak Bharat	78,07	82,53	67,12	78,78	76,32	66,61	82,90	73,70	95,28	103,94	98,06	98,47	121,96	47,33	37,10
Kab. Humbang Hasundutan	95,99	78,79	80,01	96,11	75,68	88,14	98,66	83,69	86,85	97,65	85,98	71,15	87,70	72,18	59,46
Kab. Samosir	89,33	88,93	73,31	89,57	74,58	72,79	84,80	81,48	86,74	98,49	88,96	86,98	88,74	72,63	73,14
Kab. Serdang Bedagai	95,70	87,58	77,25	95,80	77,24	81,23	94,37	75,50	87,08	86,69	68,58	69,57	85,38	65,36	36,42

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM)														
	2008			2009			2010			2011			2012		
	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK
Kota Medan	98,64	90,11	76,38	98,88	82,11	76,45	99,98	78,40	79,20	103,77	78,40	72,54	103,71	75,57	74,35
Kota Binjai	89,03	89,72	72,26	89,48	83,96	72,99	92,85	80,17	81,11	89,90	66,36	63,51	89,90	67,94	63,70
Kota Tebing Tinggi	86,57	87,65	67,67	90,71	78,06	65,48	93,94	81,56	74,57	95,60	76,67	102,30	88,80	78,93	105,1
Kota Pematang Siantar	91,37	93,83	74,67	91,64	82,47	75,25	94,43	78,73	80,46	88,80	87,04	87,57	83,78	72,76	81,41
Kota Tanjung Balai	97,31	95,66	53,57	97,45	83,10	56,73	99,20	79,31	58,33	6,90	67,83	61,86	43,66	37,83	39,88
Kota Sibolga	92,20	98,13	55,88	92,47	78,46	55,83	98,15	86,63	50,88	115,53	106,97	88,84	118,65	77,91	64,62
Kota Padang Sidempuan	97,87	101,1	61,35	98,28	67,52	67,20	98,93	76,76	66,32	99,50	96,00	52,99	0,00	0,00	0,00
Kota Gunung Sitoli							76,69	80,56	45,45	96,48	88,10	74,07	87,80	139,91	79,09
Sumatera Utara	92,89	79,87	67,42	86,86	64,05	59,74	92,43	77,46	66,04	92,69	78,14	68,69	75,77	56,24	43,79

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

a5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 secara umum terlihat terjadi penurunan mulai dari jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK).



Grafik 2. 8.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2008-2012 (data diolah)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan terutama untuk pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 16.48 % dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sebesar 16.47 %.

Tabel. 2.37
Angka Partisipasi Kasar (APK)

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)														
	2008			2009			2010			2011			2012		
	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK	SD	SMP	SMA/S MK
Kab. Deli Serdang	122,94	97,73	81,91	122,77	98,02	86,90	113,85	103,41	113,00	117,96	100,04	91,02	118,28	80,01	98,72
Kab. Langkat	113,87	89,49	70,95	117,81	89,49	74,55	110,62	98,15	81,90	99,49	98,15	40,46	76,06	43,78	30,29
Kab. Karo	117,83	99,53	126,70	121,96	99,73	132,67	121,81	98,12	110,12	104,04	103,72	90,72	108,16	109,65	82,96
Kab. Simalungun	119,73	97,33	61,49	121,45	98,94	64,81	114,96	98,53	60,75	104,65	92,99	48,82	94,30	94,31	50,67
Kab. Dairi	91,10	99,81	109,03	102,92	96,68	114,73	100,25	95,58	109,58	107,59	88,81	89,86	111,34	102,06	103,23
Kab. Asahan	102,21	90,66	64,66	108,39	91,23	67,61	117,53	95,56	73,81	110,79	40,63	63,31	107,47	93,95	66,59
Kab. Batubara	101,67	83,96	48,74	111,59	84,42	50,91	111,86	96,26	58,56	101,94	84,04	52,15	102,60	73,02	50,79
Kab. Labuhan Batu	104,53	90,34	63,24	108,66	91,33	66,38	104,84	99,41	91,49	104,11	99,61	79,43	81,68	47,44	56,17
Kab. Labuhan Batu Selatan		0,00	0,00		0,00	0,00	99,64	94,00	29,46	105,88	108,27	89,93	102,42	93,05	70,50
Kab. Labuhan Batu Utara		0,00	0,00		0,00	0,00	98,70	97,74	48,69	105,70	93,50	68,64	0,00	0,00	0,00
Kab. Tapanuli Utara	118,10	94,50	119,44	120,90	95,79	125,71	119,26	98,79	110,34	105,59	101,97	102,47	109,37	6,77	91,42
Kab. Tapanuli Tengah	111,46	81,13	99,21	115,28	81,63	104,03	117,59	93,84	110,33	117,59	93,84	110,33	113,71	87,18	30,65
Kab. Tapanuli Selatan	115,99	100,53	71,00	118,85	101,04	75,24	119,09	105,38	87,62	102,53	92,97	50,75	105,98	74,65	43,30
Kab. Padang Lawas				119,68	0,00	0,00	118,74	94,98	61,98	103,83	41,38	96,22	0,00	0,00	0,00
Kab. Padang Lawas Utara				104,05	0,00	0,00	110,25	97,51	59,97	115,28	94,01	70,51	110,20	37,74	15,91
Kab. Nias	111,81	68,71	43,90	114,83	69,07	46,25	109,63	95,24	63,06	116,48	65,51	35,00	107,90	52,55	30,89
Kab. Nias Utara							90,30	96,66	43,74	95,44	98,26	98,43	0,00	0,00	0,00
Kab. Nias Barat							88,77	93,72	43,36	88,77	93,72	43,36	106,02	88,52	72,61
Kab. Mandailing Natal	105,70	98,94	76,00	113,82	99,35	82,30	116,04	102,08	87,01	116,04	100,00	100,00	117,54	45,64	42,43
Kab. Toba Samosir	109,22	104,95	78,74	114,00	97,78	83,50	114,09	98,71	108,11	99,62	85,64	84,24	152,02	27,74	64,63

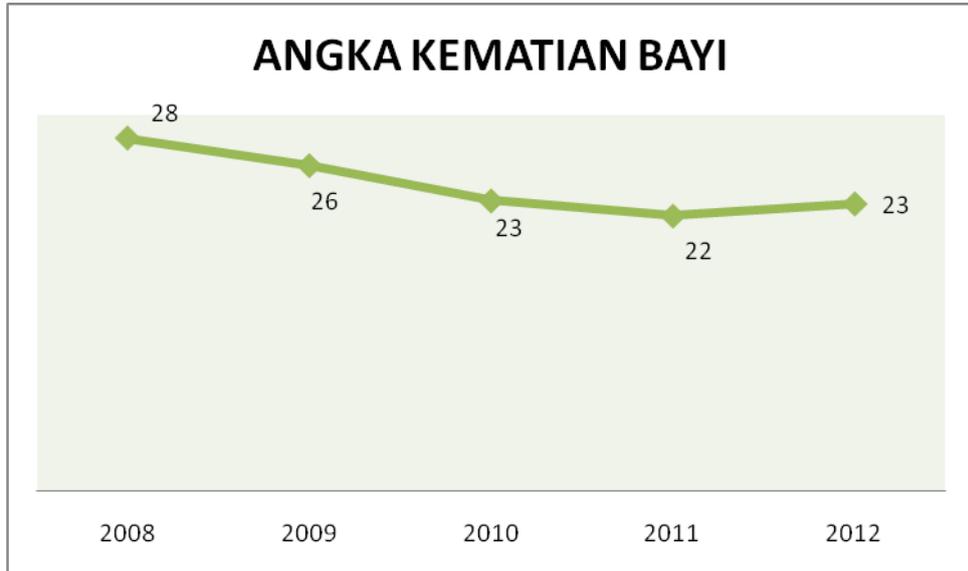
Kab. Nias Selatan	107,65	94,79	94,06	112,39	95,28	99,97	110,93	97,24	112,16	104,56	96,60	104,11	127,50	105,16	82,57
Kab. Pak pak Bharat	94,32	106,73	80,29	109,81	99,85	87,14	99,91	93,08	119,39	111,81	109,33	99,71	148,37	63,20	39,56
Kab. Humbang Hasundutan	111,53	99,45	99,82	117,82	99,95	105,85	118,38	108,69	106,90	117,57	96,45	82,75	104,14	98,81	80,22
Kab. Samosir	99,92	111,16	87,64	109,80	98,28	93,02	98,95	102,11	106,79	108,29	106,75	153,59	106,72	108,57	105,92
Kab. Serdang Bedagai	104,03	110,81	94,55	117,44	100,59	99,19	113,44	97,60	108,37	102,07	91,50	98,67	100,41	94,40	49,53
Kota Medan	119,67	114,86	91,77	120,28	107,52	96,77	122,76	101,82	97,41	124,77	101,82	113,39	124,31	113,26	114,69
Kota Binjai	106,90	111,97	87,89	109,70	109,92	93,23	111,54	101,82	105,08	105,33	94,55	94,27	105,33	95,93	94,60
Kota Tebing Tinggi	106,38	113,35	83,56	108,36	102,93	88,50	113,23	105,93	93,26	115,87	120,68	166,01	113,81	126,49	155,61
Kota Pematang Siantar	111,20	118,57	90,39	112,34	108,86	96,77	113,59	100,94	101,87	105,48	110,16	114,08	102,29	104,10	118,01
Kota Tanjung Balai	115,50	118,82	65,71	116,94	108,24	68,87	119,79	101,82	68,90	13,10	92,93	83,85	57,07	64,86	74,70
Kota Sibolga	115,88	126,47	67,87	113,35	103,47	73,36	118,50	112,52	59,50	142,59	141,51	150,59	146,04	140,23	37,00
Kota Padang Sidempuan	109,36	131,37	74,92	111,79	87,26	81,21	116,90	98,41	77,46	99,29	96,00	52,99	0,00	0,00	0,00
Kota Gunung Sitoli							91,98	99,59	54,00	98,30	91,30	75,39	107,06	105,82	114,89
Sumatera Utara	109,56	94,86	76,20	114,18	83,89	75,32	110,54	99,25	83,76	105,22	94,75	87,73	96,00	72,09	62,70

Sumber : Dinas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012 (Data diolah)

b. Kesehatan

b.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari jumlah kematian/1000 kelahiran hidup menunjukkan masih cukup tinggi. Secara umum Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan, sejak tahun 2008 yang mencapai 28 bayi/1000 kelahiran hidup kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2012 mencapai 23 bayi/1000 kelahiran hidup, sebagaimana pada grafik berikut :



Grafik 2. 9.

Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Bila melihat jumlah kematian bayi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012, dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki angka kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 199 bayi, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel. 2.38

Angka Kematian Bayi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008-2012

KABUPATEN	Jumlah Kematian Bayi				
	2008	2009	2010	2011	2012
Nias	8	20	184	46	149
Mandailing Natal	1,746	1,962	402	249	199
Tapanuli Selatan	33	24	41	66	84
Tapanuli Tengah	71	66	44	61	60
Tapanuli Utara		31	98	106	115
Toba Samosir	18	5	42	41	43
Labuhan Batu	154	79	167	190	97
Asahan		11	151	195	182
Simalungun	44	44	127	111	93

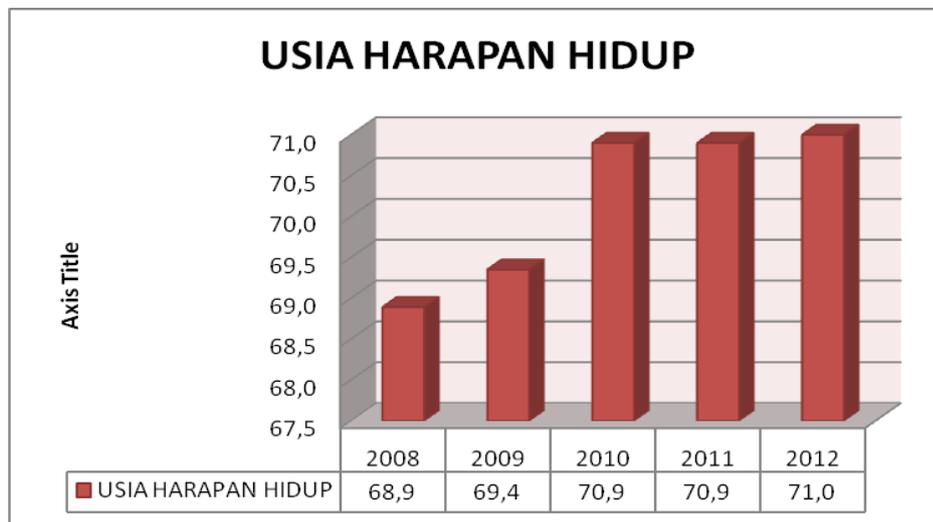
KABUPATEN	Jumlah Kematian Bayi				
	2008	2009	2010	2011	2012
Dairi			83	74	68
Karo	107	73	72	17	47
Deli Serdang	25	37	135	133	96
Langkat			139	103	76
Nias Selatan			177	103	108
Humbang Hasundutan	24	0	62	60	66
Pakpak Bharat	3	5	30	31	24
Samosir	1	1	78	70	62
Serdang Bedagai	8		42	62	50
Batubara			37	27	58
Padang Lawas			36	232	77
Padang Lawas Utara	19	25	45	96	7
Labuhan Batu Selatan		10	56	138	56
Labuhan Batu Utara		41	141	114	106
Nias Utara			26	12	12
Nias Barat			15	13	56
Sibolga	15	1	71	31	25
Tanjungbalai	49	30	22	121	36
Pematang Siantar	5	1	20	32	6
Tebing Tinggi	44	48	16	17	15
Medan	4	4	24	16	37
Binjai			5	0	16
Padangsidempuan	5	3	6	32	28
Gunung Sitoli			22	0	117
Jumlah	2,383	2,521	2,616	2,599	2,271

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012 (data diolah)

b.2. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah mencapai 71,9 tahun. Sampai dengan tahun 2012 Kabupaten dengan capaian Usia Harapan Hidup tertinggi berada pada Kabupaten Karo (72,14 tahun) diikuti dengan Kota Siantar (72,07 tahun), Medan (71,80 tahun) dan Binjai (71,71 tahun). Sementara Kabupaten Mandailing Natal menjadi Kabupaten paling rendah Angka Usia Harapan Hidupnya, yakni hanya sebesar 63,58 tahun.

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten setempat dalam meningkatkan derajat layanan kesehatannya.



Grafik 2. 10.

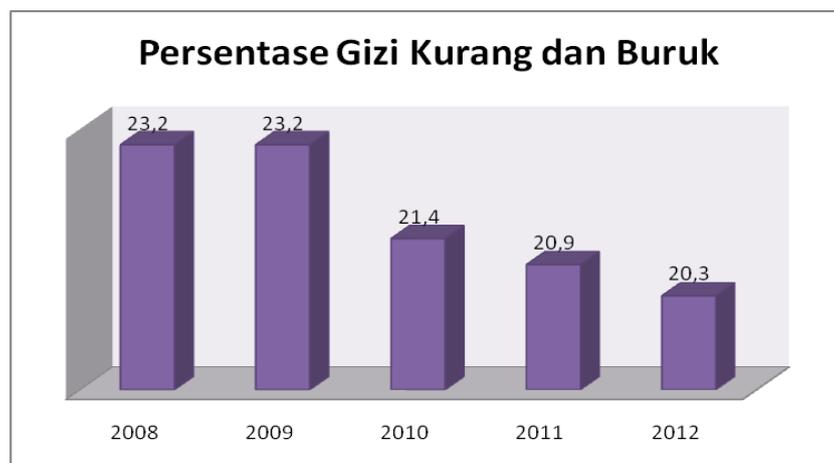
Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2008-2012
 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

b.3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 prevalensi rata-rata Balita Gizi Buruk dan Kurang pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan terdapat 5 Kabupaten yang termasuk kepada kriteria Sangat Tinggi (diatas 30%) yakni Nias, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Sibolga dan Nias Selatan, sedangkan perkembangan dari hasil PSG tahun 2009 menunjukkan Kabupaten Nias Selatan masih menunjukkan kategori sangat tinggi, sehingga hal ini menjadi perhatian dalam penanganan masalah kekurangan gizi di Provinsi Sumatera Utara;

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI (Riskesdas, 2010), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9, meskipun secara umum persentase gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan.



Grafik 2.11

Persentase Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Sumatera Utara 2008-2012
 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel. 2.39

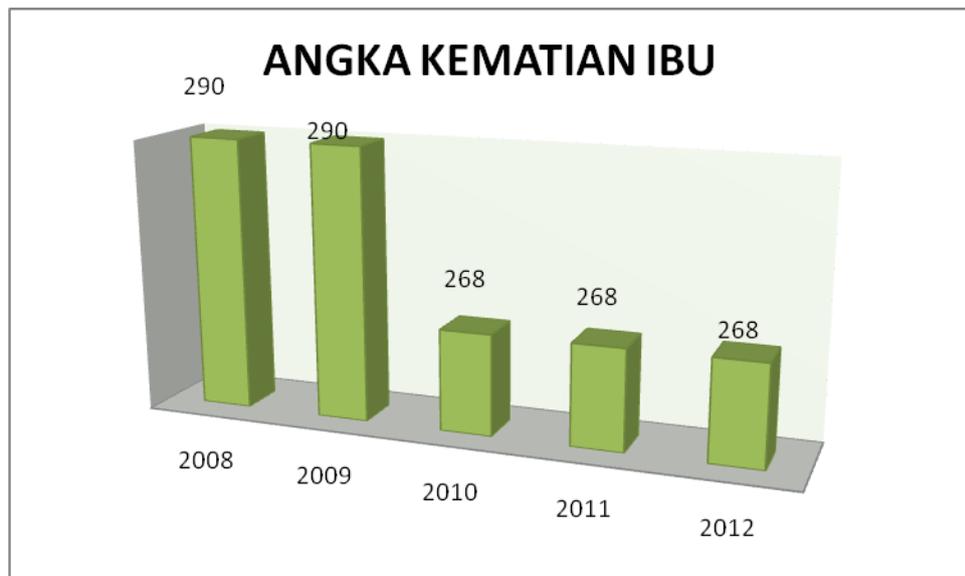
Prevalensi rata-rata Balita Gizi Buruk dan Kurang di Sumatera Utara Tahun 2007,2009 dan 2010

Kabupaten/ Kota	KATEGORI STATUS GIZI BB/U									Kategori
	2007 (Riskasdas)			2009 (PSG)			2010 (Riskasdas)			
	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Jml	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Jml	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Jml	
Nias	16,2	21,1	37,3	-	-	-	-	-	-	ST
MandailingNatal	10,1	16	26,1	5,20	15,47	20,67	-	-	-	T
TapanuliSelatan	14,3	13	27,3	6,10	18,55	24,65	-	-	-	T
TapanuliTengah	11,1	16,7	27,8	5,90	19,08	24,98	-	-	-	T
TapanuliUtara	19,5	18,8	38,3	2,90	7,46	10,36	-	-	-	ST/S
Toba Samosir	3,7	9,1	12,8	2,9	11,80	14,7	-	-	-	S
Labuhan Batu	10,4	12,3	22,7	1,90	21,99	23,89	-	-	-	T
Asahan	7,2	19	26,2	1,30	11,73	13,03	-	-	-	T/S
Simalungun	13,3	13	26,3	0,80	16,90	17,7	-	-	-	T/S
Dairi	5,1	14,3	19,4	3,10	15,60	18,7	-	-	-	S
Karo	2,3	12,7	15	4,80	18,00	22,8	-	-	-	S/T
Deli Serdang	6,1	16,8	22,9	4,30	18,86	23,16	-	-	-	T
Langkat	3,8	7,6	11,4	4,90	19,70	24,6	-	-	-	S/T
Nias Selatan	13,9	18,1	32	13,30	25,45	38,75	-	-	-	ST
Humbahas	16,8	13,3	30,1	3,80	15,81	19,61	-	-	-	ST/S
Pakpak Bharat	14	10,5	24,5	3,70	17,49	21,19	-	-	-	T
Samosir	4,3	7,2	11,5	3,94	8,45	12,39	-	-	-	S
SerdangBedagai	10,6	15,5	26,1	5,20	22,42	27,62	-	-	-	T
Sibolga	17,7	15,1	32,8	2,50	25,07	27,57	-	-	-	ST/T
Tanjung Balai	6,2	20	26,2	2,80	23,34	26,14	-	-	-	T
Pematangsiantar	2,4	12,2	14,6	3,20	16,19	19,39	-	-	-	S
Tebing Tinggi	5,1	17,7	22,8	2,50	19,50	22	-	-	-	T
Binjai	10	15,8	25,8	1,30	9,99	11,29	-	-	-	T/S
Padang Sidempuan	3,2	9,5	12,7	4,50	13,48	17,98	-	-	-	S
Batu Bara	-	-	-	3,80	12,50	16,3	-	-	-	S
Padang Law as	-	-	-	5,60	13,53	19,13	-	-	-	S
Padang Law as Utara	-	-	-	4,10	18,24	22,34	-	-	-	T
SumateraUtara	8,4	14,3	22,7	4,21	16,22	20,43	7,8	13,5	21,4	T
Indonesia	5,4	13	18,4	-	-	-	4,9	13	17,9	S

Sumber: - Riskasdas Tahun 2007
- PSG Tahun 2009
- Riskasdas Tahun 2010
(Data diolah)

b4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Tinggi rendahnya AKI merefleksikan status kesehatan/gizi ibu selama hamil serta nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu negara. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 sebanyak 290 jiwa / 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2012 mencapai 268 jiwa / 100.000 kelahiran hidup, dimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2. 11.

Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Bila melihat secara keseluruhan kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Utara, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 terdapat 276 jumlah kematian ibu melahirkan, dengan jumlah kematian tertinggi di Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 33 kematian ibu; seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.40

Angka Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

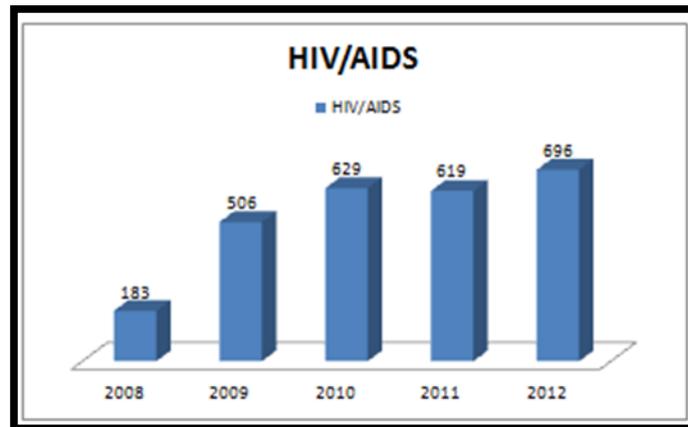
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN IBU				
	2008	2009	2010	2011	2012
KABUPATEN					
Nias	21	34	21	11	10
Mandailing natal	17	22	17	36	10
Tapanuli selatan	20	19	20	15	11
Tapanuli tengah	12	7	12	15	5
Tapanuli utara	7	8	7	5	9
Toba samosir	3	8	3	7	3

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN IBU				
	2008	2009	2010	2011	2012
KABUPATEN					
Labuhan batu	38	24	38	16	33
Asahan	17	19	17	17	13
Simalungun	29	12	29	10	12
Dairi	4	10	4	10	3
Karo	8	10	8	0	7
Deli serdang	32	21	32	20	15
Langkat	14	20	14	23	17
Nias selatan	45	28	45	17	12
Humbang hasundutan	2	6	2	2	7
Pakpak bharat	3		3	2	2
Samosir	3	6	3	5	0
Serdang bedagai	23	12	23	15	13
Batubara	13	18	13	12	16
Padang law as		1		4	10
Padang law as utara	6	5	6	17	10
Labuhan batu selatan		3		0	8
Labuhan batu utara		10		16	13
Nias utara				0	2
Nias barat				0	1
Sibolga	4	3	4	3	3
Tanjungbalai	5	2	5	13	6
Pematang siantar	4	3	4	2	11
Tebing tinggi	5	4	5	1	2
Medan	13	7	13	8	2
Binjai		2		5	2
Padangsidempuan	5	4	5	5	3
Gunung sitoli				6	5
Jumlah	353	328	353	318	276

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012, data diolah

b5. HIV/AIDS.

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 2008 - 2012 telah terjadi trend peningkatan, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 2. 12.

Data Kasus HIV/AIDS Tahun 2008 - 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS ini merupakan gambaran dari terjadinya peningkatan kasus HIV/AIDS di kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara. Dimana kasus terbanyak untuk HIV/AIDS terdapat di Kota Medan sebesar 1.550 kasus, Deli Serdang sebanyak 276 kasus dan Karo sebanyak 223 kasus, sebagaimana table berikut :

Tabel. 2.41

Kasus HIV/AIDS per kabupaten/kota

Kab/kota	2008	2009	2010	2011	2012
	HIV/AIDS	HIV/AIDS	HIV/AIDS	HIV/AIDS	HIV/AIDS
Medan	131	310	379	351	379
P.Siantar	4	19	37	29	11
T.Balai	1		2	1	2
Binjai	3	7	17	1	5
T.Tinggi	1	1		4	6
Sibolga			1	13	12
D.Serdang	8	70	32	85	81
Lngkat		6	13	12	67
Karo	9	30	54	54	76
Simalungun	7	13	6	3	8
Asahan	3	6	12	10	7
L.Batu			8	5	
Taput		5	2	5	1
Tapteng		2	1	2	5
Tapsel				2	
P.Sidemouan		2			
Dairi	4	5	10	7	10
Madina				2	
Tobasa	8	19	36	9	11
Sergei	1	4	6	13	9
Nias	1	4	2	3	3
Samosir	1		4	2	1
Batubara	1	1	4	1	1
Humbahas		1	1	3	1
P.P.Bharat		1		1	
Padang Lawas			2	1	
JUMLAH	183	506	629	619	696

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012 (data diolah)

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mengupayakan untuk menekan angka penyakit HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai program pembangunan di bidang kesehatan.

b6. Flu Burung

Kasus suspect Flu burung/Avian Influenza mulai muncul di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 yaitu dengan ditemukannya 9 (sembilan) orang diduga menderita penyakit Flu Burung, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan darah penderita dinyatakan negatif AI. Kemudian pada tahun 2006 ditemukan 15 orang dari Kabupaten Karo yang dinyatakan Suspect Flu Burung. Kejadian yang terjadi di Kabupaten Karo ini merupakan kluster terbesar di dunia dan tingkat kematian tertinggi di Indonesia (CFR 85%). Pada tahun 2007, sebanyak 34 orang dinyatakan suspect, 1 orang diantaranya positif dan meninggal dunia. Dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan suspect Flu Burung yaitu sebanyak 51 kasus dengan jumlah terbesar di Kabupaten Asahan (16 kasus) tetapi tidak ada yang meninggal dunia. Sejak tahun 2009 sampai 2011 tidak ditemukan kasus flu burung, namun pada tahun 2012 ditemukan 2 (dua) kasus suspect Flu burung yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi dan ke-2 kasus (100%) yang ditangani sesuai standard.

b7. Demam Berdarah

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah endemis DBD. Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2008 jumlah kasus yang teridentifikasi adalah sebanyak 4.444 kasus dan terus bertambah setiap tahun sebanyak 4.643 pada tahun 2009 dan hingga tahun 2012 telah mencapai 4.757 kasus.

Dimana bila melihat penyebaran terbesar berada di Kota Medan dengan 10.351 kasus, Deliserdang sebanyak 3.368 kasus dan Pematang Siantar sebanyak 3.154 kasus.

Tabel. 2.42

Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Per Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012

KAB/KOTA	2008	2009	2010	2011	2012
Medan	1,703	1,340	3,123	2,384	1,201
Pematang Siantar	510	598	599	531	618
Binjai	257	142	800	247	140
Tanjung Balai	448	298	80	61	38
Tebing Tinggi	170	208	339	173	158
Sibolga	84	22	49	65	102
Padang Sidempuan	10	14	20	73	69
Deli Sordang	325	458	1,257	741	587
Langkat	199	98	593	281	145
Karo	74	108	230	43	97
Simalungun	397	307	530	697	733
Asahan	88	93	333	123	210
Labuhan Batu	47	8	55	207	89
Tapaneli Utara	25	18	133	31	32
Tapaneli Tengah	8	22	8	47	112
Tapaneli Selatan	2	6	2	3	9
Nias	-	19	-	-	-
Dairi	10	59	88	107	41
Toba Samosir	19	25	88	22	27
Mandailing Natal	9	-	-	-	2
Nias Selatan	-	-	-	-	9
Pak-Pak Bharat	-	-	-	4	18
Humbahas	-	-	-	-	-
Samosir	15	23	228	88	30
Serdang Bedagai	37	88	78	61	49
Batu Bara	47	92	108	89	70
Padang Lawas	-	4	-	11	12
Padang Lawas Utara	2	-	-	8	15
Labuhan Batu Selatan	-	-	9	21	18
Labuhan Batu Utara	-	-	18	23	13
Nias Utara	-	-	-	-	8
Nias Barat	-	-	-	-	-
Gunung Sitoli	-	-	21	10	115

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013 (data diolah)

Meningkatnya jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dari tahun ke tahun ini, menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui implementasi program-program kesehatan yang mendukung penurunan penyakit demam berdarah di Provinsi Sumatera Utara.

b.8 Jaminan Kesehatan

Pemerintah Provinsi telah ikut aktif dalam pembangunan di bidang Kesehatan dengan memberikan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat (Jamkesmas) mulai tahun 2010 dengan hingga sekarang, dimana sejak tahun 2011 jumlah pasien yang terdaftar sebagai pengguna jamkesda mencapai 2.312 orang dan terus mengalami peningkatan ditahun 2012 (5.048) pasien serta tahun 2013 (7.983) pasien. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.43
Cakupan Jamkesda Provinsi per kabupaten/kota Tahun 2011-2012

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
	2011	2012
Deli Serdang	496	1156
Asahan	240	273
Langkat	252	449
Simalungun	143	263
Toba Samosir	56	52
Karo	69	245
Labuhan Batu	75	98
Labuhan Batu Utara	36	57
Labuhan Batu Selatan	15	51
Batu Bara	142	288
Humbang Hasundutan	32	122
Serdang Bedagai	71	148
Tapanuli Selatan	36	59
Tapanuli Utara	33	126
Tapanuli Tengah	10	52
Padang Lawas	18	33
Medan	284	850
Sibolga	22	38
Binjai	155	146
Tebing Tinggi	14	64
Pematang Siantar	25	66
Gunung Sitoli	1	3
Tanjung Balai	3	7
Padang Sidempuan	38	75
Padang Lawas Utara	4	35
Nias	1	0
Nias Utara	0	0
Nias Barat	1	1
Nias Selatan	0	70
Pakpak Barat	0	2
Mandailing Natal	26	87
Dairi	10	100
Samosir	4	32
Jumlah	2.312	5.048

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui adanya peningkatan pengguna Jaminan Kesehatan di masyarakat mulai tahun 2011 hingga tahun 2013. Namun bila melihat jumlah masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara, akan terlihat ketidak seimbangan antara masyarakat miskin dan pengguna Jaminan Kesehatan Provinsi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.44
Cakupan Jamkesda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2012

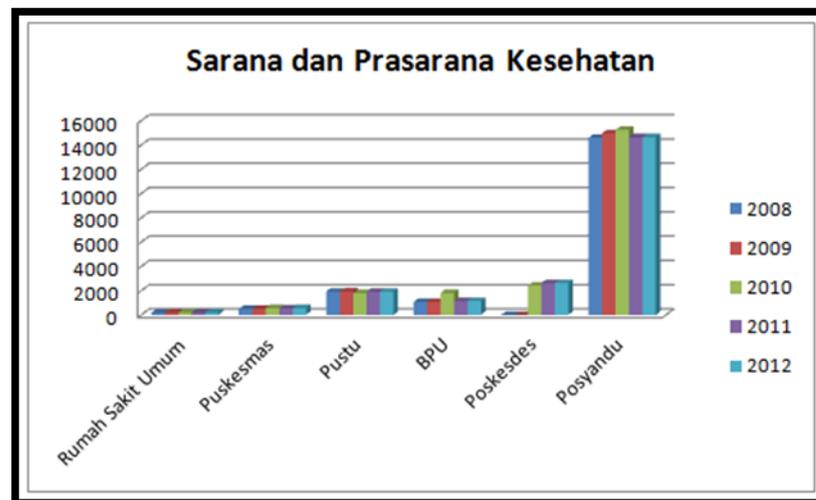
TAHUN	JUMLAH M. MISKIN	JUMLAH MASY TERCOVER JAMKESDA PROVINSI	RATIO	%
2011	1481300	2312	1478988	0,16 %
2012	1378400	5048	1373352	0,37 %

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (data diolah)

Kecilnya jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Kesehatan ini dikarena cakupan Jaminan Kesehatan masih pada Provinsi dan belum mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara akan terus berupaya untuk memperluas cakupan layanan jaminan kesehatan hingga ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

b9. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak diperlukan dalam peningkatan standar kesehatan. Dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara telah berupaya menyediakan sarana kesehatan di seluruh pelosok Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



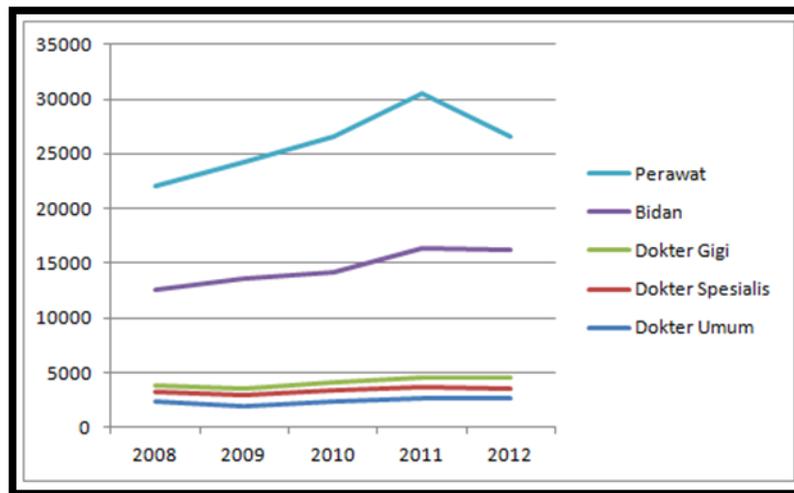
Grafik 2.13.

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2013 (data diolah)

Setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki paling sedikit sebuah puskesmas. Lebih dari 40% desa telah dilayani oleh sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2012 tersedia 570 puskesmas, 14.644 posyandu dan 1.917 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian setiap 100.000 penduduk Provinsi Sumatera Utara, rata-rata dilayani oleh 4 puskesmas atau satu puskesmas melayani 23.266 jiwa penduduk dan satu puskesmas pembantu melayani 3-4 desa. Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dasar diikuti dengan penambahan sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit), dengan penyediaan upaya pelayanan medis spesialistik. Pada tahun 2012, di Sumatera Utara terdapat 203 rumah sakit baik pemerintah dan swasta yang disertai juga dengan penyediaan tenaga medis (dokter, perawat dan bidan dll), namun bila dilihat dari jumlahnya maka akan terlihat bahwa kebutuhan tenaga medis sangat penting, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2. 14.

Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
 Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2013

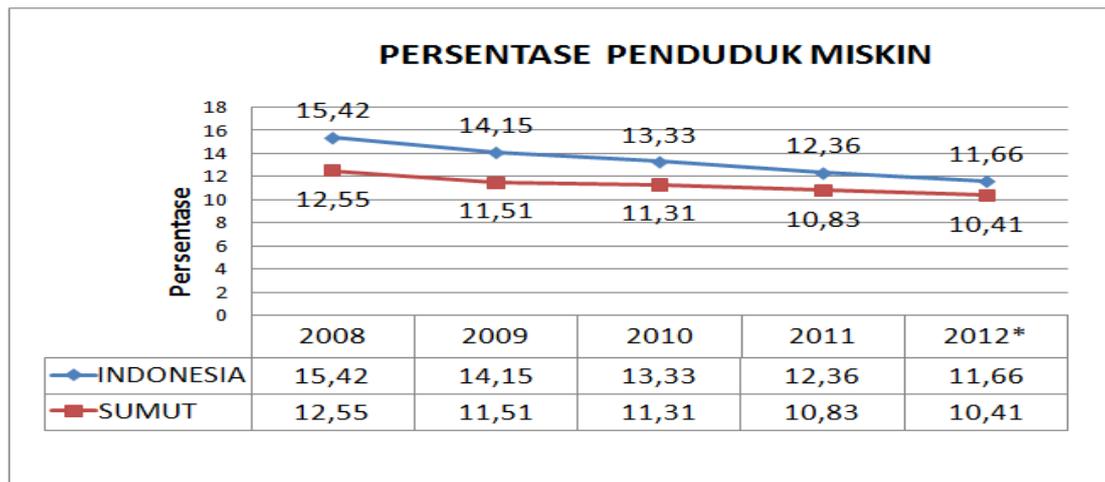
Secara umum, jumlah tenaga medis di Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal, terlihat masih terjadi penurunan jumlah tenaga perawat dari tahun 2011 (14.300) orang menjadi 10.342 orang perawat pada tahun 2012, sehingga hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan jumlah tenaga kesehatan ke seluruh kabupaten/kota.

c. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami perubahan dari tahun 1999–2010. Akibat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 1999 meningkat menjadi 16,74 % dari total penduduk Sumatera Utara yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada tahun 2003 terjadi penurunan penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase, yaitu menjadi 1,89 juta jiwa atau sekitar 15,89 %, sedangkan tahun 2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 juta jiwa atau sekitar 14,93 %, kemudian pada tahun 2005 penduduk miskin turun menjadi 1,84 juta jiwa (14,68 %), namun akibat dampak kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 penduduk miskin tahun 2006 meningkat menjadi 1,98 juta jiwa (15,66 %). Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 1,77 juta atau 13,90 %, angka ini menurun pada tahun 2008 menjadi 1,61 juta jiwa atau 12,55 %. Pada tahun 2009 angka kemiskinan ini kembali turun menjadi 1,50 juta jiwa atau 11,51 %. Selanjutnya pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin Sumatera Utara menjadi 1,49 juta jiwa atau 11,31 jiwa.

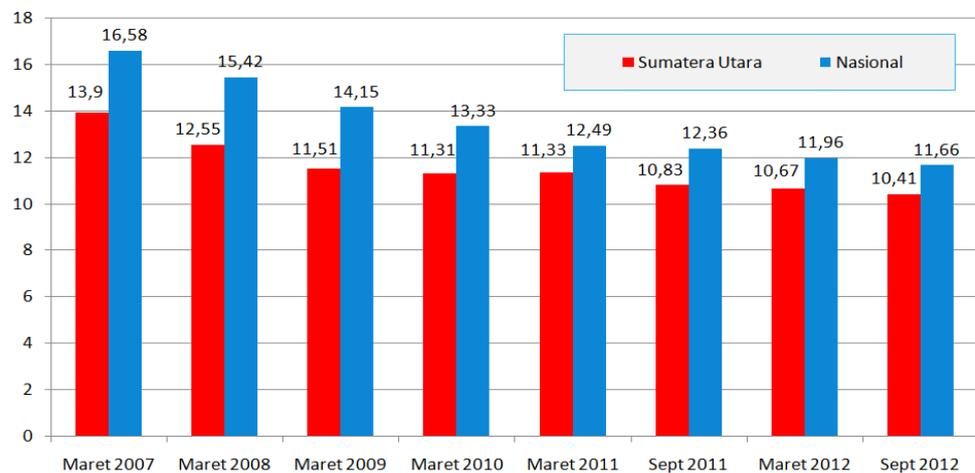
Adapun untuk angka penduduk Sumatera Utara yang berada diatas garis kemiskinan setiap tahun terus mengalami perbaikan, dimana tahun tahun 2008 sebesar 87,45%, tahun 2009 sebesar 88,47%, tahun 2010 sebesar 86,69%, tahun 2011 sebesar 89,17% dan tahun 2012 menjadi 89,59%.

Secara umum penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



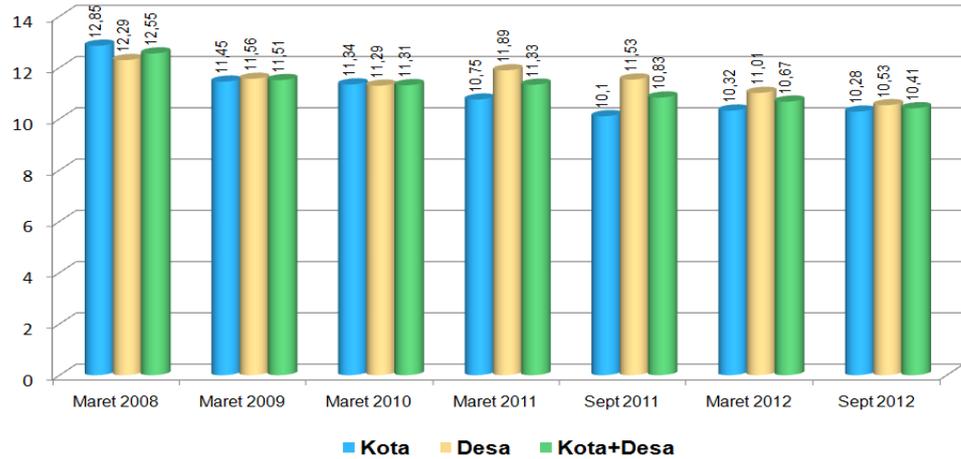
Grafik 2. 15.
 Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2008-2012
 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2007-2012 terus mengalami penurunan dengan tingkat kinerja lebih baik dibandingkan pencapaian kinerja nasional selama periode yang sama. Sampai dengan tahun 2012 persentase penduduk miskin telah menjadi 10,41%, sementara capaian nasional menunjukkan 11,66%. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin Sumatera Utara dan Nasional selama periode 2007-2012.

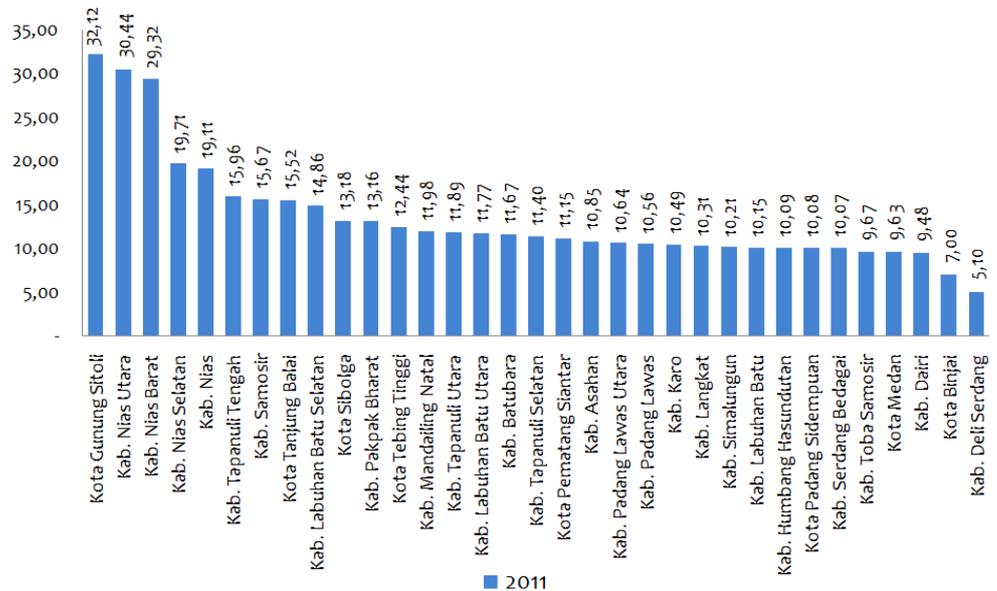


Grafik 2. 16.
 Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara dan Nasional
 Maret 2007 - September 2012
 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (diolah)

Sementara itu jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin di perkotaan dibandingkan pedesaan terjadi perubahan dimana persentase penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan.



Grafik 2.17.
 Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan
 Sumatera Utara Maret 2008 - September 2012
 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (diolah)



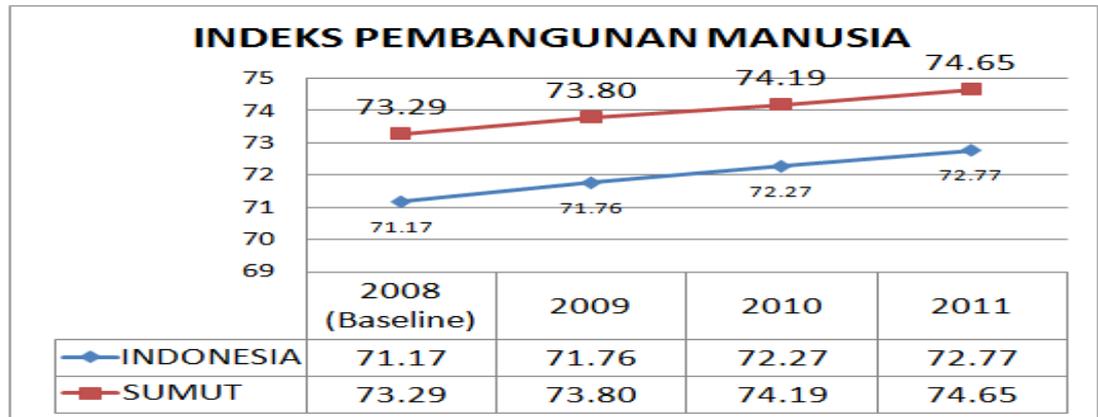
Grafik 2.18.
 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
 di Sumatera Utara, 2012
 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (diolah)

Grafik 2.14 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara terbesar terdapat di wilayah Kepulauan Nias, yakni Kota Gunung Sitoli (32,12%), Nias Utara (30,44%), Nias Barat (29,32%), Nias Selatan (19,71%) dan Kabupaten Nias (19,11) Kabupaten dengan kemiskinan terendah berada pada Kabupaten Deli Serdang (5,10%). Hal ini menunjukkan disparitas yang masih sangat besar antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 sebesar 73,29 menjadi 74,65 pada tahun 2011.

Angka IPM ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IPM Nasional, namun dilihat dari ranking IPM belum menunjukkan peningkatan karena masih tetap berada pada ranking 8 nasional.



Grafik 2. 19.

Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara dibandingkan IPM Nasional
Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2008-2012 (diolah)

e. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja dilihat berdasarkan rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.45

Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Penduduk Yang Bekerja	Angkatan Kerja	Rasio
1	2008	5,540,263	6,094,802	0,91
2	2009	5,765,643	6,298,070	0,92
3	2010	6,125,571	6,617,337	0,93
4	2011	5,912,114	6,314,239	0,94
5	2012	5,751,682	6,131,664	0,94

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Rasio Angkatan Kerja pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2011 menunjukkan tren naik sebesar 0,01. Banyak variabel yang mempengaruhi kecenderungan ini, antara lain : Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Lapangan Usaha Baru, Jumlah Penduduk usia kerja 15-60 tahun, dll.

f. Kondisi Masyarakat Pesisir

Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Pantai Timur yaitu: Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Kota Medan, dan Kota Tanjungbalai, sedangkan di Wilayah Pantai Barat ada Kabupaten Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga, dan Kepulauan Nias terdiri atas 5 Kabupaten/Kota yang memiliki garis pantai yaitu: Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli.

Secara umum jumlah penduduk di 9 Kabupaten/Kota di Pesisir Pantai Timur berjumlah 7.092.286 jiwa terdiri atas 3.033.202 laki-laki dan 4.059.084 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk di pesisir Pantai Barat berjumlah 2.471.996 terdiri atas 1.229.177 laki-laki dan 1.242.819 orang perempuan. Untuk konsentrasi penduduk di desa nelayan berdasarkan hasil survey di kawasan pantai barat maupun pantai timur, kualitas sumberdaya manusia (SDM) di wilayah pesisir masih rendah. Rendahnya kualitas SDM tersebut erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan survey di lapangan, sekitar 63 % dari populasi yang ada memiliki tingkat pendidikan SD dan SLTP, bahkan masih terdapat penduduk yang tidak tamat SD. Di samping itu, kualitas SDM di instansi terkait juga masih belum memadai, karena masih dijumpai penempatan tenaga SDM yang tidak kompeten di bidangnya terutama bagi daerah-daerah yang baru dimekarkan.

Rendahnya kualitas SDM di daerah ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM wilayah pesisir, terutama pada daerah-daerah yang terisolir seperti di pulau-pulau kecil, yang tidak mudah dijangkau akibat sulitnya transportasi. Khususnya di kawasan pantai barat, pada beberapa sekolah SD dan SMP negeri di daerah ini masih didominasi guru bantu (honorar) dan relatif sedikit guru yang berstatus PNS.

Secara umum, faktor penyebab rendahnya kualitas SDM di daerah ini adalah :

- a) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar baik di tingkat SD maupun SMP.
- c) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat (kemiskinan)
- d) Sulitnya transportasi untuk menjangkau lokasi pendidikan.
- e) Kurangnya perhatian pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat pesisir.

Tingkat pendapatan yang rendah (kemiskinan) adalah salah satu ciri yang melekat pada masyarakat pesisir. Kemiskinan ini erat kaitannya dengan kualitas SDM yang rendah (pendidikan dan keterampilan), minimnya mata pencaharian alternatif (MPA), sulitnya sarana pengangkutan faktor produksi dan hasil produksi, kesulitan pemasaran, dan rendahnya penguasaan teknologi penangkapan ikan, budidaya dan teknologi pasca panen.

Berdasarkan hasil survey lapangan (2011), 80,4 % dari masyarakat nelayan di pantai barat mempunyai tingkat pendapatan antara Rp 300.000 – Rp 500.000 per bulan, dan di pantai timur berkisar antara Rp 450.000 – 650.000 yang masih jauh berada di bawah UMR Provinsi Sumatera Utara. Dalam kondisi demikian, masyarakat pesisir kesulitan biaya untuk pendidikan, dan banyak yang terlilit hutang sehingga mereka tetap dalam kemiskinan. Selain itu, tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendorong masyarakat pesisir sering melakukan tindakan eksploitasi sumberdaya pesisir secara tidak bijaksana, yang menyebabkan degradasi sumberdaya hayati seperti kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang. Penambangan karang untuk dijual sebagai bahan bangunan, dan pengambilan bunga karang untuk dijual sebagai souvenir banyak terjadi akibat tekanan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan dari pendapatan yang rendah ini, antara lain :

- a) Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.
- b) Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan yang memadai, sehingga angka kesakitan relatif tinggi.
- c) Timbul dorongan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dengan cara-cara yang tidak bijaksana.
- d) Mendorong berkembangnya sistem ijon dengan posisi tawar yang sangat lemah.
- e) Timbulnya kerawanan sosial akibat tekanan pemenuhan kebutuhan hidup dengan jalan pintas.

g. Agama

Tabel. 2.46
Populasi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Kab / Kota	Umat Agama						Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong hucu	
1	Nias	37.000	575.554	138.102	79	1.042	-	751.777
2	Mandailing Natal	372.280	25.000	652	-	57	-	397.989
3	Tapanuli Selatan	222.249	35.613	2.467	-	6	-	260.335
4	Tapanuli Tengah	10.198	130.063	35.750	224	162	-	176.397
5	Tapanuli Utara	134.384	360.946	50.765	199	2.410	-	548.706
6	Toba Samosir	14.427	263.606	68.859	-	83	-	346.945
7	Labuhan Batu	739.985	108.863	21.521	102	20.110	24	890.587
8	Asahan	581.020	63.036	68.859	-	83	-	346.945
9	Simalungun	464.001	362.154	65.467	231	9.649	-	901.502
10	Dairi	545.783	216.830	51.605	2.753	3.791	-	820.762
11	Karo	79.479	185.585	55.095	6.853	9.782	-	336.794
12	Deli Serdang	1.277.563	380.402	61.025	5.923	87.532	42	1.812.445
13	Langkat	779.018	84.306	13.530	1.899	24.221	8	902.974
14	Nias Selatan	6.987	205.357	57.330	-	61	-	269.735
15	Humbahas	8.200	123.000	25.937	-	-	-	157.137
16	Pakpak Barat	19.141	22.003	996	-	-	-	42.140
17	Samosir	2.500	80.001	52.683	-	-	-	135.247
18	Serdang Bedagai	591.119	95.461	22.872	1.442	13.725	18	724.619
19	Batu Bara	397.347	43.295	8.357	523	11.537	-	461.059
20	Sibolga	47.763	51.948	7.335	115	18.832	-	125.993
21	Tanjung Balai	107.295	24.894	6.685	477	21.932	-	161.283
22	Pematang Siantar	103.504	108.996	12.230	551	16.090	-	241.371
23	Tebing Tinggi	87.165	39.724	2.780	6.357	12.750	12	148.776
24	Medan	1.387.758	553.388	107.310	29.789	297.694	3.140	2.374.939
25	Binjai	203.302	30.086	3.856	996	13.710	14	251.950
26	Padang Sidempuan	152.197	31.192	1.089	-	823	-	185.301
27	Padang Lawas	232.249	35.613	20.467	-	5	-	288.334
28	Padang Lawas Utara	186.671	10.384	78	-	-	-	197.133
	Jumlah	9.201.482	3.845.315	903.849	59.053	390.190	3.308	14.349.771

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2010, BPS Sumatera Utara

Populasi penduduk berdasarkan Agama tersebut diambil data pada tahun 2010 dan akan direvisi pada tahun 2015 (secara periodik dilakukan sekali dalam 5 tahun). Namun dari segi jumlah maka Penduduk Sumatera Utara Mayoritas menganut Agama Islam, dan Selanjutnya Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu.

Tabel. 2.47
Jumlah Rumah Ibadah Kabupaten / Kota se Sumatera Utara

No	Kab / Kota	Umat Agama					
		Islam (Masjid + Musala)	Kristen (Gereja)	Katolik (Gereja)	Hindu (Kuil)	Budha (Vihara)	Kong hucu (Klenteng)
1	Nias	183	1.708	219	-	1	-
2	Madina	1.508	71	2	-	1	-
3	Tapanuli Selatan	2.752	245	13	-	1	-
4	Tapteng	410	548	122	-	-	-
5	Taput	170	805	66	-	-	-
6	Toba samosir	81	290	50	-	-	-
7	Labuhan Batu	1.942	475	100	1	11	1
8	Asahan	1.345	342	36	2	6	1
9	Simalungun	1.091	1.112	148	-	3	-

No	Kab / Kota	Umat Agama					
		Islam (Masjid + Musala)	Kristen (Gereja)	Katolik (Gereja)	Hindu (Kuיל)	Budha (Vihara)	Kong hucu (Klenteng)
10	Dairi	288	868	86	2	2	-
11	Karo	340	569	235	6	4	-
12	Deli Serdang	2.633	1.597	148	13	36	-
13	Langkat	2.088	266	60	4	16	-
14	Nias Selatan	16	890	179	-	-	-
15	Humbahas	39	442	98	-	-	-
16	Pakpak Barat	125	90	19	-	-	-
17	Samosir	8	322	123	-	-	-
18	Sergai	2.351	470	147	4	-	-
19	Batu Bara	668	116	27	1	3	-
20	Sibolga	80	47	2	-	7	-
21	Tanjung Balai	334	22	1	-	8	-
22	Pematang Siantar	216	136	5	2	7	-
23	Tebing Tinggi	218	22	1	2	19	-
24	Medan		691	34	22	187	9
25	Binjai	582	36	1	3	14	-
26	P.Sidempuan	379	71	1	-	1	-
	Jumlah	21.933	12.209	1.848	61	323	11

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2011, BPS Sumatera

Mengingat Masyarakat Sumatera Utara mayoritas menganut Agama Islam maka Masjid dan Mushalla merupakan sarana ibadah yang dominan dibanding dengan sarana ibadah lainnya seperti Gereja, Kuil, Vihara maupun Klenteng. Hal ini dapat terlihat dari data yang disajikan dari masing Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 2.48
Organisasi Kemasyarakatan Yang Bercirikan Keagamaan

No	Nama Organisasi
1	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2	Persekutuan Gereja – Gereja Indonesia (PGI)
3	Keuskupan Agung
4	Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)
5	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
6	Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN)

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2012, BPS Sumatera Utara

Majelis – majelis agama yang ada di Sumatera Utara berperan dalam membangun budaya yang damai. Ke enam lembaga tersebut sangat berperan dalam menjalin dan mempererat hubungan antar masyarakat Se - Sumatera Utara.

Tabel. 2.49
Jumlah Konflik Horizontal dan Vertikal Yang dilatarbelakangi Isu Keagamaan

No	Nama Konflik	Tindak Lanjut
1	Keresahan Warga Atas Pembangunan Gereja GKPS di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan	FKUB Kab Asahan Mengadakan Rapat dan Menyerahkan Permasalahan Kepada Pemkab Asahan
2	Keberatan Warga Atas Pembangunan Gereja di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran	FKUB Kab Karo sudah Mengadakan Musyawarah dan masalah sudah teratasi
3	Penolakan MUI Kab Asahan Atas Pembangunan Vihara Meitreyia Jaya di Kelurahan Tebing Kisaran Kota Kisaran	FKUB Kab Asahan sudah meneliti kelengkapan administrasi dan survey dan FKUB merekomendasikan pendirian rumah ibadah, namun Kandepag belum mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah

No	Nama Konflik	Tindak Lanjut
4	Keberatan Warga Atas Kegiatan dan Keberadaan Gereja GBI Antiokhia	FKUB Kota Tebing Tinggi telah melakukan dialog dengan perwakilan warga, selanjutnya FKUB Tebing Tinggi memutuskan untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah maksimal 2 tahun
5	Keberatan Warga Atas Pendirian Rumah Ibadah Gereja HKBP	Pengurus FKUB Kota Binjai dan Dewan Penasehat sepakat penyelesaian masalah diserahkan kepada Pemerintah Kota Binjai
6	Keberatan Masyarakat Atas Ijin Pendirian Bangunan Sebagai Balai Pengobatan tetapi dijadikan tempat rumah ibadah	Permasalahan Masih dalam proses penyelesaian dan akan dibahas kembali pada rapat pengurus FKUB Kota Tanjung Balai
7	Terbakarnya Rumah Pendeta dan Rumah Umat Kristiani di Kecamatan Barumon	Muspida Plus Telah menyelesaikan permasalahan dan pemerintah memfasilitasi kebebasan beribadah bagi umat kristiani dan mencari lokasi tempat ibadah dan memenuhi prosedur yang berlaku
8	Keberatan Warga Atas Pendirian Rumah Ibadah Kuil Balaji Venkateswara Padang Bulan Selayang	FKUB Kota Medan telah menyelesaikan permasalahan
9	Insiden Yang Dilakukan Massa Pendukung Pembentukan Protap sehingga Ketua DPRD Provsu Meninggal Dunia	Pengurus FKUB Sumut dengan sigap dan segera menyatakan sikap dan kesepakatan bahwa peristiwa tersebut bukanlah masalah antar agama melainkan tindakan kriminal.
10	Keberatan Warga Atas Renovasi Gereja HKBP Dusun III Sukarela Timur Desa Laugendang Kec Percut Sei Tuan	Permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian FKUB Deli Serdang
11	Tuntutan Masyarakat Agar Pemindahan Patung Amithaba di Vihara Tri Ratna Tanjung Balai	Permasalahan telah diserahkan kepada Kanwil Kementerian Sumut dan Pemerintah Kota Tanjung Balai
12	Protes Masyarakat Hindu dan PHDI Atas Pemuatan Gambar Dewa Ganesha dan Krisna di Sandal	Belum ada penyelesaian permasalahan dimaksud
13	Pelemparan Masjid Yang Berakibat Terbakarnya Kios merangkap Bengkel Sepeda Motor di Asahan	Telah diselesaikan Pemda setempat bersama FKUB namun pelaku pelemparan masih dalam urusan yang berwajib
14	Pelemparan Masjid Al – Barokah dan Pembakaran 7 Unit Rumah serta Merusak Tanaman Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan	-
15	Pembakaran Masjid di Lumbanlobu Tobasa	FKUB Provsu dan FKUB Tobasa telah melakukan mediasi sehingga masyarakat tidak terpancing
16	Peggunaan Ruko dan Plaza Sebagai tempat Ibadah yang tidak mempunyai ijin	Melanggar Ketentuan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
17	Penyebaran Buku yang bernuansa pelecehan dan penodaan suatu agama di Medan dan Kab Lab Batu.	Seorang Pelau ditangkap
18	Terbakarnya dua buah masjid di desa Aek Loba Kab Asahan	Masih Dalam Proses Penyelesaian

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2012, BPS Sumatera Utara

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa walaupun secara umum kondisi kerukunan intern dan antar umat beragama di Sumut kondusif dan terkendali, namun masih ada juga faktor-faktor pemicu perselisihan yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa khususnya wilayah Sumatera Utara.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Secara umum dari data Angka Partisipasi Sekolah pada usia 1-12 tahun (SD dan SLTP) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 terungkap bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) murid SD/MI sebesar 98,33% dan APS usia 13-15 tahun (SMP/MTs) sebesar 89,10%, yang berarti terjadi penurunan APS dari jenjang sekolah dasar

ke sekolah lanjutan pertama. Terjadinya penurunan APS ini perlu untuk dicermati dalam rangka mendukung pencaian misi Wajib Belajar 12 tahun (murid dapat menamatkan jenjang pendidikan dari mulai SD sampai SLTA).

b). Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel. 2.50
Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas
Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2008-2012

NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
A.	Jumlah Gedung Sekolah					
1	SD	9,136	8,968	8,050	10,292	8,172
2	SMP	1,530	1,627	1,873	2,230	2,040
3	SMA	911	935	861	950	869
4	SMK	619	692	681	834	678
B.	Jumlah Ruang Kelas					
1	SD	65,729	64,233	48.005	68,268	61,255
2	SMP	14,407	14,781	26.997	17,010	17,807
3	SMA	9,045	8,714	7.745	9,445	9,188
4	SMK	5,362	6,067	5.777	6,639	6,467
C.	Ratio Kelas/Sekolah					
1	SD	7.19	7.16	5.96	6.63	7.49
2	SMP	9.42	9.08	14.40	7.62	8.72
3	SMA	9.93	9.32	8.99	9.94	10.57
4	SMK	8.66	8.77	8.48	7.96	9.53

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkat SMP, SMA dan SMK selama tahun 2008-2012. Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

c). Rasio guru/murid

Tabel. 2.51
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008-2012 Provinsi Sumatera Utara

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	92.897	95.397	94.441	102.510	99.927
1.2.	Jumlah Murid	1.920.660	1.939.865	1.959.265	1.287.472	1.656.909
1.3.	Rasio	20%	22%	22%	24%	17%
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	54.161	55.966	34.334	59.002	45.951
2.2.	Jumlah Murid	896.593	936.039	962.689	428.575	569.581
2.3.	Rasio	12	12	12	12	12
3	SMA					
3.1.	Jumlah Guru	17.200	18.358	18.335	22.610	22.183
3.2.	Jumlah Murid	334.833	321.066	398.100	222.200	272.042
3.3.	Rasio	13	13	13	12	12
4	SMK					
4.1.	Jumlah Guru	16.066	17.100	11.726	16.019	18.374
4.2.	Jumlah Murid	310.000	300.500	300.092	220.074	234.983
4.3.	Rasio	11	12	20	30	13

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Murid/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang murid untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

d) Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah murid terhadap sekolah, perbandingan murid terhadap jumlah kelas, perbandingan murid terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.52
Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan
Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD					
	Murid / Sekolah	200	2.06	2.15	1.99	202
	Murid / Kelas	28	29	30	32	27
	Murid / Guru	19	20	18	17	17
	Kelas / Sekolah	7.19	7.16	7.15	6.19	7.49
	Kelas / Guru	0.67	0.69	0.61	0.53	0.61
	Guru / Sekolah	11	10	12	12	12
2	SMP					
	Murid / Sekolah	3.57	3.49	3.09	2.48	279
	Murid / Kelas	38	38	36	29	32
	Murid / Guru	12	12	15	13	12
	Kelas / Sekolah	9.42	9.08	8.59	8.66	8.72
	Kelas / Guru	0.32	0.31	0.41	0.44	0.39
	Guru / Sekolah	30	29	21	19	22
3	SMA					
	Murid / Sekolah	3.63	3.44	0.43	3.08	313
	Murid / Kelas	37	37	35	34	30
	Murid / Guru	13	12	12	11	12
	Kelas / Sekolah	9.93	9.32	9.69	9.12	10.57
	Kelas / Guru	0.36	0.33	0.34	0.33	0.41
	Guru / Sekolah	28	28	28	27	26
4	SMK					
	Murid / Sekolah	3.49	3.56	0.57	3.41	346
	Murid / Kelas	40	41	39	35	36
	Murid / Guru	11	12	12	13	13
	Kelas / Sekolah	8.66	8.77	9.18	9.78	9.53
	Kelas / Guru	0.27	0.29	0.3	0.37	0.35
	Guru / Sekolah	32	30	30	26	27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Murid/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang murid untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

e). Sarana dan Prasarana Belajar

Permasalahan ketersediaan sarana belajar merupakan masalah umum yang terjadi di dunia pendidikan. Provinsi Sumatera Utara sebenarnya telah berusaha terus meningkatkan ketersediaan sarana belajar ini dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung. Pencapaian sarana dan prasarana belajar menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel. 2.53
Sarana dan Prasarana Belajar SD, SMP dan SMA/SMK Tahun 2008-2012

SD	2008	2009	2010	2011	2012
Fasilitas Sekolah		n/a	n/a	n/a	8,898
Ruang	50,320	n/a	n/a	n/a	55,327
Perpus-takaan	590	n/a	n/a	n/a	3,113
Lap. OR	2,597	n/a	n/a	n/a	3,276
UKS	1,902	n/a	n/a	n/a	2,540
Laboratorium		n/a	n/a	n/a	
Ruang Keterampilan		n/a	n/a	n/a	
BP		n/a	n/a	n/a	
Ruang Serbaguna		n/a	n/a	n/a	
Tempat Ibadah		n/a	n/a	n/a	1,161
Toilet		n/a	n/a	n/a	16,332
Air Bersih		n/a	n/a	n/a	4,310
Listrik		n/a	n/a	n/a	5,363
Lainnya	48	n/a	n/a	n/a	

SMP	2008	2009	2010	2011	2012
Fasilitas Sekolah		n/a	n/a	n/a	2,235
Ruang	60,423	n/a	n/a	n/a	17,771
Perpus-takaan	974	n/a	n/a	n/a	1,063
Lap. OR	838	n/a	n/a	n/a	708
UKS	342	n/a	n/a	n/a	509
Laboratorium	4,335	n/a	n/a	n/a	1,655
Ruang Keterampilan		n/a	n/a	n/a	-
BP		n/a	n/a	n/a	-
Ruang Serbaguna		n/a	n/a	n/a	-
Tempat Ibadah		n/a	n/a	n/a	751
Toilet		n/a	n/a	n/a	6,470
Air Bersih		n/a	n/a	n/a	1,329
Listrik		n/a	n/a	n/a	1,427
Lainnya	2,119	n/a	n/a	n/a	

SMA	2008	2009	2010	2011	2012
Fasilitas Sekolah		n/a	n/a	n/a	932
Ruang	9595	n/a	n/a	n/a	8,516
Perpus-takaan	397	n/a	n/a	n/a	709
Lap. OR	224	n/a	n/a	n/a	312
UKS	123	n/a	n/a	n/a	323
Laboratorium	803	n/a	n/a	n/a	1,817
Ruang Keterampilan	161	n/a	n/a	n/a	133
BP	241	n/a	n/a	n/a	434
Ruang Serbaguna	119	n/a	n/a	n/a	249
Tempat Ibadah		n/a	n/a	n/a	430
Toilet		n/a	n/a	n/a	5,260
Air Bersih		n/a	n/a	n/a	721
Listrik		n/a	n/a	n/a	745
Lainnya	123	n/a	n/a	n/a	

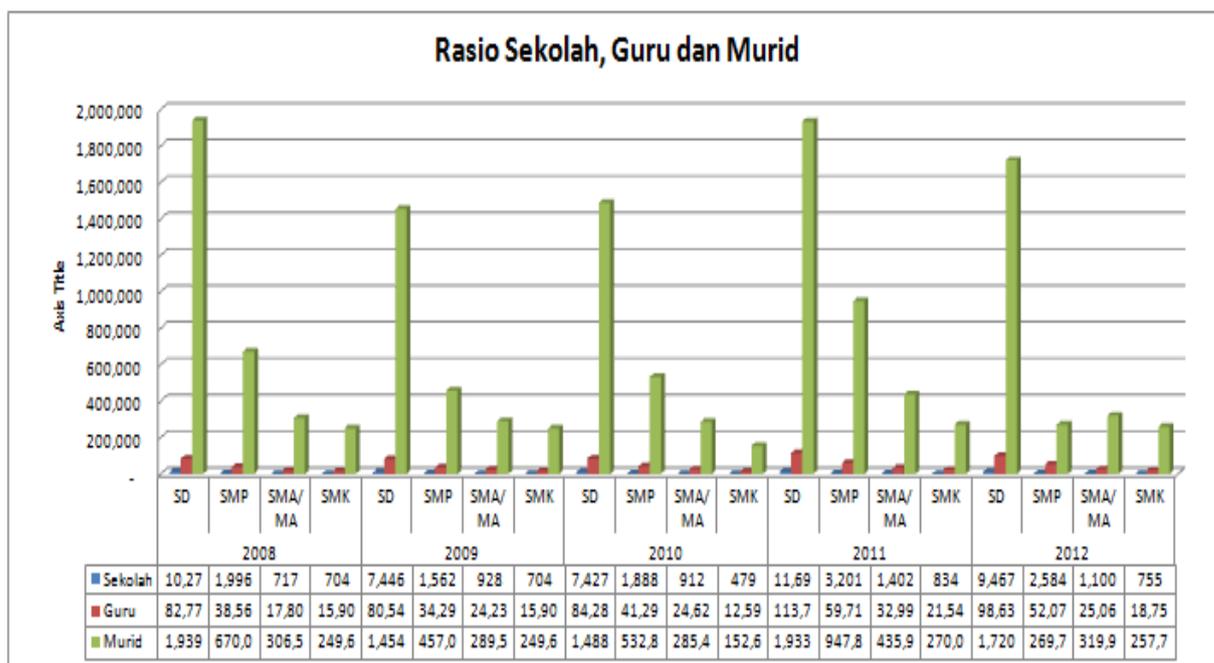
SMK	2008	2009	2010	2011	2012
Fasilitas Sekolah		n/a	n/a	n/a	
Ruang	5,700	n/a	n/a	n/a	6,286
Perpus-takaan	361	n/a	n/a	n/a	418
Lap. OR	213	n/a	n/a	n/a	352
UKS	161	n/a	n/a	n/a	223
Laboratorium	371	n/a	n/a	n/a	1,234
Ruang Keterampilan	206	n/a	n/a	n/a	145
BP	173	n/a	n/a	n/a	415
Ruang Serbaguna	164	n/a	n/a	n/a	200
Tempat Ibadah		n/a	n/a	n/a	419
Toilet		n/a	n/a	n/a	2,941
Air Bersih		n/a	n/a	n/a	711
Listrik		n/a	n/a	n/a	830
Bengkel	313	n/a	n/a	n/a	n/a
R. Praktik	473	n/a	n/a	n/a	n/a
Lainnya	142	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran masih belum merata khusus untuk ruang kelas, kelengkapan Laboratorium , toilet, tempat ibadah dan sarana air bersih di setiap jenjang tingkatan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

f) Rasio Sekolah, guru dan siswa

Secara umum jumlah sekolah yang tersebar di seluruh kabupten/kota di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup banyak di tiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2. 20.
Rasio Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2008-2012
Sumber : BPS, Sumut Dalam Angka, 2013

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi ketidak seimbangan antara jumlah sekolah, guru dan siswa. Dimana dalam setiap 1 (satu) sekolah mempunyai lebih dari 150 orang siswa untuk Sekolah Dasar (SD) 300 siswa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 350 siswa untuk Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) dan 350 siswa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Begitu juga untuk kapasitas guru dimana setiap 1 orang guru harus memberikan pengajaran kepada 30 siswa SD, 20 siswa SMP, 18 siswa SMA dan 23 siswa SMK. Jumlah siswa yang lebih besar daripada jumlah sekolah maupun guru menjadi permasalahan yang sangat penting.

Tabel. 2.54

Rasio Sekolah, guru dan siswa per kabupaten/kota Tahun 2012

Kabupaten/kota	Sekolah	Guru	Siswa	Rasio		
				Siswa-Sekolah	Siswa-Guru	Sekolah-Guru
Nias	1,294	10,268	191,736	148	19	8
Mandailing Natal	1,592	20,640	293,572	184	14	13
Tapanuli Selatan	1,622	14,089	284,593	175	20	9
Tapanuli Tengah	1,542	15,878	222,125	144	14	10
Tapanuli Utara	1,516	16,235	240,902	159	15	11
Toba Samosir	913	11,409	149,009	163	13	12
Labuhan Batu	1,957	20,797	433,869	222	21	11
Asahan	2,403	21,808	537,926	224	25	9
Simalungun	3,292	39,075	533,972	162	14	12
Dairi	358	14,295	235,522	658	16	40
Karo	1,171	17,480	226,848	194	13	15
Deli Serdang	3,040	64,691	1,111,868	366	17	21
Langkat	2,760	39,774	284,065	103	7	14
Nias Selatan	1,881	11,440	266,502	142	23	6
Humbang Hasundutan	873	10,261	160,142	183	16	12
Pakpak Bharat	272	4,069	37,780	139	9	15
Samosir	764	7,638	111,410	146	15	10
Serdang Bedagai	1,947	21,657	352,263	181	16	11
Batu Bara	1,115	14,737	201,588	181	14	13
Padang Lawas Utara	920	7,419	139,690	152	19	8
Padang Lawas	316	4,820	98,759	313	20	15
Labuhan Batu Selatan	589	7,141	120,011	204	17	12
Labuhan Batu Utara	448	5,687	76,745	171	13	13
Nias Utara	485	6,168	70,747	146	11	13
Nias Barat	324	4,800	30,855	95	6	15
Sibolga	203	4,538	89,702	442	20	22
Tanjung Balai	417	6,916	115,438	277	17	17
Pematang Siantar	798	15,901	247,117	310	16	20
Tebing Tinggi	469	7,988	119,381	255	15	17
Medan	3,755	92,342	1,526,249	406	17	25
Binjai	792	14,041	201,356	254	14	18
Padangsidempuan	480	11,214	163,012	340	15	23
Gunung Sitoli	249	4,270	48,393	194	11	17

Sumber : BPS, Sumut Dalam Angka, 2013 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kecilnya angka partisipasi sekolah terjadi untuk wilayah kabupaten/kota pemekaran seperti Nias Barat yang hanya memiliki 324 Sekolah dengan kapasitas guru sebanyak 4.800 orang dan 30.855 siswa mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA/MA dan SMK dengan rasio setiap 1 sekolah memiliki 95 orang siswa dengan jumlah guru sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di Kabupaten Nias Barat masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 82.701 jiwa (SUDA, 2013). Begitu juga dengan beberapa kabupaten/kota lain seperti Langkat dan Nias Utara.

Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berupaya menaikkan angka partisipasi sekolah di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara.

g). Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru dilihat berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki. Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2. Dari data tabel dibawah terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan sehingga dalam lima tahun terakhir (2008-2012) terjadi peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S2.

Tabel. 2.55
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2008-2012

No	Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	16,259	22	19,136	24	204.006	65	22.446	71	40.605	192
2	SMP	32,795	248	34,793	580	21.825	148	24.007	162	36.170	358
3	SMA	19,205	188	20,648	517	15.290	364	16.819	400	22.183	736
4	SMK	13,590	60	14,145	63	10.013	90	11.014	99	15.531	739
	Jumlah	81,849	518	88,722	1,184	251.134	667	74.286	732	114.489	2.025

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Untuk penyebaran guru dengan kualifikasi jenjang pendidikan mulai dari SD hingga kepada S3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah berusaha meningkatkan kualifikasi guru untuk daerah – daerah tertinggal, seperti Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Pakpak Bharat, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.56
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi untuk daerah tertinggal Tahun 2011

No.	Kab/Kota	SD	SMA	SMP	D1	D2	D3	S1	S2	Jlh
1	Nias	7	2.294	40	12	602	101	694		3.750
2	Nias Barat	8	1.226	12	7	552	138	474	1	2.418
3	Nias Selatan		5.303	42	41	1.107	270	1.314	11	8.088
4	Nias Utara	22	2.113	50	22	852	114	586	4	3.763
5	Pakpak Bharat	4	939	19	22	277	67	534	8	1.870

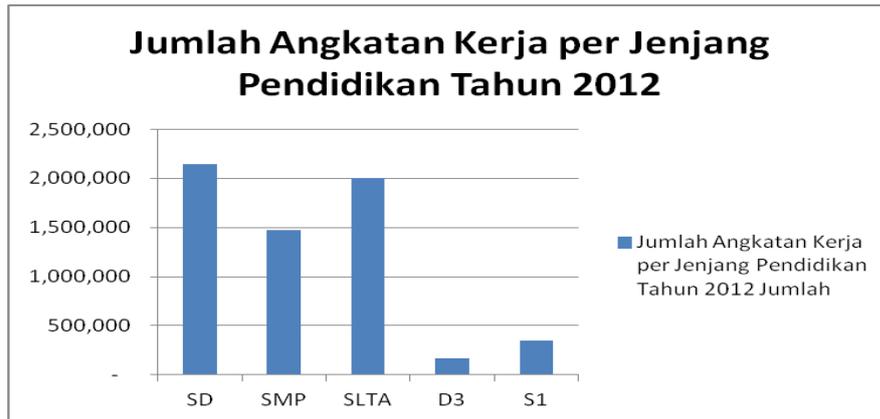
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebaran guru dengan tingkat kualifikasi Sarjana (S1) masih terkonsentrasi di wilayah kota besar seperti Kota Medan sebesar 24,664 guru disusul oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar 14,404 guru. Sedangkan untuk daerah – daerah tertinggal mengalami permasalahan kekurangan guru dengan kualifikasi Sarjana (S1) seperti Nias Barat (474 guru), Pakpak Bharat (534 guru) dan Nias Utara (586 guru). Dimana tentu hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penyebaran guru dengan strata Sarjana (S1) agar bisa merata ke seluruh Provinsi Sumatera Utara.

h). Ratio jenjang pendidikan dan angkatan kerja

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara secara umum cukup besar, namun secara kualitas, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Hal ini dikarenakan kontribusi terbesar dalam angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh tenaga kerja dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 2.140.625 orang, sehingga hal ini menjadikan para pekerja tersebut tidak mempunyai kreativitas dan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus berupaya menaikkan mutu pendidikan sehingga para pekerja mempunyai kreativitas dan produktivitas yang lebih baik dan mampu bersaing pada lapangan kerja yang menjanjikan.



Grafik 2. 21.
 Jumlah Angkatan Kerja per Jenjang Pendidikan Tahun 2012
 Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, 2012

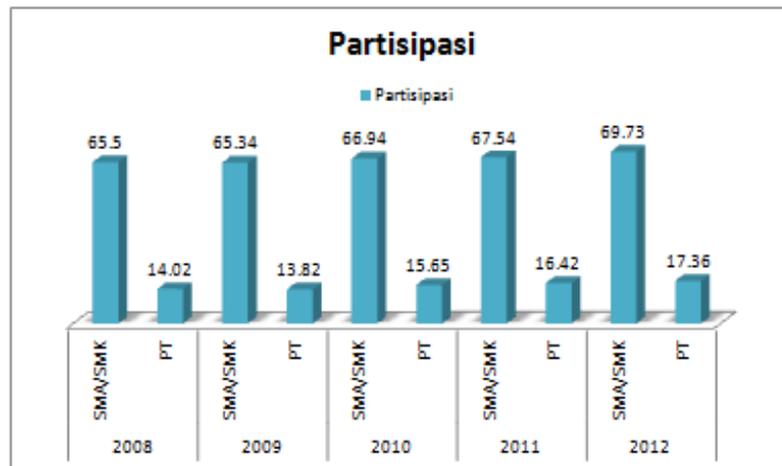
i). Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan Tinggi

Dewasa ini, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, misalnya pada kasus - kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut bersumber dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan ini.

Dalam pengimplementasian kurikulum 2013 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah ikut aktif merealisasikannya ke sekolah Negeri dan Swasta dengan melibatkan para guru dalam kegiatan sosialisasi kurikulum 2013 baik yang diadakan di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga saat ini tercatat sebanyak 10 SD dan 5 SMP telah memasukkan kurikulum 2013 ke dalam pengembangan pembelajaran.

Begitu juga dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dengan mengintegrasikan seluruh ketentuan yang terdapat di dalam implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) ke dalam Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Menengah Kejuruan.

Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Utara mengalami permasalahan yang cukup serius. Hal ini dikarenakan masih rendahnya angka partisipasi sekolah dari jenjang SMA/SMK ke tingkat Perguruan Tinggi.



Grafik 2. 22.

Partisipasi SMA/SMK ke Perguruan Tinggi Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Secara umum, terjadi kenaikan persentase jumlah partisipan Perguruan Tinggi namun bila melihat persentase siswa SMA/SMK yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi akan terlihat penurunan yang sangat signifikan. Melalui pengembangan program Pendidikan Menengah Universal, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berupaya untuk menaikkan jumlah partisipasi siswa jenjang SMA/SMK ke Perguruan Tinggi.

Selain daripada itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan komitmen yang dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, pengembangan perguruan tinggi, pola pengembangan perguruan tinggi dan tanggung jawab pendanaan pendidikan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berusaha untuk ikut aktif dalam mengimplementasikan amanat yang sudah diberikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini, dengan mengeluarkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung, seperti; pemberian bantuan penelitian ilmiah, penulisan jurnal, peningkatan sarana prasarana, workshop kewirausahaan bagi mahasiswa dll, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.57
Kerjasama Provinsi & Akademisi Tahun 2008-2012

Program Pendidikan Tinggi	2008	2009	2010	2011	2012
Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Dosen PTN/PTS	87 judul	90 judul	- judul	90 judul	- judul
Penerapan Hasil Penelitian pada Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)	-	34 tim	- tim	34 tim	- tim
Penulisan Buku Ajar bagi Dosen PTN/PTS	-	102 judul	- judul	102 judul	- judul
Peningkatan Peralatan Laboratorium Bahasa PTN/PTS	-	-	2 PTN/PTS	8 PTN/PTS	-
Peningkatan Alat Peraga Pendidikan Kesehatan PTN/PTS	16 PTN/PTS	-	2 PTN/PTS	-	-
Peningkatan Peralatan Laboratorium Teknik	8 PTN/PTS	-	31 PTN/PTS	-	-
Peningkatan Peralatan Laboratorium Biologi	-	-	- PTN/PTS	22 PTN/PTS	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan PTN/PTS	21 PTN/PTS	-	- PTN/PTS	42 PTN/PTS	20 PTN/PTS
Penerbitan Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi	1,800 exmp	1,800 exmp	1,800 exmp	1,800 exmp	2,100 exmp
Workshop Metode Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah bagi Dosen PTN/PTS	180 Orang				
Penyediaan Beasiswa Studi ke S2 bagi dosen PTN/PTS	-	-	-	-	-
Penyediaan Beasiswa Studi ke S3 bagi dosen PTN/PTS	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kegiatan Organisasi Mahasiswa PTN/PTS	31 organisasi	29 organisasi	32 organisasi	30 organisasi	46 organisasi
Workshop Kewirausahaan Mahasiswa PTN/PTS	60 Orang	60 Orang	- Orang	120 Orang	- Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat dari jumlah tenaga pengajar di tingkat perguruan tinggi hingga tahun 2012 sebanyak 1.068 tenaga pengajar, maka kerjasama dengan pihak akademisi masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

2.3.1.2. Kesehatan

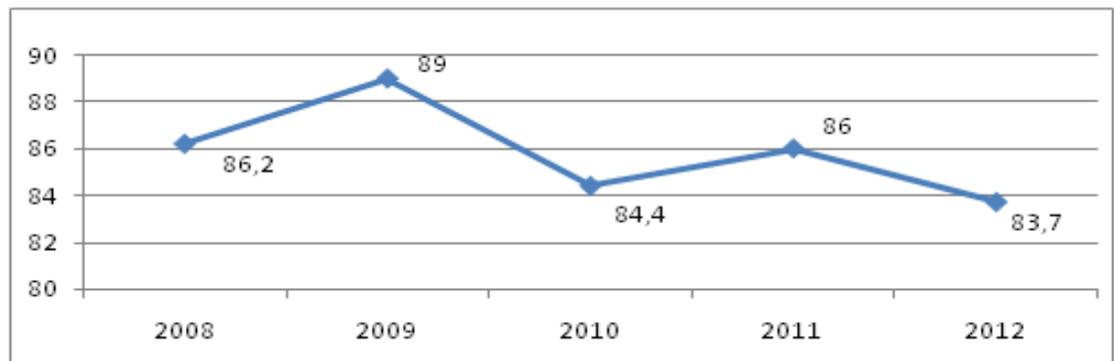
SPM Bidang Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, sedangkan pada tingkat Provinsi belum ada petunjuk yang menjadi acuan.

Dengan demikian, tidak semua indikator SPM bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjadi indikator dalam Indikator Kinerja bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun indikator SPM yang menjadi indikator Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

1) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2008-2012 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2009, cakupan indikator ini mencapai 89% namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 5%. Pada tahun 2011, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (nakes) ini mampu ditingkatkan sekitar 1,5%, namun pada tahun 2012 kembali turun menjadi 83,7%, yaitu dari 294.244 sasaran ibu hamil di Sumatera Utara yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 246.393 orang atau 83,7%. seperti yang tergambar pada grafik berikut :

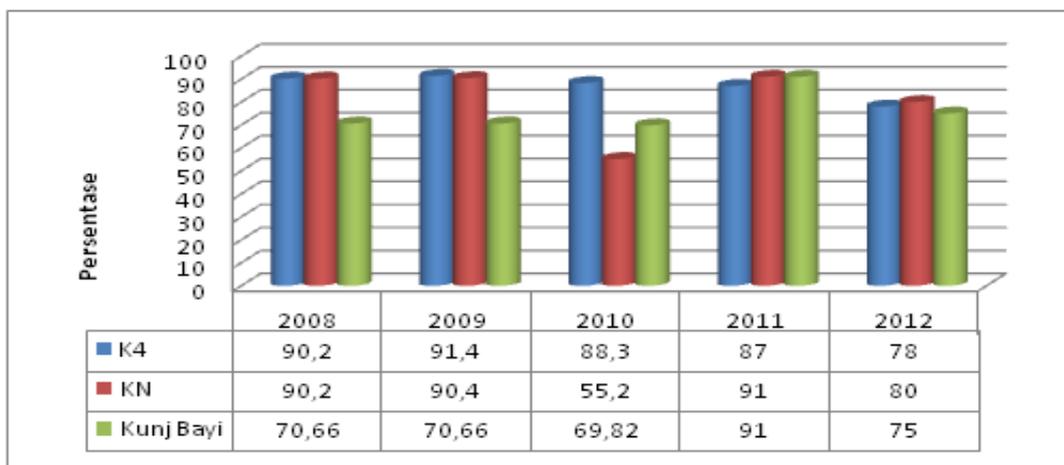


Grafik 2. 23.

Persentase Persalinan yang Ditangani Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2008-2012

2) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi

Dibandingkan tahun 2011, pencapaian cakupan Kunjungan ibu hamil (*antenatal care*) minimal 4 kali ibu (K4) selama masa kehamilan, Kunjungan Nifas (KN) lengkap dan kunjungan bayi mengalami penurunan pada tahun 2012. Penurunan tertinggi terjadi pada indikator kunjungan bayi dimana turun hampir 20%, perkembangan persentase *antenatal care* (K4), KN lengkap dan Kunjungan bayi seperti yang tergambar pada grafik berikut ini.



Grafik 2. 24.
 Persentase *Antenatal Care* (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2008 – 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2008-2012

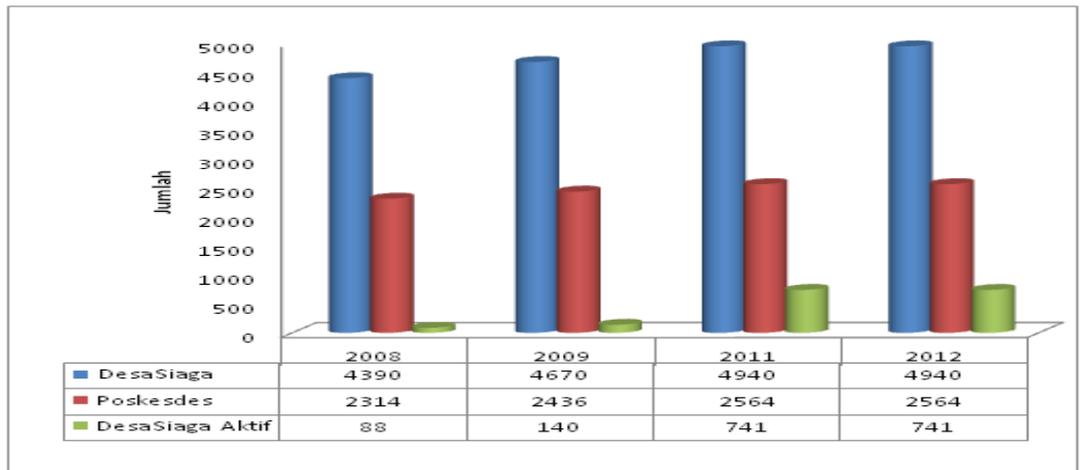
Selama kurun waktu 2008-2012, cakupan K4 ibu hamil menunjukkan trend penurunan yaitu turun sekitar 12% dari 90,2% pada tahun 2008 menjadi 78% pada tahun 2012. Cakupan KN lengkap turun sekitar 10% yaitu dari 90,2% tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2012, dilain pihak kunjungan bayi pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2010, namun kembali turun secara drastis juga sehingga hanya mencapai 75% di tahun 2012.

Pada tahun 2012, dari 308.272 sasaran ibu hamil, yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4) adalah sebanyak 243.240 ibu hamil (78%). Untuk pelayanan neonatal, dari 281.973 sasaran bayi sebanyak 225.105 bayi (80%) mendapatkan pelayanan neonatal lengkap (KN3) dan melakukan kunjungan bayi yaitu yang mendapatkan pemeriksaan minimal 4x selama setahun adalah sebanyak 212.441 bayi (75%). Dan dari 281.973 bayi yang lahir hidup terdapat sebanyak 533 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) atau 0,19%. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus BBLR pada tahun 2011 yaitu 743 bayi dan tahun 2010 yaitu 773 bayi, maka terjadi penurunan di tahun 2012.

3) Cakupan desa siaga aktif

Jumlah Desa Siaga, poskesdes dan Desa Siaga Aktif mengalami peningkatan kurun waktu 2009-2011. Namun penambahan Desa Siaga tidak diikuti dengan pembangunan poskesdes, sehingga jumlah Desa Siaga yang ada lebih banyak dari jumlah poskesdes, seharusnya setiap Desa Siaga memiliki Poskesdes.

Pada tahun 2009-2010, Desa Siaga bertambah sebanyak 280 unit namun poskesdes hanya bertambah 122 unit. Pada tahun 2011, Desa Siaga bertambah 270 unit namun penambahan poskesdes hanya 128 unit. Kesenjangan dalam pembentukan Desa Siaga dan pembangunan poskesdes menyebabkan persentase Desa Siaga dengan poskesdes menurun dari 55% pada tahun 2010 menurun menjadi 52% pada tahun 2011. Di lain pihak, persentase Desa Siaga aktif meningkat secara tajam, yaitu dari 3% pada tahun 2010 menjadi 15% pada tahun 2011. Untuk tahun 2012, angka pencapaian masih menggunakan angka pada tahun 2011.



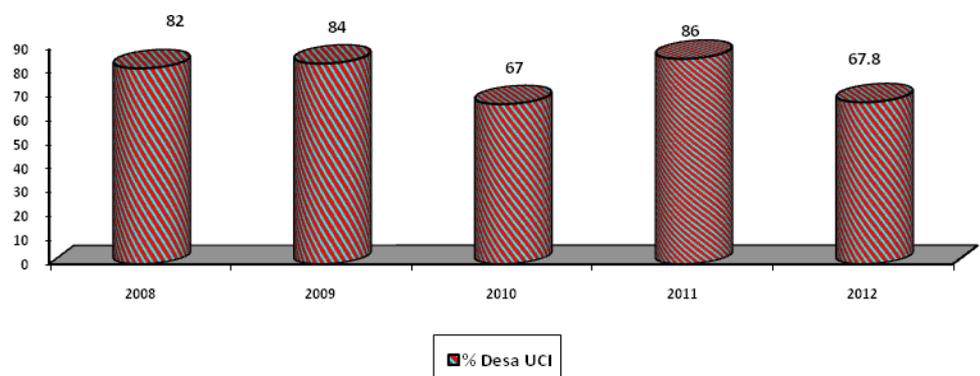
Grafik 2. 25.
 Jumlah Desa Siaga, Poskesdes dan Desa Siaga Aktif
 Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

4) Cakupan balita gizi buruk

Pada tahun 2012, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 746 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 375 kasus.

5) Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Persentase desa yang mencapai imunisasi lengkap pada anak hingga usia sekolah kelas 6 SD di Sumatera Utara mengalami fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada tahun 2005-2007, persentase desa UCI berada dibawah angka 80%. Pada tahun 2008-2009, persentase desa UCI diatas angka 80% sehingga mampu mencapai target nasional yaitu 80%. Namun, pada tahun 2010, mengalami penurunan yang sangat tajam lebih dari 15% sehingga menjadi 67%. Tahun 2011, persentase desa UCI dapat ditingkatkan mencapai hampir 20% menjadi 86%, namun kembali mengalami penurunan hampir 20% sehingga hanya mencapai 67,8% pada tahun 2012. Pencapaian ini tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80% pada tahun 2012.



Grafik 2. 26.
 Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
 Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2011

Fluktuatifnya pencapaian desa UCI ini menunjukkan masih belum mantapnya dalam manajemen program imunisasi di kabupaten/kota dan puskesmas, sehingga desa-desa UCI pada tahun sebelumnya tidak mampu dipertahankan. Perlu adanya penguatan manajemen program imunisasi sampai ke tempat pelayanan terkecil, sehingga mampu mencegah Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB PD3I) di Sumatera Utara.

6) Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2011, terjadi 36 kasus KLB dan 31 kasus diantaranya (85%) dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam. Pencapaian ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 85%, namun bila dibandingkan dengan tahun 2010, mengalami penurunan sebesar 5% dari 90%.

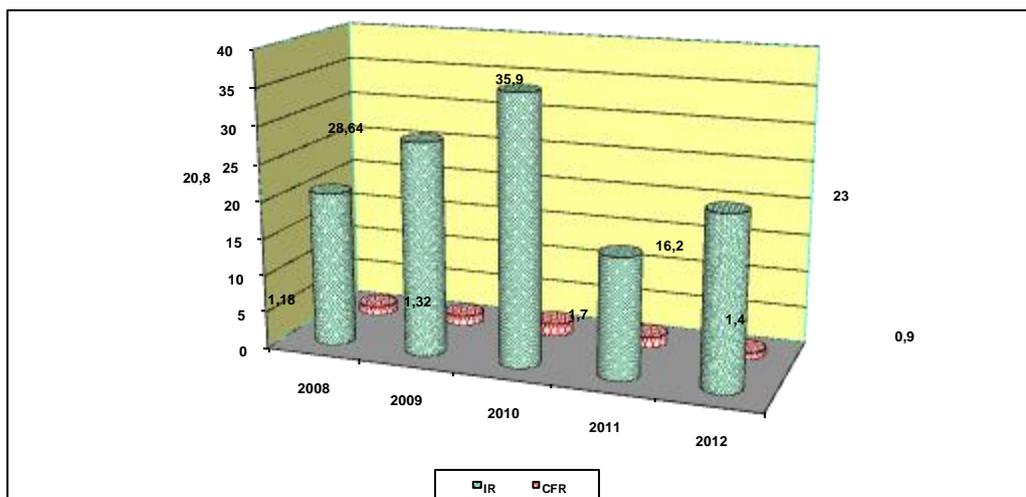
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam di wilayah KLB umumnya telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kabupaten/kota yang masih terlambat dalam melaporkan kejadian KLB sehingga penyelidikan epidemiologi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 24 jam setelah KLB terjadi.

Kasus KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam, disamping indikator SPM Bidang Kesehatan, ini juga menjadi kinerja pelayanan Kesehatan dalam mencapai Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Angka Kesakitan (IR) DBD di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan kurun waktu 2008-2010. Peningkatan IR DBD begitu tajam sekitar 9% setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IR mencapai diatas 35% dengan jumlah penderita yang ditemukan sebanyak 8.889 orang. Pada tahun 2011, IR DBD turun secara drastis menjadi 16,2% dengan jumlah penderita sebanyak 5.545 orang.

Namun, bila dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu tahun 2011 yaitu 35/100.000 penduduk, maka hasil capaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan, dan bila dibandingkan dengan target IR DBD Nasional yaitu < 5/100.000 penduduk maka angka kesakitan DBD di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi.

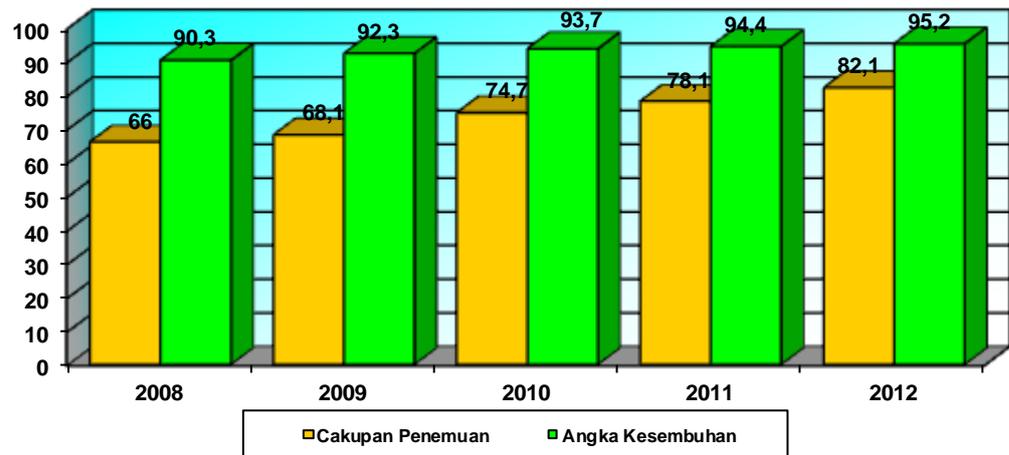


Grafik 2. 27.
 Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD
 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012
 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Di sisi lain angka CFR (*Case Fatality Rate*) DBD menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2008, dan pencapaian tertinggi pada tahun 2010 yaitu 1,7%. Pada tahun 2012, pencapaian CFR DBD sudah mampu diturunkan menjadi 0,9% dan mampu mencapai target nasional yaitu < 1%. Ini menunjukkan kecepatan dan penanganan kasus penderita DBD sudah mampu ditingkatkan.

8) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2. 28.

Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008–2012

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Pada tahun 2012, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 17.776 kasus atau 82,1% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.664 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Pencapaian tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yaitu 78,1% dan tahun 2010 yaitu 74,7%.

Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2012. Dan sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2008 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.

2.3.1.3. Pekerja Umum

2.3.1.3.1 Jalan dan Jembatan

- a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

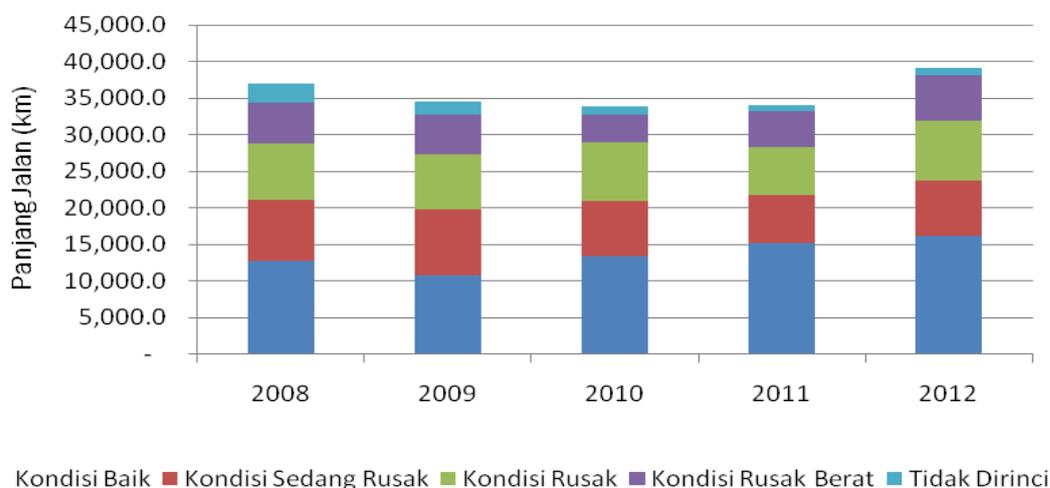
Infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 39.125,305 kilometer yang terdiri dari ruas jalan Nasional sepanjang 2.232,770 kilometer (tidak termasuk jalan tol sepanjang 40 kilometer), ruas jalan Provinsi sepanjang 3.048,500 kilometer, dan ruas jalan Kabupaten/Kota sepanjang 33.844,037 kilometer. Hingga tahun 2012, proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah 66,59% sedangkan proporsi panjang jalan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) adalah 58,46 %.

Secara keseluruhan, kondisi jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2012 yang berada dalam kondisi mantap adalah 60,82% dari total panjang jalan 39.125,305 kilometer.

Tabel. 2.58
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 – 2012

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kondisi Baik	12.728,620	10.834,004	13.371,323	15.219,543	16.237,987
2.	Kondisi Sedang	8.393,990	8.934,845	7.641,081	6.533,052	7.556,860
3.	Kondisi Rusak	7.758,830	7.631,611	7.965,376	6.524,464	8.038,869
4.	Kondisi Rusak Berat	5.473,060	5.331,344	3.761,239	4.870,129	6.253,169
5.	Tidak Dirinci	2.611,970	1.843,690	1.135,220	962,230	1.038,420
6.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	36.966,470	34.575,494	33.874,239	34.109,418	39.125,305

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)



Grafik 2. 29.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 – 2012
Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)

Grafik diatas menggambarkan peningkatan kondisi ruas jalan dalam kondisi baik namun kondisi ruas jalan rusak dan rusak berat yang memerlukan penanganan masih cukup signifikan. Sementara itu, kondisi ruas jalan kabupaten/kota pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.59
Panjang Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 – 2012

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (Km)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kondisi Baik	1166,79	1291,48	1124,36	1213,84	1272,29
2.	Kondisi Sedang	769,04	722,55	1045,92	862,03	757,43
3.	Kondisi Rusak Ringan	232,36	200,33	262,38	369,40	518,10
4.	Kondisi Rusak Berat	584,85	262,33	320,38	306,77	500,23
	TOTAL	2752,04	2752,04	2752,04	2752,04	3048,50

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Data diolah)

Jembatan yang berada dalam jaringan jalan provinsi berjumlah 937 buah dengan panjang keseluruhan 13.280,10 meter. Dari keseluruhan panjang jembatan yang ada, 81,30% dalam kondisi baik.

Tabel. 2.60
Panjang Jembatan Provinsi di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 - 2012

NO	KONDISI	JUMLAH JEMBATAN (Unit)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kondisi Baik	695	730	744	765	715
2.	Kondisi Sedang	124	111	109	95	173
3.	Kondisi Rusak	91	84	74	63	48
4.	Kondisi Sedang Dibangun	-	1	11	1	1
	TOTAL	910	926	938	924	937
	PANJANG JEMBATAN (m)	13.652,6	14.049,6	14.254,3	14.136,5	13.280,1

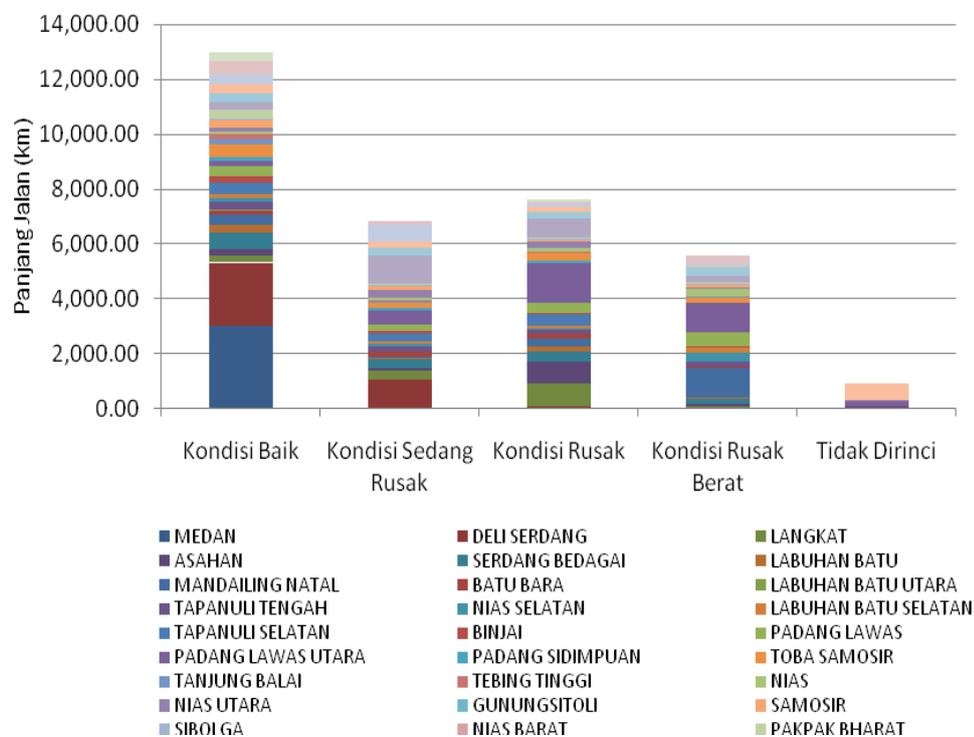
Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Data diolah)

Tabel. 2.61
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

NO	KABUPATEN/ KOTA	KONDISI BAIK	KONDISI SEDANG	KONDISI RUSAK	KONDISI RUSAK BERAT	TIDAK DIRINCI	JALAN SECARA KESELURUHAN
1	Medan	2,980.200	15.800	20.100	1.300	-	3,017.400
2	Deli Serdang	2,320.062	1,000.826	39.520	12.532	-	3,372.940
3	Langkat	245.830	319.310	807.300	40.400	-	1,412.840
4	Asahan	261.610	129.870	821.650	90.310	47.770	1,351.210
5	Serdang Bedagai	592.123	315.071	344.276	212.480	-	1,463.950
6	Labuhan Batu	262.000	16.830	209.210	33.820	-	521.860
7	Mandailing Natal	368.650	48.450	275.050	1,095.420	-	1,787.570
8	Batu Bara	164.665	191.540	189.850	8.050	-	554.105
9	Labuhan Batu Utara	37.626	-	-	-	-	37.626
10	Tapanuli Tengah	264.554	199.803	143.239	190.230	-	797.826
11	Nias Selatan	147.650	112.150	23.670	338.000	-	621.470
12	Labuhan Batu Selatan	160.950	93.550	103.200	171.110	-	528.810
13	Tapanuli Selatan	397.320	267.830	440.720	42.880	-	1,148.750
14	Binjai	239.612	66.167	38.971	10.855	-	355.605

15	Padang Law as	364.960	274.640	379.580	521.820	-	1,541.000
16	Padang Law as Utara	186.150	483.470	1,455.980	1,045.130	184.960	3,355.690
17	Padang Sidempuan	155.730	100.830	62.570	-	32.590	351.720
18	Toba Samosir	465.800	188.350	301.600	252.000	-	1,207.750
19	Tanjung Balai	187.672	68.290	35.440	5.890	-	297.292
20	Tebing Tinggi	202.690	18.210	14.850	-	-	235.750
21	Nias	57.940	101.590	130.040	272.130	-	561.700
22	Nias Utara	164.909	300.811	251.081	27.841	21.217	765.859
23	Gunungsitoli	-	-	-	-	-	-
24	Samosir	291.910	152.260	47.860	123.960	-	615.990
25	Sibolga	28.839	7.581	9.803	8.690	-	54.913
26	Nias Barat	-	-	-	-	-	-
27	Pakpak Barat	339.700	67.720	50.400	59.380	-	517.200
28	Simalungun	248.890	1,021.700	692.210	259.200	-	2,222.000
29	Karo	353.030	280.890	253.600	330.630	-	1,218.150
30	Dairi	319.950	233.720	175.120	27.000	619.120	1,374.910
31	Tapanuli Utara	352.427	600.684	155.856	113.042	-	1,222.009
32	Humbang Hasundutan	471.500	141.280	52.960	251.460	-	917.200
33	Pematang Siantar	331.758	-	81.184	-	-	412.942
	Jumlah	12,966.707	6,819.223	7,606.890	5,545.560	905.657	33,844.037

Sumber: BPS Sumatera Utara 2012 (data diolah)



Grafik 2. 30.

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012
Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)

Grafik diatas menggambarkan 58,46 % dari total panjang ruas jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik namun kondisi ruas jalan rusak dan rusak berat yang memerlukan penanganan masih cukup signifikan.

b. Penanganan / peningkatan Jalan strategis Provinsi

- Ruas Jalan Alternatif Medan – Berastagi

Penanganan Ruas sejajar Jalan Medan – Berastagi meliputi Medan (Sp. Pos) – Sp. Tuntungan – Kotalimbaru – Taburan – Tanduk Benua (Kab. Deli Serdang) – Sp. Sabaikan II – Berastagi (Kab. Karo) sepanjang 55,88 Km, ruas jalan ini sangat diprioritaskan mengingat jalan yang ada sudah cukup padat dan sering terjadi kemacetan sekaligus mendukung Kawasan Mebidangro. Disajikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel. 2.62
Panjang Ruas Alternatif Medan - Berastagi

No	Nama Ruas	Panjang (Km)
1.	Medan (Sp. Pos) – Sp. Tuntungan	8,70
2.	Sp. Tuntungan – Tuntungan	3,23
3.	Tuntungan – Kotalimbaru	8,12
4.	Kotalimbaru – Taburan	6,67
5.	Taburan – Tanduk Benua	9,65
6.	Tanduk Benua – Sp. Sabaikan II	11,56
7.	Sp. Sabaikan II – Berastagi (Tugu)	7,96
	Total	55,88

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu (berdasarkan FS. 2011)

- Ruas Jalan Tj. Morawa – Saribu Dolok – Tongging (RAWASARING)

Penanganan Ruas Tj. Morawa – Saribu Dolok – Tongging (RAWASARING) dilaksanakan untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba yang pembangunannya dimulai dari Kota Lubuk Pakam – Tanah abang – Sei Buaya – Bts. Simalungun - Saran Padang – Saribu Dolok – Tongging sepanjang 105,20 Km dan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Untuk ruas jalan Saribu Dolok – Tongging merupakan Jalan Nasional. Ruas ini juga diharapkan dapat mendukung akses menuju bandara Kuala Namu.

Tabel. 2.63
Panjang Ruas Jalan Tj. Morawa – Saribu Dolok – Tongging (RAWASARING)

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Kondisi (Status 2012)		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Tanah Abang-Sei Buaya	32,00 Km	9,50 Km	11,50 Km	11,00 Km
2.	Sei Buaya-Bts. Simalungun	33,00 Km	12,40 Km	8,00 Km	12,60 Km
3.	Bts. Simalungun-Saran Padang	20,00 Km	-	1,00 Km	19,00 Km
4.	Saran Padang – Seribu Dolok	20,20 Km	2,00 Km	7,20 Km	11,00 Km
	Total	105,20 Km	23,90 Km	27,70 Km	53,60 Km

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu (Thn 2012)

- Ruas Jalan Lingkar Pulau Nias

Penanganan Ruas Jalan Lingkar Pulau Nias sepanjang 334,50 Km meliputi kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan. Hal ini diprogramkan untuk mendukung Kawasan Pariwisata Nias dan daerah pemekaran baru dan terisolir. Ruas jalan ini belum secara keseluruhan terbuka masih ada ruas jalan yang menghubungkan Nias Barat dengan Nias Utara sepanjang 43 Km.

Tabel. 2.64
Panjang Ruas Jalan Lingkar Pulau Nias

No	Nama Ruas	Panjang (meter)	Kondisi (Status 2012)		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Miga-Tetehosi-Lolow ua	8,594+	7,694	700	200
2.	Gunungsitoli-Afia	16,258	15,300	900	158
3.	Jln. Sudirman Gunungsitoli	167	167	-	-
4.	Jln. Gomo Gunungsitoli	494	300	-	194
5.	Jln. Yos Sudarso Gunungsitoli	656	456	-	200
6.	Duria-Lolow au	20,800	1,400	2,000	17,400
7.	Lolow au-Teluk Dalam-Pelabuhan Baru	62,284	48,284	10,100	3,900
8.	Hoya-Lahusa-Teluk Dalam	46,928	24,728	10,900	11,300
9.	Lolow au-Siwalawa II	4,589	-	200	4,389
10.	Afia-Tuhemberua	19,101	17,200	1,500	401
11.	Tuhemberua-Lotu	26,907	8,700	700	17,507
12.	Lotu-Lahewa	24,132	22,400	832	900
13.	Lahewa-Afulu	20,416	15,200	-	5,216
14.	Afulu-Bts. Nias Barat	43,500	-	-	43,500
15.	Dola-Duria	14,352	8,300	3,552	2,500
16.	Siwalawa II-Sirombu	21,098	16,898	2,400	1,800
17.	Fabilawa-Bts. Nias Barat	22,300	178	300	21,822
18.	Hilimbuasi-Mandrehe	13,946	6,246	5,700	2,000
19.	Lasara Bagaw u-Simaeasi	9,500	-	-	9,500
Total		375,752	193,451	39,784	142,887

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu (Thn 2012)

- Ruas Jalan Lingkar Pulau Samosir

Penanganan Ruas Jalan Lingkar Pulau Samosir sepanjang 143 Km meliputi Pangururan – Ambarita – Tomok – Nainggolan – Onan Runggu untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Tabel. 2.65
Ruas Jalan Lingkar Pulau Samosir

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Kondisi (Status 2012)		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Tele-Pangururan	22,00	6,00	13,30	2,70
2.	Pangururan-Ambarita	35,00	20,70	13,80	0,50
3.	Ambarita-Tomok	5,00	1,90	3,10	-
4.	Pangururan-Nainggolan	40,00	16,20	20,90	2,90
5.	Tomok-Onan Runggu	34,00	22,70	4,20	7,10
6.	Onan Runggu-Nainggolan	7,00	0,16	2,17	4,67
Total		143,00	67,66	57,47	17,87

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu (Thn 2012)

- Ruas Jalan pada Daerah Pemekaran dan Terisolir
Penanganan Ruas Jalan jurusan Siwalawa II Sirumbu (Bts. Nias Utara) sepanjang 20 KM dan Ruas Jalan Lahewa – Afulu – Bts. Nias Utara sepanjang 65 KM. Ruas ini diharapkan dapat menghubungkan pusat pemerintahan Kab. Nias Utara dan Nias Barat. Penanganan Ruas Jalan Simpang Pulau Banyak – Batahan – Bts. Sumatera Barat dalam rangka menghubungkan daerah terisolir ke pusat Ibu Kota Kabupaten.
- Ruas Jalan Status Baru sebagai Jalan Provinsi
Penanganan Ruas Jalan – Jalan Baru sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 118.44/30/KPTS/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Perubahan Status jalan Provinsi semula 2.752,04 Km menjadi 3.048,50 Km, bertambah sepanjang 296,46 Km yang pada umumnya kondisinya rusak dan butuh penanganan.
- Ruas Jalan Pendukung Kawasan KEK Sei Mangkei dan MP3EI
Penanganan Ruas Jalan Indrapura (Junction) – Kuala Tanjung sepanjang 16,02 Km. Ruas Jalan Limapuluh – Bts. Simalungun – Perdagangan – Pematang Sintang sepanjang 58,60 Km.

Tabel. 2.66
Ruas Jalan Pendukung Kawasan KEK Sei Mangkei dan MP3EI

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Kondisi (Status 2012)		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	P.Siantar-Perdagangan	35,10	29,70	4,60	0,80
2.	Perdagangan-Bts. Batubara	5,30	2,70	2,60	-
3.	Limapuluh-Bts.Simalungun	5,75	3,50	2,25	-
4.	Sei Bejangkar-Tj. Tiram	12,65	7,20	4,90	0,55
5.	Indrapura (Junction) - Kuala Tanjung	16,00	16,00	-	-
Total		74,80	59,10	14,35	1,35

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu (Thn 2012)

- Ruas Jalan Pantai Susur Timur
Penanganan ruas jalan untuk mendukung pengembangan kawasan Agromarinepolitan di wilayah pantai timur pulau sumatera khususnya Sumatera Utara perlu diprioritaskan pembangunan dan peningkatan jalan yang menghubungkan susur pantai timur Sumatera Utara, mulai dari Kab. Langkat perbatasan Provinsi NAD hingga Kab. Labuhan Batu Selatan perbatasan Provinsi Riau yang sebahagian eksisting jalannya sudah ada. Berikut tabel panjang jalan Susur Pantai Timur tiap kabupaten/kota.

Tabel. 2.67
Ruas Jalan Pantai Susur Timur

No	Kab/Kota	Panjang (Km)
1.	Kab. Langkat	169,40
2.	Kab. Deli Serdang	65,17
3.	Kab. Sergeï	60,33
4.	Kab. Batubara	44,73
5.	Kab. Asahan	62,21
6.	Kab. Labusel, Kab. Labura dan Kab. Labuhan Batu	115,82
Total		518,00

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu (FS. Thn 2011)

2.3.1.3.2 Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber daya air mencakup pengelolaan sumber daya air yang ketersediaannya terbatas, menjaga kualitas air, konservasi danau, dan menjaga ketersediaan sumber air, dan pengendalian banjir agar pembangunan yang dibutuhkan dan kehidupan dapat berlanjut secara berkesinambungan.

a. Irigasi

Kondisi Irigasi di Sumatera Utara sudah cukup memprihatinkan baik dalam arti luasan yang tersebar pada daerah satuan wilayah sungai yang lebih kurang 421.734 hektar, tersebar di satuan wilayah sungai (SWS) Wampu-Besitang, SWS Belawan-Belumai-Ular, SWS Bah Bolon, SWS Barumon, dan SWS Batang Gadis-Batang Toru dan wilayah sungai lainnya. Kerusakan yang terjadi juga terdapat pada sebagian besar konstruksi sistim irigasi yang ada.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air Pasal 41 Ayat (2), dari total Daerah Irigasi/Rawa seluas 421.734 Ha berdasarkan strata penanganan kewenangan luasan Daerah Irigasi/Rawa pada Propinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Pusat (> 3000 Ha) seluas 70.530 Ha
- Pemerintah Provinsi (1000-3000 Ha) dan Lintas Kabupaten/Kota seluas 88.733 Ha
- Pemerintah Kab/Kota (< 1000 Ha) seluas 261.061 Ha.

Sementara jika dilihat berdasarkan Revisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 data terakhir menunjukkan adanya perubahan luasan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dari 88.733 Ha menjadi 86.999 Ha atau mengalami penurunan seluas 1774 Ha (2% dari total luas irigasi sebelumnya). Gambaran kondisi sistim irigasi dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.68
Luas Irigasi Sumatera Utara Menurut Kondisi

Kondisi Daerah Irigasi	Luas	
	Ha	%
Total Luas Daerah Irigasi Provinsi	86,999	
Luas Daerah Irigasi dalam kondisi rusak ringan	26,630	30.61%
Luas Daerah Irigasi dalam kondisi rusak berat	23,949	27.53%
Total Luas Irigasi Rawa Provinsi	64,339	
Luas Irigasi Rawa dalam Kondisi Rusak ringan	37,844	58.82%
Luas Daerah Irigasi Rawa dalam kondisi rusak berat	12,615	19.61%

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu (FS. Thn 2011)

Kondisi Jaringan Irigasi secara keseluruhan saat ini masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi baik yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air, pengendali kelebihan air, maupun pengamanan terhadap kerusakan, sehingga dirasakan saat ini setiap selesai dilakukan perbaikan pada daerah irigasi selalu rentan terhadap kerusakan masa berikutnya.

Faktor yang mempengaruhi kerusakan pada jaringan irigasi tersebut adalah untuk daerah irigasi didataran tinggi jaringan irigasinya pada umumnya terletak pada lereng lereng bukit yang sangat rawan terhadap longsor, dan untuk daerah irigasi didataran rendah terjadi sedimentasi yang sangat tinggi yang terbawa oleh sungai akibat kondisi Daerah Aliran Sungai yang sudah rusak.

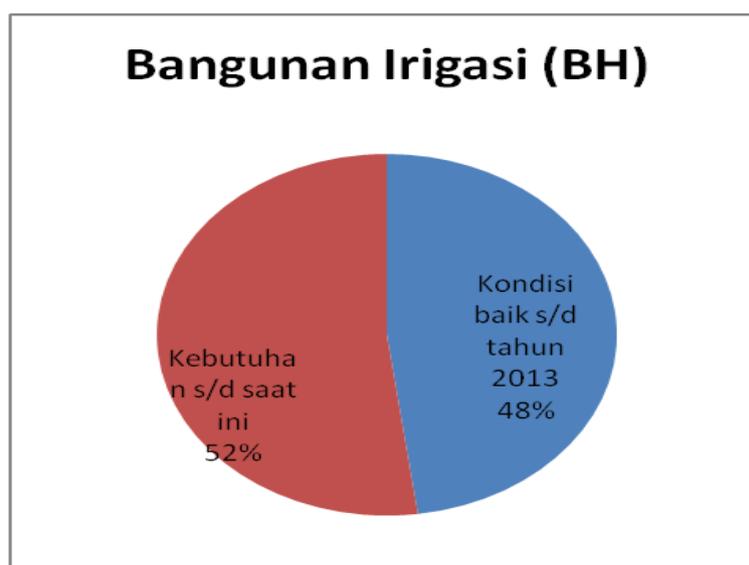
Disamping sarana dan prasarana jaringan irigasi, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian peningkatan keberlanjutan pengelolaan irigasi sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan dapat tercapai.

Data Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

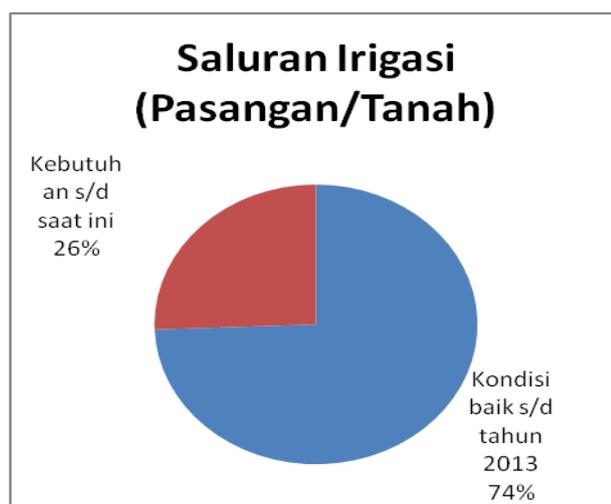
Tabel. 2.69
Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara

No.	Uraian	Inventarisasi		Kondisi baik s/d tahun 2013		Kebutuhan s/d saat ini	
		Jumlah (bh;m)	%	Jumlah (bh;m)	%	Jumlah (bh;m)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangunan Irigasi (BH) Bangunan gerak, Bendung tetap, Free intake, Pintu pengambilan, penguras, Bag. Bagi, Sadap, Kantong Lumpur, piscas, got miring, gorong gorong, pelimpah, talang, sipon, terjun, jembatan, tangga cuci, plat pelayanan, got miring	3.796	99	1.816	47,840	1980	52,160
2	Saluran Irigasi (Pasangan/Tanah)	255.252	60	189.965	74,42	65.287	25,58

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, 2012



Grafik 2. 31.
Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara Bangunan Irigasi (BH)
Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, 2012



Grafik 2. 32.

Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara Saluran Irigasi (Pasangan/Tanah)
 Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, 2012

b. Rawa

Daerah rawa adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan secara optimal, dan untuk pengembangannya memerlukan kordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang kaitannya dengan daerah kawasan hutan. Di Propinsi Sumatera Utara terdapat luas baku lahan rawa seluas 1.012.005 Ha dan letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18 %) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan atas Kawasan untuk dapat dijadikan menjadi areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45 %).

Dari luas rawa yang potensial tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, pembagian kewenangannya pada tabel adalah sebagai berikut :

- Kewenangan Pemerintah Pusat seluas = 100.286 Ha,
- Kewenangan Propinsi seluas = 64,339 Ha,
- Kabupaten/Kota = 24.801 Ha.

Tabel. 2.70
 Rawa Kewenangan Provinsi

No	Kabupaten / Kota	Jumlah DR	Luas (Ha)
1	2	3	4
1	Deli Serdang	2	3.000
2	Karo	1	1.500
3	Labuhan Batu	10	21.116
4	Langkat	15	26.563
5	Mandiling Natal	2	3.000
6	Serdang Bedagai	2	4.000
7	Tapanuli Selatan	3	3.600
8	Tapanuli Utara	1	1.560
Jumlah		36	64.339

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, 2012

Tabel. 2.71
Kondisi Rawa Kewenangan Provinsi

Uraian		Yang Ada			Yang Belum Ada (Kekurangan)
		Baik	RR (Rusak Ringan)	RB (Rusak Berat)	
Jaringan Pembawa/ Pembuang	(M)	291.350	97.124	97.120	145.670
Tanggul Banjir	(M)	46.085	24.300	16.300	62.850
Bangunan-Bangunan Rawa	(M)	180	65	29	24
Jumlah Daerah Rawa	(Bh)	36			
Luas Total Areal Rawa	(Ha)	64.339			

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, 2012

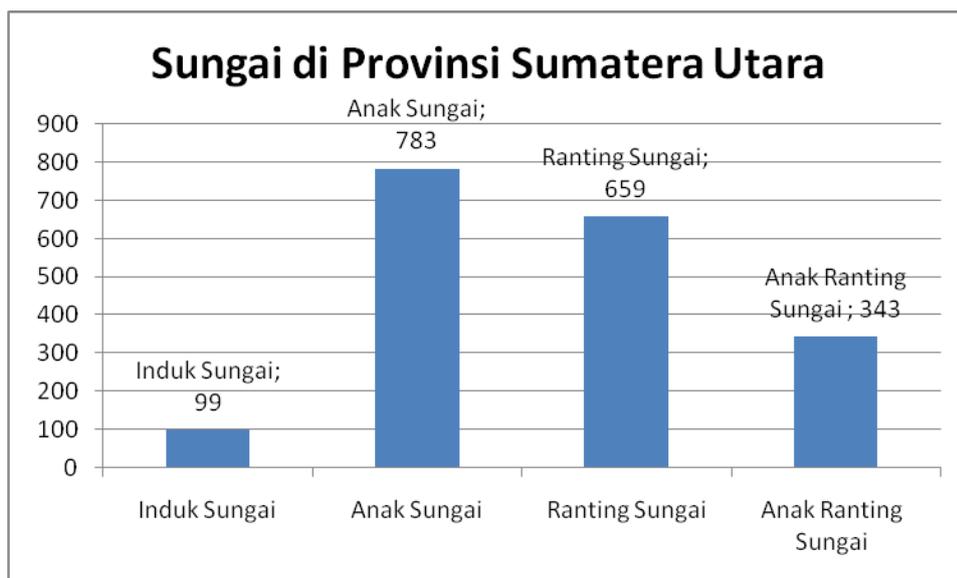
c. Sungai

Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Wilayah Sungai Lintas Kabupaten, sedangkan Kewenangan Pemerintah Pusat adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi dan Strategis Nasional yaitu :

- WS Belawan-Ular-Padang meliputi DAS Deli yang melintasi kota Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara yang berpotensi rawan banjir, DAS Ular yang merupakan sumber air bagi areal persawahan irigasi Sungai Ular seluas 18.500 Ha serta DAS Padang yang melintasi Kota Tebing Tinggi, kota berpenduduk padat dan rawan banjir.
- WS Toba-Asahan meliputi Danau Toba yang merupakan danau terbesar di tanah air dan obyek wisata yang termashur di mancanegara serta DAS Asahan yang merupakan sumber air bagi PLTA Asahan dan melintasi Kota Tanjung Balai yang berpenduduk padat.
- WS Bt. Angkola-Bt. Gadis meliputi DAS Bt. Angkola yang merupakan sumber air bagi daerah irigasi Paya Sordang seluar 4350 Ha serta daerah irigasi Batang Angkola seluar 7400 Ha dan DAS Batang Gadis yang merupakan sumber air bagi daerah irigasi Bt. Gadis seluas 6628 Ha.
- WS Bt. Natal-Bt. Batahan merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi, terletak di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Sungai di Provinsi Sumatera Utara

Induk Sungai	=	99 BH
Anak Sungai	=	783 BH
Ranting Sungai	=	659 BH
Anak Ranting Sungai	=	343 BH
Total	=	1.884 BH



Grafik 2. 33.
Sungai di Provinsi Sumatera Utara
Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara, 2012

2.3.1.4. Penataan Ruang

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dimana disebutkan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pusat data geospasial di Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2012 telah dibuat Sistem Informasi Pusat Data Geospasial.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang dalam tahap revisi mengikuti Undang-Undang Penataan Ruang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang menunggu Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan untuk kepentingan peruntukan pola ruang di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara untuk Kabupaten/Kota, saat ini 33 Kabupaten/Kota telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan seluruhnya telah dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Dari 33 Kabupaten/Kota tersebut, 7 (tujuh) Ranperda RTRW dan 1 (satu) Ranperda tentang RDTR telah dievaluasi oleh Gubernur dan 2 (dua) Ranperda RTRW telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Kota Medan (Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011 – 2031) dan Kabupaten Simalungun (Perda Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Simalungun Tahun 2012 – 2032).

2.3.1.5. Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Provinsi Hak Asasi Manusia (RAP-HAM) Tahun 2011 – 2014
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 73 Tahun 2011 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) nProvinsi Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015;
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2012 tentang E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033.

2.3.1.6. Perhubungan

Fasilitas sarana perhubungan di provinsi Sumatera Utara terbagi atas transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, kereta api, dan transportasi angkutan danau/penyeberangan.

Tabel. 2.72

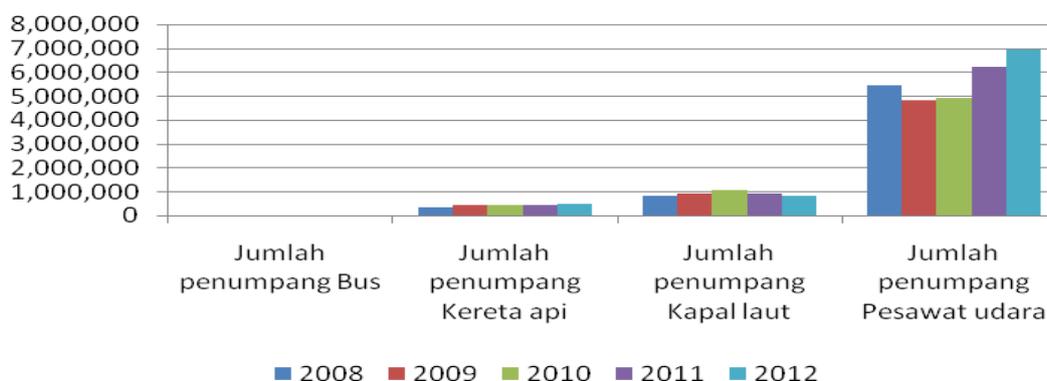
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah penumpang Bus)*	-	-	-	-	-
2.	Jumlah penumpang Kereta api	351.298	412.243	419.094	455.800	475.005
3.	Jumlah penumpang Kapal laut					
	a. Internasional	220.321	264.766	220.873	374.124	246.580
	b. Domestik (antar pulau)	605.302	664.746	825.037	530.518	564.186
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara					
	a. Internasional	972.507	933.929	894.634	1.165.728	1.392.620
	b. Domestik	4.484.051	3.882.923	4.019.101	5.073.249	5.530.333
	Total Jumlah Penumpang	6.633.479	6.158.607	6.378.739	7.599.419	8.208.724

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012

Keterangan : -) : Data tidak tersedia

Dalam kurun waktu 2008 – 2012, pertumbuhan penumpang angkutan umum di Sumatera Utara didominasi oleh angkutan udara, disusul oleh angkutan laut, dan kereta api. Penumpang angkutan laut mengalami fluktuasi di sepanjang 5 tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas.



Grafik 2. 34.
 Pertumbuhan Penumpang Angkutan Umum di Sumatera Utara Tahun 2008 - 2012
 Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)

a. Transportasi Darat

Hingga tahun 2012, fasilitas terminal angkutan darat yang tersedia di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 40 buah dengan perincian 8 terminal tipe A, 15 terminal tipe B, dan 17 terminal tipe C.

Tabel. 2.73
 Terminal Bus di Sumatera Utara berdasarkan tipe Tahun 2012

No	Terminal	Kab/Kota	Tipe	Luas (m ²)	Kapasitas
1	Amplas	Medan	A	26.580	80 Bus. 300 MPU
2	Pinang Baris	Medan	A	19.940	50 Bus. 200 MPU
3	Sitinjo	Dairi	A	30.000	30 Bus. 200 MPU
4	Sarantama	P.Siantar	A		
5	Bandar Kajum	T.Tinggi	A	30.000	40 Bus. 200 MPU
6	Tarutung	Tap. Utara	A	40.000	30 Bus. 1.000 MPU
7	Kisaran	Asahan	A	50.000	50 Bus. 100 MPU
8	Penyabungan	Madina	A	18.000	100 MPU
9	Rantau Prapat	Lab.Batu	B	40.000	50 Bus. 200 MPU
10	Sibolga	Sibolga	B	10.954	32 Bus. 65 MPU
11	Lubuk Pakam	Deli Serdang	B	10.000	40 Bus. 100 MPU
12	Kabanjahe	Karo	B	1.500	20 Bus. 150 Angdes
13	Sosorsaba	Simalungun	B		
14	Perdagangan	Simalungun	B		
15	Ikan Paus	Binjai	B	16.000	20 Bus. 50 MPU
16	Bohorok	Langkat	B	10.000	30 Bus. 70 MPU
17	Pasar X / Tjg. Pura	Langkat	B	7.500	35 Bus. 150 MPU
18	Selesai	Langkat	B	12.000	40 MPU
19	Tanjung Beringin	Langkat	B	20.000	30 Bus. 100 MPU
20	Siborong-Borong	Humbahas	B	6.500	20 Bus. 50 MPU
21	Sibolga	Sibolga	B	11.000	30 Bus. 50 MPU
22	Batu Nadua	P. Sidempuan	B	18.000	20 Bus. 150 MPU

No	Terminal	Kab/Kota	Tipe	Luas (m ²)	Kapasitas
23	Aek Kanopan	Lab. Batu	B	10.800	5 Bus. 50 MPU
24	Pajak Tavip	Binjai	C	15.000	100 MPU
25	Gunung Sitoli	Nias	C		
26	Pangururan	Samosir	C		
27	Asahan	Asahan	C	1.925	20 Bus. 60 MPU
28	Sijambi	T. Balai	C	22.000	50 Bus. 100 MPU
29	Sidikalang	Dairi	C		60 Bus. 200 MPU
30	Berastagi	Karo	C		
31	Serbelawan	Simalungun	C		
32	Dolok Masihul	Sergei	C	1.507	20 Bus. 50 MPU
33	Perbaungan	Sergei	C	2.000	20 Bus. 60 MPU
34	Pancur Batu	Deli Serdang	C	10.000	45 MPU
35	Deli Tua	Deli Serdang	C		
36	Sambu	Medan	C	2.500	1500 MPU
37	Veteran	Medan	C	2.000	20 Bus. 60 MPU
38	Wiliem Iskandar	Medan	C	4.500	75 MPU
39	Belawan	Medan	C	420	30 Bus
40	P. Brandan	Langkat	C	6.400	40 Bus

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu 2012

Tabel. 2.74
Realisasi Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan TA. 2009-20012 di Sumatera Utara

No	Kegiatan	Realisasi								Total	
		2009		2010		2011		2012		Volume	
		Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	
1	Marka Jalan	1.000	m	5.000	m	2.082	m ²	1.247	m	9.329	m
2	Guardrail	900	m	1.080	m	745	m	0	m	2.725	m
3	Rambu	125	bh	764	bh	190	bh	216	bh	1.295	bh
4	ZOSS	2	lok	2	lok	0	bh	0	bh	4	lok
5	APILL	2	lok	2	lok	0	lok	2	lok	6	lok
	- Traffic Light	2	lok	0	lok	0	lok	0	lok	2	
	- Warning Light	0	lok	2	lok	0	lok	2	lok	4	
6	Paku Jalan							1.080	bh	1.080	bh
7	Delineator			340	bh	545	bh	700	bh	1.585	bh
8	RPPJ			28	bh					28	bh

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu 2012

b. Transportasi Laut

Mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 414 Tahun 2013 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional, jumlah dan tipe Pelabuhan laut di Sumatera Utara adalah sebanyak 35 unit dengan perincian sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut

Tabel. 2.75
Jumlah dan Tipe Pelabuhan Laut di Sumatera Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Pelabuhan	Tipe Pelabuhan
1.	Batubara	Kuala Tanjung	Pelabuhan Utama
2.	Batubara	Pangkalan Dodek	Pengumpan Regional
3.	Batubara	Perupuk	Pengumpan Lokal
4.	Batubara	Tanjung Tiram	Pengumpan Regional
5.	Batubara	Teluk Nibung	Pengumpan Regional
6.	Serdang Bedagai	Sialang Buah	Pengumpan Lokal
7.	Serdang Bedagai	Pantai Cermin	Pengumpan Regional
8.	Asahan	Tanjung Balai Asahan	Pelabuhan Pengumpul
9.	Langkat	Pangkalan Susu	Pelabuhan Pengumpul
10.	Langkat	Pulau Kampal	Pengumpan Lokal
11.	Langkat	Tanjung Pura	Pengumpan Regional
12.	Langkat	Tapak Kuda	Pengumpan Lokal
13.	Langkat	Kuala Sarapu	Pengumpan Lokal
14.	Deli Serdang	Belawan	Pelabuhan Utama
15.	Deli Serdang	Pantai Labu	Pengumpan Lokal
16.	Deli Serdang	Percut	Pengumpan Lokal
17.	Deli Serdang	Rantau Panjang	Pengumpan Regional
18.	Deli Serdang	Tanjung Beringin	Pengumpan Regional
19.	Labuhan Batu	Labuhan Bilik	Pengumpan Lokal
20.	Labuhan Batu	Sel Barombang	Pengumpan Regional
21.	Labuhan Batu	Teluk. Lidong	Pelabuhan Pengumpul
22.	Labuhan Batu	Tg. Sarang Elang	Pelabuhan Pengumpul
23.	Mandailing Natal	Natal/Sikara-kara	Pelabuhan Pengumpul
24.	Mandailing Natal	Sikara-Kara	Pelabuhan Pengumpul
25.	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pelabuhan Pengumpul
26.	Nias	Lahawa	Pengumpan Regional
27.	Nias	Sirombu	Pengumpan Regional
28.	Nias Selatan	Pulau Tanah Masa	Pengumpan Lokal
29.	Nias Selatan	Pulau Tello	Pelabuhan Pengumpul
30.	Nias Selatan	Teluk Dalam	Pengumpan Regional
31.	Tapanuli Tengah	Barus	Pengumpan Lokal
32.	Tapanuli Tengah	Manduamas	Pengumpan Lokal
33.	Tapanuli Tengah	Sibolga	Pelabuhan Pengumpul
34.	Tapanuli Tengah	Oswald Siahaan/ Labuhan Angin	Pelabuhan Pengumpul
35.	Mandailing Natal	Batahan	Pelabuhan Pengumpul

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu 2012

Saat ini, pelabuhan Belawan memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat kondisi fisik memiliki kedalaman alur yang sangat terbatas sehingga tidak memadai untuk menunjang angkutan laut secara efektif, sehingga perlu didukung dengan pengembangan pelabuhan alternatif di Kuala Tanjung dan pelabuhan lainnya. Data fasilitas di Pelabuhan belawan berikut kapasitasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 2.76
Fasilitas Pelabuhan Belawan

No	Nama/Lokasi	Sat	Nilai	Keterangan
1.	ALUR KOLAM	Mil	8	Lebar 100 m, kedalaman -10 m LWS -6 s/d -10 LWS
2.	TERMINAL TERMINAL PENUMPANG Kapal Pelni	M	100	Gd. Terminal Penumpang 882 m ²
	TERMINAL CURAH CAIR 1) Minyak Sawit 2) BBM	M M	300 75	105 – 106 Ujung Baru Jetty + SMB Offshore
	TERMINAL CURAH KERING 1) Pupuk 2) Semen 3) Bungkil	M M M	100 100 190	104 Ujung Baru PT SAI, Kolam Citra Ujung Barura
	TERMINAL GENERAL CARGO	M	2.184	Belawan Lama, Ujung Baru dan Kolam Citra
3.	TPS (TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA)			
	Container Yard (CY)	M2	14.846	Penanganan Peti Kemas Antar Pulau
	Container Freight Station (CFS)	M2	19.502	Penanganan LCL Cargo

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Tabel. 2.77
Kapasitas Terpasang di Pelabuhan Belawan

No	Nama/Lokasi	Sat	Nilai	Keterangan
1.	ALUR KOLAM	Mil	8	Lebar 100 m, kedalaman -10 m LWS -6 s/d -10 LWS
2.	TERMINAL TERMINAL PENUMPANG Kapal Pelni	M	100	Gd. Terminal Penumpang 882 m ²
	TERMINAL CURAH CAIR 1) Minyak Sawit 2) BBM	M M	300 75	105 – 106 Ujung Baru Jetty + SMB Offshore
	TERMINAL CURAH KERING 1) Pupuk 2) Semen 3) Bungkil	M M M	100 100 190	104 Ujung Baru PT SAI, Kolam Citra Ujung Barura
	TERMINAL GENERAL CARGO	M	2.184	Belawan Lama, Ujung Baru dan Kolam Citra
3.	TPS (TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA)			
	Container Yard (CY)	M2	14.846	Penanganan Peti Kemas Antar Pulau
	Container Freight Station (CFS)	M2	19.502	Penanganan LCL Cargo

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Tabel. 2.78
 Fasilitas Dermaga di Pelabuhan Belawan

No	Uraian	Panjang	Luas (m ²)
DERMAGA			
1	Belawan Lama	688,71	9.832,82
2	Ujung Baru	1.669,75	20.906,73
3	Citra	625,00	8.937,50
4	IKD	300,00	7.500,00
	TOTAL	3.283,46	47.220,55

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Tabel. 2.79
 Fasilitas Gudang di Pelabuhan Belawan

No	Uraian	Unit	Luas (m ²)
GUDANG			
1	Belawan Lama	4	3.013,30
2	Ujung Baru	6	24.124,50
3	Gudang Tertutup	2	1.457,20
4	Gudang Terbuka	3	1.935,00
5	Citra	3	16.800,00
	Total	18	47.330,21

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Tabel. 2.80
 Fasilitas Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan

No	Uraian	Unit	Luas (m ²)
LAPANGAN PENUMPUKAN			
1	Belawan Lama	5	10.580,87
2	Ujung Baru	9	32.212,92
3	Citra	8	40.634,86
4	IKD	1	9.390,00
5	Lapangan Container	2	34.348,00
	Total	25	127.166,65

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

c. Transportasi Udara

Hingga tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 8 (delapan) pelabuhan udara dengan perincian : 2 (dua) bandara internasional (termasuk Bandara Kuala Namu), dan 6 (enam) bandara perintis.

Tabel. 2.81
Pelabuhan udara di Sumatera Utara Tahun 2012

NO.	BANDARA	LANDASAN PACU / RUNWAY (M)	HIERARKI	LOKASI
1	KUALA NAMU	3.750 X 60	Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Deli Serdang
2	POLONIA	2.900 X 45	Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Kota Medan
3	BINAKA	1.800 X 30	Pengumpan	Gunung Sitoli
4	Dr.F.L. TOBING	2.260 X 30	Pengumpan	Tapanuli Tengah
5	SIBISA	750 X 23	Pengumpan	Toba Samosir
6	AEK GODANG	1.400 X 30	Pengumpan	Padang Lawas Utara
7	SILANGIT	2.250 X 30	Pengumpan	Tapanuli Utara
8	LASONDRE	1.400 X 30	Pengumpan	Nias Selatan

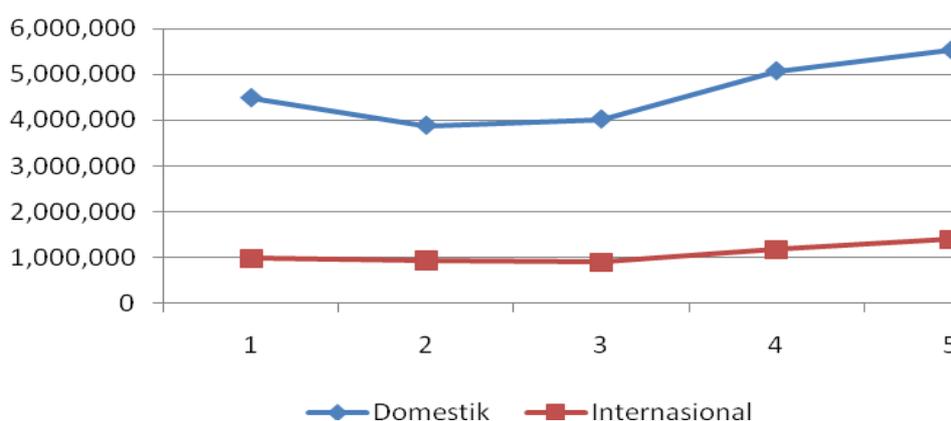
Sumber : Dinas Perhubungan Provsu 2012

Hingga tahun 2012, tercatat pergerakan penumpang domestik dan internasional (datang, berangkat, dan transit) yang melalui Bandara Polonia mengalami peningkatan. Hal yang sama terjadi pada pergerakan angkutan barang dengan pesawat udara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.82
Jumlah Pergerakan Penumpang/Barang melalui Bandara Polonia di Sumatera Utara Tahun 2008-2012

Uraian		2008	2009	2010	2011	2012
Penumpang (org)	Domestik	4.484.051	3.882.923	4.019.101	5.073.249	5.530.333
	Internasional	972.507	933.929	894.634	1.165.728	1.392.620
Barang (ton)	Domestik	32.182.685	34.004.226	31.164.759	34.247.230	41.991.212
	Internasional	3.823.946	4.768.480	3.672.458	2.417.715	5.105.055

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)



Grafik 2. 35.
Pertumbuhan Pergerakan Penumpang melalui Bandara Polonia Di Sumatera Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)

Bandara Kualanamu dibangun sebagai pengganti Bandara Polonia yang pergerakan penumpang pertahunnya telah mencapai 8 juta penumpang, dengan pergerakan pesawat udara 64.800, dengan trend pertumbuhan antara 15-20% pertahun. Yang jelas tidak sebanding lagi dengan kapasitas Bandara Polonia yang hanya sebesar 900.000 pnp. Bandara Kualanamu yang secara resmi telah beroperasi sejak 15 juli 2013 yang lalu, saat ini masih membutuhkan pembangunan fasilitas diantaranya VIP Room.

Tabel. 2.83
Perbandingan Fasilitas Bandara Polonia dan KNIA

URAIAN	BANDAR UDARA	
	POLONIA	KUALANAMU
Luas Lahan	144 Ha	1376 Ha
Runway	2900 m x 45 m	3750 m x 60 m
Paralel Taxiway	-	Taxiway 1 3.750 x 30 m
	-	Taxiway 2 2.000 x 30 m
Luas Terminal	13.811 m ²	90.000 m ²
Kapasitas Terminal	900.000 Pnp/thn	8.000.000 Pnp/thn
Gudang Kargo	2.140 m ²	13.000 m ²
Luas Apron	98.514 m ²	300.000 m ²
Kapasitas Apron	11 pesawat	33 pesawat
Luas Parkir Area	17.592 m ²	50.820 m ²
Kapasitas Parkir Area	520 mobil	Taxi 407 Bus 55 Mobil 908

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Tabel. 2.84
Tahapan Pembangunan Bandara Kualanamu

Pengembangan	Tahap I		Tahap II	Tahap III
	Stage I	Stage II		
▪ Runway	3.000x60m	3.750x60m	3.750x60m	3.750x60m
▪ Pesawat terbesar	B 747-400	A 380	A.380	A 380
▪ Terminal Pnp	90.000m ²	125.000m ²	170.000m ²	225.000m ²
▪ Kapasitas	8 juta/th	10 jt/th	15 juta/th	22 juta/th
▪ Terminal Kargo	13.000m ²	13.000m ²	18.000m ²	27.000m ²
▪ Kapasitas	65.000 ton/th	65.000 ton/th	90.000 ton/th	115.000/th
▪ Area Parkir	20.000 m ²	90.000 m ²	140.000 m ²	140.000 m ²

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Peningkatan Jumlah penumpang pesawat dan peningkatan kapasitas di Bandara Kualanamu membutuhkan dukungan aksesibilitas dan mobilitas orang. Jika tidak diantisipasi sejak dini maka potensi kemacetan lalu lintas akibat tingginya tingkat penggunaan pribadi akan semakin besar. Untuk itu Pemerintah Provinsi telah mempersiapkan pelayanan angkutan pepadu moda baik untuk jenis angkutan bus maupun taksi.

Tabel. 2.85
Jumlah Kedatangan & Keberangkatan Pesawat di Bandara Polonia

Tahun	Internasional (Pswt)		Domestik (Pswt)		Jumlah	% Pert.
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat		
2007	4.216	4.208	22.893	22.921	54.238	-
2008	5.184	5.200	21.189	21.164	52.737	-2,77
2009	5.381	5.321	19.779	19.882	50.363	-4,50
2010	6.177	6.176	23.031	23.054	58.438	16,03
2011	7.408	7.408	23.378	23.404	61.598	5,41
2012	8.639	8.640	23.725	23.754	64.758	5,13

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Tabel. 2.86
Jumlah Kedatangan & Keberangkatan Penumpang Di Bandara Polonia

Tahun	Internasional (org)		Domestik (org)			Jumlah	% Pert.
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transit		
2007	480.659	491.848	2.067.400	2.231.965	184.686	5.456.558	-
2008	472.952	460.977	1.776.224	1.954.697	152.002	4.816.852	-11,72
2009	432.985	461.649	1.767.128	2.072.921	179.052	4.913.735	2,01
2010	585.003	580.725	2.450.060	2.550.554	72.635	6.238.977	26,97
2011	701.700	690.920	2.719.806	2.801.527	-	6.913.953	10,82
2012	818.397	801.115	2.989.552	3.258.616	-	7.867.680	13,79

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

d. Transportasi Kereta Api

Jaringan Transportasi Kereta Api di Sumatera Utara memiliki panjang rel keseluruhan 491,112 kilometer yang terdiri dari bantalan beton, bantalan besi dan bantalan kayu.

Tabel. 2.87
Panjang Lintasan Rel Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

NO.	LINTAS	PJG LINTAS (M'Sp)	TYPE REL
1.	Medan – Tanjung Balai	1,000	R.42
		97,000	NP.34
		55,739	R.42
		20,703	NP.25
2.	Kisaran - Rantau Prapat	19,800	R.42
		8,400	NP.34
		85,720	R.42
3.	Tebing Tinggi – P. Siantar	500	NP.34
		47,967	R.25
4.	Medan - Kuala	700	R.42
		40,706	R.25
5.	Binjai – Pkl. Brandan	65,915	R.25
6.	Pkl. Brandan - Besitang	14,990	R.25
7.	Besitang - Halaban	10,365	R.42
8.	Medan - Belawan	1,100	R.42
		20,507	R.25
JUMLAH		491,112	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

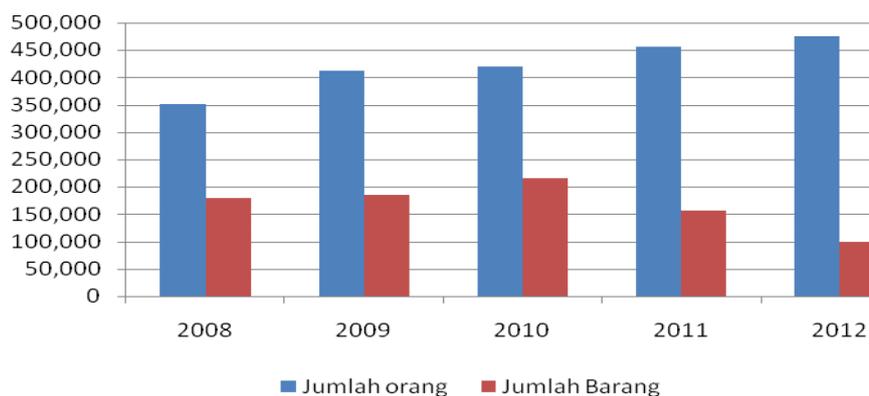
Transportasi kereta api di Sumatera Utara dimanfaatkan untuk angkutan umum dan angkutan barang. Pertumbuhan jumlah penumpang dan pengiriman barang menggunakan moda kereta api ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2.88
 Jumlah Penumpang/Barang menggunakan Angkutan Kereta Api
 di Sumatera Utara Tahun 2008-2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Penumpang (org.)	351.298	412.243	419.094	455.800	475.005
2.	Jumlah Barang (ton)	178.444	184.269	215.169	155.721	98.322

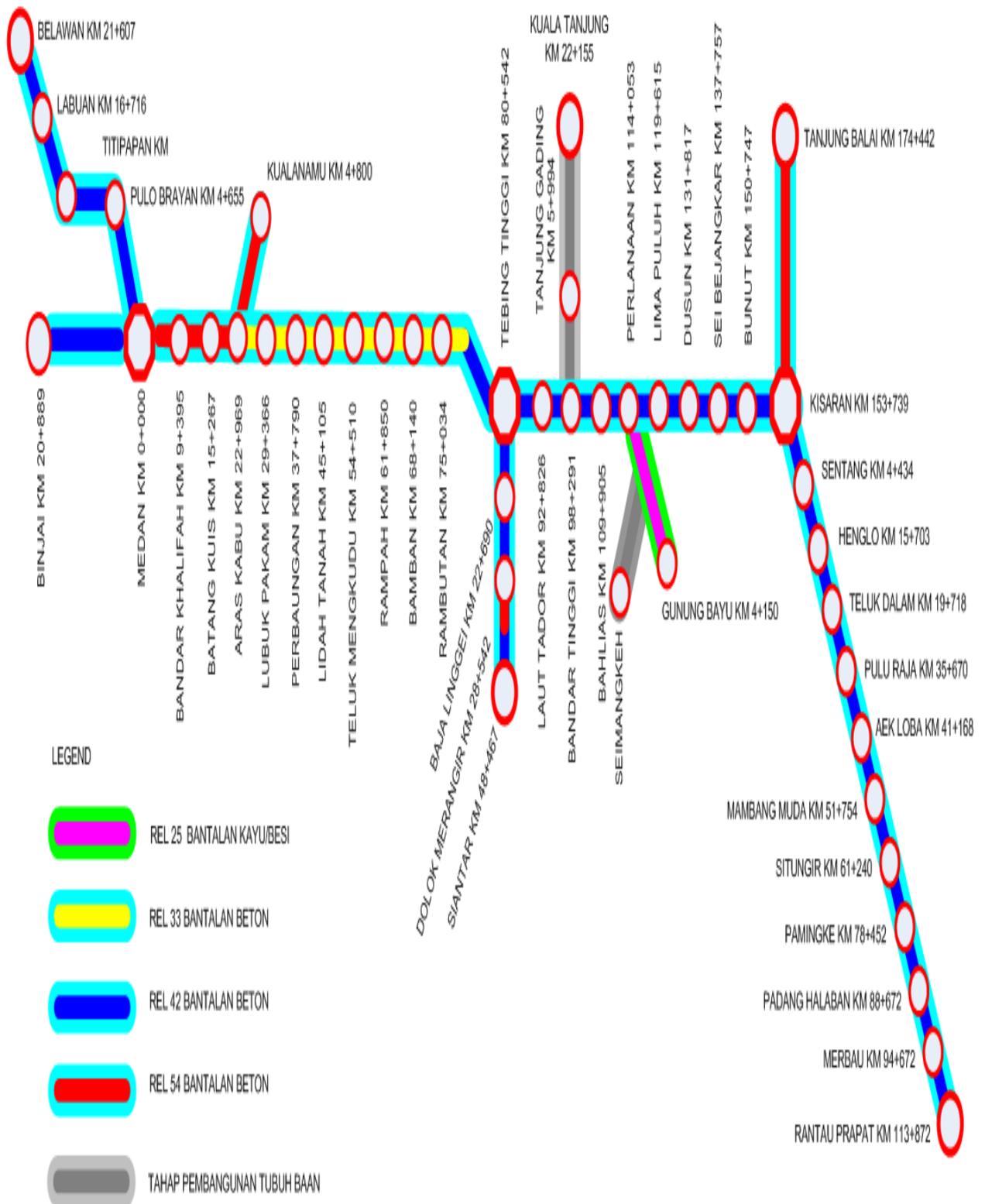
Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)

Hingga tahun 2012, penggunaan transportasi kereta api sebagai angkutan orang mengalami pertumbuhan, namun jumlah pengiriman barang mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.39.



Grafik 2. 36.
 Pertumbuhan Penumpang/Barang menggunakan Angkutan Kereta Api
 di Sumatera Utara Tahun 2008-2012
 Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2012 (Data diolah)

Jaringan kereta api perkotaan dan antar kota yang ada belum memadai untuk sarana *rapid mass transportation* dan mendukung pengembangan kawasan industri. Demikian pula dengan KA Komuter Mebidang yang sudah beroperasi sejak tahun 2009 belum berperan optimal untuk mobilisasi pergerakan orang dikawasan Mebidang yang masih didominasi angkutan jalan.



Gambar 2. 14.
Peta Jalur KA dan Tipe Bantalan Rel KA Eksisting
 Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Tabel. 2.89
Data Stasiun KA Aktif dan Tidak Aktif di Prov. Sumut

NO	STASIUN KA TIDAK AKTIF	STASIUN KA AKTIF
1	BESITANG	BELAWAN
2	PANGKALAN BRANDAN	LABUAN
3	TANJUNG PURA	PULO BRAYAN
4	TANJUNG SELAMAT	MEDAN
5	STABAT	BANDAR KHALIFAH
6	KUALA BEGUMIT	BATANG KUIS
7	KUALA BINGE	ARASKABU
8	TANJUNG PUTUS	LUBUK PAKAM
9	KUALA	PERBAUNGAN
10	SUNGGAL	LIDAH TANAH
11	DISKI	TELUK MENGGUDU
12	GELUGUR	RAMPAH
13	TITI PAPAN	BAMBAN
14	KAMPUNG BARU	RAMBUTAN
15	KEDAI DUREN	TEBING TINGGI
16	DELI BTUA	LAUT TADOR
17	KEBON PASAR	BANDAR TINGGI
18	KEBON PISANG'	BAHLIAS
19	MANDALA	PERLANAAN
20	SERDANG	LIMA PULUH
21	GALANG	DUSUN
22	SEI BULUH	SEI BEJANGKAR
23	PAYA PINANG	BUNUT
24	TANJUNG KASALI	KISARAN
25	NAGA KESIANGAN	HENGLO
26	SINAKSAK	TELUK DALAM
27	AIR JOMAN'	PULO RAJA
28	SENTANG	AEK LOBA
29	SEI ALIM	MAMBANG MUDA
30	KP. ADIANTOROP	SITUNGIR
31	GUNTING SAGA	PAMINGKE
32	BABU SALAM	PADANG HALABAN
33	MENDARIS	MERBAU
34	PERTEMBALAN	RANTAU PARAPAT
35	SIJABUT	BAJA LINGGEI
36	MASIHI	DOLOK MERANGIR
37	TAMBAKGAPUK	SIANTAR
38	ADIANTOROP	TANJUNG BALI
39	KAMPUNG BESAR	BINJAI
40	SERBANGAN	KUALANAMU
41	KEBUN SAYUR	
42	GEBANG	
43	KUALA BESILAM	
44	BABALAN	
45	BUKITMAS	
46	ALUR DUA	
47	TANJUUNG PURA HALTE	
48	KP. PANTAI GEMII	
49	KEBUN LADA	
50	PUNGAJ	

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu 2013

e. Transportasi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)

Jumlah dermaga Angkutan Danau dan Penyeberangan di Sumatera Utara adalah 18 dermaga yang sebahagian besar berada di kawasan Danau Toba. Konstruksi dermaga penyeberangan terdiri dari dermaga kayu dan dermaga beton.

Tabel. 2.90
Dermaga Angkutan Danau dan Penyeberangan
di Sumatera Utara Tahun 2012

No.	Nama Dermaga	Luas Dermaga		Konstruksi
		Lantai (M2)	Areal (M2)	
1	Tongging	200,00	400,00	Beton
2	Haranggaol	250,00	630,00	Kayu
3	Tigaras	200,00	635,00	Beton
4	Tigaraja	268,70	3.200,00	Beton
5	Ajibata	162,00	900,00	Beton
6	Tomok	270,00	480,00	Beton
7	Ambarita	225,00	-	Beton
8	Simanindo	-	2.800,00	Beton
9	Pangururan	368,00	1.500,00	Beton
10	Nainggolan	100,00	240,00	Kayu
11	Onan Runggu	60,00	157,5	Beton
12	Balige	98,00	774,00	Beton
13	Muara	450,00	452,00	Beton
14	Mogang	70,00	450,00	Kayu
15	Bakkara	175,00	450,00	Beton
16	Silalahi	-	450,00	Beton
17	Batang Serai	-	-	Beton
18	Belawan Lama	-	-	Beton

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2012

f. Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda

Pasca beroperasinya KA Bandara (airport rail service), telah menimbulkan permasalahan baru yaitu meningkatnya kemacetan akibat tundaan kendaraan di perlintasan sebidang KA dan jalan, khususnya di wilayah Kota Medan. Selain itu dengan penambahan frekuensi KA Bandara maka potensi kecelakaan di perlintasan sebidang juga semakin tinggi. Untuk itu pemerintah juga telah memprogramkan pembangunan elevated rail di beberapa perlintasan sebidang di Kota Medan.

Kegiatan peningkatan jalur KA eksisting antara Stasiun Medan – Araskabu sepanjang 23 km' sp telah selesai dilaksanakan melalui APBN pada tahun 2012. Pembangunan jalur KA baru (single track) antara Araskabu-Kualanamu sepanjang 4,8 km' sp telah selesai dilaksanakan oleh PT. KAI dan telah dilaksanakan running test pada bulan November 2012.

Ditjen Perkeretaapian telah meminjamkan 2 set KRDA yang akan digunakan untuk pelayanan KA Bandara saat ini dari Medan menuju Bandara Kualanamu sambil menunggu pengadaan sarana KA oleh PT. Railink yang diperkirakan selesai pada Agustus 2013.

Terdapat 7 perlintasan sebidang yang berpotensi tinggi terhadap kemacetan di Kota Medan yaitu daerah Pandu, Thamrin, Aksara, Sisingamangaraja, Bakaran Batu, Mandala dan Mahkamah.

Kemacetan dapat mencapai antrian sepanjang 40 meter di kedua arah lalu lintas jalan. sebelum beroperasinya KA Bandara frekuensi perjalanan KA hanya 30 PP dan saat ini pasca beroperasinya KA bandara total frekuensi perjalanan KA menjadi 56 PP yang sangat berpotensi memperparah kemacetan.



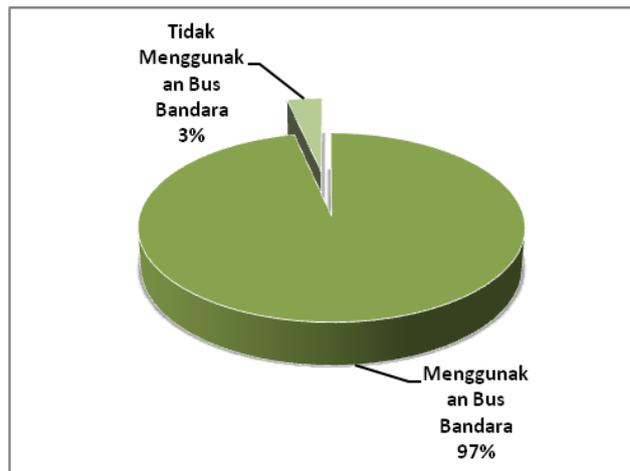
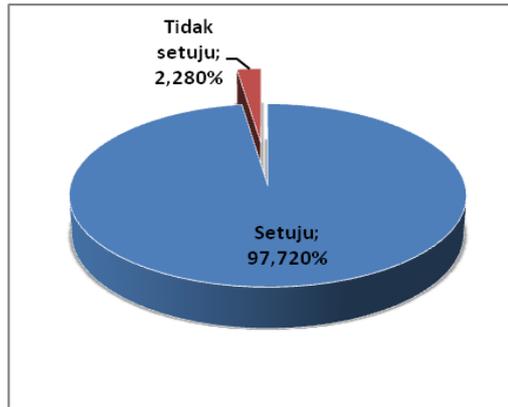
Gambar 2.15.
Lokasi perlintasan Sebidang pada Lintasan KA Stasiun Medan – KNIA
Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Untuk mengetahui preferensi pengguna jasa angkutan udara, terhadap jenis dan karakteristik pelayanan bus bandara, pada tahun 2012 telah dilakukan Studi Prefrensi Masyarakat terhadap Pelayanan angkutan dari dan ke Bandara. Hasil studi menunjukkan data-data sebagai berikut :

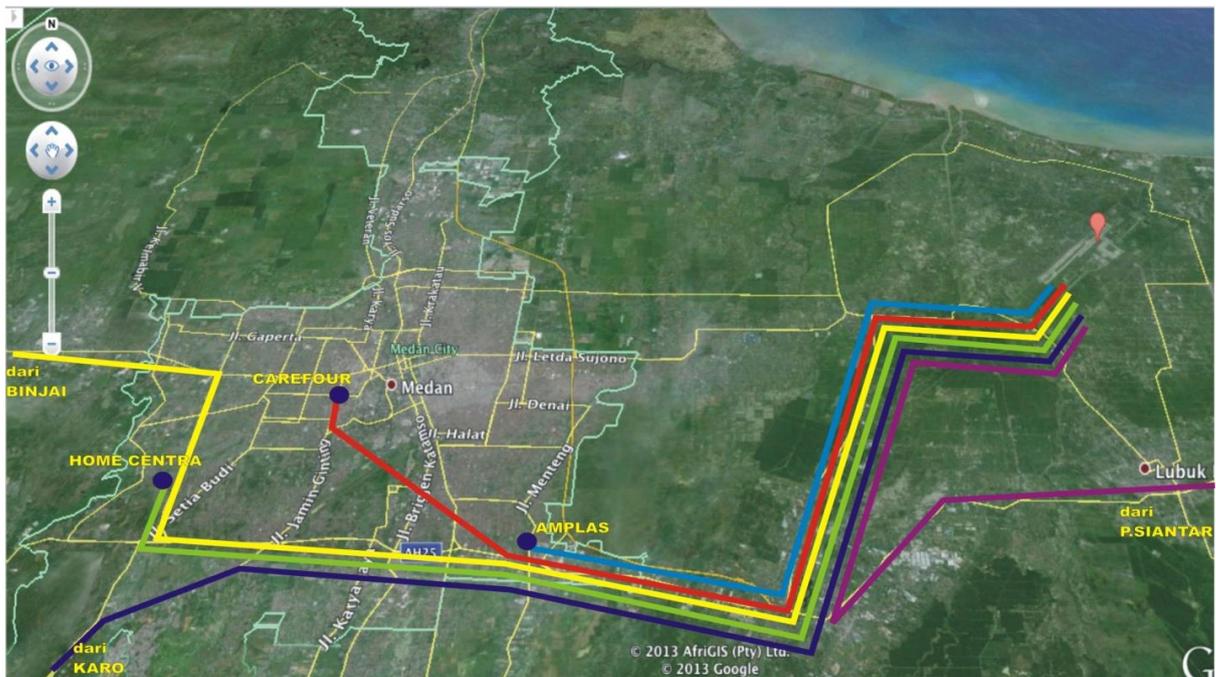
Tabel. 2.91
Preferensi Pengguna Jasa Terhadap rencana Penyediaan Bus Bandara

Moda Share		Adanya Bus Bandara				Jika Disediakan Bus Bandara			
		Setuju		Tidak Setuju		Akan Menggunakan		Tidak Menggunakan	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pribadi	1.918	1.863	97,13	55	2,87	1.836	95,72	82	4,28
Umum	1.279	1.261	98,59	18	1,41	1.251	97,81	28	2,19
Jumlah	3.197	3.124	97,72	73	2,28	3.087	96,56	110	3,44

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013



Grafik 2. 37.
 Preferensi Pengguna Jasa Terhadap rencana Penyediaan Bus Bandara
 Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013



Gambar 2. 16.
 Koridor pelayanan Angkutan Bus pemadu Moda (Bus Bandara)
 Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Proses seleksi operator dilakukan melalui proses tender pelayanan (lelang) Dasar pelaksanaan tender mengacu pada Pergubsu No.38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Angkutan Pemandu Moda Berdasarkan Kualitas (Quality Licensing).

Saat ini telah dilakukan tender terhadap 3(tiga) rute bus pemandu moda yakni :

1. KNIA – Carefour
2. KNIA – Terminal Amplas
3. KNIA – Binjai

Untuk Tahap berikutnya akan dilakukan proses tender untuk beberapa koridor dalam dan luar kota.

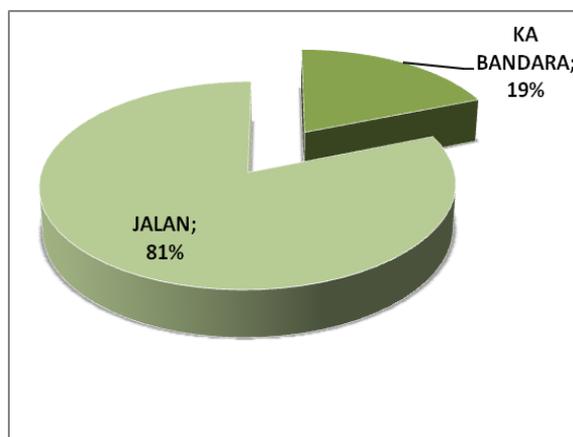
Sedangkan untuk jenis pelayanan taksi, operator dan jumlah armada yang telah dilakukan proses tender yaitu :

Tabel. 2.92
Jumlah Armada Angkutan Bus pemandu Moda (Bus Bandara)

OPERATOR ANGKUTAN		JUMLAH ARMADA
1.	PERUM DAMRI (CARREFOUR)	10
2.	PERUM DAMRI (AMPLAS)	10
3.	PT. A L S (BINJAI)	12
4.	PT. BLUE BIRD	95
5.	PT. EXPRESS LIMO	45
6.	PT. KARSA	39
7.	PT. NICE	21
8.	PUSKOPAU	100
9.	KOKAPURA	50
10	KPUM MATRA	30

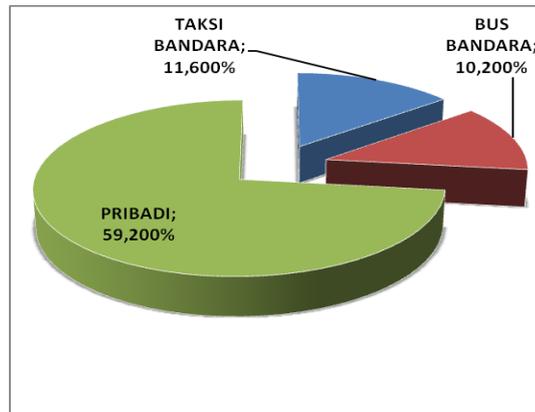
Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap share penggunaan moda angkutan dari dan ke bandara internasional Kualanamu, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 2. 38.
Evaluasi terhadap share penggunaan moda angkutan Kereta Api Bandara
Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

81 % Penumpang menggunakan moda jalan untuk menuju / keluar dari bandara, sisanya sebesar 19% menggunakan KA Bandara (Airport Rail Service). Dengan komposisi pengguna moda angkutan jalan sebagai berikut :



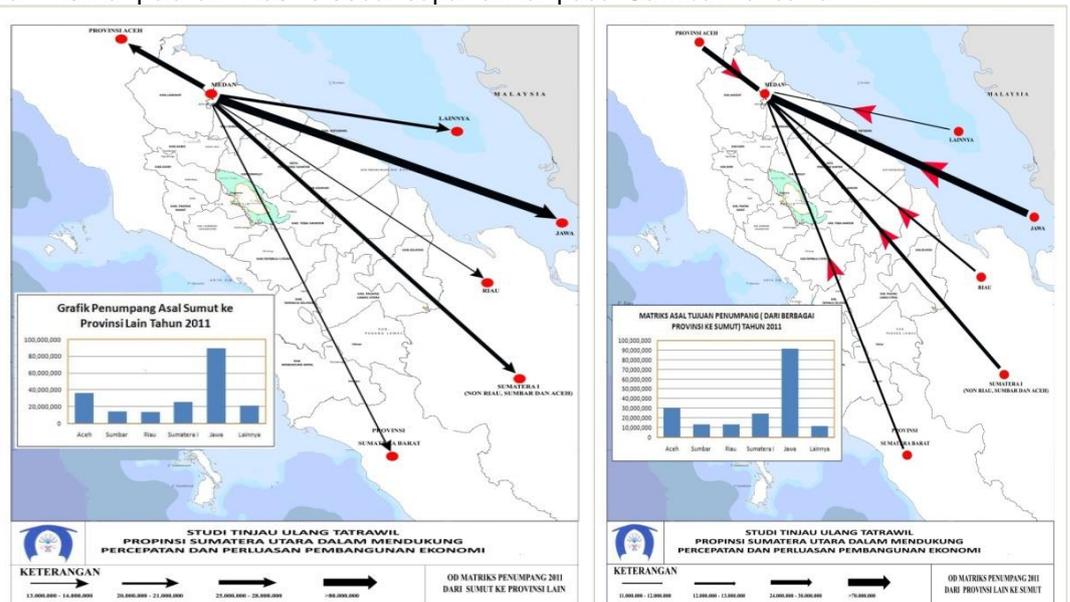
Grafik 2. 39.
Evaluasi terhadap share penggunaan moda angkutan Bus Bandara
 Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2013

Kondisi ini menunjukkan dominasi penggunaan angkutan pribadi masih cukup tinggi (59,2%). Maka ke depan perlu peningkatan peran angkutan umum guna menekan potensi kemacetan.

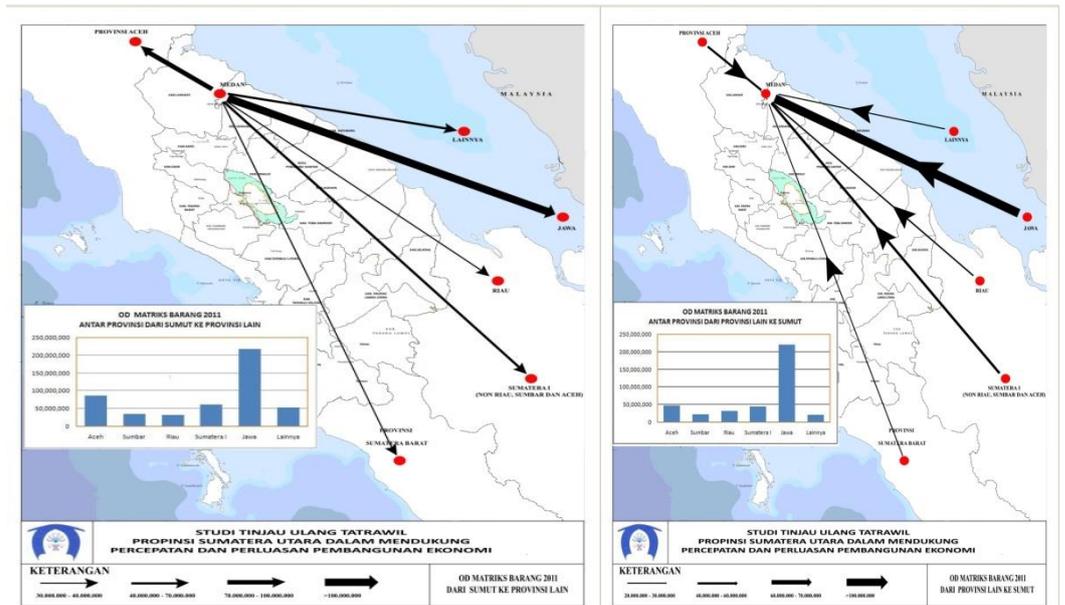
g. Pola Pergerakan Orang dan Barang (OD Matriks Survey Tahun 2011)

Berdasarkan data pola pergerakan di Provinsi Sumatera Utara cenderung oleh wilayah Medan dan sekitarnya (Medan, Binjai, Deli Serdang) sebagai kawasan dengan 1/3 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara ada di kawasan tersebut, maka pergerakan yang dilakukan adalah yang terbesar untuk kawasan Provinsi Sumatera Utara.

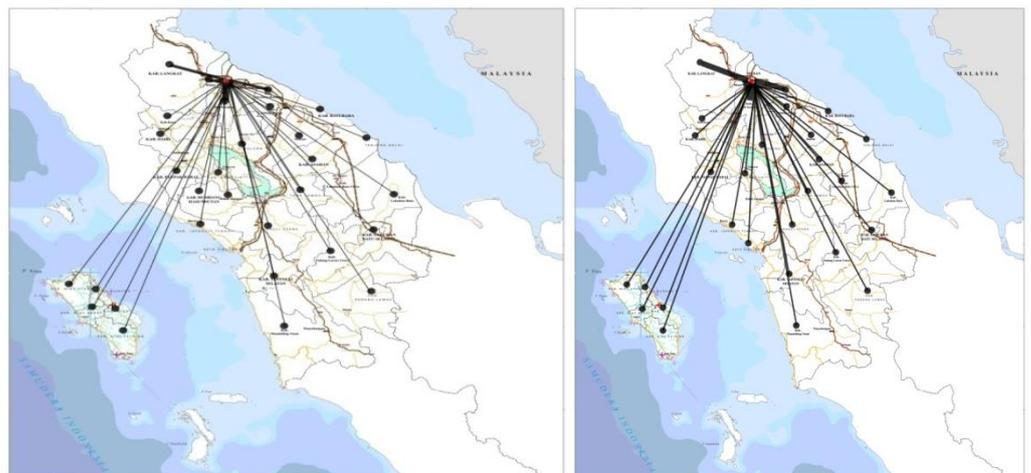
Untuk melihat pola aktivitas tersebut dapat dilihat pada **Gambar** di bawah ini



Gambar 2. 17.
 Desired Lines Pergerakan Penumpang dari dan Ke Sumatera Utara Tahun 2012
 Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2012



Gambar 2. 18.
 Desired Lines Pergerakan Barang dari dan Ke Sumatera Utara Tahun 2012
 Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2012



Gambar 2. 19.
 Desired Lines Pergerakan Penumpang dan Barangdi Sumatera Utara Tahun 2012
 Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2012

2.3.1.7. Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari jumlah rumah tangga menurut lokasi tempat tinggal, akses terhadap sumber airbersih/air minum, serta akses terhadap sanitasi layak, alih fungsi lahan, kualitas air, dan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- a. Jumlah Rumah Tangga menurut lokasi tempat tinggal

Tabel. 2.93
Jumlah Rumah Tangga menurut Lokasi dan Tipikal Tempat Tinggal
Provinsi : Sumatera Utara, tahun 2010

No.	Lokasi Permukiman	Jumlah Rumah Tangga
		2010
1	Mewah	70,877
2	Menengah	1,994,137
3	Sederhana	1,748,940
4	Kumuh	58,905
5	Bantaran Sungai	243,408
6	Pasang Surut	350,328

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2012

Dari data diatas dapat dilihat kondisi perumahan yang sangat beragam, mulai dari kondisi yang baik berupa perumahan mewah, menengah dan sederhana, hingga perumahan yang masih dalam kondisi kumuh dan sebagian masih berada di bantaran sungai dan area pasang surut. Kondisi ini menuntut penanganan lingkungan yang lebih baik dimasa depan.

- b. Cakupan Terhadap Layanan Air Bersih

Kondisi penyediaan fasilitas air bersih bagi penduduk Sumatera Utara sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.94
Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

No	Jenis	Sumber Air Minum Penduduk Sumatera Utara (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Air Kemasan	-	5,44	12,75	16,48	22,69
2	Ledeng	24,61	22,26	22,43	19,32	15,18
3	Pompa	18,39	18,62	-	17,64	17,55
4	Sumur	37,19	35,58	37,08	28,08	25,93
5	Mata Air	12,53	11,74	11,42	12,51	12,79
6	Lainnya (sungai, hujan, dll)	7,28	6,36	16,32	5,96	5,85

Sumber : BPS Sumatera Utara, diolah

Untuk pelayanan air minum masyarakat, terdapat jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan sebesar 15,18%, hampir 85% dari penduduk Provinsi Sumatera Utara masih mengandalkan air sumur, air sungai, air hujan, dan air dalam kemasan sebagai sumber air minumnya.

- c. Cakupan terhadap Layanan Sanitasi Dasar

Tabel. 2.95
Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Sanitasi Dasar Sehat
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

No	Jenis	Tempat Pembuangan Tinja Penduduk Sumatera Utara (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tangki Septik	53,92	58,75	62,97	64,45	64,13
2	Kolam/Sawah	1,32	0,79	0,81	0,83	0,84
3	Sungai/Danau	13,80	12,31	12,65	13,25	12,51
4	Lainnya	30,96	28,14	23,57	21,47	22,52

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada Tahun 2012 masih terdapat masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan di Sumatera Utara, seperti kolam/sawah sebesar 0,84%, Sungai/Danau sebesar 12,51%, sedangkan masyarakat yang sudah memiliki tangki septik baru sekitar 64,13%.

d. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Telah dilakukan Analisa AMDAL, khususnya pada perusahaan besar di Sumatera Utara, sebanyak 19 dokumen dalam bentuk KA-ANDAL dan ANDAL/RKL-RPL, UKL-UPL dan DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPPL (Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

e. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan telah dilakukan melalui penanganan pengaduan masalah lingkungan, sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus pengaduan. 7 (tujuh) pengaduan terkait masalah pencemaran lingkungan telah diproses dengan melakukan verifikasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

f. Alih Fungsi Lahan

Sumatera Utara masih memiliki kekurangan 200.000 Ha areal untuk pertanian. Disamping itu konversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit marak dilakukan oleh masyarakat bukan perusahaan sawit. Kecendrungan masyarakat dalam mengalih fungsikan lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit diperkirakan dipicu oleh saluran irigasi yang tidak tersedia, irigasi yang ada tidak berfungsi, produktivitas sawah yang rendah.

Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada petani, misalnya pada saat harga naik, pemerintah langsung membuka keran impor, dan petani cenderung mengikuti trend permintaan pasar (sosial culture). Selain alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit, juga banyak terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman di perkotaan dan kawasan pinggir kota. Alih fungsi juga terjadi pada lahan tambak menjadi lahan perkebunan, hal ini ditenggarai akibat adanya serangan hama pada tambak.

g. Pencemaran Air Danau Toba

Berbagai sumber potensi beban pencemaran Daerah Tangkapan Air Danau Toba menunjukkan limbah ternak adalah beban terbesar, kemudian limbah penduduk. Jumlah potensi beban pencemaran adalah 1,113,475.06 ton BOD/Tahun, sedangkan limbah ternak mencapai 1,110,693.35Ton BOD/tahun atau 99.75 %, Total N 827,291.90 Ton /Tahun dan Total P 194,126.30 Ton/Tahun (Tabel dan Gambar).

Tabel. 2.96

Jumlah Potensi Beban Pencemaran pada Daerah Tangkapan Air Danau Toba

No	Pollutan	BOD (Ton/Tahun)	T-N (Ton/Tahun)	T-P (Ton/Tahun)
1	Domestik	2,781.71	505.77	143.30
2	Peternakan	1,110,693.35	826,610.87	193,963.88
3	Perikanan	42,021,166.40	3,120.13	1,098.36
	Total	43,134,641.46	830,412.03	195,224.67

Sumber: BLH Provinsi Sumatera Utara, 2012

Tabel. 2.97
Beban Pencemaran Limbah Domestik pada DTA Danau Toba

NO	Kabupaten/Kecamatan	BOD (kg/hari)	Total Nitrogen (kg/hari)	Total Posfor (kg/hari)
I	Karo			
	Kec. Merek	69.95	11.99	3.4
II	Humbang Hasundutan			
	Kec. Baktiraja	101.78	18.51	5.24
	Kec. Paranginan	116.67	21.21	6.01
	Kec. Lintong Nihuta	294.89	53.62	15.19
	Kec. Dolok Sanggul	85.57	15.56	4.41
	Kec. Pollung	183.07	33.28	9.43
III	TAPUT			
	Kec. Muara	198.47	36.09	10.22
	Kec. Siborong-borong	221.08	40.2	11.39
	Kec. Sipahutar	20.39	3.71	1.05
IV	Samosir			
	Kec. Nainggolan	177.61	32.29	9.15
	Kec. Palipi	241.12	43.84	12.42
	Kec. Sitio-tio	106.79	19.42	5.5
	Kec. Harian	43.86	7.97	2.26
	Kec. Sianjur Mula2	136.98	24.9	7.06
	Kec. Simanindo	292.26	53.14	15.06
	Kec. Sianjur mula2	136.98	24.9	7.06
	Kec. Pangururan	440.85	80.15	22.71
	Kec. Onan Rungu	154.81	28.15	7.98
	Kec. Runggur Nihuta	125.24	27.77	6.45
V	TOBASA			
	Kec. Ajibata	108.36	19.7	5.38
	Kec.Lba Julu	122.04	22.19	6.29
	Kec.Pintu Pohan Meranti	105.88	19.25	5.45
	Kec.Bona Tua Lunasi	70.95	12.9	3.65
	Kec.Porsea	200.55	36.46	10.33
	Kec.Parmaksian	98.85	17.97	5.09
	Kec.Siantar Narumanda	85.55	15.55	4.41
	Kec.Uluan	5.62	1.02	0.29
	Kec.habinsaran	108.14	19.66	5.57
	Kec.Nassau	181.3	32.96	9.34
	Kec.Silaen	111.12	20.2	5.72
	Kec.Sigumpar	275.16	50.03	14.17
	Kec.Lagu Boti	64.35	11.7	3.31
	Kec.Tampahan	549.57	99.92	28.31
	Kec.Balige	54.74	9.95	2.82
	Kec.Bor-bor			
VI	Dairi			
	Kec.Silahi Sabungan	35.16	6.39	0.81
	Kec.Pegagan Hilir	2.75	0.5	0.14
VII	Simalungun			
	Kec.Silimakuta	16.98	3.09	0.87
	Kec.Purba	79.46	14.45	4.09
	Kec.Haranggaol Horison	74.5	13.55	3.84
	Kec.Dolog Pardamean	29.16	5.3	1.5
	Kec. Pematang Sidamanik	31.75	5.77	1.64
	Kec.Girsang Sipangan Bolon	118.76	21.59	6.12

Sumber: BLH Provinsi Sumatera Utara, 2012

h. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Berdasarkan Rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) provinsi Sumatera Utara 2010-2020, data baseline Tahun 2010 Sumatera Utara memiliki emisi GRK sebesar 171.890.991,5 tCO₂eq. Emisi GRK tersebut merupakan kontribusi dari 6 sektor yang terdiri atas sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah.

Tabel. 2.98

Kontribusi emisi dari 6 (enam) sektor di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010

No.	Sektor	Kontribusi Emisi, 2010 (tCO ₂ eq)	% (Persentase)
1	Pertanian*	9.324.598,5	5,42
2	Kehutanan dan Lahan Gambut**	139.132.277,0	80,94
3	Energi	8.383.000,0	4,88
4	Transportasi	5.299.200,0	3,08
5	Industri	7.659.900,0	4,46
6	Pengelolaan Limbah	2.092.016,0	1,22
Total		171.890.991,5	100

Sumber: Hasil olahan, 2012

Catatan: *) Telah memasukkan emisi dari tutupan lahan di Perkebunan, Pertanian dan Sawah

**) Net emisi setelah mengeluarkan kelas tutupan lahan untuk sektor Pertanian

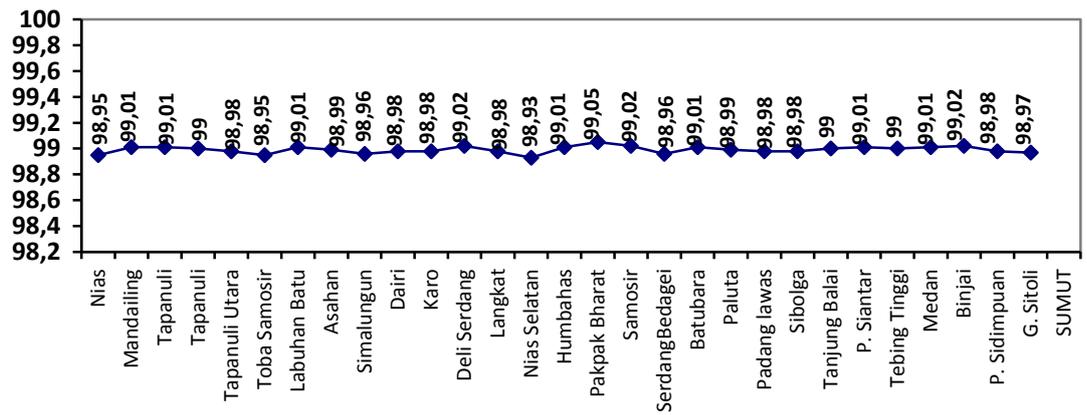
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa emisi GRK Sumatera Utara yang terbesar bersumber dari sektor kehutanan dan lahan gambut, diikuti sektor pertanian, energi, industri, transportasi dan pengelolaan limbah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya mitigasi GRK di dalam rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk 6 sektor tersebut.

Selain aspek mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim juga perlu menjadi perhatian, terutama pada sektor pertanian dalam rangka pengamanan produksi beras. Tahun 2011 terjadi bencana kekeringan tanaman padi sawah di Sumatera Utara dengan luas mencapai 5.599,6 ha. Jumlah ini jika dikalikan dengan rata-rata produksi per ha berarti Sumatera Utara mengalami ancaman potensi kehilangan hasil padi sawah sebesar 27.286,85 ton. Sedangkan untuk bencana alam banjir di Sumatera Utara tahun 2011 telah berpotensi menyebabkan penurunan produksi padi pada lahan sawah seluas 10.439,4 ha, jika dikalikan dengan produksi rata-rata per ha maka bencana banjir tersebut berpotensi menurunkan produksi sebanyak 50.871,20 ton. Dengan demikian aspek adaptasi perubahan iklim harus menjadi perhatian dalam pengamanan produksi beras.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender diberbagai bidang. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A, SMP/Mts/Paket B, SMA/MA/Paket C, dan berturut-turut sebesar 100.62 %, 102.76 % dan 101.56 % data ini meningkat di bandingkan tahun 2005 rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A sebesar 99.70 %, begitu juga pada tingkat SMP dan SMA. Walaupun mengalami sedikit penurunan tapi tetap berada di atas 100, angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 target MDGs 100 % sudah tercapai .

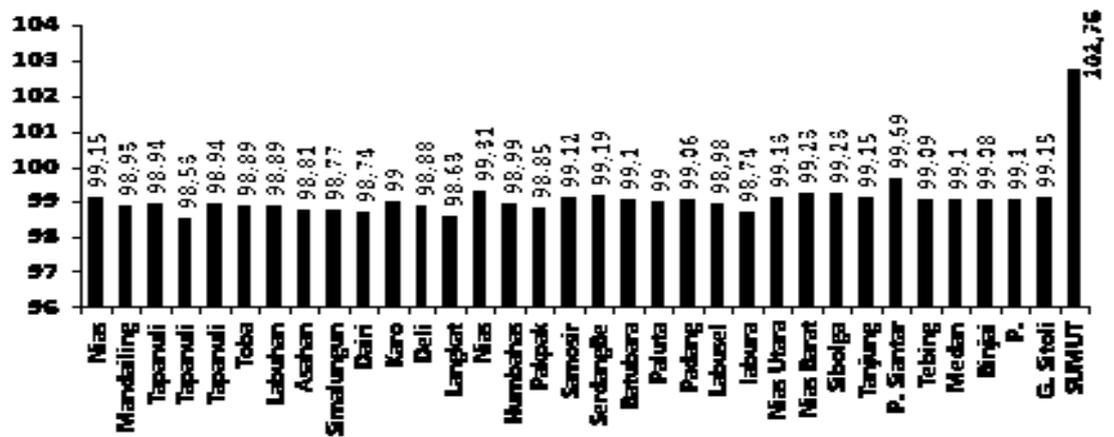
Dengan demikian Sumatera Utara sudah secara efektif menuju (*on-track*) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Rasio Angka Partisipasi Murni Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah.



Grafik 2. 40.

Rasio APM SD/MI/Paket A Kabupaten/KotaProvinsi Sumatera Utara Tahun 2010

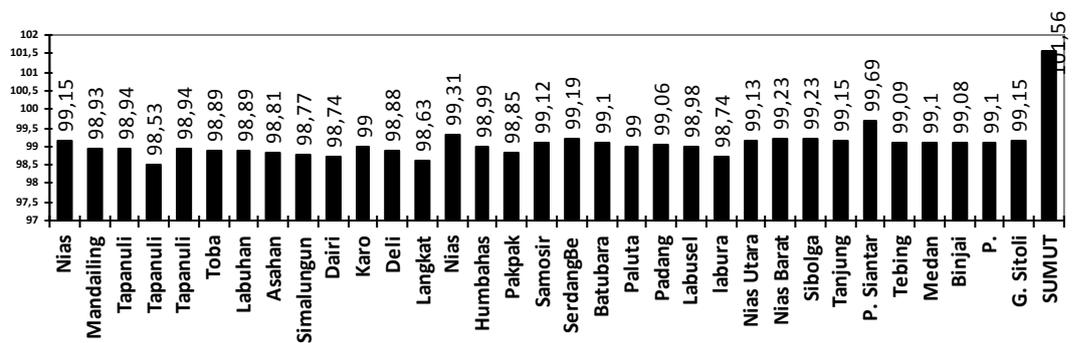
Sumber : BPS Provsu



Grafik 2. 41.

Rasio APM SMA/MA/Paket A Kabupaten/KotaProvinsi Sumatera Utara Tahun 2009/2010

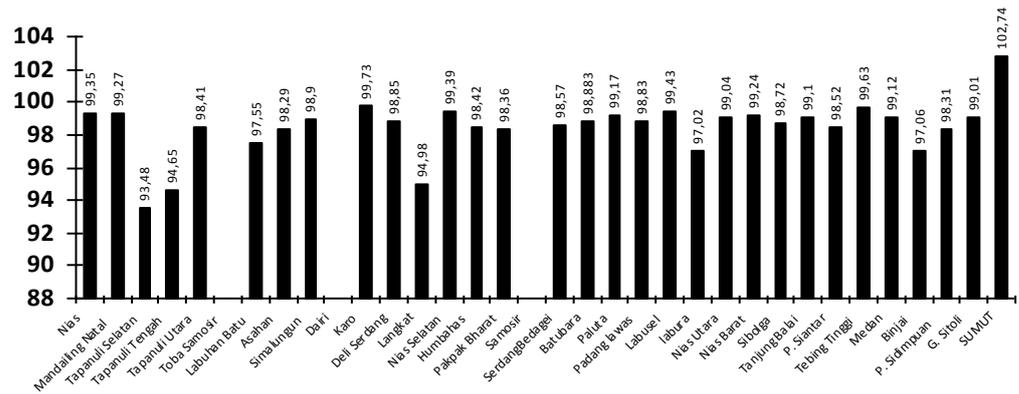
Sumber : BPS Provsu



Grafik 2. 42.

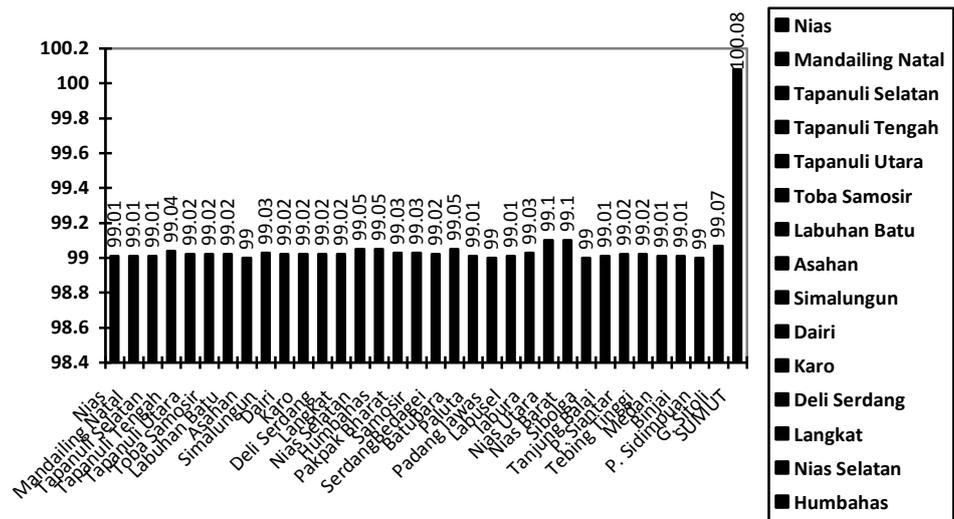
Rasio APM Perguruan Tinggi Kabupaten/KotaProvinsi Sumatera Utara Tahun 2009/2010

Sumber : BPS Provsu



Grafik 2. 43.
 Angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun
 Sumber : BPS Provsu

Angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai sasaran MDGs. Pada tahun 2009/2010 disparitas gender angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki Provinsi Sumatera Utara kelompok usia 15 tahun ke atas telah mencapai 100 yaitu sebesar 100.08 %. dan ini mengalami kenaikan dari tahun 2005 sebesar 99.83 %.



Grafik 2. 44.
 Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap Laki-laki perkabupaten/Kota
 Provinsi Sumatera Utara 2010
 Sumber ; BPS Provsu

Pada bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 38.84 % pada tahun 2010, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar 33.67 %. Walaupun terjadi peningkatan tetapi masih jauh dari target MDGs 2015 sebesar 57 %. Dibidang ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Data BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa TPAK perempuan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hanya berkisar sebanyak 57.165 orang, angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki sebanyak 176.884 orang di periode yang sama.

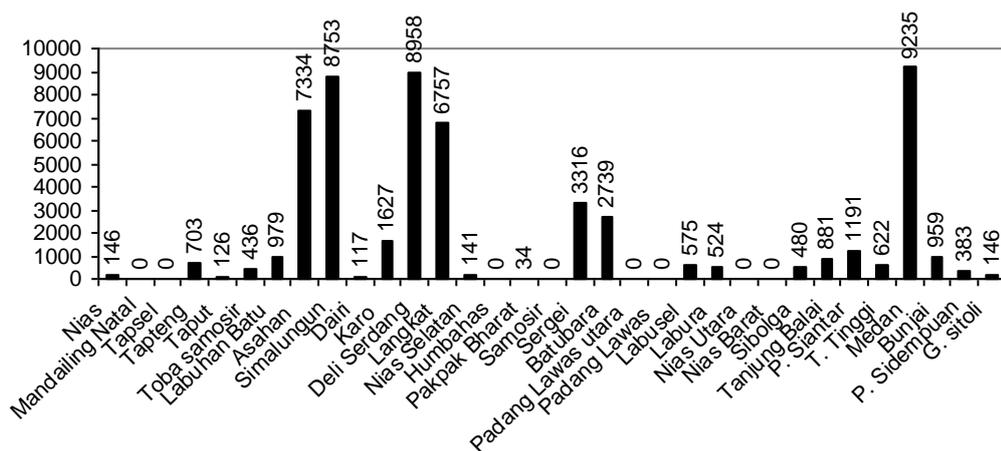
Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 TPAK di Sumatera Utara sebesar 57.34 %, tahun 2006 naik menjadi 66.90 % kemudian pada tahun 2007 kembali naik menjadi 67.49 %, begitu pula pada tahun 2008, angka tersebut kembali naik menjadi 68.33 % (BPS Provsu 2009).

Berdasarkan status pekerjaannya, hampir sepertiga (28.40 %) penduduk yang bekerja di Sumatera Utara adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha dengan dibantu anggota keluarga mencapai sekitar 20.12 %, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 20.62 %. Hanya 2.78 % penduduk Sumatera Utara yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap /bukan anggota keluarga (Profil Gender Provsu 2009). Data proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian tidak didapatkan datanya dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi, maupun dari SKPD terkait.

Jumlah pencari kerja di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih banyak perempuan dari pada laki-laki, khususnya pada jenjang pendidikan SMTA umum, SMEA, Diploma I, Sarjana Muda, dan Sarjana Lengkap. Selanjutnya selama kurun waktu 4 tahun (2005-2008) jumlah pencari kerja perempuan lebih banyak yang sudah ditempatkan atau sudah mendapat lapangan kerja dibanding laki-laki. Berdasarkan FGD menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak tingkat angka partisipasi kerjanya dibandingkan laki-laki. Hal ini sejalan dengan tingkat pendapatan keluarga yang rendah sehingga menuntut perempuan untuk bekerja.

Selain itu banyak perusahaan dan sektor informal yang menerima tenaga kerja perempuan karena upah kerja untuk perempuan lebih rendah dan relative tidak banyak tuntutan (menerima apa adanya), serta keterbatasan keterampilan dan tingkat pendidikan yang ditamatkan (Profil Gender Provsu 2009).

Jika dilihat dari Kabupaten/Kota, Kota Medan merupakan Kota tertinggi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebanyak (9.235 orang). Dan yang paling sedikit adalah Pakpak Bharat (34 orang), sementara itu ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak ada perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, capaian perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dapat dilihat pada grafik;

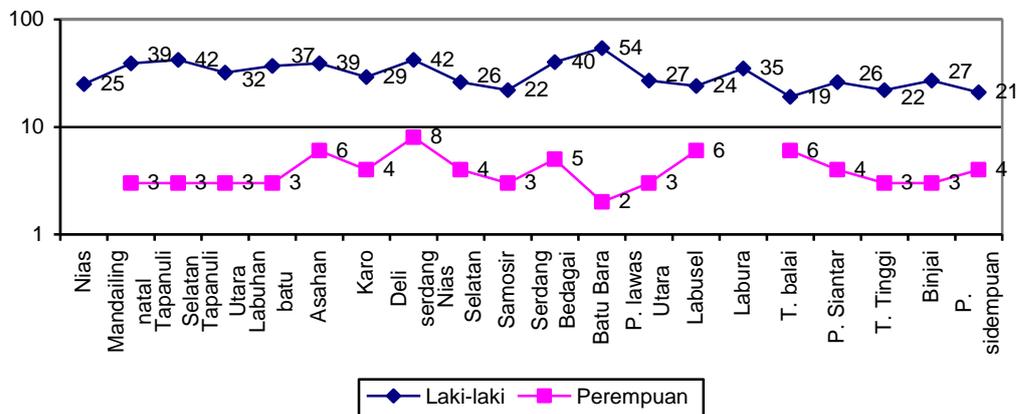


Grafik 2. 45.

Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di sektor Non pertanian
PerKabupaten/Kota Sumatera Utara 2010
Sumber ; BPS Provsu

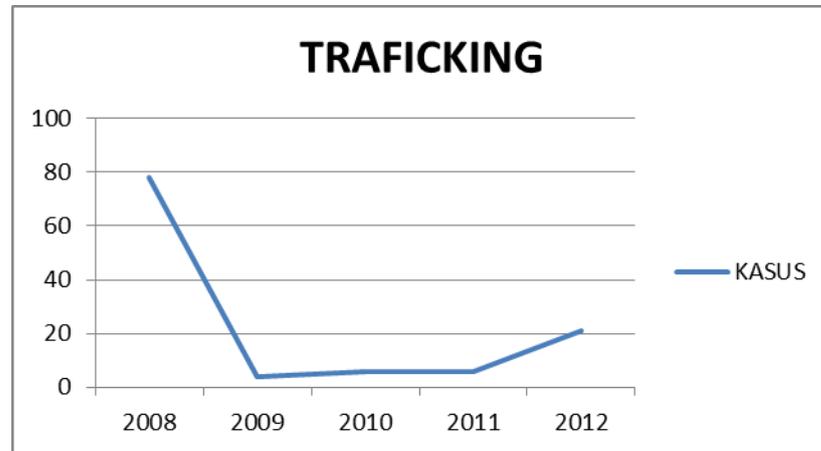
Kemajuan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan juga diukur berdasarkan proporsi perempuan di lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif), partisipasi perempuan di bidang politik menunjukkan peningkatan. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara hasil pemilu 2004 berjumlah 85 orang, yang terdiri dari 79 orang (93 %) laki-laki dan 6 orang (7 %) perempuan. Hasil pemilu 2009 berjumlah 100 orang, yang terdiri dari 84 orang (84 %) laki-laki dan 16 orang (16 %) perempuan. Seiring dengan penambahan jumlah anggota DPRD, partisipasi perempuan juga meningkat 9 %. dan diharapkan pada tahun 2015 partisipasi perempuan yang duduk di DPRD bias mencapai 25 %. Kemajuan yang dicapai di bidang politik antara lain adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, di susul dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 % keterwakilan perempuan dan kepengurusan Partai Politik di tingkat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk anggota legislatif. Perempuan calon legislatif pada pemilu 2009 di wilayah Provinsi Sumatera Utara tercatat 5 perempuan calon anggota DPD, 213 calon DPR RI, dan 668 untuk DPR tingkat Provinsi Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sejumlah caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif baik di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota umumnya tidak memiliki latar belakang aktif dipergerakan orop perempuan. Secara kuantitas jumlah aktivis perempuan Sumatera Utara yang terpilih sangat sedikit, oleh karena itu dukungan kerja bagi caleg perempuan yang terpilih dalam lembaga perwakilan, baik di DPRD maupun DPD sangat diperlukan, agar kualitas representasi isu-isu keadilan gender dapat mewarnai proses-proses politik demi lahirnya berbagai kebijakan berperspektif keadilan gender.

Jika dilihat perkembangan Kabupaten/Kota, jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 berjumlah 875 yang terdiri dari 799 laki-laki (91.31 %) dan 74 perempuan (8.69 %), sedangkan hasil pemilu 2009 berjumlah 924 orang dengan rincian 850 orang (92 %) laki-laki dan 74 perempuan (8 %). Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota bertambah tetapi partisipasi perempuan menurun. Kabupaten Nias dan Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan Kabupaten yang tidak ada perempuan yang duduk di DPRD, berikut perkembangan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten/Kota yang dijelaskan pada Grafik 1.17 pada halaman selanjutnya. namun pada grafik di bawah ini tidak semua kabupaten/kota ada, masih ada 10 kabupaten/kota lagi yang datanya tidak didapatkan.



Grafik 2. 46.
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2009
 Sumber ; BP2AKB

Disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengarusutamaan gender, namun masih muncul permasalahan terkait dengan perdagangan manusia (trafficking), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2. 47.
Kasus Trafficking di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
Sumber : POLDA SUMUT, 2013

Mulai dari tahun 2010 – 2012 tercatat banyak kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang terjadi di Sumatera Utara. Dari data yang dihimpun dari lembaga pemerhati anak terlihat bahwa terdapat 55 kasus KDRT, 21 kasus penganiayaan, 25 kasus pencabulan, 9 kasus Perkosaan, 17 kasus penelantaran anak, 14 kasus persetubuhan anak di bawah umur, 49 kasus pembatasan hak asuh, 19 kasus pembatasan hak pendidikan, 1 kasus melarikan anak, 14 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), 1 kasus pernikahan dini, 6 kasus intimidasi terhadap anak, 15 kasus anak berkonflik dengan hukum, 38 kasus anak terlantar (KPAID, 2012 data diolah).

Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Konvensi Hak Anak Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun Peraturan perundangan-undangan tersebut belum mengatur semua permasalahan terkait perlindungan anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; maka Isu Gender dalam Pembangunan merupakan isu strategis mengingat jumlah Penduduk Sumatera Utara perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara strategis dan spesifik harus tergambar dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah, yang dilihat dari akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

Pengintegrasian Gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan permasalahan gender sudah menyentuh pembahasan lintas sektor di dalam pembangunan daerah yang dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan alur pikir setiap struktur RPJMD dengan menggunakan analisis Gender model Gender Analisis Pathway (GAP) yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS).

Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat kajian tinjauan akademis tentang perlindungan anak dan Rancangan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang nantinya diharapkan akan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui proses Pembahasan di DPRD.

Peraturan Daerah ini menjadi bahan penyusunan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih komprehensif, sesuai dengan kebutuhan kepentingan terbaik bagi anak dan diharapkan menjadi payung hukum bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun peraturan daerah perlindungan anak di tingkat Kab/Kota yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan permasalahan anak di daerah masing-masing. Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan anak yang mencakup Hak sipil dan kebebasan anak, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, Penyelenggaraan perlindungan khusus.

Disamping itu Pemerintah Provsu telah mengambil langkah-langkah yaitu pembangunan menuju Kabupaten/kota layak anak dan Forum anak sebagai salah satu langkah untuk mengintegrasikan hak-hak anak secara dini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana didalamnya terdapat 5 kewajiban dan 31 hak anak. Adapun yang menjadi indikator dari Kota Layak Anak (KLA) telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 2.99
Indikator Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Sumatera Utara

KLUSTER	Indikator
KLUSTER I	
Hak Sipil dan Kebebasan	Persentase anak dengan Akta Kelahiran
	Fasilitas Informasi Layak Anak
	Jumlah Kelp Anak, FA di Kab/Kota, Kec, Desa dan Kel
KLUSTER II	
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Persentase Usia perkawinan < 18 Tahun
	Lembaga Kesejahteraan Anak
	Lembaga Parenting Skill untuk Orang Tua
KLUSTER III	
Kesehatan dasar dan kesejahteraan	AKB
	Prevalensi Gizi
	Persentase ASI Eksklusif
	Jumlah Pojok Asi
	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
	Jumlah Lembaga Layanan Kespro dan Kes Mental
	Jumlah Anak Miskin dengan akses Peningkatan Kesejahteraan
	Persentase RT dengan Air Bersih
Kawasan Bebas Rokok	
KLUSTER IV	
Pendidikan, waktu luang, seni budaya	Angka Partisipan PAUD
	Persentase Wabel 12 Tahun
	Persentase Sekolah Ramah Anak
	Sekolah dengan program, sarana dan prasarana, perjalanan anak ke dan dari sekolah
	Fasilitas kegiatan Luar Sekolah
KLUSTER V	
Perlindungan Khusus	Persentase AMPK yang memperoleh layanan
	Penanggulangan Bencana pada anak yang memperhatikan kepentingan anak
	Persentase kasus ABH dengan Restorative Justice
	Persentase anak bebas dari pekerjaan terburuk bagi anak

Sumber : Biro PP, PA dan KB Setda Provinsi Sumatera Utara, 2012

Melalui penetapan indikator Kota Layak Anak (KLA) ini, maka Provinsi Sumatera Utara telah berhasil menjadikan lebih 50 % wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menjadi Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.100
Kabupaten/Kota Layak Anak

NO	KABUPATEN/KOTA	Tahun		
		2011	2012	2013
1	DELI SERDANG	√		
2	LANGKAT	√		
3	KARO			
4	SIMALUNGUN	√		
5	ASAHAN		√	
6	LABUHAN BATU		√	
7	LABUHAN BATU UTARA			√
8	LABUHAN BATU SELATAN			√
9	TAPANULI TENGAH			√
10	TAPANULI SELATAN			
11	TAPANULI UTARA			√
12	NIAS			√
13	DAIRI			
14	MEDAN	√		
15	PEM. SIANTAR	√		
16	TJ. BALAI		√	
17	BINJAI		√	
18	TEBING TINGGI	√		
19	SIBOLGA			
20	MANDAILING NATAL			√
21	TOBA SAMOSIR		√	
22	PADANGSIDIMPUAN			√
23	SERDANG BEDAGAI	√		
24	HUMBANG HASUNDUTAN			
25	NIAS SELATAN		√	
26	SAMOSIR			√
27	PAK PAK BARAT			
28	BATU BARA	√		
29	PADANG LAWAS			
30	PADANG LAWAS UTARA			
31	GUNUNG SITOLI		√	
32	NIAS UTARA			
33	NIAS BARAT			
JUMLAH		8	15	23

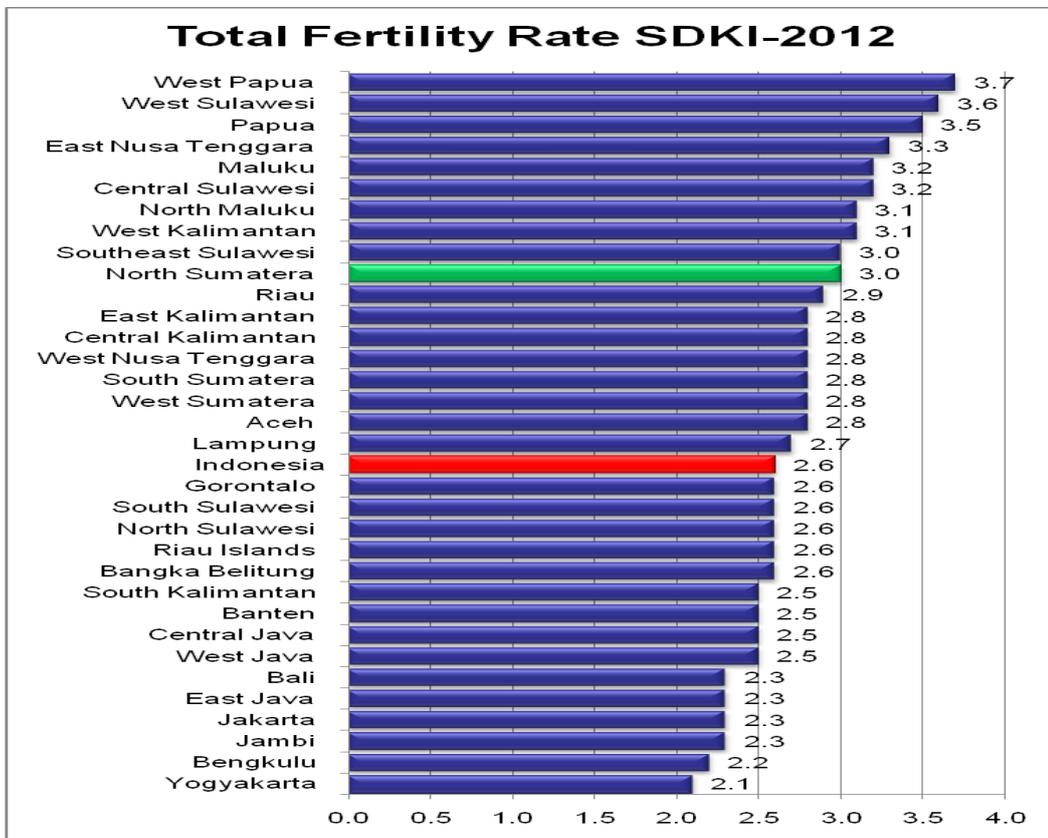
Sumber : Biro PP, PA dan KB Setda Provinsi Sumatera Utara, 2012

2.3.1.9. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan persoalan kependudukan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dari program Keluarga Berencana (KB) akan secara langsung berdampak pada pertumbuhan penduduk.

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat dari rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan penurunan dari 2,42 tahun 2007 menjadi 1,92 ada tahun 2008, namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 2,1 dan 2,07 pada tahun 2010. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan penduduk Sumatera Utara.

Bila dilihat TFR Provinsi Sumatera Utara hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2012 adalah 3,0 %, ini berarti telah terjadi penurunan sekitar 0,8 % dari hasil SDKI tahun 2007 yaitu sekitar 3,8 %. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru untuk dapat menurunkannya lebih rendah lagi di masa yang akan datang, sebagaimana diharapkan dalam RPJMN TFR Provinsi Sumatera Utara menjadi sekitar 2,1. Untuk Total Fertility Rate SDKI 2012, dapat dilihat pada grafik berikut;



Grafik 2. 48.
Total Fertility Rate SDKI Tahun 2012
Sumber ; BP2AKB

Pada era reformasi dan desentralisasi ini program-program keluarga berencana yang sangat baik di masa lalu, di masa kini kurang gencar disosialisasikan secara signifikan kepada masyarakat terutama kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, dan lingkungan kerja terutama di daerah padat penduduk, sehingga sebagian masyarakat masih belum memahami tujuan program pembangunan manusia Indonesia sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan rakyat dan merupakan investasi yang akan berdampak pada perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Komitmen untuk melaksanakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada era otonomi daerah saat ini cenderung semakin melemah, petugas lapangan dan penyuluh KB yang selama ini merupakan ujung tombak dilapangan, saat ini sudah semakin berkurang secara signifikan, keinginan untuk merekrut kembali petugas lapangan KB di kabupaten dan kota belum terlihat. Dari segi penganggaran, dapat diketahui bahwa dukungan anggaran operasional program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota sangat kecil ditambah lagi dengan tidak terintegrasinya program Keluarga Berencana di setiap Program/Kegiatan Pembangunan Daerah.

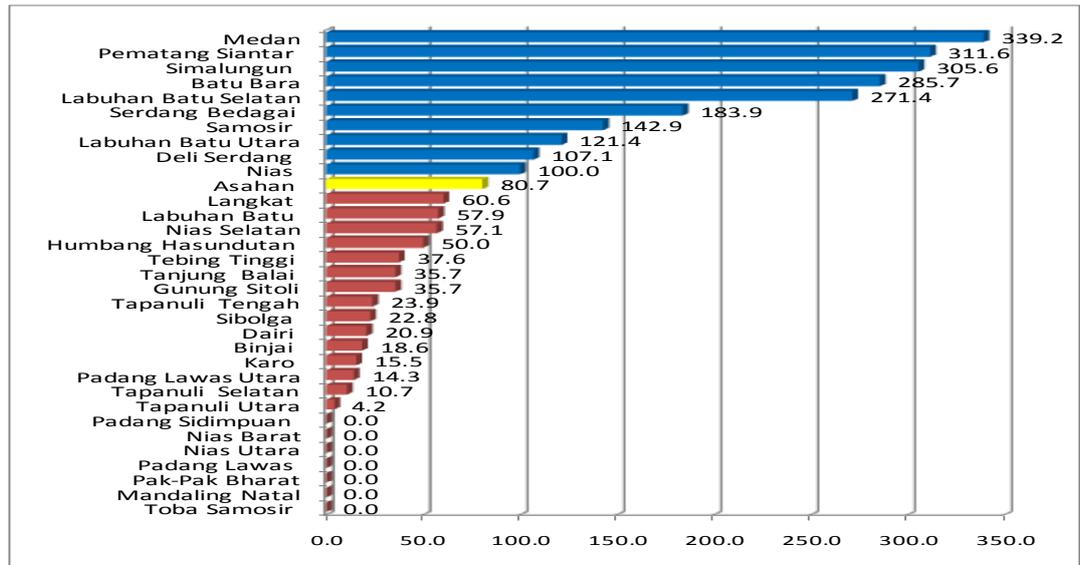
Pada aspek kependudukan diupayakan mengatasi masalah-masalah kependudukan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, peningkatan pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan keluarga, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kualitas hidup masyarakat, untuk itu semua SKPD, Lintas Sektor dan Organisasi Profesi, untuk selalu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan dilaksanakan secara terpadu serta terintegrasi. Bila tidak dari sekarang kita mewaspadainya, maka persoalan kependudukan ini akan menjadi bom waktu bagi bangsa Indonesia.

Dalam Kontrak Kerja Pemerintah (KKP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 telah memberikan gambaran sebaran capaian Model Operasi Pria (MOP) dan kondom, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.101
Capaian Model Operasi Pria (MOP) dan kondom Tahun 2010-2012

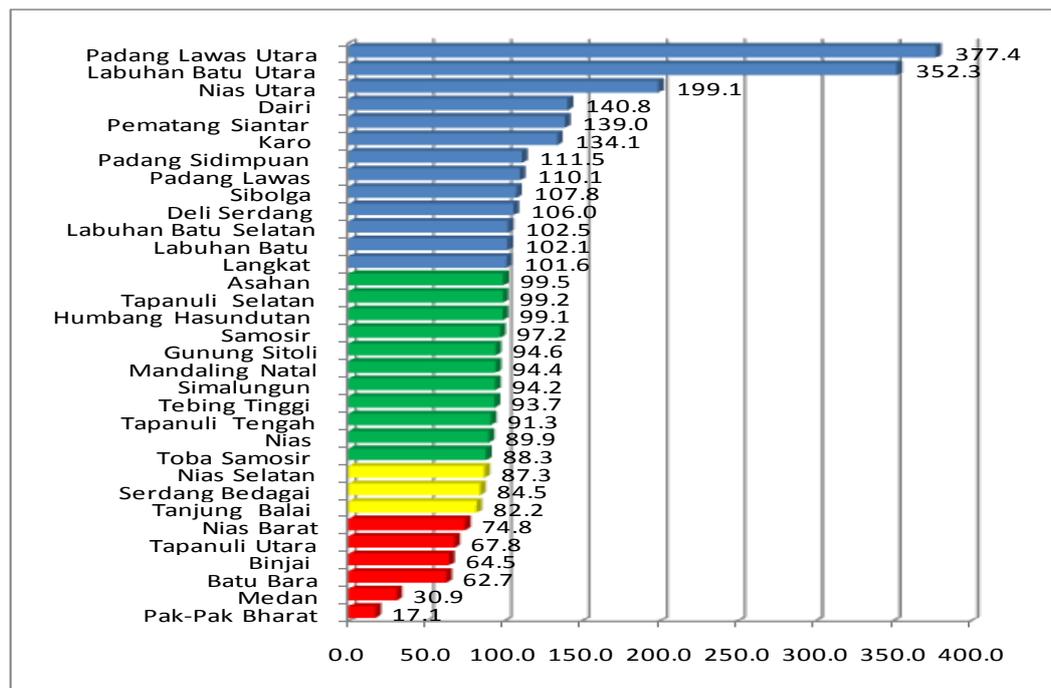
TAHUN	ALKON	SASARAN PPM	PENCAPAIAN PB PRIA	%
2010	KONDOM	85,000	80,042	94.2
	MOP	2,000	2,088	104.4
	JUMLAH	87,000	82,130	94.4
2011	KONDOM	60,000	61,673	102.8
	MOP	2,088	2,813	134.7
	JUMLAH	62,088	64,486	103.9
2012	KONDOM	65,370	56,901	87.0
	MOP	2,960	4,871	164.6
	JUMLAH	68,330	61,772	90.4

Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB tahun 2012



Grafik 2. 49.

Sebaran pencapaian kondom terhadap Kontrak Kerja Pemerintah (KKP) Tahun 2010
 Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB tahun 2011



Grafik 2. 50.

Sebaran pencapaian kondom terhadap Kontrak Kerja Pemerintah (KKP) Tahun 2012
 Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB tahun 2012

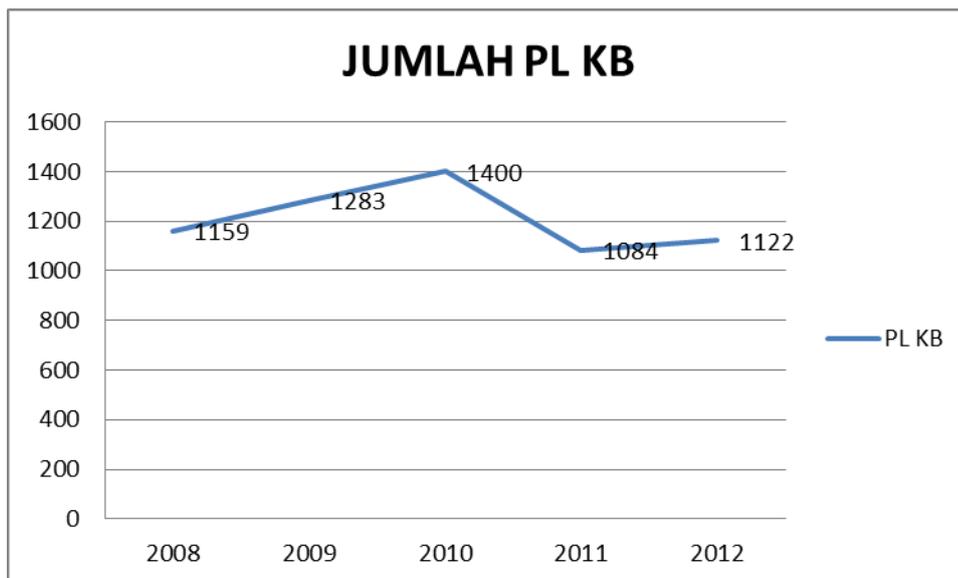
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa pencapaian peserta KB Pria dari tahun 2010 – 2012 mengalami kenaikan secara fluktuasi, untuk peserta KB pria dengan MOP setiap tahunnya sasaran dapat tercapai lebih dari 100 % dari KKP Provinsi Sumatera Utara (Kontrak Kinerja Pemerintah), hal ini karena penggarapannya dilakukan bekerjasama dengan seluruh mitra kerja dan pelayanan dengan MUYAN (Mobil Unit Pelayanan).

Pada tahun 2012 Kota Medan (Sumatera Utara) telah memecahkan rekor MURI jumlah Vasektomi (KB Pria) terbanyak di Indonesia dengan jumlah peserta 1.575 orang, keberhasilan ini menunjukkan kemampuan kita dalam mendorong kesertaan pria dalam ber-KB dan antusias masyarakat Sumatera Utara khususnya Pria dalam program KB. Sehingga dapat dikatakan bahwa KB Pria di Sumatera Utara cukup sukses. Dengan adanya Program dan Grafik di atas maka partisipasi laki-laki masuk dalam kategori tinggi, sehingga capaian program KB di Sumatera Utara tercapai. Hanya saja bila melihat pada kondisi penyebaran penggunaan alat kontrasepsi baik untuk pria dan wanita, maka dapat dikatakan usaha kearah tersebut belum optimal, hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah peserta KB aktif kurun waktu 2011 – 2012, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



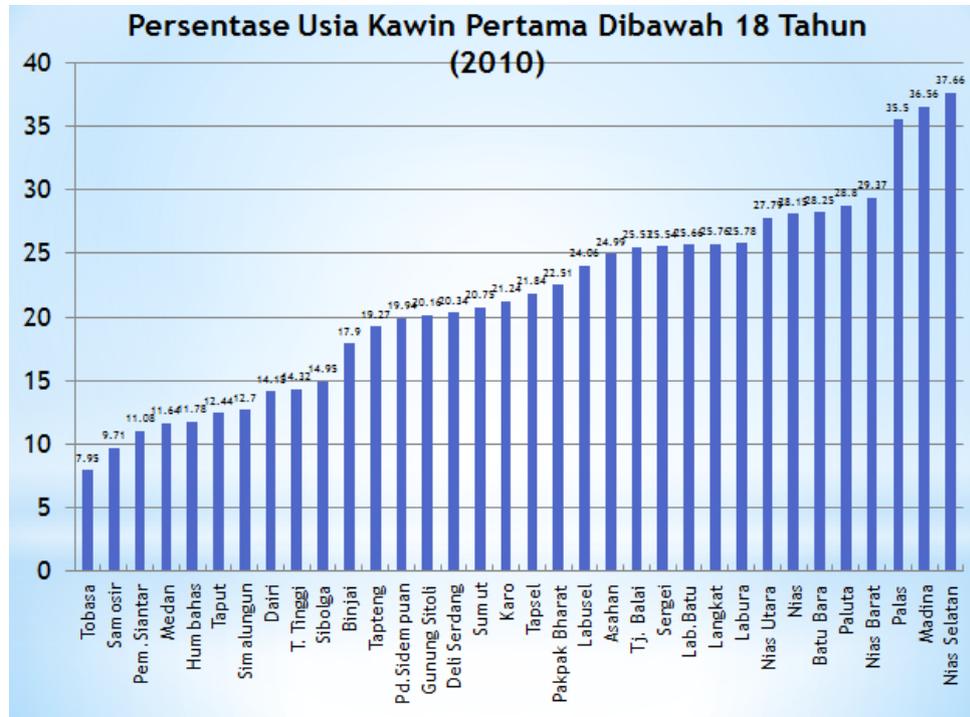
Sumber : BKKBN, 2012
Grafik 2. 51. Jumlah Peserta KB Aktif

Salah satu penyebab turunnya jumlah peserta KB aktif ini adalah masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh KB (PL KB) di Sumatera Utara, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 2. 52. Jumlah Tenaga Penyuluh KB
 Sumber : BKKBN, 2012

Sedikitnya jumlah tenaga PL KB (1122 orang) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menjadi hal penting untuk terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hal ini tentu tidak seimbang dengan persentase usia kawin di bawah umur 18 tahun yang mempunyai potensi cukup besar dalam penambahan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2. 53.
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 18 Tahun
Sumber : BKKBN, 2012

Sesuai dengan hasil pendataan keluarga tahun 2012 yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Utara jumlah keluarga Pra Sejahtera/Sejahtera I pada kondisi awal tahun 2013 sebanyak 34,16%. Kondisi ini diharapkan akan terus menurun sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD 2014 – 2018 yaitu sebesar 31% pada tahun 2014, 28% pada tahun 2015 dan 2016, 24% pada tahun 2017 dan 21% pada tahun 2018.

Peningkatan kesejahteraan keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dapat dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat serta keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif antara lain melalui bantuan modal kepada kelompok - kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang perlu diteruskan melalui pendekatan – pendekatan yang bersifat kemitraan.

Perkembangan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keberadaan kelompok UPPKS dan anggotanya pada tahun 2011 sebagai berikut : jumlah anggota UPPKS pada tahun 2011 sebanyak 34.658 keluarga, terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 33.433 keluarga atau 96,47% dari jumlah anggota UUPKS yang ada.

Sesuai dengan hasil pendataan keluarga tahun 2012 yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Utara jumlah keluarga Pra Sejahtera/Sejahtera I pada kondisi awal tahun 2013 sebanyak 34,16%. Kondisi ini diharapkan akan terus menurun sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD 2014 – 2018 yaitu sebesar 31% pada tahun 2014, 28% pada tahun 2015 dan 2016, 24% pada tahun 2017 dan 21% pada tahun 2018.

Peningkatan kesejahteraan keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dapat dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat serta keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif antara lain melalui bantuan modal kepada kelompok - kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang perlu diteruskan melalui pendekatan – pendekatan yang bersifat kemitraan.

Perkembangan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keberadaan kelompok UPPKS dan anggotanya pada tahun 2011 sebagai berikut : jumlah anggota UPPKS pada tahun 2011 sebanyak 34.658 keluarga, terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 33.433 keluarga atau 96,47% dari jumlah anggota UUPKS yang ada.

2.3.1.10. Sosial

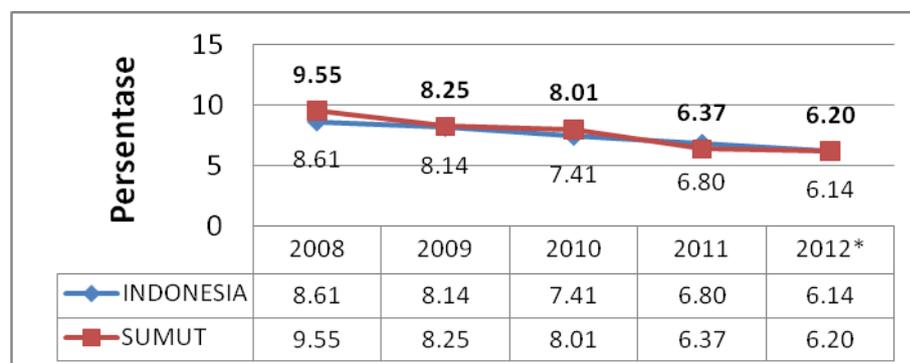
Sampai dengan tahun 2012, telah dibangun sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota, yang menampung anak-anak terlantar, gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sumatera Utara terdiri dari balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak jermal, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas narapidana, korban penyalahgunaan napza, keluarga fakir miskin, keluarga rumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial / pengungsi, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan hiv aids (odha) dan keluarga rentan.

2.3.1.11. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, namun jumlah angka pengangguran masih cukup besar. Dari jumlah angkatan kerja Tahun 2012 (periode Agustus) sebesar 6.131.700 jiwa, sebanyak 380,000 orang (6,20%) merupakan Pengangguran Terbuka. Mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang masih sebesar 402,100 orang (6,37%).

Namun demikian jika dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2012 sebesar 69,41%, mengalami penurunan pada periode yang sama sebesar 72,09%.



Grafik 2. 54.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2008-2012
Sumber : BPS, data diolah 2012

2.3.1.12. Transmigrasi

Tujuan program transmigrasi adalah mewujudkan masyarakat transmigran yang mandiri dan sejahtera. Program transmigrasi di Provinsi Sumatera Utara di mulai sejak tahun 1960 hingga sekarang. Penempatan transmigran di Sumatera Utara telah dilakukan sejak tahun 1960 – 1969 sebanyak 31.783 KK dengan sebaran lokasi di Kabupaten Langkat, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan. Salah satu dampak program pembangunan transmigrasi adalah pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian mengamanatkan pembangunan transmigrasi harus memenuhi kriteria clear and clean (2 C) serta catur layak yaitu; layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Program transmigrasi mengalami keterbatasan lahan di Provinsi Sumatera Utara dengan tidak terpenuhi kriteria clear and clean (2C) dan catur layak. Sehingga pembangunan calon lokasi transmigrasi baru sulit untuk diwujudkan.

Sesuai dengan arahan kebijakan program ketransmigrasian yang memfokuskan penanganan permasalahan lokasi – lokasi transmigrasi yang telah purna bina atau sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten. Tujuan dari hal ini agar transmigran memperoleh hak – hak nya, yaitu; legalitas lahan yang dimiliki dan pengembangan usaha serta akses ke lokasi-lokasi yang mengalami keterlambatan dalam perkembangannya karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Pengembangan sumber daya manusia transmigrasi berupa pelatihan-pelatihan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengembangan usaha ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan transmigran, serta pengolahan hasil-hasil usaha yang telah berkembang di lokasi transmigrasi, menjadi salah satu agenda pembangunan provinsi Sumatera Utara.

2.3.1.13. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Sumatera Utara.

a. Persentase koperasi aktif

Perkembangan Koperasi di Sumatera Utara sampai Desember 2013 berjumlah 11.754 dengan 6.678 diantaranya adalah koperasi aktif dan 5.076 buah koperasi yang tidak aktif. Ratio Koperasi aktif sampai dengan tahun 2013 sebesar 56.8%. Kabupaten/Kota yang tertinggi Ratio Koperasi aktif yakni Kota Medan sebesar 12%. Dan yang terendah adalah Kabupaten Nias Barat sebesar 0.1%.

Adapun beberapa penyebab tidak aktifnya koperasi tersebut antara lain diakibatkan oleh motif/tujuan pembentukan koperasi yang tidak jelas; Mutu SDM Koperasi relative rendah; koperasi kurang mampu mengakses permodalan; kualitas produk yang dihasilkan relative masih rendah; daya saing rendah; ditariknya fasilitas kredit pangan; ditariknya kewenangan koperasi sebagai penyalur pupuk; banyaknya tunggakan kredit uaha tani di Koperasi.

Tabel. 2.102
 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 - 2013
 Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah koperasi aktif	5,429	6,327	6,222	6,395	6,706	6.678
2	Jumlah koperasi	9,540	10,528	10,623	10,879	11,206	11.754
3	Persentase koperasi aktif	56.91	60.10	58.57	58.78	59.84	57

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada akhir tahun 2013 terdapat sejumlah 194 unit KSP dengan jumlah anggota 126.7242.256 orang dan nasabah berjumlah 254.338 nasabah, dengan total asset berjumlah ± Rp. 628 milyar dan jumlah pinjaman yang diberikan sebesar ± Rp.524 milyar.

Selain Koperasi Simpan Pinjam, juga terdapat koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdasarkan Kabupaten/Kota sampai bulan Desember 2012 sebanyak 100 unit KJKS dengan jumlah anggota sebanyak 47.927 orang .

Unit Simpan Pinjam (USP) sampai dengan tahun 2013, berjumlah 3.782 unit dengan jumlah anggota 835.848 orang dan nasabah berjumlah 1.002.008 nasabah. Total asset yang dikelola sejumlah Rp. 1.143 Milyar dengan jumlah pinjaman ± Rp. 1.090 Milyar.

b. Jumlah UKM BPR/LKMUKM

Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara terdapat Usaha Mikro sebesar 1.453.063 unit dan Usaha Kecil 698.666 unit. Sementara perusahaan menengah berjumlah 136.574 unit dengan jumlah penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebesar 625.954 orang.

2.3.1.14. Penanaman Modal

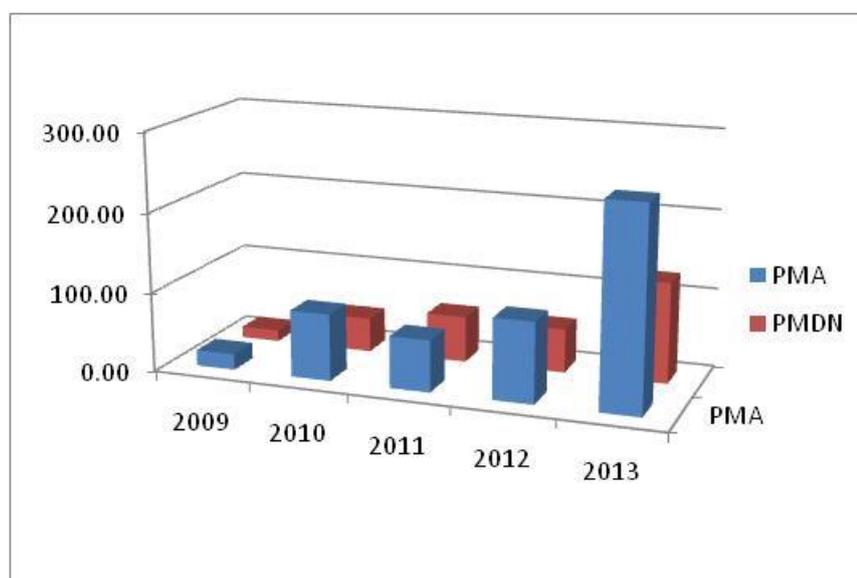
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.103
 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	Jumlah Investor	14	20	34
2010	Jumlah Investor	43	84	127
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	126	252	378
J U M L A H		522	296	818

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Grafik 2.55. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 14 jumlah proyek ditahun 2009 menjadi 126 proyek ditahun 2013, begitu juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan dari semula 20 proyek menjadi 252 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

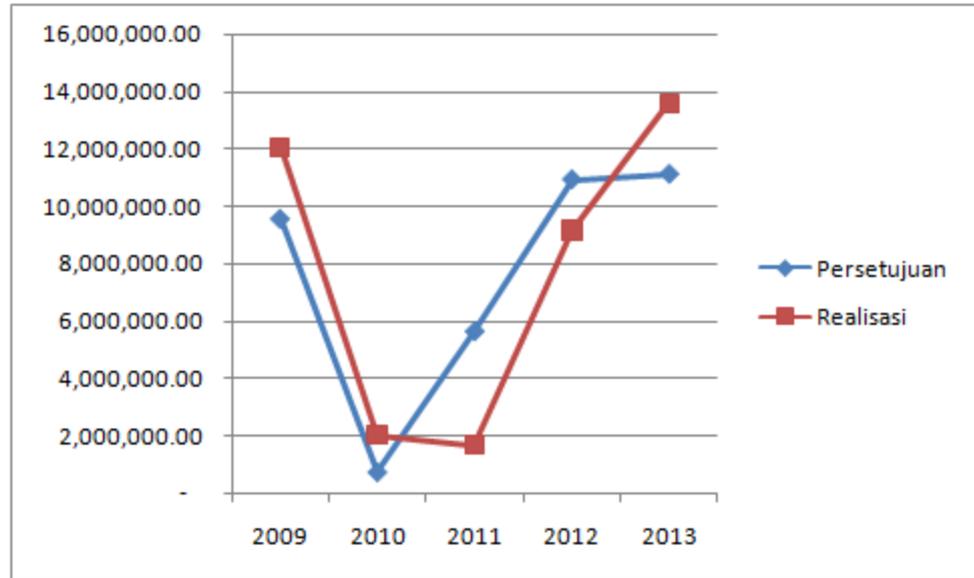
Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.104
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012

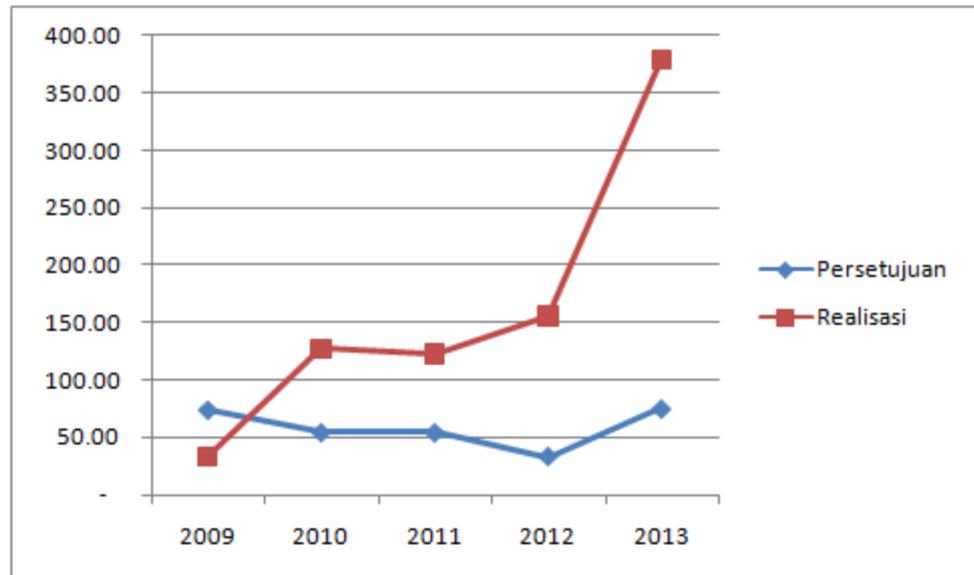
Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2009	74	9.546.173,77	34	12.047.929,86
2010	54	747.349,91	127	2.024.885,56
2011	54	5.644.561,01	123	1.662.522,50
2012	33	10.921.354,71	156	9.163.446,19
2013	75	11.106.765,19	378	13.588.420,60
Total	290	37.966.204,59	818	38.487.204,71

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu 2013

Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir ini, baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan nilai investasi yang disetujui dan yang direalisasikan.



Grafik 2. 56. Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)
 Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu 2013



Grafik 2. 57. Grafik Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu 2013

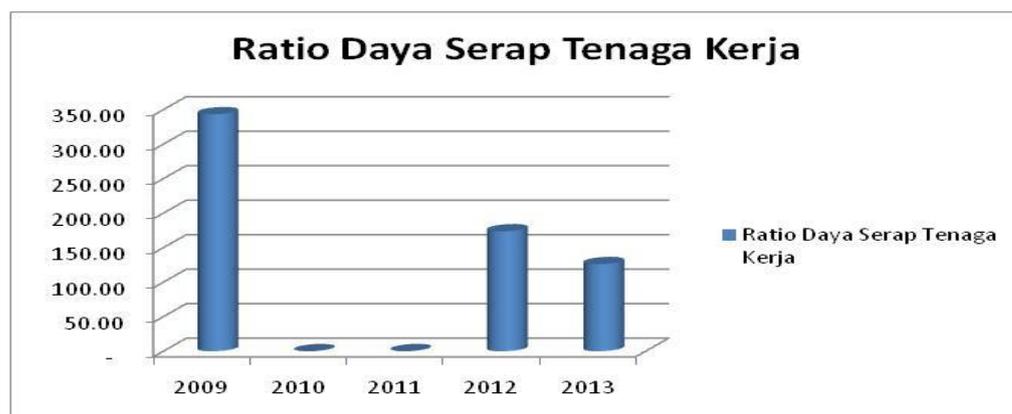
c. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.105
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN)
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	11.672	13.995	12.826	27.092	47.696
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	34	127	123	156	378
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	343,3	110,2	104,3	173,7	126,18

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu tahun 2013



Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA selama 2009-2013

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012, namun bila dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012, rasio daya serap tenaga kerja terlihat meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa investasi pada sektor riil mengalami penurunan dengan penggunaan teknologi masih mendominasi investasi hal ini mengakibatkan orientasi penyediaan lapangan kerja adalah padat modal bukan padat karya.

2.3.1.15. Kebudayaan dan Pariwisata

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik, hal ini dapat dilihat dari suku/ etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Ada 8 (delapan) suku /etnis asli di Sumatera Utara, yaitu : Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Phakpak Dairi, Simalungun, Batak Angkola dan Nias. Selain itu terdapat juga beberapa suku/etnis pendatang antara lain adalah suku Jawa, Minangkabau, Cina dan Aceh.

Selain memiliki kawasan wisata alam yang memukau, Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda, Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu :

- Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Istana Maimun di Kota Medan.
- Masjid Raya Medan.
- Budaya Loncat batu di Kabupaten Nias. Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sumatera Utara juga memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, baik wisata alam, kuliner maupun wisata budaya. Namun jika dilihat dari kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara yang masih sangat kecil dibandingkan sektor lainnya. Salah satu faktor pendukung yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata adalah aksesibilitas menuju ke daerah wisata yang dirasa masih sangat kurang. Selain itu dukungan masyarakat pariwisata di Sumatera sangat diperlukan untuk peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara.

Dalam lima (5) tahun terakhir (2008-2012) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui 3 (tiga) pintu masuk pada tahun 2012 mencapai 241.833 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 8.38 % dari tahun sebelumnya.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada bulan Desember 2012 mencapai rata-rata 47,23 %, atau naik 0,67 poin dibanding TPK hotel berbintang bulan November 2012 yang sebesar 46,56 %. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya angka TPK Desember 2012 naik 3,07 poin, yaitu dari 44,16 % bulan Desember 2011 menjadi 47,23 % pada bulan Desember 2012.

2.3.1.16. Kepemudaan dan Olahraga

a. Kepemudaan

Pemuda pemegang peran sebagai ujung tombak keunggulan daya saing bangsa. Dinamika dan euforia kehidupan global yang diwarnai oleh persaingan yang semakin ketat, menuntut kita untuk segera mungkin melakukan rekayasa percepatan membangun keunggulan dalam penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda juga harus memiliki keunggulan etos kerja dan kewirausahaan. Dengan memperhatikan permasalahan pengangguran dan anak putus sekolah yang menimpa banyak kalangan pemuda kita saat ini, dan persaingan di arena kehidupan global, terutama dalam akses pasar domestik dan pasar internasional, maka keunggulan kewirausahaan menjadi sangat penting dan strategis untuk dimiliki oleh pemuda. Sungguh tepat bila seluruh elemen pemerintah dan elemen masyarakat menyatukan kekuatan untuk melaksanakan gerakan nasional kewirausahaan pemuda. Mengembangkan kewirausahaan pemuda dimaksudkan untuk menjadikan pemuda sebagai wirausahawan dan mengembangkan kiprah wirausahawan muda sebagai aktor penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi dan industri di kota dan desa.

Satu solusi yang dikedepankan untuk menanggulangi pengangguran pemuda adalah mewirausahakan pemuda. Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda merupakan jawaban konkret untuk menjadikan pemuda bukan sebagai pencari kerja tetapi menjadi pencipta lapangan kerja. Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu infrastruktur industri yang berbasis masyarakat yang menjadi bagian integral dan pengembangan industri nasional dengan cara memaksimalkan pelaksanaan Program Pengembangan Kelompok Wirausaha Pemuda yang terdiri dari tiga proses penciptaan dan pemberdayaan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Inkubasi
3. Pelembagaan Kelompok Usaha

Ketiga proses tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan tak luput dari dukungan dana, panduan, pengembangan iptek dan pemasaran, sarana dan prasarana, fasilitas permodalan serta fasilitasi pengembangan usaha. Dengan demikian semakin terbukanya lapangan usaha bagi pemuda dan lapangan kerja bagi pemuda dan lapangan kerja bagi masyarakat pada umumnya.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari 20 Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) dari berbagai jenis usaha yang telah dibentuk dan dibina oleh Provinsi Sumatera Utara :

- KWP Risoles Indonesia
- KWP Cendol Kompeni
- KWP Angel Cel Ponsel
- KWP Rea-Choc
- Young Sablon dan Konveksi
- KWP Brilliant Laundry
- KWP Lele Jumbo
- KWP Rempala Sumut
- KWP Tan Collection
- Dll.

Hingga sekarang ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya untuk menggali potensi pemuda dalam berwirausaha sehingga mampu menjadi individu yang berdaya saing. Namun hal ini akan tercapai dengan adanya dukungan penuh dari seluruh pemegang kepentingan dan lapisan masyarakat lainnya.

b. Olahraga

Pemprovsu melalui Dispora Provsu dengan KONI Sumatera Utara telah melaksanakan pemetaan cabang olahraga unggulan pada setiap daerah sesuai dengan potensi daerah yang dikembangkan secara intensif, seperti di kabupaten Karo, Langkat, Tapanuli Selatan dan kabupaten/kota lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program pembinaan atlet sejak usia sekolah sampai perguruan tinggi. Pada tingkat perguruan tinggi pembinaan belum dilakukan secara maksimal karena PPLM (Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa) yang dibiayai dari dana APBN hanya mampu membina cabang olahraga yaitu : Karate, Atletik dan Gulat, sementara perguruan tinggi mempunyai atlet berprestasi yang mengharapkan bantuan pembinaan. Mantan atlet yang telah menunjukkan prestasi tingkat nasional menerima penghargaan pada Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) setiap tahun yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Kontribusi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini telah membawa Provinsi Sumatera Utara berprestasi di beberapa bidang olahraga seperti :

- POPNAS XI tahun 2011 di Pekanbaru menduduki peringkat 12 dengan perolehan : 4 Emas, 6 Perak, dan 9 Perunggu.
- PON VII di Kalimantan Timur, Sumatera Utara diperingkat 7 dengan perolehan : 7 Emas, 20 Perak, dan 11 Perunggu.
- SEA GAMES tahun 2011 di Palembang, Atlet Sumatera Utara memperoleh : 7 Emas, 2 perak, dan 1 Perunggu.
- POPWIL tahun 2012 di Medan menduduki peringkat 1 dengan perolehan : 12 Emas, 9 Perak, dan 8 Perunggu.

Prestasi yang telah diraih oleh Provinsi Sumatera Utara ini, tentu tidak terlepas dari peran sarana dan prasarana olahraga sebagai fasilitas yang cukup memberi peluang dan sangat dibutuhkan untuk kebugaran kesehatan masyarakat dan prestasi olahraga di Sumatera Utara.

Adapun sarana prasarana olahraga yang mendukung keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara, masih sangat terbatas, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.106

Sarana/prasarana Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2012

No	SARANA/PRASARANA	Tahun					Kondisi		
		2008	2009	2010	2011	2012	Baik	Sedang	Rusak
1	Lapangan Tenis	51	51	51	51	51		51	
2	GOR	14	14	14	14	15	2	10	3
3	STADION	18	18	18	19	19	4	8	7
4	SIRKUIT BALAP MOTOR	1	1	1	1	1	1		
5	KOLAM RENANG	9	9	9	9	9	3	4	2
6	LAP. SOFT BALL	1	1	1	1	1		1	
7	LAP. BULUTANGKIS	1	1	1	1	1		1	
8	LAP. HOKI	2	2	2	2	2		1	1
9	LINTASAN ATLETIK	1	1	1	2	2	1	1	
10	Lintasan Balap Sepeda (Veledrome)	1	1	1	1	1			1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, 2013

Bila dilihat perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2012 masih sangat minim, oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berupaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara. Adanya ruang atau lahan per orang berolahraga dengan luas 3 m², sedangkan penduduk yang melakukan aktivitas olahraga antara 6 sampai dengan 60 tahun, sama dengan 75% dari jumlah penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara 12.985.075 jiwa x 75% = 9.738.806 yang melakukan aktivitas berolahraga x 3 m² jadi lahan/ruang yang ideal 29.216.418 m², Fasilitas olahraga yang tersedia saat ini masih lahan/ruang nya masih 30% baik indoor maupun outdoor seluas 8.764.925,4 m², berupa gedung lapangan olahraga dan rekreasi. Sehingga kekurangan lahan/ruang berolahraga di Sumatera Utara 29.216.418 m² – 8.764.925,4 m² adalah 20.451.492,6 m², terlebih Provinsi Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2020.

2.3.1.17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 disebutkan beberapa kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan salah satu diantaranya pada huruf c disebutkan bahwa Kewajiban Kepala Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat selanjutnya pada huruf j disebutkan bahwa Kewajiban Kepala Daerah adalah menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Untuk menindaklanjuti pasal dimaksud Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi. Berkenaan hal tersebut Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan telah diadakan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka FKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provsu, hal ini sesuai dengan amanah dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah disebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan FKPD maka dibentuk Sekretariat dan diantaranya terdapat Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provsu bersama Sekretaris dan beberapa SKPD lainnya.

Disamping Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terdapat Lembaga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Pembentukan Lembaga ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Badan Intelijen Negara yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas maka Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan gubernur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kominda Provinsi Sumatera Utara.

2.3.1.18. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum,

2.3.1.18.1 Otonomi Daerah

➤ Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 9 (sembilan) bidang di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

a. Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Batas waktu pencapaian target Tahun 2009-2025.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat dikelola oleh Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.107

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Tahun 2010-2012

No	Jenis Pelayanan Dasar Skala Provinsi	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2010	2011	2012
		Indikator	Nilai				
I.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009 - 2025	78,57%	38,00%	78,57%
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2009 - 2025	37,44%	38,00%	39,00%
II.	Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025	-	-	-

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012

b. Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/huk /2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Batas waktu pencapaian target Tahun 2008-2015.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dikelola oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.108
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2010	2011	2012
		Indikator	Nilai				
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang						
	a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala provinsi.	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2008 - 2015	0.23	0.29	0.29
	b. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	17.07	16.51	18.18
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial						
	a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi;	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008 - 2015	70.73	68.40	65.91
	b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60%	2008 - 2015	8.82	8.62	8.62
3	Penanggulangan korban bencana						
	a. bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80%	2008 - 2015	0.00	0.00	0.00
	b. evakuasi korban bencana skala provinsi.	Persentase (%) kab/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.	60%	2008 - 2015	9.09	9.09	9.09
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.	40%	2008 - 2015	0.00	0.00	0.00
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Provinsi.						

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Batas waktu pencapaian target Tahun 2014.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelola oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.109
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		2010	2011	2012
		Indikator	Nilai			
I	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	21	126	196
II	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	154	178	594
III	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	113	203	50
		4. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	NA	NA	NA
IV	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	85	80	60
		6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	NA	NA	NA
V	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	7. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	30	40	42
		8. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	NA	116	NA

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012

d. Bidang Lingkungan Hidup

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Batas waktu pencapaian target Tahun 2013.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Provsu dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.110
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2010	2011	2012
		Indikator	Nilai				
A.	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	70%	87,50%	88,50%
B	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	100	2013	12,12%	24,24%	48,48%
C.	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	80%	95%	95%

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012

e. Bidang Ketenagakerjaan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 15/MEN/X/2010. Batas waktu pencapaian target Tahun 2016.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.111
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaan

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		2010	2011	2012
		Indikator	Nilai			
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	NA	NA	NA
		2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	94,12	90,91	89,28
		3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	NA	66,67	61,54
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	28,22	7,86	9,36
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	72,22	43,68	57,14
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	70,39	71,04	71,43
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	NA	NA	NA
		2 Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	NA	NA	NA

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012

f. Bidang Ketahanan Pangan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Batas waktu pencapaian target Tahun 2015.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provsu dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.112
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2010	2011	2012
		Indikator	Nilai				
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	687,14	771,35	820,46
B	Distribusi dan Akses Pangan	2 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015	-	-	-
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	98,33	95,79	97,78

D	Penanganan Kerawanan Pangan	4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	62,22	75,56	84,44
---	-----------------------------	---	--------------------------------	----	------	-------	-------	-------

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU tahun 2012

g. Bidang Kesenian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesenian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. Batas waktu pencapaian target Tahun 2014.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Kesenian dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 2.113
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Kesenian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		2010	2011	2012
		Indikator	Nilai			
1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni 50%	100	NA	NA	NA
		Cakupan Fasilitas Seni 30%	100	NA	NA	NA
		Cakupan Gelar Seni 75%	100	NA	NA	NA
		Misi Kesenian 100%	100	NA	NA	NA
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100	NA	NA	NA
		Cakupan Tempat 100%	100	NA	NA	NA
		Cakupan Organisasi 34%	100	NA	NA	NA

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU tahun 2012

h. Bidang Perhubungan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Batas waktu pencapaian target Tahun 2014. Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan dikelola oleh Dinas Perhubungan Provsu dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.114
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
			Indikator	Nilai (%)			
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100	-	-	-
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2 Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100	-	-	-
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	3 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60	9	10	10
		4 Keselamatan	4 Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi	100	79	82	85

		(AKDP).							
		5	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	100	100	100	100
2	Angkutan Sungai dan Danau.	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	6	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayanan sungai dan danau yang dapat dilayari.	75	33	22	22
		2	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	7	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayanan sungai dan danau yang dapat dilayari	60	100	100	100
		3	Keselamatan	8	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100	-	-	-
		4	Sumber Daya Manusia (SDM)	9	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	100	100	100	100
3	Angkutan Penyeberangan	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	10	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75	100	100	-
		2	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	11	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	75	-	-	-
		3	Keselamatan	12	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100	-	-	-
		4	Sumber Daya Manusia (SDM)	13	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	100	-	-	-
4	Angkutan Laut	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	14	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayanan dan tidak ada alternatif jalan	100	-	-	-
		2	Sumber Daya Manusia (SDM)	15	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	100	-	-	-

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovu tahun 2012

i. Bidang Penanaman Modal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanaman Modal ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Batas waktu pencapaian target Tahun 2014.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu dari tahun 2010-2012, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.115
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal

No	Indikator	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun.	-	-	-
2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Provinsi dengan Pengusaha tingkat Nasional/Asing.	-	-	-
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Provinsi.	100	100	100
4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten	-	-	60
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	100	100	100
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%	-	-	75
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100	100	100

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu dari Tahun 2010-2012

2.3.1.18.2 Pemerintahan Umum

➤ Hubungan Kelembagaan

Adanya regulasi perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan mempengaruhi tatanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dan Kelembagaan Organisasi Pemerintahan Daerah sehingga akan mengalami perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana konsep Reformasi Birokrasi akan mempengaruhi dan memberikan kontribusi positif kepada Pemerintah terutama dalam hal Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja.

Akibat dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berdampak terhadap pengelolaan urusan pemerintahan yang akan menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan merubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan berdampak kepada perubahan Struktur Pemerintahan Daerah dalam Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007.

Dalam rangka reformasi birokrasi dibidang Pemerintahan, hubungan kelembagaan sangat diperlukan dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan sinkronisasi antar lembaga yang diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan dan meningkatkan kapasitas aparatur. Sinkronisasi hubungan kelembagaan ini dapat diwujudkan dengan :

1. Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran secara bertanggungjawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur (sumber daya manusia) yang mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

➤ **Perolehan Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

- Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh predikat “C” dengan skor 44,34 hasil penilaian Kementerian PAN dan RB RI melalui surat Nomor B/158/M.PAN-RB/1/2011
- Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh predikat “CC” dengan skor 50,11 hasil penilaian Kementerian PAN dan RB RI dengan surat Nomor B/524/M.PAN-RB/02/2012
- Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh predikat “CC” dengan skor 51,45 hasil penilaian Kementerian PAN dan RB RI dengan surat Nomor B/3247/M.PAN-RB/11/2012

Tabel. 2.116

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai Pemantauan BPK-RI tahun 2008 s/d 2012

No	Objek Pemeriksaan	Jlh LHP	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jlh	Nilai Temuan	Jlh	Nilai Temuan	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jlh	Nilai Temuan	Jlh	Nilai Temuan	Jlh	Nilai Temuan
1	THN 2012	1	19	77,754,602,010.48	52	29,141,718,004.48	9	542,103,200.00	42	28,599,614,804.48	1	-
2	THN 2011	1	18	9,315,300,726.00	41	8,178,071,676.00	19	1,078,874,730.00	12	5,030,633,196.00	10	2,068,563,750.00
3	THN 2010	1	21	342,644,786,232.24	59	313,658,392,361.03	22	677,084,600.00	24	146,955,754,788.52	13	166,025,552,972.51
4	THN 2009	1	24	20,754,522,742.39	59	19,619,236,737.97	27	473,854,555.28	27	19,145,382,182.69	5	-
5	THN 2008	1	17	11,622,818,897.26	47	10,560,697,679.08	24	219,027,250.00	12	10,248,670,429.08	11	93,000,000.00
	JLH.	5	99	462,092,030,608.37	258	381,158,116,458.56	101	2,990,944,335.28	117	209,980,055,400.77	40	168,187,116,722.51

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012

Dari Data hasil pemeriksaan di atas disimpulkan :

- ❖ Tahun 2008 terdapat 17 (tujuh belas) temuan dengan 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi senilai Rp. 10.560.697.679,08,-. Dari rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 24 rekomendasi dengan nilai Rp. 219.027.250,-.
- ❖ Tahun 2009 terdapat 24 (dua puluh empat) temuan dengan 59 (lima puluh sembilan) rekomendasi senilai Rp. 19.619.236.737,97,-. Dari rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 27 rekomendasi dengan nilai Rp. 473.854.555,28,-.
- ❖ Tahun 2010 terdapat 21 (dua puluh satu) temuan dengan 59 (lima puluh sembilan) rekomendasi senilai Rp. 313.658.392,03,-. Dari rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 22 rekomendasi dengan nilai Rp. 677.084.600,-.
- ❖ Tahun 2011 terdapat 18 (delapan belas) temuan dengan 41 (empat puluh satu) rekomendasi senilai Rp. 8.178.071.676,-. Dari rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 19 rekomendasi dengan nilai Rp. 1.078.874.730,-.
- ❖ Tahun 2012 terdapat 19 (sembilan belas) temuan dengan 52 (lima puluh dua)

rekomendasi senilai Rp. 8.178.071.676,-. Dari rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 9 rekomendasi dengan nilai Rp. 542.103.200,-

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan BPK-RI dari hasil pemeriksaan tahun 2008 s/d 2012, yaitu :

- ❖ Terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) temuan dengan 258 (dua ratus lima puluh delapan) rekomendasi senilai Rp. 381.158.116.458,56,- dan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK sebanyak 101 rekomendasi dengan nilai Rp. 2.990.944.335,28,-.
- ❖ Belum sesuai rekomendasi/ dalam proses tindak lanjut sebanyak 117 (seratus tujuh belas) rekomendasi senilai Rp. 209.980.055.400,77,- dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 40 (empat puluh) rekomendasi senilai Rp. 168.187.116.722,51,-.

➤ **Peran Gubernur dan Kerjasama Pembangunan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 37 dan 38 mengamanatkan bahwa selain sebagai kepala daerah otonom, Gubernur juga menjadi wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal ini, Gubernur menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Menjembatani kebutuhan dan aspirasi daerah dengan prioritas nasional maupun prioritas Kementerian/Lembaga;
2. Memperkuat koordinasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya dalam pencapaian prioritas nasional yang membutuhkan dukungan dari daerah;
3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah.

Disamping itu, berbagai peraturan dan regulasi lainnya juga mengatur peran Gubernur antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Pasal 47.

Dalam perkembangannya, implementasi berbagai peraturan perundangan tersebut di atas masih belum berjalan efektif dan belum konsisten dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Koordinasi dan sinergitas antara pusat dan daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah belum berjalan dengan optimal.

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah, mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom serta pembinaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan rentang kendali manajemen yang ideal, serta meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Demikian pula terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang

mengakibatkan dampak lintas daerah dapat dikelola bersama dengan daerah terkait, untuk itu diharapkan setiap Pemerintahan Daerah dapat melakukan upaya-upaya dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil nyata yang beragam di berbagai daerah, khususnya kabupaten dan kota. Namun demikian, munculnya ego kedaerahan yang berlebihan telah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, antara lain konflik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, masalah perbatasan, tata ruang wilayah, keterbatasan jangkauan pelayanan, masalah lintas batas dan globalisasi.

Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Karena kerjasama daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber Pendapatan Asli Daerah.

2.3.1.19. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman.

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Menyangkut regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yakni :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G).
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan.
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Tabel. 2.117
Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele, Daging, Susu Dan Telur)

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%)
		Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013*	
1.	Beras					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	132,12	132,60	131,46	130,61	99,35
	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.795.953	1.752.362	1.808.895	1.740.549	96,22
	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi* (Ton)	2.159.846	2.158.612	2.209.782	2.338.476	105,82
2.	Jagung					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,615		61,739		
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	837.534	873.503	849.504	904.236	106,44
	Produksi Jagung (Ton)	1.055.063	1.347.124	1.091.173	1.183.011	73,38
3.	Kedele					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	4,452		4,456		
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	60.512	4.730	61.316		
	Produksi Kedele (Ton)	46.138	5.419	51.950	3.229	11,81
4.	Daging Sapi					
	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	1,04	1,86	1,10	2,41	219,09
	Kebutuhan Konsumsi per-tahun (Ton)	14.172	24.580,65	15.142	32.116,4	212,10
	Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	15.174	24.546,61	16.640	32.170,78	193,33

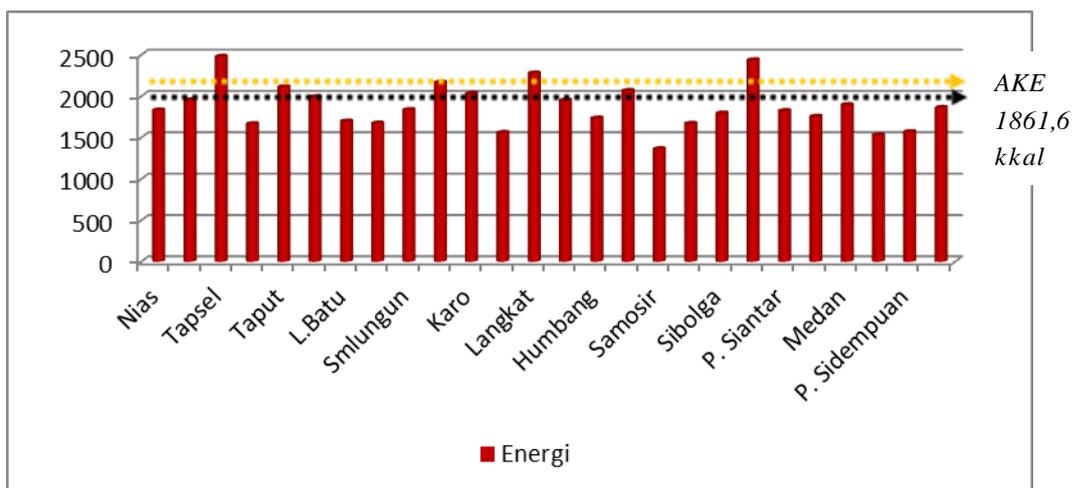
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2013

3. Kondisi Rawan Pangan

Kondisi sangat rawan pangan diukur dari konsumsi energi < 1.400 Kkal/hari. Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih menghadapi kondisi rawan pangan. Dari data Susenas tahun 2009, diketahui bahwa angka proporsi penduduk sangat rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,48% atau masih berada diatas angka rata-rata nasional sebesar 14,47%. Dari

Jika dicermati kasus rawan pangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara khususnya bukan disebabkan karena tidak tersedianya sumber bahan pangan melainkan karena keterbatasan akses fisik dan ekonomi terhadap ketersediaan sumber bahan pangan merupakan faktor utama penyebab terjadinya kasus-kasus serupa. Ketiadaan akses karena keterbatasan ekonomi terkait dengan masalah kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat membeli dan mengolah bahan pangan.

Dari hasil riset Riskesdas 2007, melaporkan bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari penduduk di Sumatera Utara tahun 2007 adalah 1.861,6 kkal untuk energi dan 65 gram untuk protein. Angka ini sudah lebih tinggi dari rata-rata angka nasional yaitu 1.735,5 kkal untuk energi dan 55,5 gram untuk protein.



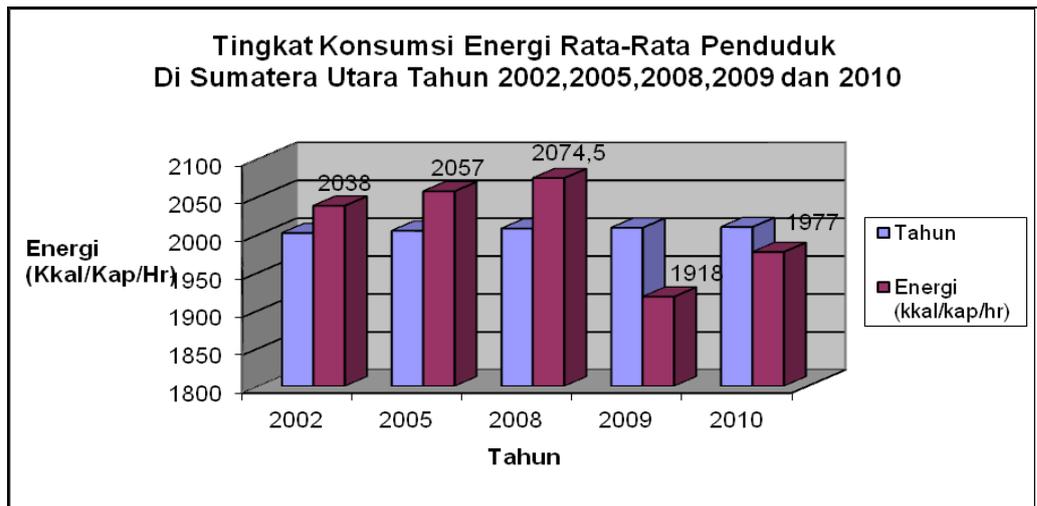
Grafik 2. 58.

Angka Kecukupan Energi pada Kabupaten/Kota Tahun 2007

Sumber : Riskesdas Tahun 2007

Di Sumatera Utara kabupaten dengan angka konsumsi energi terendah adalah Kabupaten Samosir yaitu 1.362,9 kkal dan angka konsumsi energi tertinggi adalah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 2.480,6 kkal. Sedangkan untuk konsumsi protein, yang terendah adalah Kabupaten Deli Serdang yaitu 56 gram dan tertinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat yaitu 84,6 gram.

Untuk jumlah konsumsi energi penduduk Sumatera Utara dari tahun 2002 sampai tahun 2010 relatif tidak stabil. Pada tahun 2009 tingkat konsumsi energi penduduk mengalami penurunan tetapi tidak terlalu jauh di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kap/hari.



Grafik 2. 59.

Tingkat Konsumsi Energi Rata-Rata Penduduk di Sumatera Utara

2.3.1.20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumatera Utara yang berjumlah 6.102 desa/kelurahan yang terdiri dari 5436 desa dan 666 kelurahan. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di masing-masing desa/kelurahan, diharapkan setiap desa memiliki 4 lembaga kemasyarakatan, antara lain;

1. PKK
2. LPM
3. Karang Taruna
4. Posyandu

Dari keberadaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, terdapat sebanyak 3102 desa telah difasilitasi oleh Lembaga Kemasyarakatan dan memiliki dokumen perencanaan 5 tahunan desa. Disamping itu juga lembaga desa mempunyai peran dalam pembinaan kepemudaan dan kesehatan ibu dan anak.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengusahakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, namun hingga tahun 2012 jumlah kantor desa masih berkisar 3200 kantor desa. Bila melihat jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara (5436 desa), tentu hal ini akan mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja aparatur desa.

Disamping itu, dalam hal penyangga perekonomian masyarakat desa, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk memberikan fasilitasi dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan potensi desa. Hingga Tahun 2012 jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang telah berdiri sebanyak 60 pos yang tersebar di 20 kabupaten/kota se Sumatera Utara. Jumlah ini tentu perlu ditingkatkan hingga ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, karena peningkatan pembangunan desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ini sangat bermanfaat dalam membawa potensi desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Pembentukan pasar desa dan usaha simpan pinjam sebagai Lembaga Ekonomi Desa, juga diharapkan mampu untuk mempercepat pembangunan desa. Sebanyak 97 pasar dan 50 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED - SP) telah didirikan dan tersebar di seluruh desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Minimnya jumlah Lembaga Ekonomi Desa ini tentu tidak seimbang dengan kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga Provinsi Sumatera Utara terus berupaya agar di masing-masing desa mempunyai

Lembaga Ekonomi Desa yang diharapkan mampu menaikkan pendapatan masyarakat desa.

Untuk jumlah konsumsi energi penduduk Sumatera Utara dari tahun 2002 sampai tahun 2010 relatif tidak stabil. Pada tahun 2009 tingkat konsumsi energi penduduk mengalami penurunan tetapi tidak terlalu jauh di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kap/hari.

2.3.1.21. Kearsipan

Perpustakaan yang telah dibina Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu sampai dengan tahun 2012, telah meningkatkan minat baca pada masyarakat, dilihat dari peningkatan kunjungan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, dari 283.505 orang kunjungan pada tahun 2008 menjadi 594.443 orang kunjungan pada tahun 2012.



Grafik 2. 60.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara
Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan dokumentasi daerah

Demikian juga judul dan jumlah koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, telah bertambah, dari 44.936 judul dengan jumlah koleksi berjumlah 193.587 buah pada tahun 2008 menjadi 84.419 judul dengan jumlah koleksi berjumlah 679.289 buah buku.

2.3.1.22. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Penyatutan Subdis Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Kantor PDE dan Badan Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berkenaan dengan hal tersebut, capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Sumatera Utara yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2013 adalah :

- ❖ Telah terbangunnya sistem jaringan informasi melalui LAN (Local Area Network), FO (Fiber Optic), RADIO LINK, WIRELESS, VPN-IP (Intranet) pada 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (data thn 2011).

- ❖ Terdapat 5 Surat Kabar Harian (SKH) Nasional ada yang tercatat/terpantau, yaitu :
1. Kompas, 2. Tempo, 3. Sindo, 4. Republika dan 5. Koran Jakarta.
- ❖ Surat Kabar Harian (SKH) lokal yang tercatat/terpantau ada 34 SKH yaitu : 1. Analisa; 2. Andalas; 3. Berita Sore; 4. Harian Bersama; 5. Warta Garuda; 6. Harian Global; 7. Harian Mandiri; 8. Medan Bisnis; 9. Medan Pos; 10. Mimbar Umum; 11. Perjuangan; 12. Portibi; 13. Posmetro Medan; 14. Realitas; 15. Sinar Indonesia Baru (SIB); 16. Suara Rakyat Medan; 17. Sumatera; 18. Sumut Pos; 19. Warta Kita; 20. Waspada; 21. Gebrak; 22. Batak Pos; 23. Tribun Medan; 24. Jurnal Medan; 25. Berita Medan; 26. Bintang Sumatera; 27. Gaya Medan; 28. Koran Medan; 29. Medan Ekspos; 30. Suara Sumut; 31. Harian Koreksi; 32. Skala Indonesia; 33. Pos Kota Sumatera dan 34. Orbit,
- ❖ Surat Kabar Mingguan yang tercatat/terpantau ada 16 surat kabar yaitu :
1. Aktual; 2. Radar; 3. Suara Buruh; 4. Aplaus; 5. Barisan Baru; 6. Independen Sangkakala; 7. Indonesia Baru; 8. Indonesiaku; 9. Koran Politik DOR; 10. Koran Sepak Bola GOL; 11. Media Fakta; 12. News Investigasi Indonesia; 13. Senior; 14. Suara Rakyat; 15. Taruna Mandiri dan 16. Suara Masa

Jumlah Penyiaran Radio di Sumatera Utara :

- ❖ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Radio terdiri dari :
 - RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli
 - Radio Pemerintah Deli Serdang
 - Radio Pemerintah Serdang Bedagai
 - Radio Pemerintah Kota Siantar
 - Radio Pemerintah Tapanuli Tengah
 - Radio Pemerintah Pakpak Bharat
 - Radio Siaran Publik Daerah Labuhan Batu
- ❖ Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 145 stasiun radio ;
- ❖ Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 15 stasiun radio;

Jumlah Penyiaran Televisi di Sumatera Utara :

- ❖ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Televisi ada 2 diantaranya :
 - TVRI
 - TV Karo
- ❖ Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi ada 23 lembaga
- ❖ Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi ada 7 lembaga

Website milik Pemerintah Daerah :

- Web Pemprov : 1
- Web SKPD yang aktif ada 15 web

- Pameran/Expo di Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan secara rutin setiap tahun
- Jumlah Tower (menara telekomunikasi) yang direkomendasi : 1003 unit.

2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1. Pertanian

a. Beras

Dari data penanaman padi nasional tahun 2009 diperoleh data dari Luas Panen Nasional mencapai 12.668.989 Ha maka rata-rata kontribusi luas panen padi Sumatera Utara terhadap Nasional adalah 6,06 %, sedangkan Produksi Nasional sampai tahun 2009 mencapai 62.561.146 ton, sehingga rata-rata kontribusi produksi padi Sumatera Utara terhadap Nasional sebesar 5.64 %.

Tabel. 2.118

Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras untuk memantapkan swasembada beras di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

No	URAIAN	Tahun				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%) Tahun 2013
		2012	2012	2013	2013*	
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13.592.923	13.215.401	13.759.668	13.326.307*	96,85
2	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	132.12	132.60	131,46	130,61**	99,35
3	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.795.953	1.752.362	1.808.895	1.740.549	96,22
4	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi**)	2.159.846	2.158.612	2.209.782 ¹⁾	2.338.476 ²⁾	105,82
5	Surplus/Penyangga per Tahun (Ton) (4-3)	363.893	406.250	400.887	597.927	149,15
6	Produksi GKG (Ton)	3.813.591	3.715.513	3.901.761	3.727.249*	95,53
7	Luas Panen (Ha)	854.609	765.099	867.428	742.968*	85,65
8	Produktivitas (Kw /Ha)	44,62	48,56	44,98	50,17*	111,53
9	Luas Tanam (Ha)	872.050	769.174	885.131	739.040*	83,49

Sumber :

* : Angka Sementara BPS Provinsi Sumatera Utara

** : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara

1) : Konversi GKG ke beras sesuai RPJMD Provsu 2009-2013 adalah 56.64 %

2) : Konversi GKG ke beras BPS adalah 62,74 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa konsumsi beras pada tahun 2013 sebesar 130,61 kg/kapita/tahun menurun jika dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 132,60 kg/kapita/tahun (penurunan sebesar 1,5%). Hasil ini juga berada dibawah target RPJMD (131,46 kg/kapita/tahun) sehingga tujuan untuk pengurangan konsumsi perkapita telah tercapai. Terlihat bahwa Provinsi Sumatera Utara telah berhasil menerapkan diversifikasi pangan antara dengan program "Manggadong" dan program nasional "one day no rice".

Sementara target ketersediaan beras untuk dikonsumsi, surplus/penyangga per-tahun, produksi GKG mengalami peningkatan. Jika melihat target yang ada pada RPJMD maka yang memenuhi target hanya pada ketersediaan beras untuk dikonsumsi (105,82 %), surplus penyangga per tahun (ton) (149,15%) dan produktivitas (111,53%). Sedangkan untuk produksi GKG (ton), luas panen (Ha) dan luas tanam (Ha) tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Jagung

Tabel. 2.119

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi serta Kebutuhan Jagung untuk Memantapkan Swasembada Jagung Di Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun				
		Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Pencapaian Target (%) Tahun 2013
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13.592.923	13.215.401	13.759.668	13.326.307	96,85
2	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,615		61,739		
3	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	837.534	873.503	849.504	904.236**	106,44
4	Surplus/Penyangga per Tahun (Ton)	217.529	473.621	241.669	278.775	108,41
5	Produksi Jagung (Ton)	1.055.063	1.347.124	1.091.173	1.183.011*	73,38
6	Luas Panen (Ha)	281.498	243.098	288.536	211.750*	147,72
7	Produktivitas (Kw/Ha)	37,48	55,41	37,82	55,87*	74,15
8	Luas Tanam (Ha)	287.243	253.234	294.424	218.319**	108,41

Sumber :

* : BPS Sumatera Utara, 2013

** : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2013

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi jagung, surplus/penyangga per-tahun dan produktifitas terus mengalami peningkatan, namun konsumsi jagung per-kapita masih belum memenuhi target jika dibandingkan dengan target pada RPJMD.

c. Kedele

Tabel. 2.120

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas,Produksi Serta Kebutuhan Kedele untuk Memantapkan Swasembada Kedele di Provinsi Sumatera Utara

No	URAIAN	Tahun				
		Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013*)	Pencapaian Target (%) Tahun 2013
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13.592.923	13.215.401	13.759.668	13.326.307*	96,85
2.	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4,452		4,456		
3.	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	60.512	4.730	61.316		
4.	Impor/Surplus per Tahun (Ton)* *)	(14.374)	689	(9.366)		
5.	Produksi Kedele (Ton)	46.138	5.419	51.950	3.229	11,81
6.	Luas Panen (Ha)	39.200	5.475	44.100	3.126	13,97
7.	Produktivitas (Kw/Ha)	11,77	9,90	11,78	10,33	84,11
8.	Luas Tanam (Ha)	40.000	5.450	45.000	4.175	13,55

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan pencapaian pada tahun 2013 belum sesuai dengan target yang ada pada RPJMD. Bahkan untuk produksi, luas panen dan luas tanam terjadi penurunan pada tahun 2013 dibanding tahun 2012. Hanya pada produktivitas terjadi peningkatan dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 4,34 %. Peningkatan produksi ke depan diharapkan dapat dilakukan dengan peningkatan penggunaan teknologi dan penanaman bibit unggul yang sesuai dengan potensi daerah.

d. Tanaman Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.121
Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan pengusaha, Tahun 2013*)

No.	Jenis Komoditas	Perkebunan				Total Luas (Ha)
		Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa sawit	426.258,29	248.091,07	332.861,09	151.051,65	1.158.262,10
2.	Karet	399.748,09	40.923,18	109.644,00	56.476,35	606.791,62
3.	Kelapa	112.316,60	-	1.742,74	1.139,36	115.198,70
4.	Kakao	66.137,51	5.345,72	3.118,13	2.735,62	77.336,96
5.	Lainnya	143.087,89	9.740,49	993,04	-	149.245,08
	Jumlah	1.147.548,38	304.100,46	448.359,00	211.402,98	2.111.410,82

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013
) angka sementara

Tabel. 2.122
Produksi komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013*

No.	Jenis Komoditas	Perkebunan				Total Produksi (Ton)
		Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	
		Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa Sawit	5.814.784,73	2.303.461,18	5.648.701,59	2.547.618,00	16.314.565,50
2.	Karet	329.502,67	24.427,44	144.745,90	66.558,55	565.234,56
3.	Kelapa	93.070,58	-	1.982,70	1.231,99	96.285,27
4.	Kakao	41.193,49	7.929,63	4.306,88	2.946,11	56.376,11
5.	Lainnya	94.395,18	33.866,00	855,49	-	129.116,67
	Jumlah	6.372.946,65	2.369.684,25	5.800.592,56	2.618.354,65	17.161.578,11

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013
) angka sementara

a) Kelapa Sawit

Secara umum kondisi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara cukup berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan terus meningkatnya produksi kelapa sawit baik milik perkebunan rakyat, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) yang di Sumatera Utara saat ini terdapat 3 BUMN Perkebunan yakni PTPN II, III dan IV.

Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi kelapa sawit dari tahun 2008-2013 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Tabel. 2.123
Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2013

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2008	Luas (Ha)	379.853	294.943	237.462	106.948	1.019.206
	Produksi (Ton)	5.070.760	4.422.338	3.064.211	1.527.575	14.084.884
2009	Luas (Ha)	392.721	299.604	244.283	109.105	1.045.713
	Produksi (Ton)	5.088.579	4.668.827	3.075.401	1.529.848	14.362.655
2010	Luas (Ha)	396.564	305.435	251.489	112.323	1.065.811
	Produksi (Ton)	5.221.132	4.823.524	3.107.385	1.545.758	14.697.799
2011	Luas (Ha)	405.799	306.302	248.426	115.168	1.075.695
	Produksi (Ton)	5.428.535	4.972.107	3.190.120	1.592.849	15.183.610
2012	Luas (Ha)	411.843,76	255.764,34	309.955,39	141.169,77	1.118.733,26
	Produksi (Ton)	5.511.644,29	2.531.276,00	4.911.914,42	2.483.784,76	15.438.619,47
2013*	Luas (Ha)	426.258,29	248.091,07	332.861,09	151.051,65	1.158.262,10
	Produksi (Ton)	5.814.784,73	2.303.461,18	5.648.701,59	2.547.618,00	16.314.565,50

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

*) angka sementara

Berdasarkan data yang disajikan di atas, diperoleh gambaran bahwa terjadi fluktuasi dari perkembangan areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara.

Dari data di atas secara umum terjadi peningkatan luas areal perkebunan dari tahun 2008 ke 2013 seluas 139.056,10 hektar. Dengan rata-rata peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2013 sebesar 2,60 % per tahun. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan luas areal seluas 39,528,84 hektar atau sebesar 3,53 % dibanding luas areal pada tahun 2012.

Sedangkan untuk produksi terjadi peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2013 sebesar 2.229.681,50 ton dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,99 % per tahun. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi sebesar 2.229.681,50 ton atau sebesar 5,67 % dibanding produksi pada tahun 2012.

b) Karet

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik. Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi komoditi karet dari tahun 2008-2013 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 2.124
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2013

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2008	Luas (Ha)	363.158	53.986	60.598	34.875	512.617
	Produksi (Ton)	244.404	53.881	70.380	43.633	412.298
2009	Luas (Ha)	376.076	77.697	59.314	37.456	550.543
	Produksi (Ton)	254.650	59.072	70.444	43.794	427.960
2010	Luas (Ha)	376.335	85.632	64.053	39.824	565.844
	Produksi (Ton)	261.249	61.019	75.530	46.455	444.253
2011	Luas (Ha)	378.309,95	93.254,60	62.264,96	41.252,99	575.083
	Produksi (Ton)	280.445,65	65.466,39	63.005,42	50.542,88	459.460
2012	Luas (Ha)	390.951,68	42.403,05	97.897,03	50.425,35	581.677,11
	Produksi (Ton)	310.266,17	26.843,35	125.866,00	57.877,00	520.852,52
2013*	Luas (Ha)	399.748,09	40.923,18	109.644,00	56.476,35	606.791,62
	Produksi (Ton)	329.502,67	24.427,44	144.745,90	66.558,55	565.234,56

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

*) angka sementara

Dari data di atas, terlihat bahwa secara total terjadi peningkatan luas areal tanaman dari tahun 2008 sampai 2013 seluas 94.174,62 hektar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,45% per tahun dan produksi komoditi karet meningkat dari tahun 2008 sampai 2013 sebesar 152.936,56 ton dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,58 % per tahun.

Komoditas karet masih didominasi oleh perkebunan rakyat, pada tahun 2013 seluas 399.748,09 Ha dengan produksi sebesar 329.502,67 ton. Jika dilihat dari produktifitasnya perkebunan rakyat 0,82 ton/ha, masih berada dibawah dari produktifitas karet hasil Perkebunan PBSN sebesar 1,32 ton/ha dan PBSA sebesar 1,18 ton/ha. Sedangkan produktifitas karet dari Perkebunan PTPN sebesar 0,60 ton/ha. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar kepada pertanaman karet rakyat untuk meningkatkan produktifitasnya, baik

dengan penggunaan teknologi yang lebih baik, atau peremajaan karet tua dengan klon yang lebih unggul.

c) Kakao

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara, maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2008-2013 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.125

Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2013

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2008	Luas (Ha)	60.221	18.711	4.217	2.117	85.266
	Produksi (Ton)	36.042	17.790	3.934	2.486	60.252
2009	Luas (Ha)	66.091	18.501	3.739	2.151	90.482
	Produksi (Ton)	38.294	20.339	3.918	2.501	65.052
2010	Luas (Ha)	67.119	19.503	4.005	2.303	92.930
	Produksi (Ton)	39.582	20.357	3.984	2.543	66.466
2011	Luas (Ha)	66.413	11.853	2.811	2.467	83.544
	Produksi (Ton)	37.683	13.374	2.648	2.477	56.183
2012	Luas (Ha)	66.220	7.759	3.062	2.686	79.728
	Produksi (Ton)	39.800	8.810	4.198	2.872	55.682
2013*	Luas (Ha)	66.137	5.345	3.118	2.735	77.336
	Produksi (Ton)	41.193	7.929	4.306	2.946	56.376

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

*) angka sementara

Dari data di atas, terlihat bahwa secara total terjadi penurunan luas areal tanaman dari tahun 2008 sampai 2013 seluas 7.930 Ha dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,02 % per tahun dan produksi komoditi karet menurun dari tahun 2008 sampai 2013 sebesar 3876 ton dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,01 % per tahun.

Komoditas karet masih didominasi oleh perkebunan rakyat, pada tahun 2013 seluas 66.137 Ha dengan produksi sebesar 41.193 ton. Namun jika dilihat dari produktifitas juga masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan PTPN, PBSN dan PBSA. Untuk tiap hektar lahan hasil produksi kakao rakyat baru sekitar 0,62 ton/ha, sementara produktifitas kakao kebun PTPN sebesar 1,48 ton/ha, kebun PBSN 1,38 ton/ha dan PBSA 1,08 ton/ha. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan pertanaman kakao yang dikelola oleh rakyat, sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif dan

berkelanjutan, baik dalam budidaya maupun penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan harga penjualan kakao rakyat.

Sementara itu dari data pertanaman rakyat ternyata masih terdapat areal yang tidak produktif (Tanaman Tidak Menghasilkan) yang membutuhkan peremajaan seluas 55.410,47 Ha, sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.126
Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2013

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)			
	TBM	TM	T.T.M.	Jumlah
Karet	60.674,72	303.973,37	35.100,00	399.748,09
Kelapa Sawit	64.478,74	359.612,55	2.167,00	426.258,29
Kopi Arabika	16.860,67	43.397,98	1.607,00	61.865,65
Kopi Robusta	1.369,93	13.046,12	5.607,00	20.023,05
Kelapa	9.515,74	93.272,39	9.528,47	112.316,60
Kakao	17.501,72	47.234,79	1.401,00	66.137,51
Jumlah	170.401,52	860.537,20	55.410,47	1.086.349,19

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

*) angka sementara

e. Peternakan

1) Ternak Besar

Kondisi populasi ternak besar di Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang berbeda, untuk ternak sapi dan kerbau mengalami peningkatan yang cukup baik hanya pada tahun 2011 mengalami penurunan. Sedangkan untuk ternak Kuda dan sapi perah mengalami perkembangan yang relatif fluktuatif, hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2008-2012

Jenis Ternak Besar	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Kuda	3.218	2.817	3.098	3.175	3.069	3.138
Sapi	388.240	401.821	462.443	456.752	609.951	625.817
Kerbau	155.341	158.235	161.046	128.540	131.483	139.701
Sapi Perah	2.290	2.409	2.569	932	1.057	1.075
Total	549.089	565.282	629.156	589.399	745.560	769.731

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2009-2012)

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara , 2013

2) Ternak kecil

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan kecil di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hanya pada ternak babi pada tahun 2009 mengalami penurunan populasi akan tetapi pada selanjutnya mengalami peningkatan, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2.127
Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008-2012

Jenis Ternak Kecil	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
Kambing	618.394	625.815	744.535	763.147	781.774	805.065
Domba	268.291	270.420	317.777	325.722	374.286	409.375
Babi	733.864	653.150	742.670	761.235	866.207	947.414
Total	1.620.549	1.549.385	1.804.982	1.850.104	2.022.267	2.161.853

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2013)

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Populasi ternak kecil pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 139.586 ekor atau 0,07 % dibanding tahun 2012. Sedangkan rata-rata pertumbuhan populasi dari tahun 2008 sampai 2013 sebesar 0,06 % per tahun.

3) Ternak Unggas

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan unggas di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hanya pada ternak ayam ras pedaging pada tahun 2010 mengalami penurunan akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2.128
Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2008-2013

Jenis Ternak Unggas	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
Ayam Ras Petelur	7.698.504	8.168.685	8.839.750	9.060.742	12.055.592	12.455.592
Ayam Ras Pedaging	42.891.621	43.878.127	39.376.258	40.360.663	42.813.178	44.790.497
Ayam Kampung	11.349.742	11.554.037	11.671.883	11.963.681	12.073.428	12.447.014
Itik Manila	1.825.663	1.953.647	2.569.664	2.633.909	2.790.326	2.848.329
Total	63.765.530	65.554.496	62.457.555	64.018.995	69.732.524	72.541.432

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2013)

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Populasi ternak unggas pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2.808.908 ekor atau 0,04 % dibanding tahun 2012. Sedangkan rata-rata pertumbuhan populasi dari tahun 2008 sampai 2013 sebesar 0,03 % per tahun.

Secara umum, capaian target sub sektor peternakan selama tahun 2012-2013,

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.129
Target dan realisasi Daging Sapi dalam Mendukung Swasembada Daging
Tahun 2012-2013

No	URAIAN	Tahun				
		Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Pencapaian Target (%) Tahun 2013
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13.592.923	13.215.401	13.759.668	13.326.307	96,85
2.	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	1,04	1,86	1,10	2,41	219,09
3.	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	14.172	24.580,65	15.142	32.116,4	212,10
4.	Produksi Daging (Ton)	15.174	24.546,61	16.640	32.170,78	193,33
5.	Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	81.558	131.880	89.434	172.842	204,44
6.	Produktifitas (Kg/Ekor)	186	186,13	186	186,13	100,07
7.	Populasi (Ekor)	521.975	611.008	554.859	626.892	112,98

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pada tahun 2013 untuk kebutuhan konsumsi/kapita/tahun, kebutuhan konsumsi per tahun (ton), produksi daging (ton), jumlah pemotongan sapi (ekor), produktifitas (Kg/ekor) dan populasi (ekor) telah memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD, dimana pencapaiannya diatas 100 %.

f. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Dari data diatas dapat disimpulkan tentang produktifitas dan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan harga konstan, sebagai berikut :

Tabel. 2.130
Produktivitas Bahan Pangan Utama, Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB ADHK

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1.	Produktivitas Bahan Pangan (Kw /Ha)						
	- Padi (GKG)	44,63	45,91	47,47	47,62	48,56	50,17
	- Jagung	45,71	47,08	50,13	50,71	55,41	55,87
	- Kedele	12,14	12,36	12,10	10,01	9,90	10,33
2.	Laju Pertumbuhan sektor pertanian (ADHK 2000)	6,05	4,85	5,71	4,81	4,73	NA
3.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	23,83	23,78	23,62	23,22	22,89	NA
	- Tanaman Bahan Makanan	7,91	7,85	7,75	7,42	7,14	NA
	- Tanaman Perkebunan	9,64	9,69	9,67	9,74	9,81	NA
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,46	2,45	2,40	2,38	1,12	NA
	- Kehutanan	1,33	1,31	1,21	1,15	1,12	NA
	- Perikanan	2,48	2,48	2,58	2,53	2,50	NA

Sumber : - Statistik Indonesia, 2013 (Data Diolah)
- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : NA = Note Available (data tidak tersedia)

2.3.2.2.

Kehutanan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.131
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2003 – 2012 (Ha)

Tahun	Fungsi Hutan			
	Produksi	Lindung	Hutan Konsevasi	Hutan Produksi Dikonversi
2003	1,788,016.00	1,481,738.00	362,333.00	47,251.00
2004	1,788,061.19	1,481,738.00	362,333.36	47,251.24
2005 *)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2006*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2007*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2008*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2009*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2010*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2011*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2012	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
SUDA 2013, BPS Provinsi Sumatera Utara

- * Keterangan :
- 1) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - 2) Data luas merupakan hasil digitasi Peta Kawasan Hutan SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah disesuaikan dengan Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK).
 - 3) Luas Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 859.609,93 ha dan Hutan Produksi Tetap seluas 1.015.074,98 ha.

Dari tabel diatas menunjukkan tidak ada penambahan luas hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi yang ada di Provinsi Sumatera Utara, selama kurun waktu 2006-2012.

Hasil hutan berupa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan pemberlakuan pengetatan ekspor hasil hutan dan isu pelestarian hutan.

Tabel. 2.132
Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi Tahun 2009-2012

Jenis Produksi		Satuan	2009	2010	2011	2012
A.	Hasil Utama					
1.	Log Rimba	M ³	86.204,62	157.776,95	367.638,30	621.543,83
2.	Log Pinus	M ³	21.007,27	27.863,39	78.586,89	93.665,92
3.	Kayu Gergajian	M ³	205.161,58	264.955,86	233.781,35	464.866.105
4.	Kayu Lapis	M ³	52.306,15	37.334,43	60.427,34	45.417.480
5.	PULP	M ³	164.430.24	176.082,31	185.403,99	178.676.080
6.	Block Board	M ³	-	-	-	-
7.	Moulding	M ³	33.322,86	143.179,44	70.047,54	-
B.	Hasil Ikutan					
1.	Rotan	Ton	22.820	315,12	65,70	45,00
		Batang	-	185,02*)	-	7.654,00
2.	Arang	Ton	-	-	-	-
3.	Getah Tusam	Ton	467,43	572,00	518,79	56,27

Sumber : SUDA 2013, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Batang

a. Kerusakan Kawasan Hutan

Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).

Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2012 adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu 6.711.629,29 hektar, dimana seluas 3.417.104,20 hektar (50,91 %) berada di dalam kawasan hutan dan seluas 3.294.525,09 hektar (49,09 %) berada di luar kawasan hutan. Berdasarkan klasifikasinya luas lahan kritis terdiri dari :

- Tidak Kritis : 2.617.075,86 hektar
- Potensial Kritis : 1.644.798,50 hektar
- Agak Kritis : 1.391.194,91 hektar
- Kritis : 763.276,30 hektar
- Sangat Kritis : 295.283,72 hektar

Ditinjau dari segi klasifikasi lahan kritis, maka lahan dengan kategori sangat kritis yang paling luas berada pada kawasan hutan yaitu 244.707,21 hektar (3,65 %). Untuk kategori kritis luasan paling besar juga berada di dalam kawasan hutan dengan luasan 601.163,67 hektar (8,96 %). Demikian juga untuk kategori agak kritis dan potensial kritis, luasan terbesarnya berada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian lahan kritis terbesar berada di dalam kawasan hutan.

b. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik fisik maupun vegetative guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya, akibat mengalami kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah.

Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2012 adalah 123.774,60 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 2.616,00 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 121.158,60 hektar. Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan kegiatan reboisasi seluas 3.731,00 hektar, penanaman hutan rakyat seluas 3.804,00 hektar, pembangunan kebun bibit seluas 1.017,94 hektar, pembuatan dam dan pengendali sebanyak 11 unit, pembuatan gully plug sebanyak 14 unit dan pembuatan sumur resapan sebanyak 47 unit.

2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Energi Listrik

Tabel. 2.133
Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air
yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut Status Tahun 2012

No.				KLASIFIKASI PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (KW)
	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / DUSUN		
1.	Simalungun	Tanah Jawa	Tonduhan	PLTM	2 x 200 = 400
2.	Pakpak Bharat	- Kerajaan	Kombih I	PLTM	2 x 750 = 1500
		sda	Kombih II	PLTM	2 x 750 = 1500
3.	Madina	Penyabungan	Batang Gadis	PLTM	2 x 450 = 900
4.	Humbahas	- Dolok Sanggul	Silang	PLTM	1 x 750 = 750

5.	Tap. Utara	- Dolok Sanggul - Adian Koting sda	Sibundong Raisan I Raisan II	PLTM PLTM PLTM	1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750
6.	Samosir	Pangururan	Boho	PLTM	1 x 200 = 200
7.	Dairi	Sumbul	Silalahi II	PLTA Renun	2 x 41.000 = 82.000
8.	Tap. Tengah	Sibolga	Sibuluan II	PLTA Sipansihaporas	1 x 50.000 = 50.000
			TOTAL	PLTM = 9 PLTA = 2	7.500 132.000

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Berdasarkan tabel diatas, sumber daya listrik terpasang di Sumatera Utara sampai dengan tahun 2012 yang dikelola oleh PLN Wilayah Sumut sebesar 7.500 KW yang berasal dari pembangkit listrik PLTM dan 132.000 KW yang berasal dari PLTA, tersebar di 8 lokasi.

Berbagai daerah yang dapat menjadi sumber pembangkit listrik yang potensial untuk mengatasi masalah kekurangan energi listrik di Sumatera Utara. Selain pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN juga terdapat pembangkit listrik yang dikelola swasta atau yang dibangun atas swadaya masyarakat.

Kondisi ketenagalistrikan di Sumatera Utara hingga tahun 2013

- Kapasitas daya terpasang pembangkit : 2.031,4 MW
- Daya mampu pembangkit : ± 1.645 MW
- Beban puncak : 1.645 MW
- Pertumbuhan pemakaian daya : 8% s.d 9% per tahun
- Usia pembangkit : 15 – 30 tahun

Cadangan sebesar 95 MW, namun hal ini belum dalam kondisi aman, salah satu pembangkit listrik mengalami kerusakan atau pemeliharaan akan terjadi pemadaman.

Listrik Desa (PLN) S/D Tahun 2013

- Jumlah Desa : 5.828
- Jumlah Desa Berlistrik : 4.874 (84%)
- Jumlah Desa Belum Berlistrik : 1047
- Rasio Desa Berlistrik : 90,00 %
- Rasio Elektrifikasi : 88,52%

b. Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sumatera Utara relatif kecil hanya sekitar 0,75% yang terutama berasal dari galian mineral/batuan. Bahan galian yang ada di Sumatera Utara, pada umumnya berupa batuan / mineral dan galian C. Pertumbuhan sektor Pertambangan dan penggalian di Sumatera Utara menurun dari tahun sebelumnya yaitu 1.38 % di tahun 2011 menjadi 1.30 % di tahun 2013.

Pertambangan berpotensi membawa kerusakan disekitar kawasan pertambangan akibat masyarakat sekitar yang ikut melakukan penambangan secara liar. Oleh karena itu perlu penertiban penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat, selain itu perlu dikembangkan mata pencarian alternative bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan

2.3.2.4. Kelautan dan Perikanan

1) Perikanan tangkap

Dengan kondisi perikanan dunia yang cenderung terus meningkatkan produksinya, Provinsi Sumatera Utara juga terus secara maksimal meningkatkan produksi perikanan tangkanya untuk dapat dikonsumsi di dalam negeri serta di ekspor ke luar negeri. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi

perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008-2013.

Tabel. 2.134

Kondisi Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2008-2013

Rincian	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penangkapan di Laut	354.533	361.471	370.507	379.770	391.352	512.451,50
Penangkapan di Perairan Umum	18.792	20.389	24.979	28.979	32.892	52.764,19
JUMLAH	373.325	381.861	395.486	408.748	424.244	565.215,69

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

Dari tabel di atas produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 meningkat sebesar 9,25 % dibanding produksi perikanan pada tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2008 sampai tahun 2013 sebesar 9,25 %.

2) Perikanan Budidaya

Secara umum produksi perikanan dari hasil usaha budidaya terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.135

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2008-2013

Rincian	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Perikanan Budidaya	56,789.23	60,480.53	118,942.80	126,386.40	143,447	193,750

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

Dari tabel di atas produksi perikanan budidaya pada tahun 2013 meningkat sebesar 35,07 % dibanding produksi tahun 2012. Sedangkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan produksi sebesar 31,60 %.

Sementara itu menurut data produksi ekspor dan konsumsi ikan/kapita penduduk Sumatera Utara juga mengalami peningkatan.

Tabel. 2.136

Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2008-2012

TAHUN	EKSPOR		KONSUMSI IKAN/KAPITA (KG)
	Volume (ton)	Nilai (US \$)	
2008	46,824.89	221,805,712.84	26.09
2009	49,868.51	195,173,631.82	27.79
2010	54,678.73	206,058,110.53	29.59
2011	51,508.65	213,663,776.33	34.66
2012	52,719.29	225,434,288.08	31.92
2013	56,185.92	250,900,694.10	38.95

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

Tabel. 2.137

Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Ekspor Ikan (ton / thn)	Produksi ikan (ton / thn)
2008	46.824,89	430.114,73
2009	49.868,51	442.341,33
2010	54.678,73	514.429,10
2011	51.505,65	535.134,60
2012	52.719,29	567.691,10
2013	56.185,92	758.972,69

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu (Data diolah)

2.3.2. 5. Perindustrian dan Perdagangan

a. Perindustrian

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk merencanakan dan mengelola kegiatan ekonomi sendiri tanpa menunggu campur tangan dari pusat. Karenanya setiap daerah harus mampu mengembangkan ekonomi sesuai potensi yang dimilikinya. Potensi ekonomi tersebut tergambar dari kontribusi dari setiap lapangan usaha atau sektor. Subsektor industri pengolahan non migas umumnya sangat besar kontribusinya dalam memacu pertumbuhan ekonomi sehingga daerah harus mampu mempercepat pertumbuhan subsektor industri pengolahan non-migas ini agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2013, kontribusi sektor ini sebesar 21.58 %, merupakan penyumbang terbesar dan diikuti setelahnya sektor pertanian.

Penurunan ini tentunya membuat Pemprov Sumut harus berupaya kuat untuk membantu pengusaha industri non migas terutama pengusaha industri kecil dan menengah agar terus meningkatkan kinerjanya ditengah kesulitan pendanaan dan bahan baku. Untuk memacu pertumbuhan bidang industri ini, maka dirasa perlu untuk lebih menitikberatkan usaha kepada penumbuhan industri baru dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dengan penguasaan teknologi.

Tabel. 2.138

Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Industri Berdasarkan ADHK
Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

Tahun	Kontribusi						Laju Pertumbuhan ADHK
	ADHK			ADHB			
	PDRB	Sektor Industri (Rp. Milyar)	%	PDRB	Sektor Industri (Rp. Milyar)	%	
2009	111,559.22	24,977.11	22.39	236,353.62	55,050.58	23.29	2.76
2010	118,808.90	26,105.21	21.97	275,056.31	63,013.46	22.91	4.16
2011	126,587.59	26,548.66	20.97	314,372.44	70,672.28	22.48	2.05
2012	134,463.95	27,513.10	20.46	351,136.16	77,484.96	22.07	3.63
2013	142,537.13	28,615.62	20.08	403,933.06	87,170.66	21.58	4.01

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2013 (data diolah)

b. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah perbandingan antara jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB untuk tahun 2008-2013 di Propinsi Sumatera Utara.

Tabel. 2.139
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2008 s/d 2013 Provinsi Sumatera Utara (Rp. Juta)

Tahun	PDRB (ADHK)	ADHK		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(Juta Rp.)	%		(Juta Rp.)	%
2008	106.172,36	19.515,52	18,38	213.931,70	41.281,12	19,30
2009	111.559,22	20.575,43	18,44	236.353,62	44.941,66	19,01
2010	118.640,90	21.914,84	18,47	275.700,21	52.384,32	19,00
2011	126.450,62	23.693,43	18,74	314.156,94	60.032,52	19,11
2012	134.463,95	25.406,77	18,89	351.118,16	67.027,28	19,09
2013	142.537,13	27.384,48	19,21	403.933,06	77.918,68	19,29

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013

c. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 s.d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.140
Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2008 s.d 2013 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	Berat Bersih	Nilai FOB	Berat Bersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2008	8.520.892	9.261.977	5.880.759	3.696.065	5.565.912
2009	8.058.927	6.460.117	5.236.553	2.724.236	3.735.881
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.826
2012	8.645.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.859	9.597.907	6.922.414	5.108.737	4.489.170

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per-kapita, nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)
 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita selama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.141
 Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2008 - 2012

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Total Pengeluaran RT	391.726	432.389	499.694	564.565	599.060
	a. Pangan	211.733	236.917	267.180	316.343	344.467
	b. Non Pangan	179.993	195.472	232.514	248.222	254.593
2	Jumlah RT	2.980.434	3.027.500	3.037.716	3.083.199	3.131.600
3	Rasio (Pengeluaran RT/ Jumlah RT)	0,13	0,14	0,16	0,18	19,21

Sumber : BPS Sumatera Utara

- b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.

Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Sumatera Utara tahun 2008-2013 :

Tabel. 2.142
 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008 s.d 2013
 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	114,47	121,78	129,12	138,20	141,49	109,48
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	121,78	120,79	126,14	133,64	139,12	109,80
3.	Rasio	101,79	100,82	102,36	103,42	101,71	99,71

Keterangan : * angka Desember 2013, Tahun dasar 2012=100

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013

Dari data yang disajikan di atas dapat diperoleh hasil analisa bahwa sejak tahun 2008 Nilai Tukar petani di Sumatera Utara terus mengalami perubahan fluktuatif sejak tahun 2008-2013. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Sumatera Utara.

- c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel. 2.143
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
 Tahun 2008-2012 Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	179,993	195,472	232.514	248.222	254.593
2.	Total Pengeluaran RT	391,767	432,389	499.694	564.565	599.060
3.	Rasio	45,944	45,207	0,465	0,440	42,50

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2013 (data diolah)

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian Indikator Iklim Berinvestasi dilihat dari lama pengurusan ijin dan kondisi keamanan daerah (angka kriminalitas dan aksi demonstrasi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Lama Proses Perijinan

Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010, tentang pedoman, tata cara permohonan dan jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari, terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

Selain hal tersebut juga dapat digambarkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2012 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 31 kabupaten/kota atau telah mencapai 93,94%, dan ada 56 perizinan yang telah dilimpahkan kepada PTSP. Adapun yang belum membentuk PTSP adalah Kabupaten Nias Utara dan kabupaten Nias Barat.

Adapun secara lengkap perkembangan jumlah PTSP yang terbentuk di Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel. 2.144
 Perkembangan Jumlah PTSP yang Terbentuk di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012

No	Uraian	Tahun					
		2010		2011		2012	
		Fisik	%	Fisik	%	Fisik	%
1	Kab/Kota yg memiliki PTSP	25	75,76	28	84,85	31	93,94

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provsu tahun 2012

Adapun yang menjadi permasalahan kaitan dengan pembentukan PSP adalah :

1. Komitmen Kepala daerah yang belum maksimal terhadap keberadaan PTSP
2. Belum seluruh jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke PTSP
3. Adanya tarik menarik kepentingan antara SKPD teknis dengan PTSP dalam hal pengelolaan perizinan
4. Belum semua PTP memiliki SOP tentang perizinan
5. Kurangnya SDM dari staf/playanan prizinan di PTSP.

b. Angka kriminalitas

Tabel. 2.145
Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kasus Narkoba	2.461	2.802	2.718	2.728	2.078
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	138	114	127	152	160
3	Jumlah Kejahatan Seksual	911	984	1.065	1.156	1.026
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	6.098	6.526	6.869	7.362	7.053
5	Jumlah Kasus Pencurian	8.805	9.089	10.245	8.832	8.343
6	Jumlah Kasus Penipuan	1.361	1.670	2.260	2.635	2.060
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	21	22	13	31	17
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	31.895	35.336	41.806	47.156	43.234
9	Jumlah Penduduk	12.834.371	13.201.715	13.339.353	13.103.596	13.215.401
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0.24 %	0.26%	0.31%	0.35%	0.32%

Sumber : Polda Sumatera Utara, 2013

Dari Tabel di atas Kasus Narkoba merupakan kasus tertinggi ke-3 setelah kasus pencurian dan kasus penganiayaan. Angka kriminalitas mengalami peningkatan mulai tahun 2008 hingga 2011 dan ada penurunan 0,03% pada tahun 2012. Demikian halnya jumlah tindak kriminal selama 1 tahun mengalami peningkatan mulai tahun 2008 hingga tahun 2011 dan ada penurunan sebanyak 3.922 tindak kriminal pada tahun 2012. Jumlah kasus pemalsuan uang tertinggi terjadi pada tahun 2011, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2012 dengan penurunan sebesar 14 kasus.

c. Angka kriminalitas yang tertangani

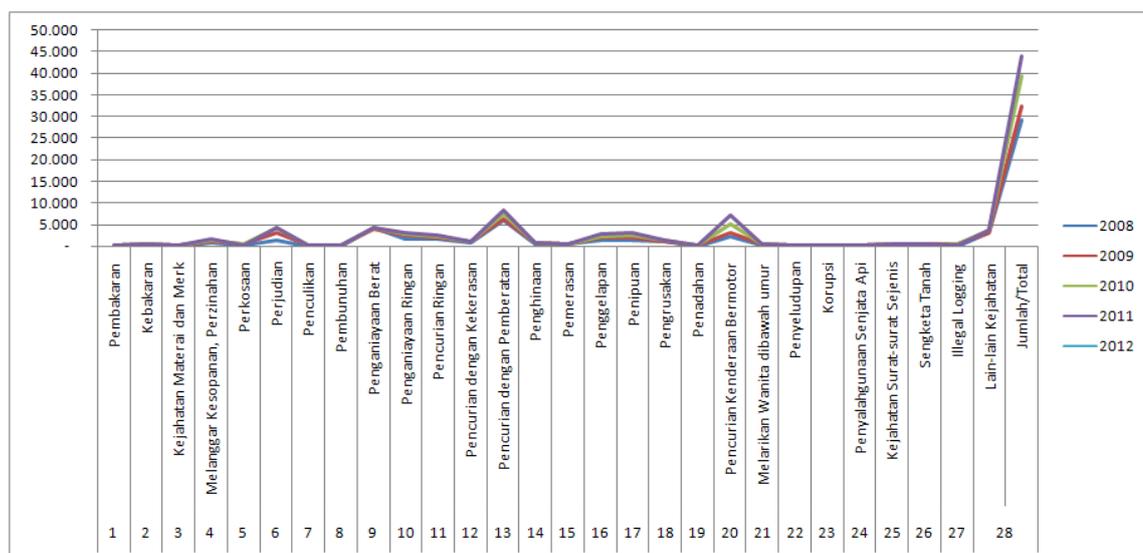
Kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari jenis kejahatan/pelanggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.146
Jenis Kejahatan/Pelanggaran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pembakaran	82	92	103	128	142
2	Kebakaran	224	229	252	262	NA
3	Kejahatan Materai dan Merk	16	16	8	12	NA
4	Melanggar Kesopanan, Perzinahan	938	1.023	1.193	1.433	NA
5	Perkosaan	207	214	207	113	217
6	Perjudian	1.557	2.908	4.051	4.182	NA
7	Penculikan	18	27	27	27	18
8	Pembunuhan	138	105	130	129	152
9	Penganiayaan Berat	4.304	3.734	4.217	3.952	3.892
10	Penganiayaan Ringan	1.706	2.476	2.619	3.019	NA

11	Pencurian Ringan	1.738	1.893	2.030	2.461	NA
12	Pencurian dengan Kekerasan	845	928	1.001	912	1.145
13	Pencurian dengan Pemberatan	6.006	6.219	7.324	8.266	7.198
14	Penghinaan	501	595	701	655	NA
15	Pemerasan	493	407	379	422	619
16	Penggelapan	1.517	1.697	2.162	2.493	NA
17	Penipuan	1.392	1.707	2.317	2.808	NA
18	Pengrusakan	1.080	1.003	1.217	1.266	NA
19	Penadahan	13	19	9	16	NA
20	Pencurian Kendaraan Bermotor	2.342	3.046	4.999	6.995	7.232
21	Melarikan Wanita dibawah umur	208	200	253	230	NA
22	Penyeludupan	72	46	17	56	15
23	Korupsi	12	20	15	15	NA
24	Penyalahgunaan Senjata Api	4	7	14	8	29
25	Kejahatan Surat-surat Sejenis	230	220	278	293	NA
26	Sengketa Tanah	298	313	6	289	NA
27	Illegal Logging	148	172	169	41	NA
28	Lain-lain Kejahatan	3.117	2.963	3.522	3.583	NA
Jumlah/Total		29.206	32.279	39.220	44.066	

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara



Grafik 2.61. Jenis Kejahatan/Pelanggaran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Besarnya tingkat kejahatan/pelanggaran tersebut akan sangat mempengaruhi investasi penanaman modal di Sumatera Utara, baik investor dalam negeri maupun luar negeri merasa tidak nyaman berusaha dan berinvestasi di Sumatera Utara, ditambah lagi ketidakpastian hukum terhadap kejahatan/pelanggaran sengketa tanah, illegal logging, penyeludupan, dan korupsi di Sumatera Utara.

Jenis kejahatan/pelanggaran Persatuan Wilayah Polda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012 (Dit Reskrim, Pol Air, Poltabes Ms, Poltabes Tebing Tinggi, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Simalungun, Tanah Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Asahan, Labuhan Batu, Dairi, Nias, KPPP Belawan, Sergei, Tanjung Balai,

Pematang Siantar, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Padang Sidempuan, Sibolga, Nias Selatan) yang paling menonjol dari tahun 2008-2012 dan terus mengalami peningkatan adalah:

1. Curas (Pencurian dengan Kekerasan) sebanyak 394 kasus tahun 2008, 884 kasus tahun 2009, 1.003 kasus tahun 2010, 942 kasus tahun 2011, 1.145 kasus tahun 2012;
2. Curat (Pencurian dengan Pemberatan) sebanyak 3.379 kasus tahun 2008, 5.618 kasus tahun 2009, 7.154 kasus tahun 2010, 7.908 kasus tahun 2011, 7.198 kasus tahun 2012;
3. Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) sebanyak 10.758 kasus tahun 2008, 2.768 kasus tahun 2009, 4.917 kasus tahun 2010, 7.001 kasus tahun 2011, 7.232 kasus tahun 2012;
4. Anirat (Penganiayaan Berat) sebanyak 2.242 kasus tahun 2008, 3.274 kasus tahun 2009, 3.970 kasus tahun 2010, 3.773 kasus tahun 2011, 3.892 kasus tahun 2012;
5. Perjudian sebanyak 593 kasus tahun 2008, 2.614 kasus tahun 2009, 4.068 kasus tahun 2010, 4.078 kasus tahun 2011, 2.277 kasus tahun 2012;
6. Pemerasan dengan ancaman sebanyak 362 kasus tahun 2008, 549 kasus tahun 2009, 540 kasus tahun 2010, 593 kasus tahun 2011, 617 kasus tahun 2012;
7. Narkoba sebanyak 1.287 kasus tahun 2008, 2.455 kasus tahun 2009, 2.636 kasus tahun 2010, 2.486 kasus tahun 2011, 2.086 kasus tahun 2012;
8. Penyelundupan sebanyak 25 kasus tahun 2008, 23 kasus tahun 2009, 18 kasus tahun 2010, 10 kasus tahun 2011, 15 kasus tahun 2012;
9. Illegal Logging sebanyak 60 kasus tahun 2008, 162 kasus tahun 2009, 150 kasus tahun 2010, 114 kasus tahun 2011, 91 kasus tahun 2012;
10. Korupsi sebanyak 10 kasus tahun 2008, 18 kasus tahun 2009, 11 kasus tahun 2010, 16 kasus tahun 2011, 33 kasus tahun 2012.

c. Jumlah Demonstrasi

Tabel. 2.148
Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara, 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	177	243	193	84	64
2	Ekonomi	69	82	47	55	211
3	Sosial Budaya	448	66	279	70	309
4	Kasus Pemogokan Kerja	65	82	72	60	47
5	Jumlah Unjuk Rasa	759	473	591	269	631

Sumber : POLDA SUMUT, 2013

Jumlah unjuk rasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 362 pada tahun 2012 dibandingkan kondisi tahun 2011, dengan konsentrasi unjuk rasa terbesar di bidang ekonomi dan sosial budaya yaitu masing-masing sebanyak 211 dan 309 demonstrasi pada tahun 2012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan gangguan keamanan dari tahun 2008 – 2012 dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi dan gangguan kenyamanan berupa aksi demonstrasi yang berakibat negatif terhadap investasi di daerah ini.

Hal ini perlu diantisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik aparat keamanan maupun masyarakat untuk menjaga agar kondisi keamanan tetap kondusif, sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi tersebut dapat dilihat padatablel data rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara dibawah ini.

Tabel. 2.149
Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

BEBAN KETERGANTUNGAN	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Beban Ketergantungan Penduduk Belum Produktif (0-14 tahun)	53,12	52,00	52,87	51,67	50,72
Angka Beban Ketergantungan Penduduk Tidak Produktif (65 tahun keatas)	7,09	7,24	6,18	6,18	6,05
Angka Beban Ketergantungan Total	60,21	59,24	59,05	57,85	56,77

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

Secara umum angka beban ketergantungan dihitung berdasarkan Angka Beban Ketergantungan Total, dimana angka beban ketergantungan ini berasal dari penduduk yang belum produktif atau penduduk yang tidak produktif lagi, maka dapat dipilih menjadi Angka Beban Ketergantungan Penduduk Belum Produktif dan Angka Beban Ketergantungan Penduduk tidak Produktif.

2.4.4. Fokus Pelayanan Hukum

Fokus pelayanan hukum untuk mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan daerah, masyarakat pada umumnya dan dunia usaha adalah dengan adanya produk hukum daerah yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sumatera utara, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara (PT PER SUMUT)
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Hidrologi Provinsi Sumatera Utara
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Permukaan
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Bersama di Provinsi Sumatera Utara
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Panas Bumi
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang mendukung investasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.150
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara
Yang Mendukung Investasi Tahun 2008-2012

No.	Kab./Kota	Produk Hukum yang dibatalkan					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Medan	6	3	-	10	5	24
2	Kota Binjai						
3	Kota tebing Tinggi						
4	Kota Sibolga	7	3	7	3	6	26
5	Kota Tanjung Balai						
6	Kota Padang Sidempuan						
7	Kota Pematang Siantar	-	-	-	2	3	5
8	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	1	3	4
9	Kabupaten Karo						
10	Kabupaten Deli Serdang	-	-	-	4	2	6
11	Kabupaten Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Langkat	-	2	-	6	4	12
13	Kabupaten Humbang Hasundutan						
14	Kabupaten Samosir	-	8	-	8	-	16
15	Kabupaten Dairi	-	-	-	-	5	5
16	Kabupaten Tapanuli Utara						
17	Kabupaten Tapanuli Tengah						
18	Kabupaten Tapanuli selatan	-	-	-	-	-	-
19	Kabupaten Pakpak Bharat						
20	Kabupaten Simalungun						
21	Kabupaten Toba Samosir	-	-	5	-	16	21
22	Kabupaten Labuhan Batu						
23	Kabupaten Labuhan Batu Utara						
24	Kabupaten Labuhan Batu Selatan						
25	Kabupaten Asahan						
26	Kabupaten Mandailing Natal						
27	Kabupaten Padang Lawas						
28	Kabupaten Padang Lawas Utara	-	-	2	9	-	11
29	Kabupaten Batu Bara	-	29	4	-	1	34
30	Kabupaten Nias						
31	Kabupaten Nias Utara						
32	Kabupaten Nias Selatan						
33	Kabupaten Nias Barat						

Sumber : Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai

Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibatalkan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 2.151
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibatalkan

No	Judul	Keterangan
1	Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Barang	Dibatalkan dengan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor
2	Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Dibatalkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Barang

Sumber : Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang menghambat investasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.152
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara
Yang Dibatalkan Karena Menghambat Investasi Tahun 2008-2012

No.	Kab./Kota	Produk Hukum yang dibatalkan					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Medan	-	-	-	-	-	-
2	Kota Binjai						
3	Kota Tebing Tinggi						
4.	Kota Sibolga	-	-	-	1	-	1
5	Kota Tanjung balai						
6	Kota Padang Sidempuan						
7	Kota Pematang Siantar	-	-	-	10	-	10
8	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Karo						
10.	Kabupaten Deli Serdang	-	-	-	4	2	6
11	Kabupaten Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Langkat	-	-	-	3	-	3
13	Kabupaten Humbang Hasundutan						
14.	Kabupaten Samosir	-	-	-	-	-	-
15	Kabupaten Dairi	-	1	-	3	-	4
16	Kabupaten Tapanuli Utara						
17	Kabupaten Tapanuli Tengah						
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-
19	Kabupaten Pakpak Bharat						
20	Kabupaten Simalungun						
21	Kabupaten Toba Samosir	-	-	-	-	-	-
22	Kabupaten Labuhan Batu						
23	Kabupaten Labuhan Batu Utara						
24	Kabupaten Labuhan Batu Selatan						
25	Kabupaten Asahan						
26	Kabupaten Mandailing Natal						
27	Kabupaten Padang Lawas						
28	Kabupaten Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-
29	Kabupaten Batu Bara	-	-	28	1	1	30
30	Kabupaten Nias						
31	Kabupaten Nias Utara						
32	Kabupaten Nias Selatan						
33	Kabupaten Nias Barat						

Sumber : Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2012

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu Fokus Pelayanan Hukum dalam upaya meningkatkan pembangunan di Sumatera Utara untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya untuk melindungi dan menegakan hak asasi manusia telah menetapkan program rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2014 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara agar setiap Kabupaten/Kota membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Daerahnya masing-masing serta menyampaikan laporan pembentukannya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia di Sumatera Utara dan pengaduan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Instansi Vertikal di Sumatera Utara khususnya dalam bidang hak asasi manusia yaitu Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

2.4.5. Fokus Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan roda pemerintahan mempekerjakan PNS dari berbagai disiplin ilmu serta jenjang pendidikan yang ditempatkan pada masing-masing SKPD sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun jumlah PNS Pemprovsu berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana data di bawah ini

Tabel. 2.153

Data PNS Pemprovsu Berdasarkan Pendidikan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pendidikan SD-D3	7.912	7.994	8.039	7.548	7.335
2.	Pendidikan S1	3.501	3.464	3.777	4.033	4.131
3.	Pendidikan S2	484	728	560	649	733
4.	Pendidikan S3	4	8	7	8	8
	Jumlah	11.901	12.194	12.384	12.238	12.207

Sumber : BKD Provinsi Sumatera Utara Provsu Tahun 2012

Memperhatikan data PNS tersebut di atas dan sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah dilakukan maka menurut hemat kami kondisi saat ini dapat dikatakan telah ideal dengan beban kerja masing-masing SKPD di Lingkungan Pemprovsu.

Untuk Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara sejak berlakunya Otonomi Daerah pengelolaan data kepegawaiannya dilakukan masing-masing Kab/Kota tersebut.

Selain data jumlah PNS di atas, berikut ini kami gambarkan kondisi PNS Pemprovsu yang telah mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Daftar PNS Pemprovsu yang telah mengikuti Diklatpim

Tabel. 2.154

PNS Pemprovsu yang telah mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya

No	Uraian	Jumlah
1	Diklatpim Tk. II	12 org
2	Diklatpim Tk. III	114 org
3	Diklatpim Tk. IV	256 org

Sumber : BKD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Memperhatikan data tersebut di atas, jika dibandingkan dengan jumlah jabatan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang menduduki jabatan masih banyak belum mengikuti diklatpim sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini dimungkinkan karena anggaran yang tersedia untuk penugasan seorang PNS mengikuti diklatpim belum tertampung sepenuhnya, sehingga pengiriman PNS untuk mengikuti Diklatpim dilakukan secara bertahap.